



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019 tentang , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
dan
BUPATI SUKAMARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 berubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
 - (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 11 Februari 2022

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 11 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 07/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional. Mekanisme penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dimulai setelah dilantiknya Bupati Sukamara dan Wakil Bupati Sukamara pada tanggal 24 September 2018 dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politik dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023;

Namun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 81



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023*” ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan disusunnya “*Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 - 2023*” ini diharapkan dapat memberikan arahan atau pedoman yang jelas dan terukur bagi seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Sukamara dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang yaitu tahun 2018 - 2023.

Kegiatan Penyusunan “*Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018 - 2023*” ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara bersama dengan Tim Ahli dari Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada.

Akhir kata, kami selaku Tim Penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama, sumbang saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang telah



diberikan. Semoga apa yang telah dihasilkan dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Sukamara, Desember 2021

Bupati Sukamara

H. WINDU SUBAGIO



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. LATAR BELAKANG	I – 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I – 6
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I – 11
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I – 12
1.4.1. Maksud	I – 12
1.4.2. Tujuan	I – 13
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	I – 13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
2.1. KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II – 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II – 1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis...	II – 3
2.1.1.3. Topografi	II – 4
2.1.1.4. Geologi	II – 5
2.1.1.5. Hidrologi	II – 5
2.1.1.6. Klimatologi	II – 7
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II – 10
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II – 21
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II – 24
2.1.4. Kondisi Demografi	II – 28
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II – 32
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 32
2.2.2. Kesejahteraan Sosial	II – 41
2.2.3. Seni Budaya Dan Pariwisata	II – 45
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II – 47
2.3.1. Pendidikan	II – 47
2.3.2. Kesehatan	II – 55
2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang ...	II – 69
2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II – 76
2.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan	II – 78
2.3.6. Tenaga Kerja	II – 78
2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	II – 84
2.3.8. Pangan	II – 84



2.3.9.	Pertanahan	II – 85
2.3.10.	Lingkungan Hidup	II – 86
2.3.11.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II – 88
2.3.12.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...	II – 89
2.3.13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II – 89
2.3.14.	Perhubungan.....	II – 89
2.3.15.	Komunikasi dan Informasi	II – 91
2.3.16.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .	II – 92
2.3.17.	Penanaman Modal	II – 93
2.3.18.	Kepemudaan dan Olahraga	II – 95
2.3.19.	Statistik	II – 97
2.3.20.	Persandian	II – 97
2.3.21.	Kebudayaan	II – 97
2.3.22.	Perpustakaan	II – 98
2.3.23.	Kearsipan.....	II – 99
2.3.24.	Perikanan	II – 99
2.3.25.	Pariwisata	II-101
2.3.26.	Pertanian.....	II-102
2.3.27.	Kehutanan.....	II-103
2.3.28.	Energi dan Sumberdaya Mineral.....	II-103
2.3.29.	Perdagangan.....	II-105
2.3.30.	Perindustrian.....	II-107
2.3.31.	Transmigrasi	II-107
2.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-108
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-108
2.4.2.	Iklm Investasi	II-113
2.4.3.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-114
2.4.4.	Standar Pelayanan Minimal	II-115
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1.	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III – 1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD Periode yang lalu	III – 1
3.1.2.	Neraca Daerah	III – 6
3.2.	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III – 9
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III – 9
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III – 10
3.3.	KERANGKA PENDANAAN DAERAH	III – 13
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023	III – 13
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	III – 22
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV – 1
4.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV – 2



4.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV – 12
4.1.3.	Urusan Pilihan	IV – 25
4.1.4.	Penunjang Urusan Pemerintahan	IV – 30
4.2.	ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023	IV – 33
4.2.1.	Isu Global	IV – 35
4.2.2.	Lingkungan Regional	IV – 38
4.2.3.	Lingkungan Strategis	IV – 42
4.2.4.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV – 47
4.2.5.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV – 49
4.2.6.	Urusan Pemerintahan Pilihan	IV – 53
4.2.7.	Penunjang Urusan Pemerintahan	IV – 55
4.3.	TELAAH/KETERKAITAN ISU STRATEGIS NASIONAL, PROVINSI DENGAN KABUPATEN ..	IV – 56
4.3.1.	Isu Strategis Kewilayahan	IV – 61
4.3.2.	Isu Lingkungan Hidup Nasional	IV – 63
4.3.3.	Isu Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Tengah	IV – 65
4.3.4.	Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	IV – 69
4.3.5.	Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional	IV – 74
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
5.1.	VISI	V – 1
5.2.	MISI	V – 4
5.3.	TUJUAN DAN SASARAN	V – 10
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI – 1
6.1.	FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..	VI – 2
6.2.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI – 5
6.3.	TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023	VI – 18
6.4.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI – 60
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII – 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII – 1
BAB IX	PENUTUP	IX – 1
9.1.	PEDOMAN TRANSISI	IX – 2
9.2.	KAJIAH PELAKSANAAN	IX – 2



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 1.1.	Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I- 11
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukamara	II - 2
Gambar 2.2.	Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten	II - 3
Gambar 2.3.	Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2021	II - 8
Gambar 2.4.	Peta Potensi Air Baku.....	II - 9
Gambar 2.5.	Rata-rata Fluktuasi Curah Hujan (mm) Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II-10
Gambar 2.6.	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara	II - 12
Gambar 2.7.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukamara	II - 15
Gambar 2.8.	Hierarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukamara.....	II - 23
Gambar 2.9.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Sukamara...	II - 25
Gambar 2.10.	Petan Garis Pantai Kabupaten Sukamara.....	II - 27
Gambar 2.11.	Proporsi Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin di Kabupaten Sukamara Tahun 2020...	II - 29
Gambar 2.12.	Angka Kelahiran menurut Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020.....	II - 30
Gambar 2.13.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020 (ADHK 2010).....	II - 32
Gambar 2.14.	Perkembangan PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 ADHB (Juta Rp).....	II - 34
Gambar 2.15.	Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Sukamara Periode 2016-2020 dengan Menggunakan Proxy.	II -34
Gambar 2.16.	PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2020 (Rp Juta).....	II - 38
Gambar 2.17.	Gini Ratio Kabupaten Sukamara Periode 2010-2020	II - 39
Gambar 2.18.	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020	II - 40
Gambar 2.19.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020 ...	II - 41
Gambar 2.20.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020	II - 43
Gambar 2.21.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017	II - 47
Gambar 2.22.	Kualifikasi Guru di Kabupaten Sukamara 2019/2020	II - 49



No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 2.23.	Jenjang Akreditasi Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2019/2020	II – 50
Gambar 2.24.	Indeks Penyebaran Guru Kabupaten Sukamara Tahun 2019/2020	II – 51
Gambar 2.25.	Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020	II – 57
Gambar 2.26.	Grafik Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2019	II – 58
Gambar 2.27.	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2019	II – 55
Gambar 2.28.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II – 80
Gambar 2.29.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat dan Kota Waringin Timur Tahun 2011-2019	II – 109
Gambar 2.30.	Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Sukamara	II – 112
Gambar 2.31.	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II – 113
Gambar 2.32.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Berbagai Wilayah di Kalimantan Tengah Tahun 2011-2020	II – 115
Gambar 4.1.	Mekanisme Penetapan Isu-Isu Strategis di Kabupaten Sukamara	IV – 2
Gambar 4.2.	Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan Isu-Isu Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023	IV – 57
Gambar 4.3.	Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023	IV – 58
Gambar 4.4.	Tujuh Belas tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs)	IV – 80
Gambar 5.1.	Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Sukamara	V – 3
Gambar 5.2.	Keterkaitan Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023	V – 7
Gambar 5.3.	Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023	V – 9
Gambar 6.1.	Kawasan Pengembangan Potensi di Kabupaten Sukamara	VI – 6
Gambar 6.2.	Arah Pembangunan Kabupaten Sukamara	VI – 8
Gambar 6.3.	Arah Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukamara	VI – 9



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.1.	Luas Kecamatan di Kabupaten Sukamara	II - 1
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Kabupaten Sukamara Menurut Kecamatan	II - 3
Tabel 2.3	Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Sukamara	II - 5
Tabel 2.4	Nama dan Debit Sungai di Kabupaten Sukamara....	II - 6
Tabel 2.5	Lokasi, Debit dan Keadaan Mata Air.....	II - 6
Tabel 2.6.	Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2020	II - 8
Tabel 2.7.	Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara	II - 11
Tabel 2.8.	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017	II - 11
Tabel 2.9.	Kisaran Lereng Optimum Untuk Berbagai Kegiatan Pembangunan.....	II - 17
Tabel 2.10	Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukamara....	II - 21
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin di Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 28
Tabel 2.12.	Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur di Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 29
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020	II - 31
Tabel 2.14.	Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017-2020 (jiwa/km ²)	II - 31
Tabel 2.15.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se-Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (%)	II - 33
Tabel 2.16.	Inflasi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020 dengan Pendekatan PDRB Deflator	II - 35
Tabel 2.17.	Distribusi Persentase PDRB di Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2020	II - 37
Tabel 2.18.	Perbandingan Gini Ratio se Kalimantan Tengah, 2010-2020	II - 39
Tabel 2.19.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara 2010-2020	II - 42
Tabel 2.20.	Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 44
Tabel 2.21.	Seni Budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017	II - 46
Tabel 2.22.	Rasio Murid Terhadap Guru menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 48
Tabel 2.23.	Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 52
Tabel 2.24.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	



No.	Nama Tabel	Hal
	menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk tahun 2020.....	II - 54
Tabel 2.25.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 2020.....	II - 54
Tabel 2.26	Data Jumlah Murid dan Jumlah Tenaga Pendidik yang terdapat dalam PKBM di Kabupaten Sukamara tahun 2020 dan 2021.....	II - 55
Tabel 2.27	Capaian Indikator SPM Kabupaten Sukamara Tahun 2020.....	II - 56
Tabel 2.28.	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020 (Orang)	II - 63
Tabel 2.29.	Rasio Tenaga Kesehatan Tahun s/d Awal 2018	II - 63
Tabel 2.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017	II - 65
Tabel 2.31.	Pencapaian Indikator Indonesia Sehat di Kabupaten Sukamara	II - 67
Tabel 2.32.	Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 68
Tabel 2.33.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara 2012-2020	II - 71
Tabel 2.34.	Panjang Jalan, Luas dan Status Jalan Tahun 2020	II - 71
Tabel 2.35.	Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara.....	II - 75
Tabel 2.36.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 76
Tabel 2.37.	Target Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara.....	II - 77
Tabel 2.38.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020.....	II - 77
Tabel 2.39.	Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020.....	II - 78
Tabel 2.40.	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020	II - 79
Tabel 2.41.	Penduduk yang Berkerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II - 80
Tabel 2.42.	Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Sukamara menurut Tingkat Pendidikan Kondisi Tahun 2019 ...	II - 81
Tabel 2.43.	Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sukamara	II - 82
Tabel 2.44.	Data Pelatihan Keterampilan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017	II - 83



No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.45.	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten dan Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2020	II – 84
Tabel 2.46.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II – 88
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020.....	II - 90
Tabel 2.48.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II – 91
Tabel 2.49.	Perbandingan Jumlah Koperasi se-Kalimantan Tengah Tahun 2020	II – 92
Tabel 2.50.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II – 93
Tabel 2.51.	Jumlah PMA dan PMDN di Kalimantan Tengah Tahun 2018-2020	II – 94
Tabel 2.52.	Organisasi Olahraga Tahun 2018-2020.....	II - 95
Tabel 2.53.	Prestasi Atlit dari Kabupaten Sukamara di Kancah Nasional.....	II - 96
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012-2017	II – 98
Tabel 2.55.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017	II – 99
Tabel 2.56.	Perkembangan Produksi Perikanan menurut Jenis Kejadiannya (Ton, Basah).....	II -100
Tabel 2.57.	Potensi Obyek Wisata Kabupaten Sukamara Tahun 2017	II –101
Tabel 2.58.	Kunjungan Wisata di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2020	II –102
Tabel 2.59.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun 2020	II –103
Tabel 2.60.	Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik di Kabupaten Sukamara Tahun 2018	II -104
Tabel 2.61.	Sumber Penerangan Utama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2020	II – 104
Tabel 2.62.	Sebaran Pasar-Pasar dan Kondisinya di Kabupaten Sukamara.....	II – 105
Tabel 2.63.	Banyaknya Pedagang menurut Jenis Pedagang dan Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020...	II – 106
Tabel 2.64.	Banyaknya Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2018.....	II – 106
Tabel 2.65.	Indikator Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	II – 106
Tabel 2.66.	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketransmigrasian Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017.....	II - 108
Tabel 2.67.	Perkembangan Indikator Perbankan Kabupaten Sukamara.....	II - 110



No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 2.68.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017.....	II - 121
Tabel 2.69.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2020.....	II - 136
Tabel 3.1.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 s/d 2020	III - 4
Tabel 3.2.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara	III - 6
Tabel 3.3.	Kondisi Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Periode 2015-2019	III - 7
Tabel 3.4.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 ..	III - 9
Tabel 3.5.	Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020	III - 11
Tabel 3.6.	Persentase SiLPA terhadap Belanja Tahun 2015-2020	III - 12
Tabel 3.7.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	III - 16
Tabel 3.8.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	III - 19
Tabel 3.9.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019-2023 (Dengan Perhitungan Perda Penyertaan Modal Bank Kalteng)	III - 21
Tabel 3.10.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	III - 23
Tabel 3.11.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	III - 23
Tabel 4.1.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sukamara	IV - 17
Tabel 4.2.	Telaah Kebijakan Pembangunan dengan Kabupaten Sekitarnya	IV - 59
Tabel 5.1.	Indikator Makro Pemerintah Kab. Sukamara 2018-2023	V - 14
Tabel 5.2.	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	V - 17
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023	VI - 10
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	VI - 17
Tabel 6.3.	Pemetaan Waktu Arah Kebijakan	VI - 19
Tabel 6.4.	Pemetaan Program pendukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	VI - 60
Tabel 6.5.	Implementasi Misi Kepala Daerah dalam Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	VI - 65



No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2024	VII – 2
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2023	VII – 3
Tabel 8.1.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	VIII – 1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara	VIII – 4



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Tujuan dari disusunnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk:

- a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, dokumen perencanaan pembangunan kabupaten, khususnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau



Perubahan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut di atas. Oleh karena itu penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan Pusat dan Pemerintah Provinsi. RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, secara bertahap selama lima tahun periode RPJMD. RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bagi Kabupaten Sukamara, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. Perda ini ditetapkan 6 (enam) bulan setelah dilantiknya Bupati Sukamara dan Wakil Bupati Sukamara pada tanggal 24 September 2018. RPJMD ini selama 3 (tiga) tahun telah



menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukamara. Seiring dengan terjadinya dinamika perubahan politik, ekonomi, dan sosial baik di tingkat Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kab. Sukamara sendiri, dirasakan dokumen RPJMD perlu dilakukan perubahan.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 di antaranya:

1) Perubahan periode RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan RPJMD Kab. Sukamara 2018-2023 disusun dan disinkronisasikan dengan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2017. Seiring dengan terpilihnya presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024 dan terpilihnya Sugianto Sabran dan Edy Pratowo masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2021-2024, maka RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang baru.

2) Perubahan kebijakan di tingkat Pusat yang berpengaruh pada substansi perencanaan dan keuangan daerah.

Pemberlakuan peraturan di bidang perencanaan dan keuangan daerah yang baru di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, termasuk RPJMD.

- 3) Terjadinya pandemi COVID-19**, yang telah berdampak pada menurunnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukamara. Hal ini dipastikan akan berdampak pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023.

Ketiga alasan tersebut di atas, sudah sejalan dengan ketentuan tentang perubahan RPJMD sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.* Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 misalnya, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RPJMD apabila:



- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar, yaitu terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Sejalan dengan pertimbangan perubahan tersebut di atas, maka dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 ini, perubahan lebih difokuskan pada penajaman identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah, sinkronisasi visi dan misi RPJMD Sukamara dengan RPJMN 2020-2024 dan rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, penajaman program prioritas pembangunan daerah, penyesuaian nomenklatur program dan penyesuaian kapasitas fiskal daerah dan target/sasaran kinerja yang akan dicapai hingga tahun 2023.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 ini pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kab. Sukamara 2018-2023 yang ditetapkan dengan Perda No. Tahun 2019. Mengingat RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Sukamara, maka dokumen perubahan RPJMD ini setelah disahkan, selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Sukamara di sisa tahun pelaksanaan RPJMD ini.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 didasarkan pada:

- 1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 21) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 - 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



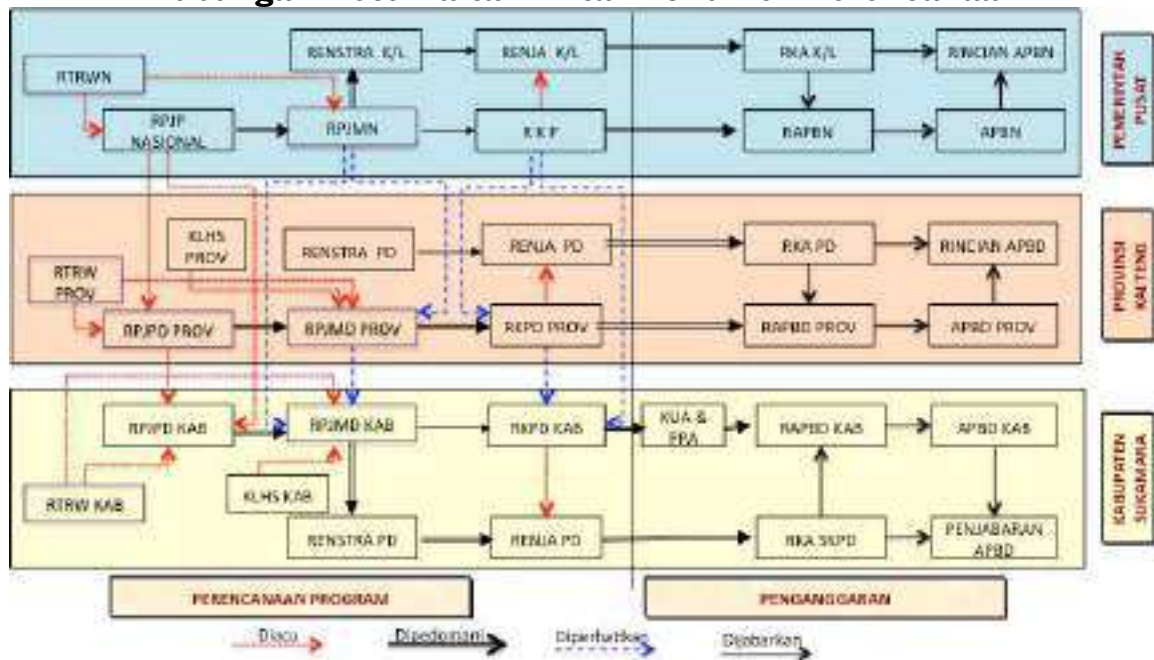
- Nomor 81);
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
 - 28) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
 - 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 67);
 - 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 69).



1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antara perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025, Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 dan memperhatikan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Sukamara 2018-2023;
2. Di samping itu, penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026;

3. Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara 2018-2023;
4. Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran dan perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
5. RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD), sedangkan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang juga menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD. RAPBD ini selanjutnya setelah disahkan bersama-sama dengan DPRD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan di Kabupaten Sukamara hingga tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi terkini, sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat Pemerintah Provinsi



Kalimantan Tengah dan Pusat serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkini.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 adalah:

- a) Menyesuaikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara dengan kondisi dan situasi terkini yang dihadapi, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024;
- b) Menyesuaikan skala prioritas dan nomenklatur program pembangunan daerah beserta indikator capaian dan kebutuhan pendanaan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terbaru dan proyeksi kapasitas fiskal daerah;
- c) Memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan dalam perubahan RPJMD ini dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan anggaran daerah (RAPBD) serta Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi Dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan Daerah
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan Dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX. PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakter Lokasi dan Batas Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil kedua di Kalimantan Tengah, sebesar 3.827,00 Km² atau 2,49 persen dari luas Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara terdiri dari lima kecamatan. Ibu kota Kabupaten terletak pada Kecamatan Sukamara. Empat kecamatan lainnya yaitu Jelai, Pantai Lunci, Balai Riam, dan Permata Kecubung. Dari lima kecamatan tersebut, Kecamatan Sukamara merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Sukamara, sekitar 1.028 Km², dan Kecamatan Balai Riam merupakan kecamatan terkecil, dengan luas 539 Km².

Secara administrasi, Kabupaten Sukamara terbagi menjadi lima kecamatan yang terdiri atas 32 desa/kelurahan yang meliputi tiga kelurahan dan 29 desa. Secara lebih lengkap, luas per kecamatan di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1.
Luas Kecamatan di Kabupaten Sukamara

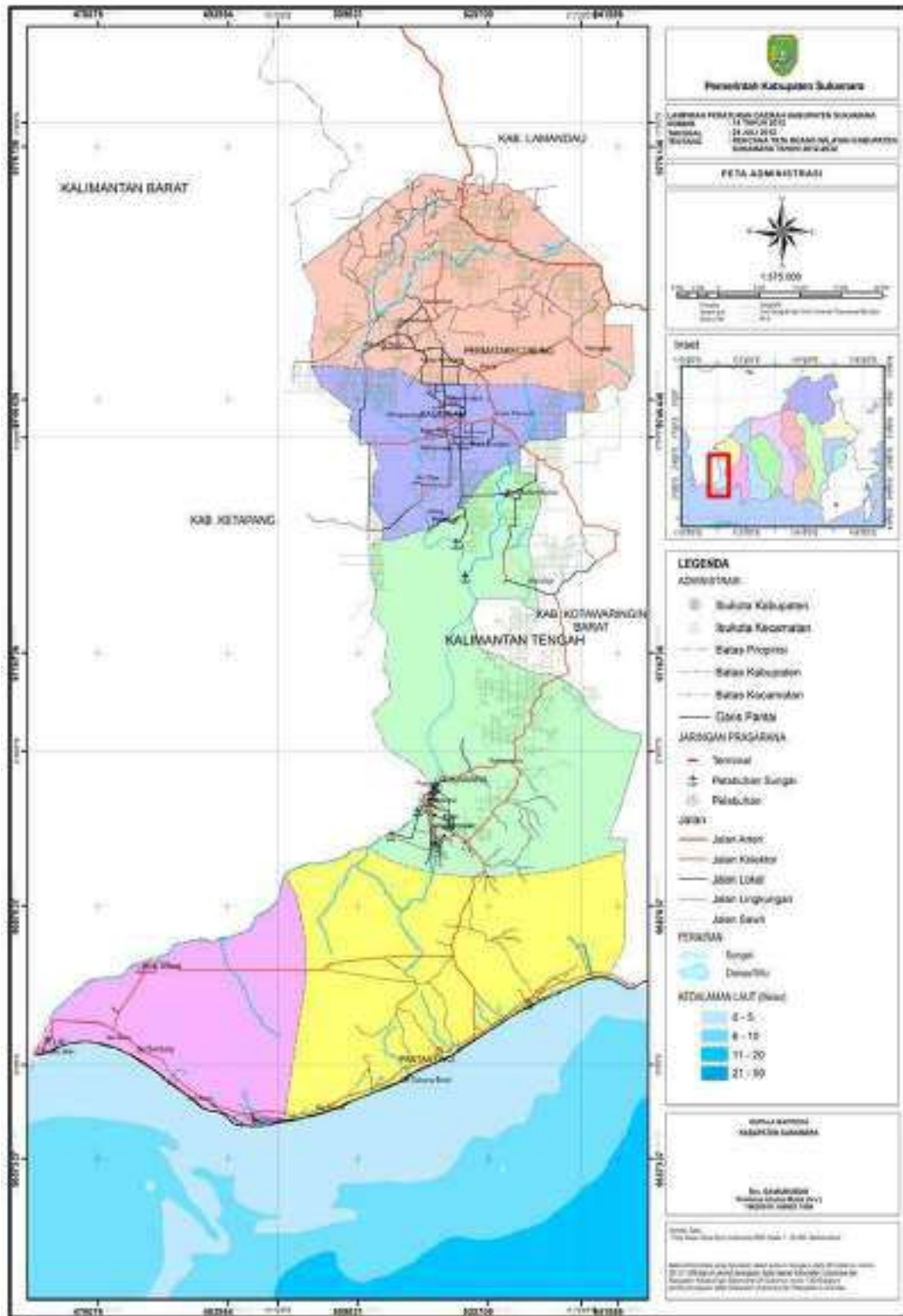
No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Jelai	796
2	Lunci	804
3	Sukamara	1.028
4	Balai Riam	539
5	Permata Kecubung	660
Jumlah		3.827

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021.

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032



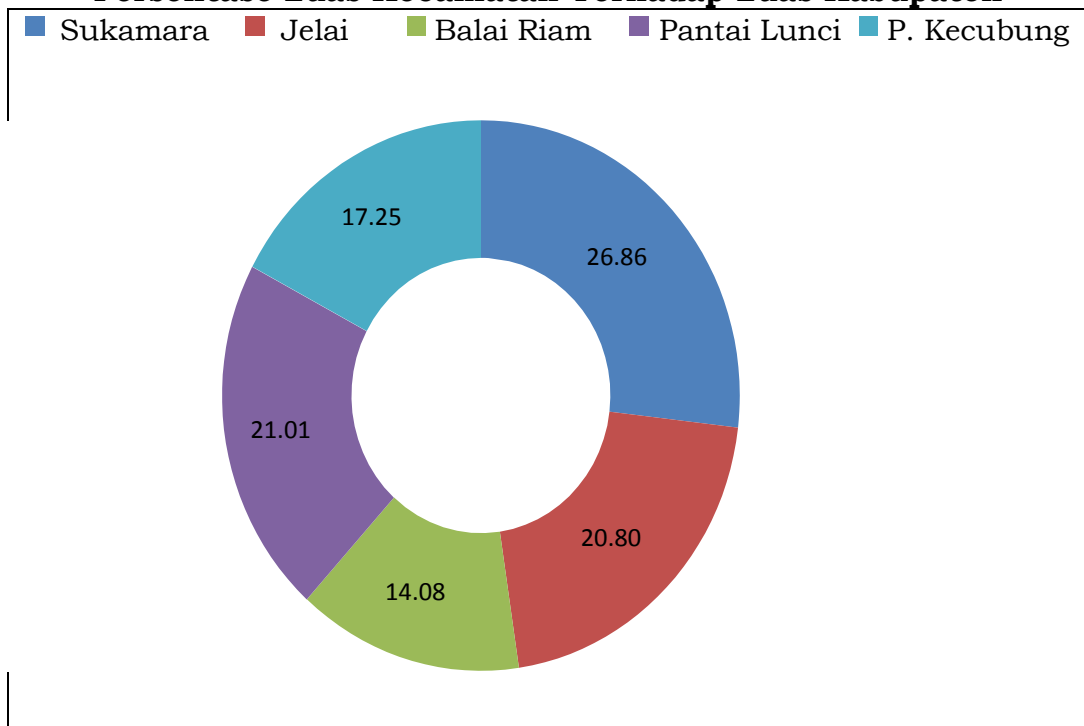
Untuk lebih jelas jumlah Desa serta proporsi luas masing-masing Kecamatan terhadap luas Kabupaten Sukamara dapat di lihat dalam Tabel 2.2 serta Gambar 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kabupaten Sukamara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Sukamara	2	6	102.800	26,86
2	Jelai	1	4	79.600	20,80
3	Balai Riam	-	8	53.900	14,08
4	Pantai Lunci	-	4	80.400	21,01
5	P. Kecubung	-	7	66.000	17,25
JUMLAH		3	29	382.700	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2020 dan RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032.

Gambar 2.2.
Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2021.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sukamara terletak antara 2°19' Lintang Selatan 3°07' Lintang Selatan dan 110°25' Bujur Timur 111°09' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :



- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik dengan Kabupaten Lamandau
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Selatan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

2.1.1.3. Topografi

Karakteristik wilayah di Kabupaten Sukamara bagian Barat dan Utara memiliki ketinggian 7-100 m di atas permukaan laut serta kemiringan 0-15 derajat, sedangkan wilayah selatan merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Sukamara dapat dikatakan termasuk daerah rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 meter serta kemiringan 0-15 derajat ditinjau dari segi geologi, sebagian besar wilayahnya meliputi laut dan sungai. Kabupaten Sukamara dapat dibagi menjadi tiga wilayah, wilayah utara meliputi, Kecamatan Balai Riam kemiringan lahan 8-15 derajat, ketinggian lahan 7-100 mdpl dan Kecamatan Permata Kecubung kemiringan lahan 8-15 derajat, ketinggian lahan 7-100 mdpl ketiga wilayah Kecamatan tersebut termasuk kedalam dataran bergelombang dan perbukitan, wilayah tengah yaitu Kecamatan Sukamara kemiringan lahan 8-15 derajat, ketinggian lahan 5-30 mdpl sedangkan wilayah selatan meliputi Kecamatan Jelai kemiringan lahan 0-8 derajat, ketinggian lahan 0-15 mdpl dan Kecamatan Pantai Lunci 0-8 derajat, ketinggian lahan 0-25 mdpl kedua Kecamatan tersebut termasuk kedalam wilayah dataran rendah.



2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kabupaten Sukamara memiliki lima jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah yang paling banyak ditemui adalah jenis *histosol*, *entisol*, *inceptisol*, *ultisol* dan *spodosol*. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3.
Jenis Tanah yang Terdapat di Kabupaten Sukamara

No	Soil Taxonomy (USDA, 1975)		Soil Taxonomy (USDA, 1990)	PUSLITANAK (1983)
	Ordo	Great Group	Great Group	Macam Tanah
1.	Histosol	Tropofibrist	Haplofibrists	Organosol fibrik
		Tropohemist	Haplohemists	Organosol hemik
		Troposaprist	Haplosaprist	Organosol saprik
2.	Entisol	1. Tropaquents	1. Endoaquents	1. Aluvial gleik
		2. Fluvaquents	2. Fluvaquents	2. Aluvial distrik
		3. Psammaquents	3. Psammaquents	3. Regosol gleik
		4. Tropopsamments	4. Udipsamments	4. Regosol haplik
		5. Quartzzipsamment	5. Quartzzipsamment	5. Regosol kuarsik
		5. Sulfaquents	5. Sulfaquents	5. Aluvial tionik
3.	Inceptisol	6. Hydraquents	6. Hydraquents	6. Aluvial hidrik
		1. Tropaquepts	1. Endoaquepts	1. Gleisols hidrik
2.	Dystropepts	2. Dystropepts	2. Dystrudepts	2. Kambisol distrik
		1. Tropodults	1. Hapludults	1. Podsolik haplik
4.	Ultisol	2. Palaeudults	2. Palaeudults	2. Podsolik kromik
		3. Tropohumults	3. Haplohumults	3. Podsolik haplik
		Placaquods	Placaquods	Podsol plasik
5.	Spodosols	Placaquods	Placaquods	Podsol plasik

Sumber : Peta Land System dan Land Suitibility Lembar Pangkalan Bun 1513 & Hasil Analisis 2011

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Sukamara berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai yang meliputi lebih dari 40 anak sungai. Sedangkan dilihat dari kondisi drainase permukaan, Kabupaten Sukamara memiliki 3 kawasan yaitu :

- Daerah tidak pernah tergenang,
- Daerah tergenang secara periodik, dan
- Daerah tergenang secara terus menerus, yaitu sebagian di daerah Kecamatan Jelai dan sebagian di daerah Kecamatan Sukamara.

Terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sukamara, yaitu DAS Jelai dengan panjangnya 200 Km dan DAS Mapam.



Tabel 2.4.
Nama dan Debit Sungai di Kabupaten Sukamara

No	Nama Sungai	Debit (m ³ /det)	Keterangan
1	Sungai Jelai	-	Tidak ada data
2	Sungai Karta Mulya	0,160	
3	Sungai Mapam	6,300	
4	Sungai Riam Kemuruh	0,432	
5	Sungai Kelampaian	0,630	
6	Sungai Baru	1,250	Pada saat pasang
7	Sungai Bundung	1,540	Pada saat pasang
8	Sungai Raja	0,250	Pada saat pasang
9	Sungai Damar	0,750	Pada saat pasang
10	Sungai Tabuk	0,970	Pada saat pasang
11	Sungai Cabang Barat	0,970	Pada saat pasang
12	Sungai Pasir	1,010	Pada saat pasang

Sumber : Studi Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau dan Laporan MCRMP 2004

Kondisi mata air di Kabupaten Sukamara saat ini ada yang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber air baku, serta ada yang kondisinya tidak terawat. Sebaran mata air potensial berdasarkan hasil studi “Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya lokasi, debit air dan keadaan mata air di Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada **Tabel 2.5**

Tabel 2.5.
Lokasi, Debit dan Keadaan Mata Air

No	Lokasi (Desa)	Debit (M ³ /det)	Kondisi
1	Sungai Damar	0,002	Belum dimanfaatkan, kondisi tidak terawat
2	Sungai Tabuk	0,002	Dimanfaatkan dengan pompa, sederhana
3	Pudu	0,006	Saat musim kemarau air terus mengalir
4	Natai Sedawak	0,008	Oleh masyarakat dibuatkan tampungan sederhana
5	Kenawan	0,0005	Dibuatkan tampungan kecil sederhana oleh masyarakat

Sumber : Studi Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah 2004



Berdasarkan hasil studi “Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004, potensi air tanah di Kabupaten Sukamara dibagi 3 zona untuk potensi air tanahnya yaitu :

1. Potensi air tanah sangat tinggi, umumnya terletak pada daerah sepanjang sungai besar yaitu : Sungai Jelai. Potensi air yang besar ini terletak dari bantaran sungai sampai beberapa kilometer dari bantaran sungai kebagian Barat dan Timur.
2. Potensi air tanah tinggi, yang terdapat setelah daerah potensi air tanah sangat tinggi berangsur-angsur potensi air tanah berkurang sampai potensi air tanah yang tinggi.
3. Potensi air tanah rendah dimana merupakan daerah yang agak menjauhi sungai-sungai besar atau diantara dua sungai dan dataran selatan dari Peg. Schwarner.

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Sukamara memiliki curah hujan yang hampir merata pada semua wilayahnya. Berdasarkan data banyaknya hari hujan menurut bulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2010-2021, diketahui siklus hujan di Kabupaten Sukamara dalam satu tahun dengan rata-rata hari hujan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar 9 hari sedangkan yang tertinggi pada bulan Desember yaitu sebesar 26 hari. Secara ringkas diilustrasikan pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.3. Untuk curah hujan, selama 2021 berdasarkan data dari 3 pos pengamatan yaitu Jelai, Sukamara, dan Balai Riam, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan triwulan pertama (Januari-Maret) serta triwulan keempat (Oktober-Desember) yang diilustrasikan pada Gambar 2.4. Berdasarkan data antara jumlah hari hujan dan curah hujan, terlihat kedua data tersebut memiliki pola yang sama.



Tabel 2.6.
**Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara
Tahun 2010-2020**

Bulan	Hari Hujan (Hari)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	22	24	26	19	12	29	23	29	14	16	22
Februari	25	15	23	19	16	15	25	19	11	12	17
Maret	28	25	25	25	24	24	23	20	19	8	17
April	21	23	17	24	27	18	22	21	17	12	16
Mei	19	16	8	22	23	17	21	25	19	12	18
Juni	23	6	11	15	19	17	15	19	9	17	12
Juli	25	8	11	18	10	11	18	20	2	3	12
Agustus	27	8	11	15	15	5	11	17	2	2	9
September	23	11	4	18	8	2	20	20	5	2	16
Oktober	26	22	16	12	10	4	23	22	10	10	17
November	26	24	21	25	21	19	20	27	25	9	8
Desember	27	23	27	27	25	20	23	23	24	26	15

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018, 2019, 2020 dan 2021.

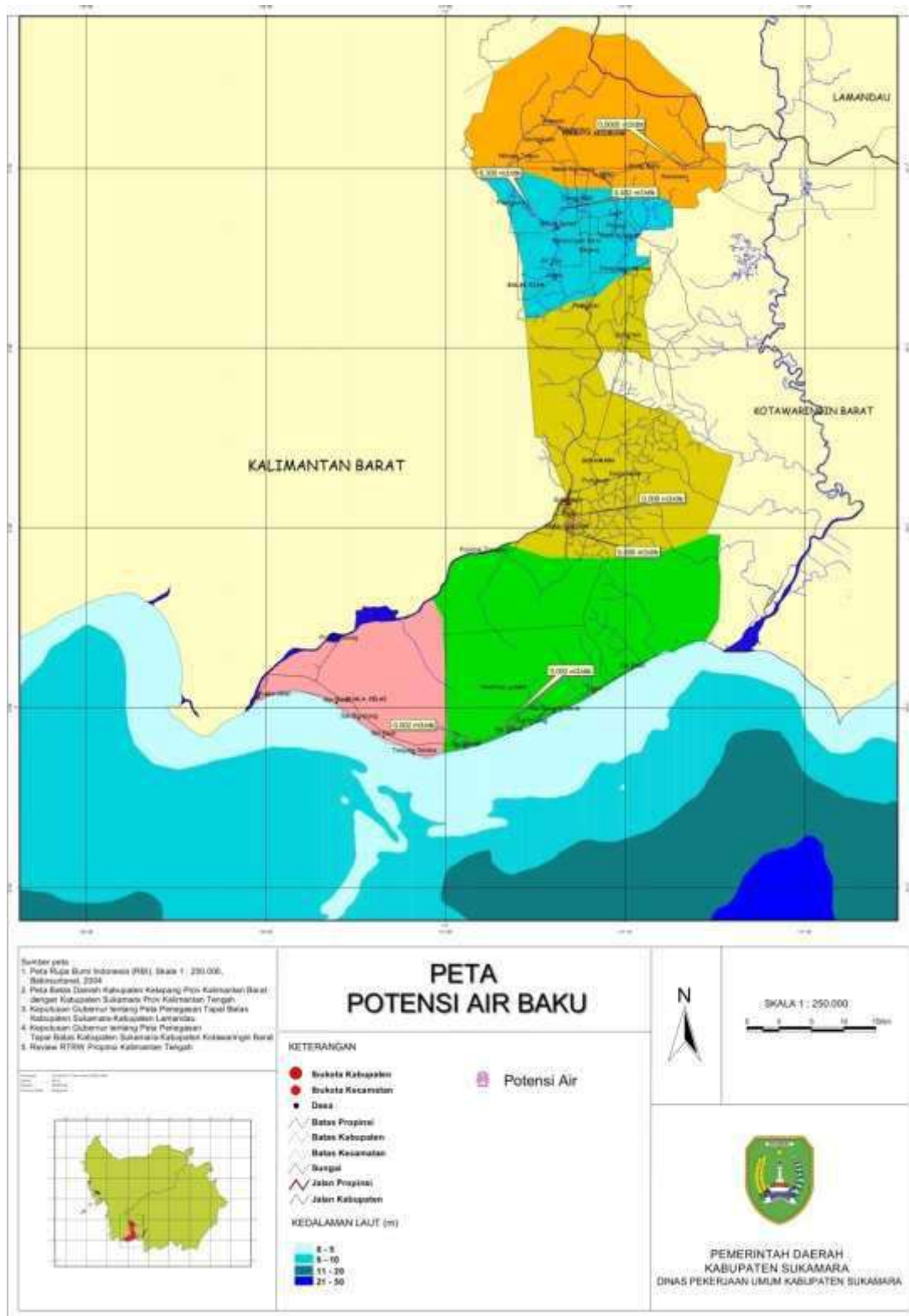
Gambar 2.3.
**Rata-rata Hari Hujan menurut Bulan di Kabupaten Sukamara
Tahun 2018-2021**



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018-2020, diolah.



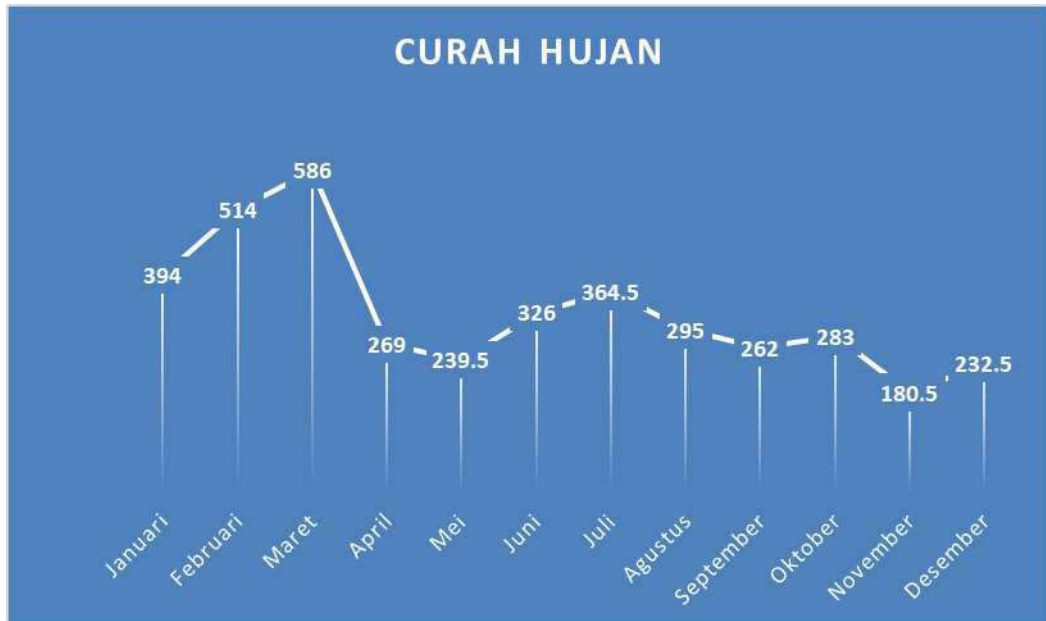
Gambar 2.4.
Peta Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032



Gambar 2.5.
Rata-rata Fluktuasi Curah Hujan (mm) Kabupaten Sukamara
Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021, data diolah.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Sukamara memiliki luasan wilayah mencapai 3.827 Km². Wilayahnya secara administratif terbagi menjadi 5 kecamatan. Kondisi fisiografis wilayahnya cukup bervariasi, mulai dari datar hingga berbukit sehingga penggunaan lahannya pun juga bervariasi. Penggunaan lahan pertanian dan perkebunan secara umum cukup dominan yang menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi wilayahnya. Kegiatan pertanian dan perkebunan masih dominan sehingga luasan lahan ini menjadi cukup dominan diantara penggunaan lahan lainnya.

Kondisi penggunaan lahan menunjukkan kecenderungan kegiatan ekonomi penduduk suatu wilayah. Dominasi penggunaan lahan memberikan gambaran struktur ekonomi wilayahnya. Data penggunaan lahan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.7.
Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1	Rawa	1.351,83
2	Tanah Terbuka	67.324,61
3	Perkebunan	89.577,12
4	Tegalan/Ladang	1.179,09
5	Semak/Belukar	71.160,96
6	Permukiman	1.095,07
7	Tubuh Air	935,11
8	Hutan Lahan Kering	98.424,81
9	Hutan Mangrove	770,71
10	Industri	194,08
11	Pertambangan	26,40
12	Pertanian	2.198,27
13	Peternakan	727,96
14	Ruang Terbuka Hijau	35,20
Jumlah		335.001,22

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032.

Tabel 2.8.
**Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara
Tahun 2013-2017**

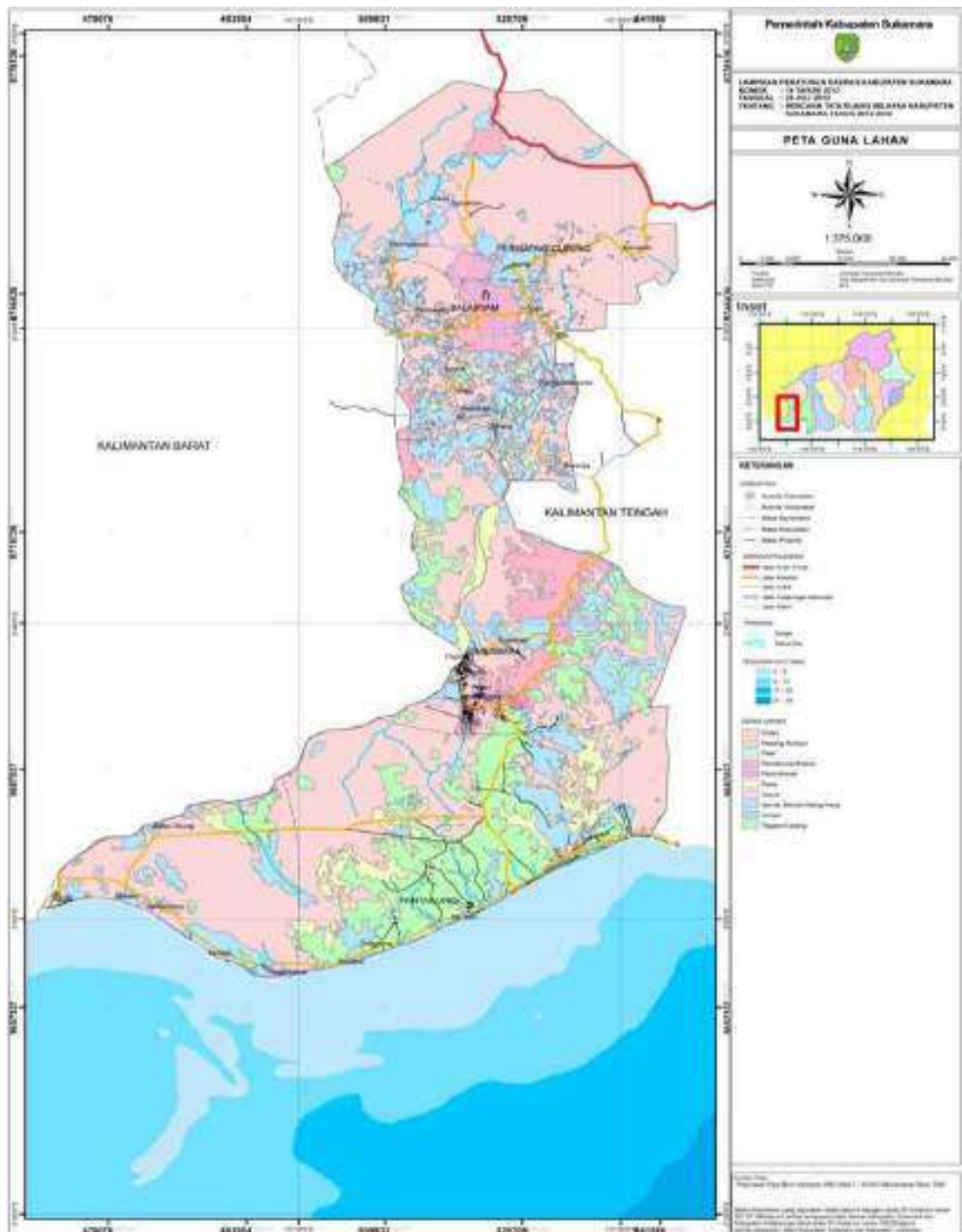
No	Uraian	Satuan	Kondisi Awal 2012	Tahun				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase kawasan hutan produksi terhadap luas wilayah Kab. Sukamara	%	66,61	69,53	69,53	69,53	61,13	61,13
2	Persentase kawasan lahan pangan terhadap luas wilayah Kab. Sukamara	%	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
3	Persentase kawasan perkebunan terhadap luas wilayah Kab. Sukamara	%	26,74	26,74	26,74	26,74	26,74	26,82
4	Persentase kawasan permukiman terhadap luas wilayah Kab. Sukamara	%	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,37

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukamara, 2018.

Untuk lebih jelasnya mengenai peta penggunaan lahan di Kabupaten Sukamara, dapat di lihat pada Gambar 2.6 di bawah ini:



Gambar 2.6.
Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032.



Rencana pola ruang Kabupaten Sukamara meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung di Kabupaten Sukamara, terdiri dari:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan gambut dengan luas 1.316,66 hektar dan kawasan resapan air dengan luas 15.832 hektar yang terletak di Kecamatan Jelai.
2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) Kawasan sempadan pantai seluas 202,79 hektar, terdapat di Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci;
 - b) Kawasan sempadan sungai seluas 4.067,27 hektar, terdapat di Kecamatan Sukamara; dan
 - c) Kawasan sekitar mata air dengan luas 72,34 hektar, terdapat di Sungai Damar, Sungai Tabuk, sumber mata air Pudu, sumber mata air Natai Sedawak dan sumber mata air di Kenawan diameter 200 meter dari titik sumber mata air.
3. Kawasan suaka alam, meliputi:
 - a) Kawasan suaka alam Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Kabupaten Sukamara seluas 30.983,4 hektar yang terletak di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Sukamara; dan
 - b) Kawasan cagar budaya kota lama seluas 15,92 hektar terletak di Kecamatan Sukamara.
4. Kawasan lindung lainnya, meliputi:
 - a) Kawasan terumbu karang dengan luas 4.137,58 hektar; dan
 - b) Kawasan hutan bakau (mangrove) dengan luas 56,46 hektar.

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Sukamara, terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi, yang meliputi:
 - a) Hutan produksi terletak di Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung dengan luas

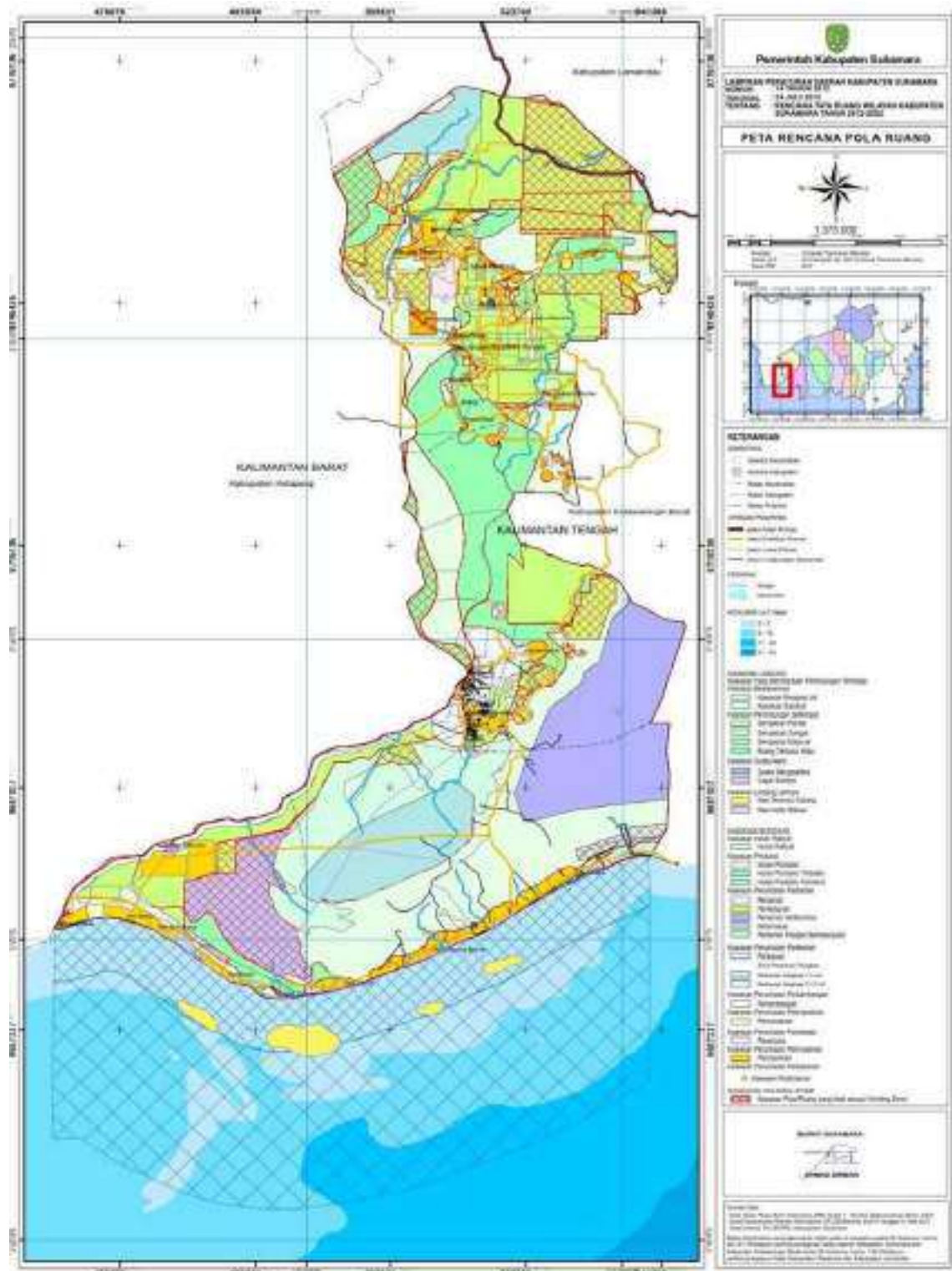


- 104.893,21 hektar;
- b) Hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan Pantai Lunci dan Permata Kecubung dengan luas 22.076,36 hektar; dan
 - c) Hutan produksi konversi terletak di Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam dan Permata Kecubung dengan luas 46.913,14 hektar.
2. Kawasan hutan rakyat seluas 3.136 hektar;
 3. Kawasan pertanian, meliputi:
 - a) Tanaman pangan seluas 39.418 hektar;
 - b) Hortikultura seluas 114 hektar;
 - c) Perkebunan seluas 51.068,1 hektar; dan
 - d) Peternakan seluas 1.308 hektar.
 4. Kawasan perikanan seluas 447 hektar;
 5. Kawasan pertambangan seluas 117.820,37 hektar;
 6. Kawasan industri seluas 100 hektar;
 7. Kawasan pariwisata seluas 3.450 hektar; dan
 8. Kawasan permukiman seluas 60.376 hektar.

Untuk lebih jelasnya mengenai peta rencana pola ruang Kabupaten Sukamara, dapat di lihat pada Gambar 2.7 di bawah ini:



Gambar 2.7.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032.



Sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air dan udara. Untuk kepentingan pembangunan ekonomi sumber daya alam digolongkan berdasarkan potensi pemanfaatannya. Kabupaten Sukamara merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sukamara sebagian besar adalah hutan, bahan tambang, disamping itu juga mempunyai potensi sumberdaya laut, sungai, obyek wisata serta sumber daya lahan yang sesuai untuk dimanfaatkan bagi budidaya pertanian dan perkebunan serta peternakan.

1. Sumber Daya Lahan

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan, terutama dalam era pembangunan yang dewasa ini selalu ditingkatkan. Lahan juga merupakan salah satu tempat kegiatan yang dibebani untuk menampung semua kegiatan sehingga mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin bertambah, sementara luasan lahannya senantiasa tidak berubah dan tetap. Disamping luas lahan yang tidak akan bertambah, tidak semua lahan dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan bebas, karena tanah mempunyai faktor pembatas baik dari segi fisik seperti kemampuan lahan, kesuburan dan lain sebagainya, maupun non fisik seperti adat istiadat maupun sosial budaya dari masyarakat sebagai pengguna tanah tersebut. Untuk melihat potensi sumber daya lahan di Kabupaten Sukamara, ditinjau dari beberapa karakteristik kesesuaian lahan bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Sukamara. Kesesuaian lahan ini menggambarkan tingkat kesesuaian dari sebidang lahan untuk pemanfaatan tertentu.

a. Kemiringan Lahan

Lereng memiliki pengertian yaitu perbedaan ketinggian antara dua tempat yang berbeda yang dinyatakan dalam persentase, artinya



berapa meter beda tinggi antara dua tempat dibagi dengan jarak kedua tempat tersebut. Lereng merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan tanah untuk menjaga kelestarian tanah. Sehingga dalam pengelolaan akan memerlukan syarat-syarat tertentu pada kisaran lereng tertentu pula, agar tanah tersebut dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam analisis kemiringan lereng digunakan standar ketentuan skala Maberry (1972), yang dapat menentukan kisaran lereng optimum untuk penempatan berbagai kegiatan pengembangan di suatu wilayah perencanaan. Kegiatan yang ada dapat diklasifikasikan kedalam 10 kegiatan, yang meliputi: rekreasi umum, bangunan terhitung dengan persyaratan teknis, kegiatan perkotaan, perumahan konvensional, pusat-pusat perdagangan serta sarana dan prasarana pelayanan. Untuk lebih jelasnya mengenai kisaran lereng skala Maberry (1972), dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Kisaran Lereng Optimum Untuk Berbagai Kegiatan Pembangunan

No	Peruntukan	Kelas Sudut Lereng (%)						
		0-3	3-8	8-10	10-15	15-30	30-70	>70
1	Rekreasi Umum	x	x	x	x	x	x	x
2	Bangunan Terhitung	x	x	x	x	x		
3	Penggunaan Kota Umum	x	x	x				
4	Jalan Kota	x	x	x				
5	Sistem Septik	x	x					
6	Perumahan Konvensional	x	x	x	x			
7	Pusat-pusat Perdagangan	x	x					
8	Jalan Raya	x	x					
9	Lapangan Terbang	x						
10	Jalan Lain	x	x	x	x			

Sumber: Skala Maberry (1972).

Dari ketentuan tersebut dapat teridentifikasi potensi-potensi yang sesuai dan cocok untuk menunjang kegiatan penduduk di wilayah perencanaan, dengan kriteria sebagai berikut:

- Wilayah Potensi: adalah wilayah yang sesuai dan cocok untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan, dengan kisaran lereng 0-15



%.

- Wilayah Kendala: adalah wilayah yang sesuai dan cocok untuk pengembangan kegiatan-kegiatan tertentu (seperti rekreasi umum dan bangunan terhitung) yang dapat dikembangkan dengan bantuan teknologi atau persyaratan-persyaratan teknis, dengan kisaran lerengnya 15-40 %.
- Wilayah Limitasi: adalah wilayah yang tidak berpotensi untuk kegiatan budidaya, dengan kisaran lerengnya > 40 %.

Dari klasifikasi di atas dapat dikemukakan bahwa wilayah Kabupaten Sukamara memiliki 72,69 % Wilayah Potensi, 26,67 % Wilayah Kendala, dan 0,61 % Wilayah Limitasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Jelai

Sebagian besar wilayah ini memiliki wilayah potensi sekitar 20,8 % dari luas wilayah perencanaan, 0 % wilayah kendala, dan 0 % merupakan wilayah limitasi.

b. Kecamatan Pantai Lunci

Wilayah kecamatan ini memiliki 21,0 % dari luas wilayah merupakan wilayah potensi, 0 % merupakan wilayah limitasi, wilayah kendala yaitu 0 %.

c. Kecamatan Sukamara

Wilayah potensi yang terdapat di wilayah ini sebesar 25,07 %, wilayah kendala 1,8 % dan wilayah limitasi sebesar 0 %.

d. Kecamatan Balai Riam

Wilayah Balai Riam memiliki wilayah potensi 4,52 % dari luas wilayah, dan wilayah Kendal sebesar 9,09 %.

e. Kecamatan Permata Kecubung

Wilayah Kecamatan Permata Kecubung wilayah potensi 1,3 %, wilayah kendala 15,9 %, dan wilayah limitasi sebesar 0,6 %.



b. Sistem Lahan dan Kesesuaian Lahan

Dalam pendekatan analisis sistem lahan dan kesesuaian lahan yang ada meliputi penilaian berdasarkan kondisi lahan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting lahan di atasnya guna menilai sejauh mana efisiensi lahan serta melihat sejauh mana pengaruh kegiatan yang ada terhadap kegiatan lainnya.

Selanjutnya dari sistem lahan dapat di analisis untuk mengetahui kesesuaian lahan. Pada dasarnya, kajian mengenai sistem lahan merupakan penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan sebagai suatu potensi pengembangan. Definisi secara kualitatif setiap kelas kesesuaian lahan adalah sebagai berikut:

- S: Sesuai; lahan dimana penggunaan tetap untuk tipe yang dipertimbangkan, diharapkan akan memberikan hasil panen yang cukup untuk dapat mengimbangi masukan-masukan yang dibutuhkan tanpa resiko merusak sumberdaya lahan.
- \$: Sesuai bersyarat; lahan yang membutuhkan masukan-masukan tambahan agar menjadi sesuai bagi penggunaan secara tetap untuk tipe- tipe yang dipertimbangkan.
- N: Tidak Sesuai; lahan dengan mutu yang kelihatannya tidak memungkinkan dipakai secara tetap untuk tipe-tipe yang dipertimbangkan.
- N/S: Suatu sistem lahan “Tidak Sesuai” yang mempunyai fase kecil “sesuai” didalamnya.

Sistem lahan di Kabupaten Sukamara pada umumnya masih bervariasi dan menunjukkan proporsi yang hampir seimbang antara sistem lahan sesuai dan tidak sesuai.

c. Daya Dukung Lahan

Untuk memudahkan identifikasi suatu daerah, maka ditentukan pengelompokan menjadi 2 jenis wilayah, yaitu Wilayah Potensi dengan definisi daerah yang memiliki potensi tinggi dalam berbagai



pengembangan baik kegiatan perkotaan dan pedesaan, dan Wilayah Limitasi adalah daerah yang berpotensi sangat rendah untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Adapun kriteria yang dipergunakan dalam melakukan penilaian adalah sebagai berikut:

a) Wilayah Potensi, dengan ketentuan:

- Kemiringan Lereng dengan penilaian kawasan potensi (0-15 %); Kesesuaian Lahan (Sistem Lahan) dalam klasifikasi “Sesuai”, untuk pengembangan kegiatan pertanian;
- Daerah berpotensi bahan tambang (untuk pengembangan kegiatan pertambangan);
- Daerah bukan sempadan pantai, sungai, waduk/danau dan mata air;
- Ketersediaan Air (mencukupi) serta bukan rawan bencana.

b) Wilayah Limitasi, dengan ketentuan:

- Kemiringan Lereng dengan penilaian kawasan limitasi (> 40 %);
- Daerah merupakan sempadan pantai, sungai, waduk/danau dan mata air;
- Daerah rawan bencana;
- Tingkat kesuburan rendah.

Dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sukamara terdapat potensi dan permasalahan serta peluang pengembangannya dijabarkan sebagai berikut:

- Potensi: Kabupaten Sukamara memiliki kemiringan lahan yang relatif landai, dengan kemiringan lahan berkisar antara 0-15 % terdapat 72,69 % dari total luas wilayah. Kondisi ini memiliki kesesuaian wilayah yang cocok untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan.
- Permasalahan: Permasalahan yang terdapat di Kabupaten Sukamara dengan memiliki kemiringan lahan yang relatif

datar, hal ini disebabkan oleh keberadaan kemiringan lahan yang terdapat di jenis tanah SGT (teras-teras berpasir, tekstur terdiri dari fraksi-fraksi kasar, merupakan dataran aluvium yang telah berkembang lanjut). Kondisi inilah yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan tidak sesuainya jenis tanaman padi sawah dan tanaman tahunan.

- Peluang Pengembangan: dengan kondisi yang dikemukakan di atas maka di Kabupaten Sukamara Kondisi ini memiliki kesesuaian wilayah yang cocok untuk dikembangkan bagi berbagai kegiatan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik perkembangan Kabupaten Sukamara dibagi menjadi 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian tengah dan kawasan bagian selatan.

Tabel 2.10.
Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukamara

KAWASAN	KARAKTERISTIK
KAWASAN BAGIAN UTARA	
Kawasan BALAIPERMATA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan ini meliputi Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung. ▪ Perkembangan dipengaruhi oleh migran karyawan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Karakteristik merupakan permukiman pedesaan, dan perkebunan Kelapa Sawit.
KAWASAN BAGIAN TENGAH	
Kawasan SUKMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukamara. ▪ Perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukamara sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman- permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan



	dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama.
KAWASAN BAGIAN SELATAN	
Kawasan JELUNCI	<ul style="list-style-type: none">▪ Kawasan ini meliputi Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci.▪ Merupakan kawasan pantai, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok. Kegiatan perdagangan dan jasa pariwisata serta industri perikanan berkembang linier terhadap jaringan pantai.

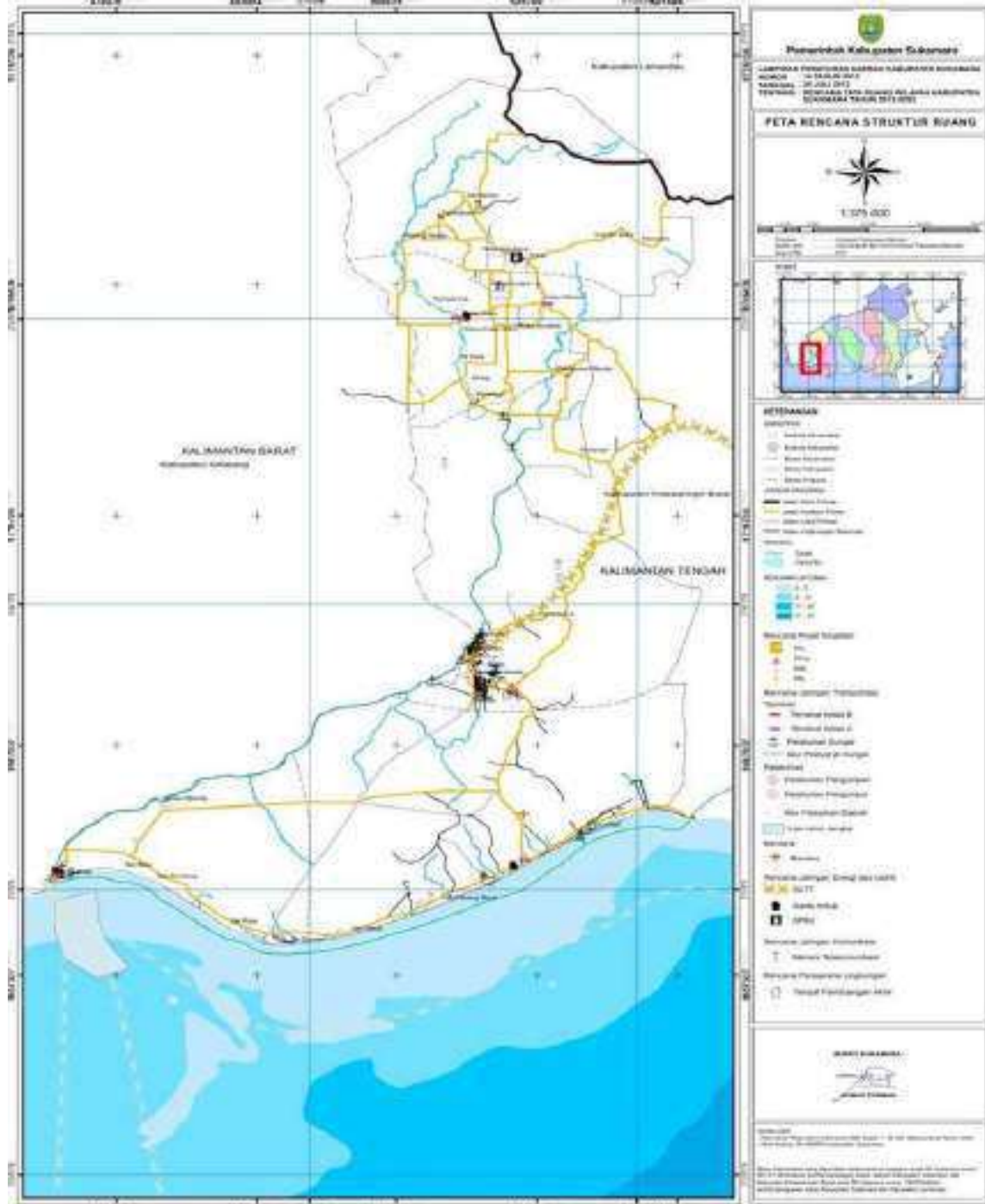
Kabupaten Sukamara berpotensi untuk dikembangkan mengingat posisinya yang strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Potensi ini bisa dikembangkan apabila kedua kabupaten ini bisa terhubung. Keberadaan Jembatan Jelai yang menghubungkan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Ketapang sampai saat ini belum bisa terkoneksi, sehingga belum mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi kedua kabupaten tersebut.

Pembangunan di Kabupaten Sukamara berdampak terhadap dinamika jumlah, jenis, kualitas dan fasilitas yang tersedia antar wilayah. Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap jenis fasilitas juga berbeda. Perbedaan ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan jumlah penduduk sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh. Hierarki perkotaan sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah karena menyangkut fungsi yang ingin diarahkan untuk masing-masing kota. Terlaksananya fungsi itu berkaitan dengan fasilitas kepentingan umum yang akan dibangun di masing-masing kota. Banyaknya fasilitas yang harus tersedia di masing-masing kota harus sejalan dengan luas pengaruh kota tersebut, atau jumlah penduduk yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas tersebut.



Hierarki dan perubahan rencana status sistem perkotaan yang ada di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8.
Hierarki dan Rencana Status Perkotaan Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032.



2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

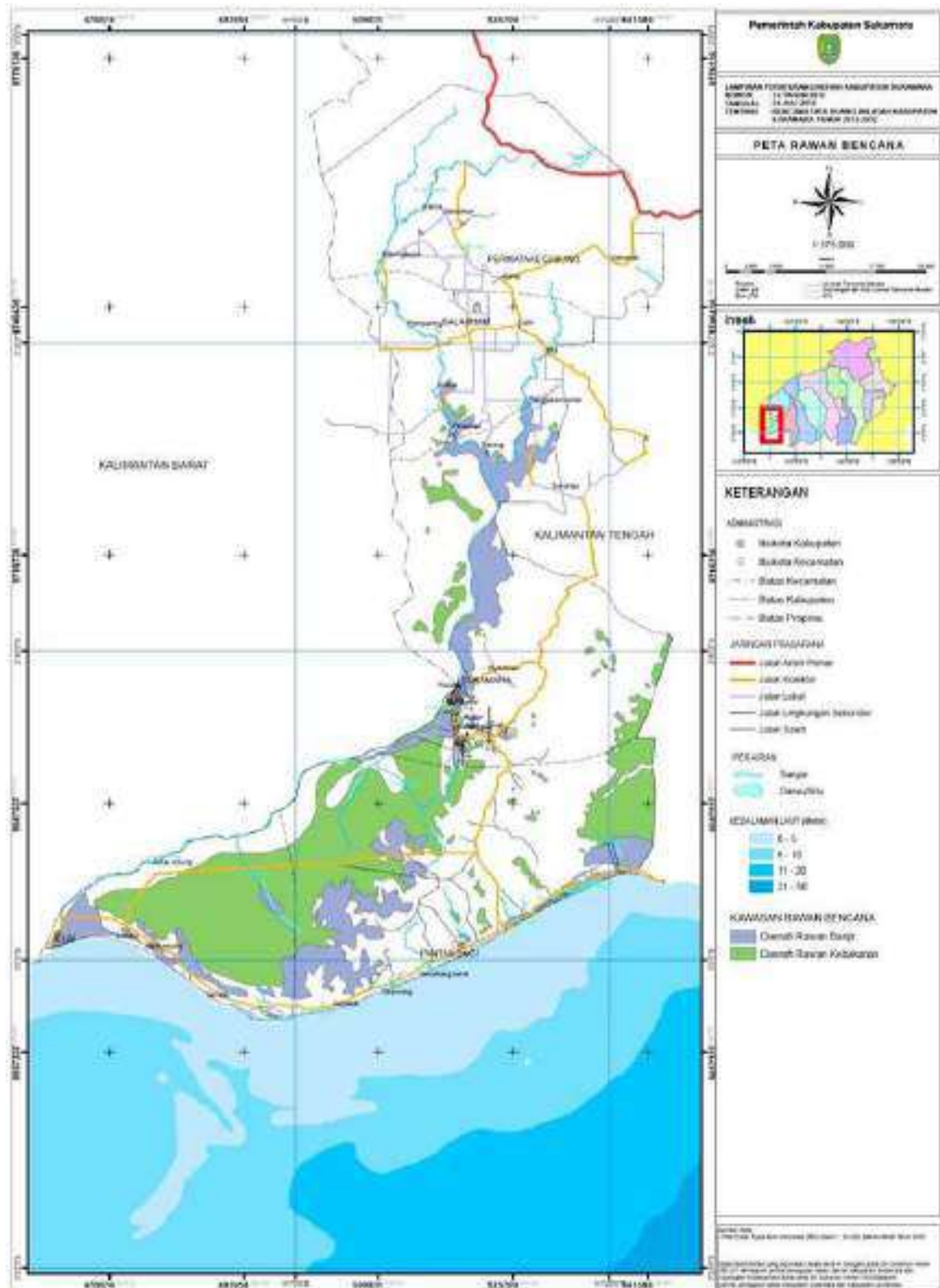
Dalam perencanaan pembangunan, penting untuk melihat daerah-daerah yang potensial terjadinya bencana. Di Kabupaten Sukamara ada beberapa lokasi yang merupakan daerah rawan bencana yang perlu perhatian lebih serius dari pemerintah. Daerah-daerah tersebut adalah:

- a. Lokasi di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci dengan luas sekitar 127,50 Ha yang merupakan daerah yang rawan terjadinya gelombang pasang dan abrasi;
- b. Lokasi di Kecamatan Sukamara dan Jelai dengan luas sekitar 30.268,66 Ha yang merupakan daerah rawan banjir dan tergenang utamanya daerah permukiman yang berada di sepanjang Sungai Jelai dan anak-anak sungainya; dan
- c. Lokasi daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi beberapa titik di wilayah Kecamatan Sukamara, Jelai dan Pantai Lunci, dengan luas wilayah sekitar 66.703,01 Ha.

Informasi lebih jelas mengenai kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 2.9.
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032.



a. Kerawanan Bencana Banjir

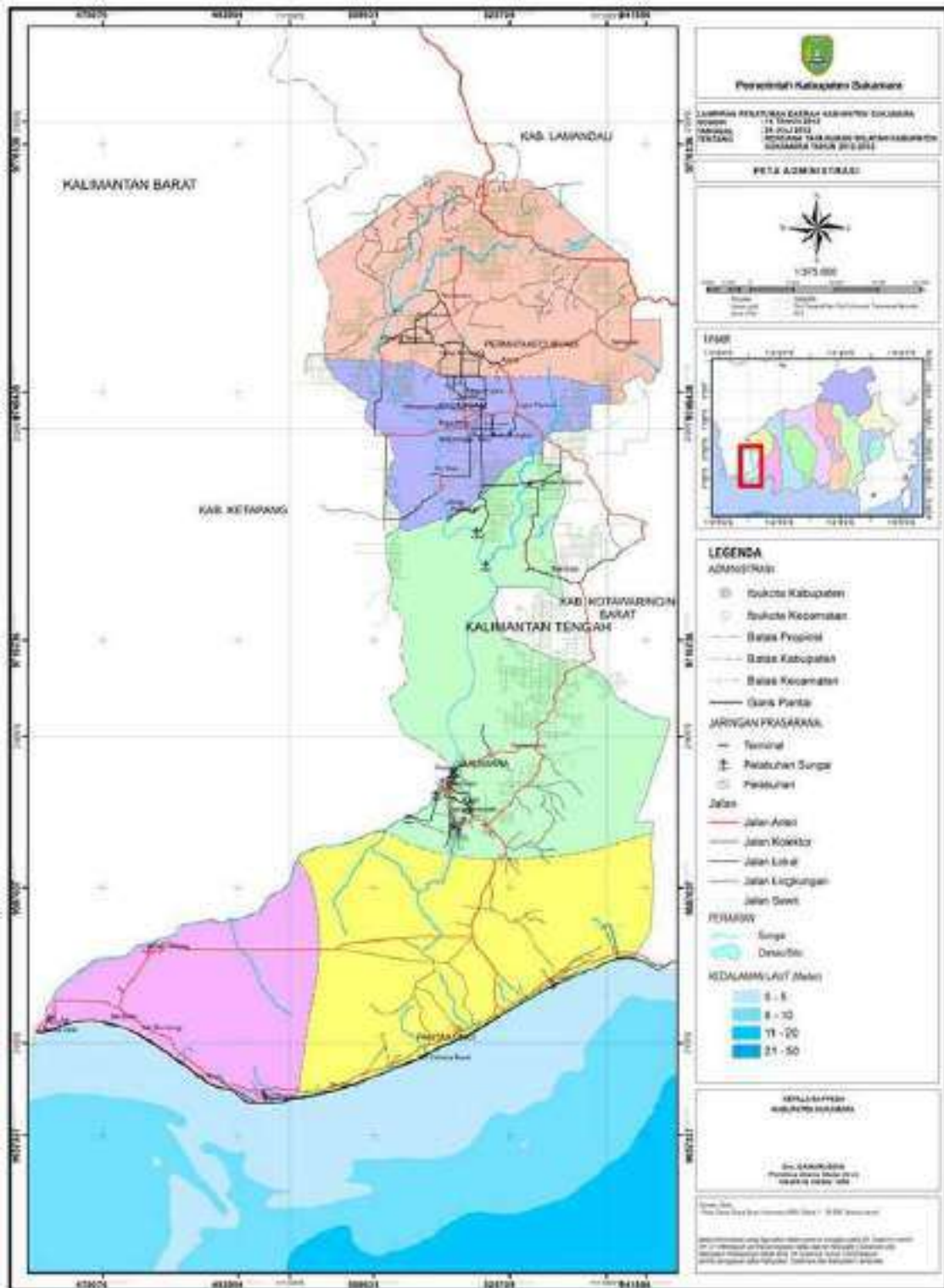
Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kabupaten Sukamara memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Jelai dan DAS Mapam. Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukamara, namun disisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan Maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Selain itu banjir juga bisa diakibatkan oleh pasangannya air laut (*rob*) ini sering terjadi di Kecamatan Jelai. Luas wilayah kawasan rawan bencana banjir 30.268,66 Ha. Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Jelai dan Kecamatan Sukamara.

b. Kerawanan Abrasi dan Gelombang Pasang

Kabupaten Sukamara, terdapat dua kecamatan berbatasan dengan laut jawa, wilayah ini mempunyai garis pantai yang cukup panjang yakni Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci. Sehingga dua kecamatan tersebut termasuk wilayah yang rawan abrasi. Luas wilayah yang rawan Abrasi di 2 (dua) kecamatan tersebut 127,50 Ha.



Gambar 2.10.
Peta Garis Pantai Kabupaten Sukamara



Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032.



c. Kerawanan Bencana Kebakaran

Ada tiga kecamatan yang mempunyai kerawanan bencana kebakaran yang meliputi wilayah Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai. Tiga wilayah ini masih terdapat lahan hutan yang luas, sehingga mempunyai kerawanan yang tinggi terhadap bencana kebakaran. Luas wilayah yang termasuk dalam wilayah rawan kebakaran meliputi 66.703,01 Ha.

2.1.4. Kondisi Demografi

Pada Tahun 2012, penduduk Kabupaten Sukamara berjumlah 47.073 jiwa, sedangkan pada Tahun 2018 jumlah penduduk bertambah menjadi 62.044 jiwa, dan pada tahun 2019 berdasarkan hasil registrasi kembali naik menjadi 64.940 dengan rasio jenis kelamin 109.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukamara pada periode 2015-2019 sebesar 4,09 persen per tahun. Struktur penduduk di Kabupaten Sukamara berdasarkan umur serta proporsi jenis kelamin pada tahun 2018 dapat di lihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin
di Kabupaten Sukamara Tahun 2020

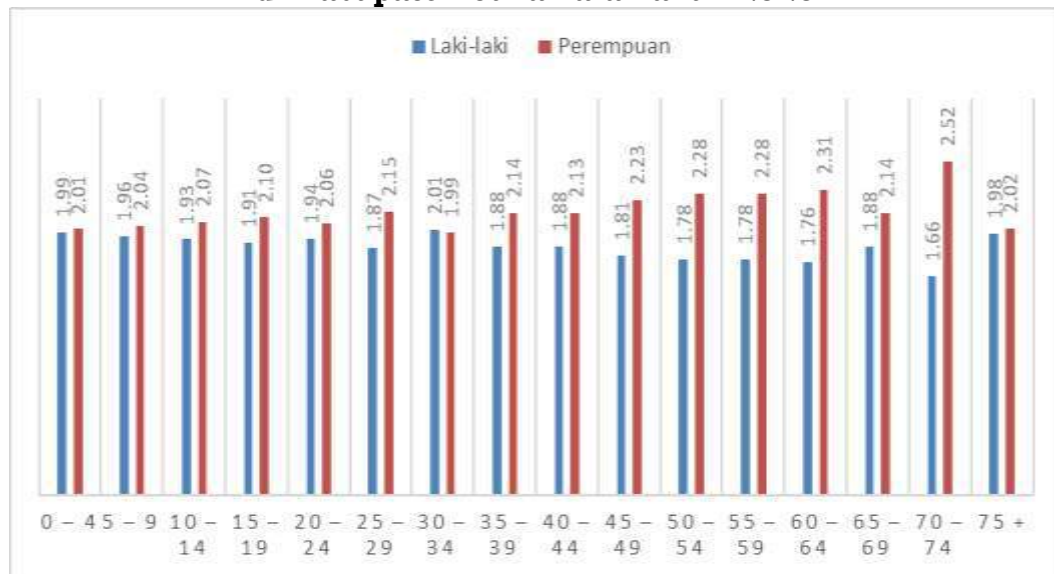
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	2 851	2 813	5 664
5 - 9	2 653	2 551	5 204
10 - 14	2 791	2 608	5 399
15 - 19	2 943	2 675	5 618
20 - 24	2 945	2 779	5 724
25 - 29	3 022	2 639	5 661
30 - 34	2 938	2 971	5 909
35 - 39	3 050	2 680	5 730
40 - 44	2 675	2 359	5 034
45 - 49	2 312	1 874	4 186
50 - 54	1 801	1 410	3 211
55 - 59	1 322	1 035	2 357
60 - 64	881	673	1 554
65 - 69	521	459	980



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
70 – 74	364	239	603
75 +	318	312	630
Jumlah	33 387	30 077	63 464

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021.

Gambar 2.11.
Proporsi Penduduk menurut Umur serta Jenis Kelamin
di Kabupaten Sukamara Tahun 2020



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2019.

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, penduduk dengan umur 0-4 tahun atau balita memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 10,15 persen. Proporsi penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk dengan usia di bawah 15 tahun mencapai 28,70 persen sehingga proporsi penduduk usia kerja adalah 71,30 persen.

Tabel 2.12.
Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur
di Kabupaten Sukamara Tahun 2020

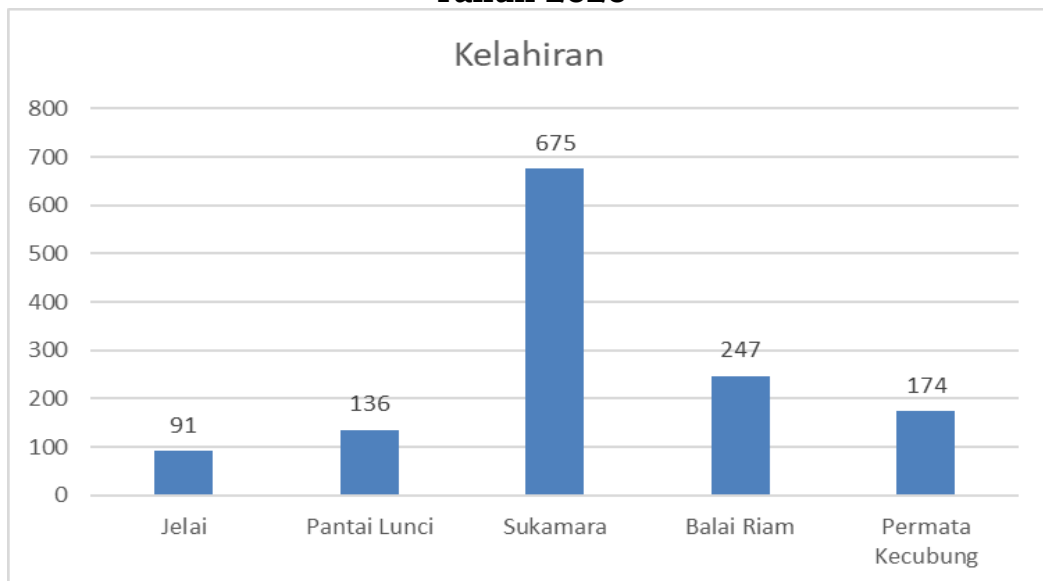
Kelompok Umur/Tahun	Jumlah	Presntase (%)
15 – 19	5618	12,49
20 – 24	5724	12,72
25 – 29	5661	12,58
30 – 34	5909	13,14
35 – 39	5730	12,74

40 – 44	5034	11,19
45 – 49	4186	9,31
50 – 54	3211	7,14
55 – 59	2357	5,24
60+	1554	3,45
Jumlah	44984	100

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara dipengaruhi oleh angka kelahiran yang lebih besar dari pada jumlah kematian. Angka kelahiran yang terregistrasi ditunjukkan oleh Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.12.
Angka Kelahiran menurut Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021.

Penduduk di Kabupaten Sukamara tersebar di lima wilayah Kecamatan. Perkembangan jumlah penduduk di 5 (lima) wilayah terlihat pada Tabel 2.10. Distribusi penduduk menurut Kecamatan bervariasi dari yang terendah sebesar 5.520 di Kecamatan Jelai hingga yang tertinggi sebesar 32.690 Kecamatan Sukamara.



Sebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk berdasarkan Sebaran Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020

Kecamatan	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
Jelai	5124	8.92	5349	8.95	5479	8.83	5930	9.13	5520	8,70
Pantai Lunci	5727	9.97	5875	9.83	6018	9.70	6190	9.53	5867	9,24
Sukamara	26069	45.41	27264	45.61	28467	45.88	32690	50.33	30893	48,68
Balai Riam	8334	14.52	8632	14.44	8929	14.39	10860	16.72	10624	16,74
Permata Kecubung	12160	21.18	12655	21.17	13151	21.20	9280	14.29	10560	16,64
Kabupaten Sukamara	57414	100.00	59775	100.00	62044	100.00	64950	100.00	63464	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2019, 2020 dan 2021.

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Berdasarkan tabel tersebut di atas, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sukamara sebesar 27 jiwa/Km². sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci yaitu 7 jiwa/Km².

Tabel 2.14.
Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2017-2020 (jiwa/km²)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km/jiwa)			
	2017	2018	2019	2020
Jelai	7	7	7	7
Pantai Lunci	7	7	8	7
Sukamara	27	28	32	30
Balai Riam	16	17	20	20
Permata Kecubung	19	20	14	16
Kab. Sukamara	16	16	17	17

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018, 2019, 2020.



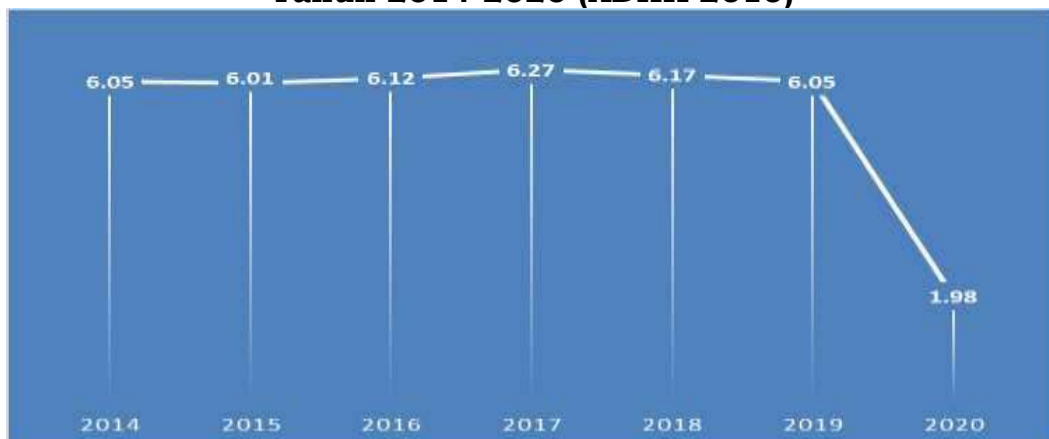
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Sukamara tumbuh sebesar 6,05 persen pada Tahun 2014 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 6,01 persen. Pada tahun 2015-2017 pertumbuhan ekonomi meningkat secara konsisten hingga tahun 2017 mencapai 6,27 persen. Namun mulai tahun 2017 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga mencapai 6,05 persen di tahun 2019. Sebenarnya angka pertumbuhan di tahun 2019 tersebut masih tergolong tinggi secara nasional.

Gambar 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara
Tahun 2014-2020 (ADHK 2010)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021.

Bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara masih lebih baik. Dari seluruh daerah di Kalimantan Tengah yang berjumlah 14, hanya terdapat 5 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Sukamara di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kuat.



Tabel 2.15.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se-Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2020 (%)

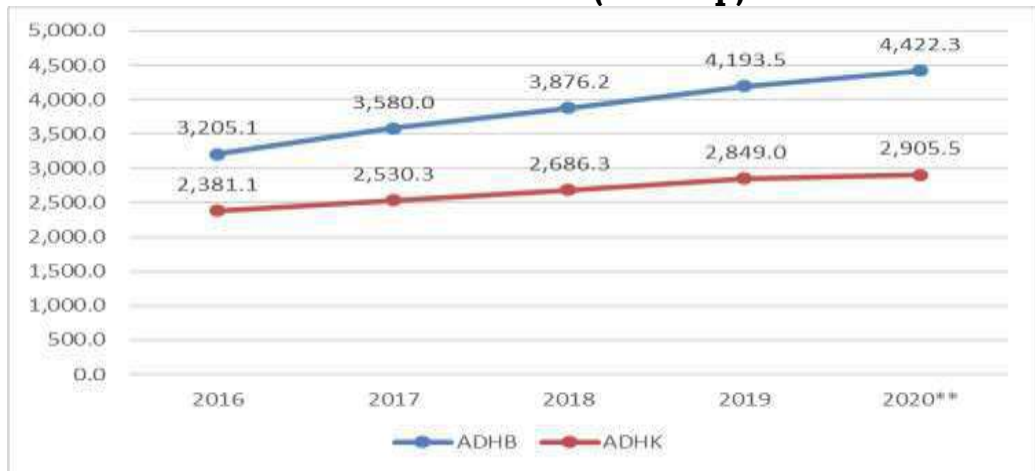
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kotawaringin Barat	5,85	6,8	6,48	5,79	0,98
2. Kotawaringin Timur	7,93	7,94	6,92	7,13	-3,09
3. K a p u a s	7,29	7,62	7,01	7,16	-1,04
4. Barito Selatan	5,63	5,44	5,12	4,96	-2,91
5. Barito Utara	5,48	6,01	5,95	5,42	-2,24
6. Sukamara	6,12	6,27	6,17	6,05	1,98
7. Lamandau	6,69	6,7	6,85	6,87	1,85
8. Seruyan	5,12	5,18	5,21	5,09	-2,23
9. Katingan	6,54	6,56	6,59	5,81	-3,25
10. Pulang Pisau	6,06	5,83	5,94	6,37	2,72
11. Gunung Mas	7	6,63	6,87	7,21	3,36
12. Barito Timur	5,5	5,98	5,71	5,45	-2,73
13. Murung Raya	5,76	5,87	5,61	5,94	-2,48
14. Palangka Raya	6,92	6,99	7,14	7,17	-2,67

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Sukamara terlihat juga dari perkembangan PDRB selama 2014-2020. Selama 2014-2020 PDRB Kabupaten Sukamara menunjukkan tren yang terus meningkat, khususnya PDRB ADHB. Selama periode tersebut jarak antara PDRB ADHB dengan ADHK semakin melebar. Tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukamara mengalami percepatan dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara berada pada angka 1,98 persen.



Gambar 2.14.
Perkembangan PDRB Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020
ADHB dan ADHK (Juta Rp)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara Tahun 2021.

Laju inflasi Kabupaten Sukamara menggunakan proxy hasil survei inflasi Kota Sampit yang merupakan daerah terdekat, mengingat BPS baru melaksanakan kajian di dua kota di Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Selama periode 2011-2018 inflasi tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,90 persen dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,46 persen. Tahun 2017 inflasi kembali naik menjadi 3,29 persen dan akhirnya di tahun 2018 inflasi naik tajam menjadi 6,02 persen.

Gambar 2.15.
Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Sukamara Periode 2016-2020
dengan Menggunakan Proxy



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020.



Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Kabupaten Sukamara setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi di tahun 2018 adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sedangkan yang menyumbang relatif kecil adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Fluktuasi laju inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian regional, nasional, dan global.

Bila inflasi di Kabupaten Sukamara dihitung dengan menggunakan pendekatan PDB (PDRB) deflator, maka akan diperoleh informasi secara sektoral. Berdasarkan pendekatan ini inflasi tahun 2018 adalah sebesar 1,99 persen sedangkan tahun 2019 adalah sebesar 2,01 persen. Tahun 2020 inflasi naik menjadi 3.40 persen. Penyumbang inflasi terbesar secara sektoral adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pendekatan PDRB deflator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa sementara Indeks Harga Konsumen yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. PDRB deflator juga dipergunakan sebagai proxy dalam hal informasi Indeks Harga Konsumen belum tersedia.

Tabel 2.16.
Inflasi Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2020
dengan Pendekatan PDRB Deflator

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,00	0,73	3,26	4,21	-1,32	0,67	8,31
Pertambangan dan Penggalian	5,06	4,98	6,13	2,52	2,24	3,06	0,60
Industri Pengolahan	5,36	3,44	5,58	5,34	-1,81	-0,53	2,21
Pengadaan Listrik dan Gas	5,73	21,97	5,02	8,76	5,95	4,35	0,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,59	8,75	4,33	5,44	4,10	5,70	1,61



Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konstruksi	4,59	6,39	5,48	6,11	7,56	3,16	1,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,87	7,78	5,83	6,12	6,13	4,25	0,10
Transportasi dan Pergudangan	9,20	7,20	6,45	5,95	6,17	4,75	1,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,73	6,46	6,52	6,53	4,84	5,21	1,51
Informasi dan Komunikasi	4,54	4,56	2,34	3,84	5,28	3,54	1,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,52	3,87	3,32	4,02	4,18	1,84	1,39
Real Estate	4,77	8,19	9,17	7,72	8,47	3,16	1,27
Jasa Perusahaan	6,06	5,70	4,21	4,15	5,06	2,94	0,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	3,60	3,21	4,48	6,07	4,77	1,03
Jasa Pendidikan	4,23	8,82	5,76	5,52	5,55	5,20	0,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,82	6,55	5,07	5,51	6,13	5,83	1,79
Jasa lainnya	5,32	8,52	4,15	4,96	5,54	4,83	1,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,73	3,88	4,70	5,11	1,99	2,01	3,40

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, Tahun 2021, diolah.

Struktur perekonomian dapat di lihat dari distribusi masing-masing sektor yang didasarkan pada nilai nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Sukamara. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Struktur perekonomian Kabupaten Sukamara pada Tahun 2019, bila di lihat dari kontribusinya pada PDRB (atas dasar harga berlaku), didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 30,38 persen. Sektor Industri dan Pengolahan sebesar 21,79 persen; Sektor Perdagangan sekitar 14,59 persen. Ini menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Sukamara masih mengarah kepada sektor primer dan sekunder yaitu sektor pertanian, pengolahan dan perdagangan.

Selama 2015-2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren yang terus menurun dari 33,03 persen di tahun 2015 menjadi 30,38 persen di tahun 2019. Di sisi lain kontribusi sektor perdagangan menunjukkan tren yang



menaik sedangkan sektor industri manufaktur selaman 2015-2019 cenderung konstan atau tetap.

Beberapa sektor selama 2015-2019 memiliki kontribusi yang kecil yaitu di bawah 1 persen yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor jasa perusahaan, serta sektor jasa lainnya.

Tabel 2.17.
Distribusi Persentase PDRB di Kabupaten Sukamara menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2020

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.03	32.28	31.73	30.67	30.39	32,06
B	Pertambangan dan Penggalian	0.97	0.97	0.93	0.92	0.91	0,83
C	Industri Pengolahan	22.60	22.90	23.26	22.37	21.79	21,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0,01
F	Konstruksi	9.14	9.13	9.17	9.49	9.66	8,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.09	13.32	13.55	14.36	14.59	14,14
H	Transportasi dan Pergudangan	2.39	2.45	2.50	2.62	2.68	2,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.13	1.15	1.16	1.21	1.25	1,17
J	Informasi dan Komunikasi	1.25	1.24	1.21	1.24	1.26	1,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.90	1.90	1.85	1.86	1.82	1,82
L	Real Estate	1.29	1.37	1.41	1.51	1.51	1,45
M,N	Jasa Perusahaan	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.11	6.07	6.04	6.33	6.50	6,30
P	Jasa Pendidikan	4.59	4.67	4.63	4.80	4.95	4,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.75	1.79	1.80	1.86	1.91	1,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.70	0.68	0.67	0.69	0.70	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

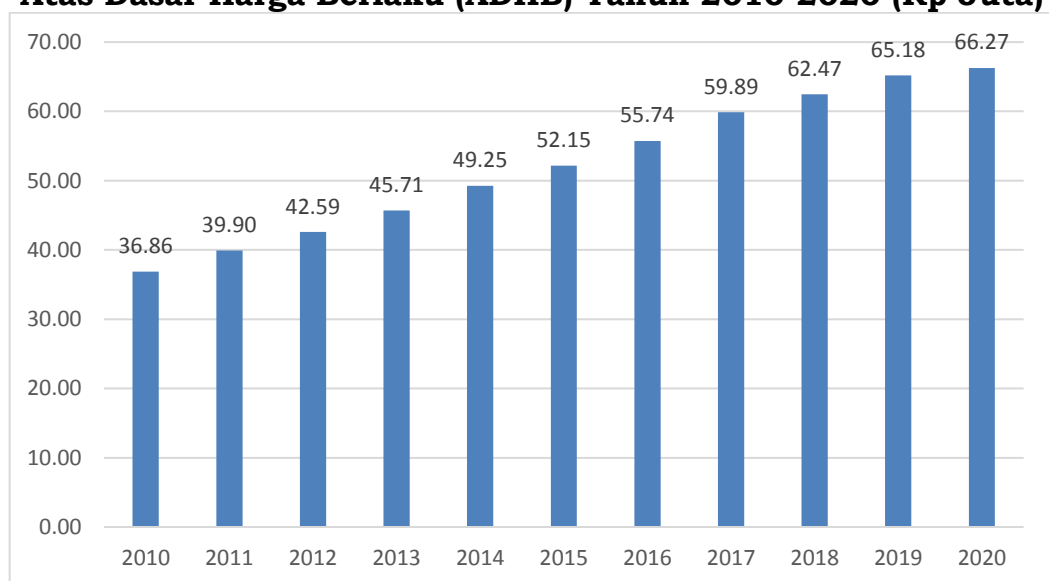
Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021.

Indikator lain yang berkaitan dengan PDRB adalah PDRB perkapita. PDRB per kapita Kabupaten Sukamara atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 mencapai Rp65,18 juta atau meningkat



4,02 persen dibanding Tahun 2018 yang besarnya Rp62,66 juta dan di tahun 2020 PDRB perkapita naik lagi menjadi Rp66,27 juta atau naik hanya 1,67 persen dibanding tahun 2019. PDRB perkapita adalah PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun yang menggambarkan pendapatan perkapita per orang selama satu tahun.

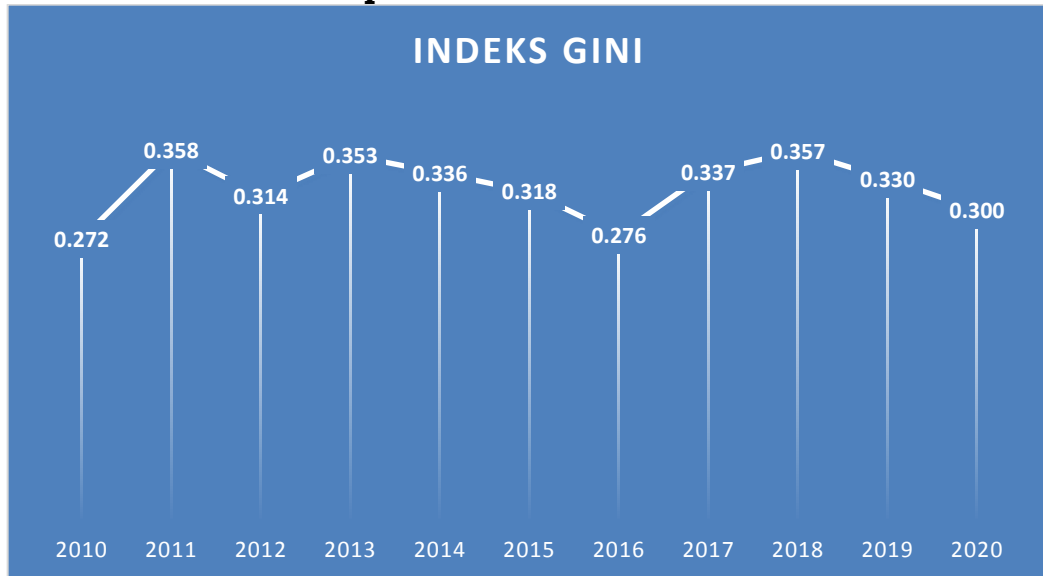
Gambar 2.16.
PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2020 (Rp Juta)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021, diolah.

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*). Gini ratio Kabupaten Sukamara pada periode 2013-2016 menunjukkan tren yang menurun, namun pada periode 2016-2018 memiliki tren yang meningkat. Pada periode 2018-2020 nilai Gini Ratio Kembali menunjukkan tren yang menurun hingga mencapai 0,300 di tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sukamara mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sisi distribusi pendapatan.

Gambar 2.17.
Gini Ratio Kabupaten Sukamara Periode 2010-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

Dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah, kondisi Gini ratio Kabupaten Sukamara relative rendah. Sukamara masuk peringkat ke-7 terendah pada tahun 2020. Gini Ratio Kabupaten Sukamara masih jauh lebih rendah dibandingkan Gini ratio Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.18
Perbandingan Gini Ratio se Kalimantan Tengah, 2010-2020

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Tengah	0,311	0,334	0,329	0,345	0,352	0,326	0,330	0,343	0,342	0,336	0,329
Kotawaringin Barat	0,279	0,347	0,284	0,355	0,365	0,309	0,309	0,309	0,306	0,308	0,333
Kotawaringin Timur	0,280	0,270	0,337	0,296	0,339	0,280	0,323	0,349	0,335	0,299	0,323
Kapuas	0,331	0,349	0,315	0,318	0,307	0,302	0,327	0,310	0,328	0,344	0,316
Barito Selatan	0,292	0,440	0,292	0,297	0,314	0,292	0,305	0,326	0,322	0,297	0,313
Barito Utara	0,274	0,266	0,255	0,288	0,333	0,340	0,314	0,317	0,314	0,309	0,337
Sukamara	0,272	0,358	0,314	0,353	0,336	0,318	0,276	0,337	0,357	0,330	0,300
Lamandau	0,275	0,329	0,301	0,288	0,325	0,327	0,347	0,314	0,303	0,280	0,296
Seruyan	0,302	0,290	0,263	0,297	0,300	0,292	0,314	0,288	0,280	0,289	0,260
Katingan	0,350	0,314	0,315	0,365	0,311	0,257	0,253	0,266	0,301	0,274	0,252
Pulang Pisau	0,299	0,310	0,269	0,268	0,252	0,365	0,340	0,295	0,266	0,357	0,302
Gunung Mas	0,293	0,225	0,275	0,251	0,260	0,242	0,270	0,296	0,309	0,302	0,279
Barito Timur	0,309	0,249	0,315	0,284	0,323	0,382	0,327	0,307	0,317	0,339	0,333



Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Murung Raya	0,276	0,271	0,280	0,318	0,333	0,297	0,328	0,303	0,320	0,309	0,280
Palangka Raya	0,331	0,321	0,331	0,362	0,365	0,338	0,330	0,379	0,366	0,357	0,340

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan ekonomi diukur dari jumlah penduduk miskin. Dilihat dari indikator kemiskinan, tingkat kemiskinan Kabupaten Sukamara pada Tahun 2010 tercatat 6,63 persen dan tahun 2019 turun cukup tajam hanya sebesar 3,16 persen. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sukamara tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 4,98 persen. Kabupaten Sukamara menduduki peringkat kedua dalam hal tingkat kemiskinan terendah di seluruh daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2.18
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara
Tahun 2010-2020

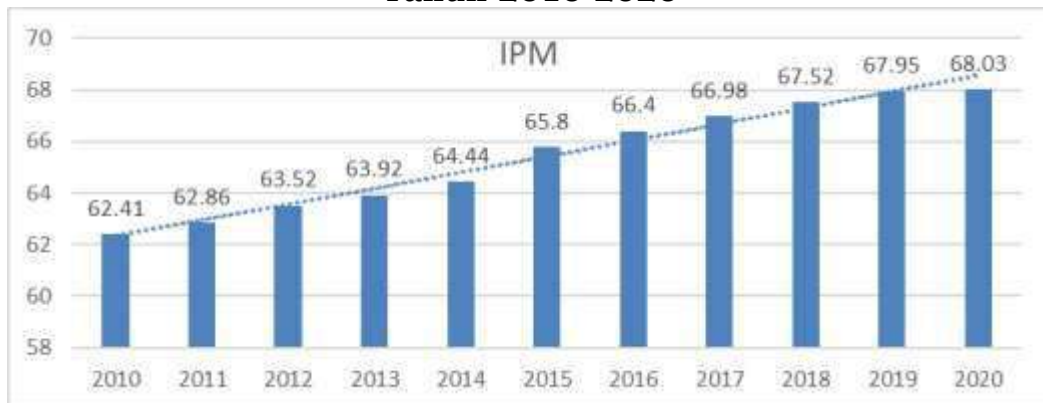


Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020, IPM Kabupaten Sukamara menunjukkan peningkatan, yakni dari 62,41 pada Tahun 2010 meningkat menjadi 68,03 pada Tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sukamara telah berupaya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Bila dibandingkan dengan IPM provinsi Kalimantan Tengah yang besarnya 71,05 IPM Sukamara tahun 2020 masih cukup jauh. IPM Sukamara masih peringkat ke 3 terendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah.

Gambar 2.19.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sukamara
Tahun 2010-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

IPM terbentuk dari 4 indikator, yaitu umur harapan hidup (UHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), serta pengeluaran perkapita. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sukamara yang merupakan salah satu komponen IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. UHH pada



Tahun 2010 tercatat 70,82 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi 71,53. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Untuk rata-rata lama sekolah pada Tahun 2010 adalah 6,62 tahun dan pada tahun 2020 naik menjadi menjadi 8,01. Untuk harapan lama sekolah pada tahun 2010 sebesar 10,56 dan tahun 2020 naik menjadi 12,12.

Dalam hal indikator pengeluaran perkapita per tahun, tahun 2010 sebesar Rp 7.293.000 dan meningkat menjadi Rp 8.674.000 di tahun 2020. Peningkatan ini juga menggambarkan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukamara.

Tabel 2.19.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sukamara 2010-2020

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
UHH	Tahun	70.82	70.92	71.02	71.1	71.19	71.24	71.32	71.41	71.45	71.49	71,53
RLS	Tahun	6.62	6.67	7.04	7.21	7.3	7.81	7.82	7.83	7.84	7.91	8,01
HLS	Tahun	10.56	10.59	10.69	10.79	11.09	11.55	11.97	11.98	12.1	12.11	12,12
Pengeluaran Perkapita	ribuan/ orang/ tahun	7293	7498	7522	7545	7568	7709	7792	8177	8482	8738	8674

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021.

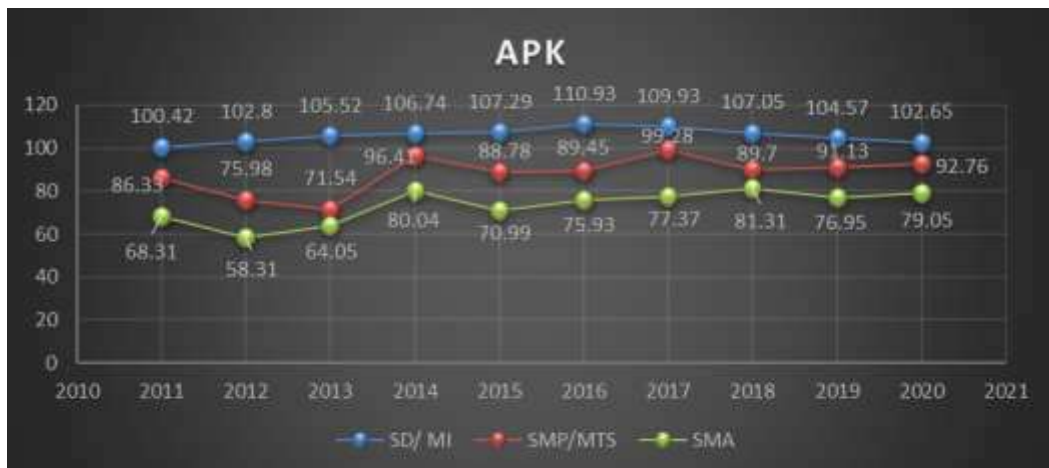
Data tentang Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa selama 2011-2020 cenderung konstan. APM adalah anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya, misal APM SD/MI berarti anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Pada tahun 2011 APM SD sebesar 96,83 yang berarti dari penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI sebanyak 96,83 %. APM pada tahun 2019 adalah sebesar 94,91. APM SD/MI di tahun 2019 ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang besarnya 93,53.

APM untuk jenjang SMP/MTs terlihat lebih rendah dibandingkan dengan APM SD/MI selama periode 2011-2019 namun memiliki tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2011 APM SMP/MTs sebesar 67,07 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 73,45. Usia SMP/MTs adalah penduduk usia 13-15 tahun.

Dari sisi APK, nilai untuk APK baik SD/MI maupun SMP/MTs terlihat lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena APK menghitung semua penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat umur, sehingga nilai APK dimungkinkan lebih dari 100. APK untuk SD/MI pada tahun 2011 sebesar 100,42 yang berarti ada 18,24 persen penduduk yang berusia selain 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Tahun 2020 APK untuk SD/MI adalah 102,65. Sementara itu APK untuk SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 86,33 dan pada tahun 2020 naik cukup tajam menjadi 92,76.

Gambar 2.20.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sukamara
Tahun 2011-2020





Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2011-2021.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada SD/MI/Paket A juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. APS SD/MI/Paket A pada Tahun 2018 sebesar 97,71, naik menjadi 99,59 pada Tahun 2020. APS SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2018 sebesar 87,10, naik menjadi 87,67 persen pada Tahun 2020.

Aspek kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan +/- Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Ratio (IMR) pada tahun 2018 sebanyak 12 namun pada tahun 2019 turun drastis menjadi 2. Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2018 mencapai 0,09 kasus sementara pada Tahun 2019 AKI turun menjadi 0 kasus.

Capaian indikator sosial hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.20.
Capaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Cakupan potensi masyarakat yang menerima bantuan sosial (jiwa)	10.586	11.549	10.586	11.549
		Penyaluran BPNT-Sembako	-	1.321	-	-
		Penyaluran BST PUSAT	-	2.644	-	-



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
		Penyaluran BST PROV	-	3.552	-	-
		Penyaluran Bantuan Beras	-	846	-	-
		Penyaluran Paket Sembako	-	1.742	-	-
		Jumlah pasangan pengantin yang mengikuti Sidang Isbat/Nikah Massal	-	-	-	-
2.	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan (%)	-	94,31	-	94,31
		Jumlah Penyandang Penyakit Kejiwaan yang memperoleh layanan (orang)	-	2	-	-
		Jumlah LANSIA yang mendapatkan pelayanan (Orang)	-	40	-	-
		Persentase LANSIA yang mendapatkan pelayanan (%)	-	23,39	-	-
3.	Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan dan penanganan (%)	100	100	100	100
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah PKH (KPM)	-	961	-	-
		Persentase masyarakat penerima BPJS- (KIS) (%)	-	-	-	-
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100
6.	Terlaksananya Antisipasi dan Bantuan Sosial Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kampung siaga bencana (keg.)	-	1	-	-
		Kegiatan pelatihan Tagana (Keg.)	-	1	-	-
		Jumlah kejadian bencana (kej.)	-	8	-	-
		Jumlah korban penerima bantuan (KK)	-	7	-	-

Sumber: LPPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020.

2.2.3. Seni Budaya dan Pariwisata

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan keragaman budaya mengingat Kabupaten Sukamara mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah terselenggara di Kabupaten Sukamara antara lain



Marawis dan Qassidah Tingkat Kabupaten Sukamara.

Jumlah kelompok seni budaya di Kabupaten Sukamara pada tahun 2018 mencapai 20 dan pada tahun 2019 naik menjadi 25 kelompok. Seni budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sukamara Tahun dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Seni Budaya yang masih dilestarikan di Kabupaten Sukamara
Tahun 2017

Budaya/Adat/ Cultures/Traditions	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
Kehamilan	Mandi Bunting
Kelahiran	Meayun Anak
Perkawinan	Pantun, Seloka, Begondang
Beladiri	Pencak Silat
Tarian	Barongsai, Tari Pesisir/Japen

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018.

Di bidang pariwisata, pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sukamara menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan. Permasalahan urusan Pariwisata: 1) Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang; 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang; 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal; 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal; 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

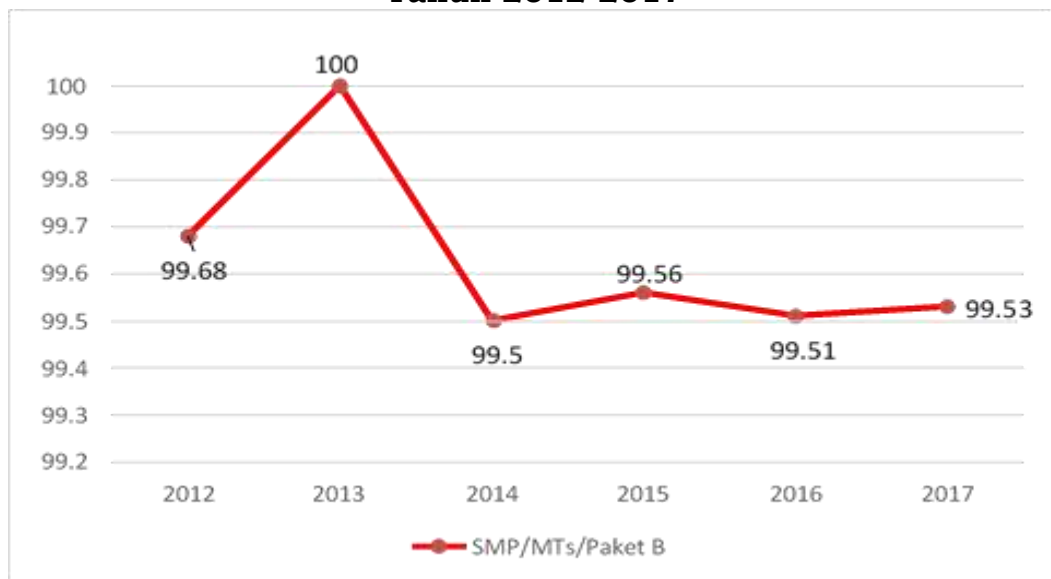


2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Kabupaten Sukamara salah satunya ditunjukkan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Angka kelulusan siswa tingkat SD di Kabupaten Sukamara 100 persen dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017. Persentase kelulusan siswa tingkat SMP menurun dari 99,68 persen pada Tahun 2012, menjadi 99,53 persen pada Tahun 2017.

Gambar 2.21.
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B
di Kabupaten Sukamara
Tahun 2012-2017



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2018.

Sampai dengan Tahun 2021, Kabupaten Sukamara memiliki jumlah SD dan MI sebanyak 50, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 16 unit, SMA/MA sebanyak 5 unit, serta SMK sebanyak 3 unit. Untuk lembaga



pendidikan informal lainnya, Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 41 unit. Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sukamara saat ini hanya mengandalkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan BOP melalui dana APBD, untuk menaikkan persentase angka partisipasi sekolah serta menurunkan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan antara lain berkaitan dengan upaya peningkatan prasarana dan sarana pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan optimal.

Tabel 2.22.
Rasio Murid Terhadap Guru menurut Jenis Sekolah
di Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No	Sekolah	Σ Sekolah	Σ Murid	Σ Guru	Rasio Murid terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	TK/RA	749	1.821	159	14
2	SD/MI	52	6.380	622	13
3	SMP/MTs	20	2.754	309	11
4	SMA/MA	8	1.600	164	13
5	SMK	3	821	75	10

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka Tahun 2021.

Berdasarkan tinjauan kualifikasi guru, dari aspek pendidikan tertinggi yang ditamatkan, hampir semua guru memiliki pendidikan tertinggi minimal S1/D4, kecuali untuk PAUD yang hanya memiliki 45,5 persen guru berpendidikan S1/D4. Di sisi lain, dari aspek sertifikasi profesi, pada semua jenjang pendidikan guru yang sudah bersertifikasi profesi semuanya di bawah 50 persen. Hal ini tentu menjadi permasalahan bila dikaitkan dengan UU tentang guru dan dosen.



Gambar 2.22.
Kualifikasi Guru di Kabupaten Sukamara 2019/2020



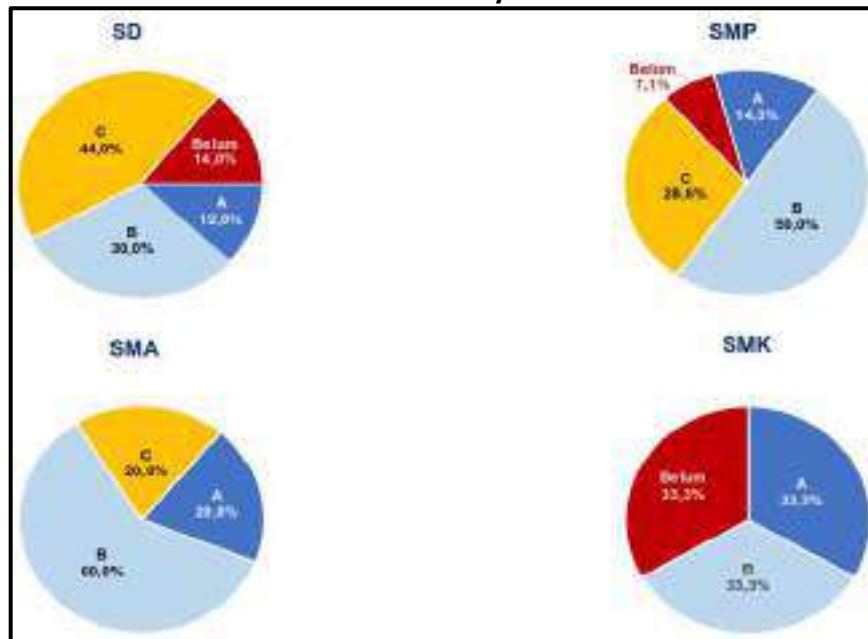
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud, 2021.

Dari sisi akreditasi sekolah, masih sedikit sekolah yang memiliki Akreditasi A di semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD, sekolah dengan akreditasi A baru mencapai 12 persen, bahkan masih lebih banyak sekolah yang belum terakreditasi, yang mencapai 14 persen. Pada jenjang SMP, 50 persen sekolah sudah memiliki akreditasi B dan 14 persen terakreditasi A sedangkan yang belum terakreditasi mencapai 7,1 persen. Untuk jenjang SMA, semua sekolah sudah terakreditasi dengan komposisi sebanyak 20 persen terakreditasi A, 60 persen terakreditasi B, dan 20 persen terakreditasi C. Untuk jenjang SMK, jumlah sekolah yang belum terakreditasi cukup besar yaitu 33,3 persen.

Kewenangan kabupaten/kota dalam Pendidikan hanyalah untuk jenjang PAUD, SD/ sederajat, serta SMP/ sederajat sedangkan SMA/ SMK/ sederajat merupakan kewenangan provinsi. Dengan demikian upaya perbaikan mutu pendidikan perlu difokuskan hingga jenjang SMP/ sederajat.



Gambar 2.23.
Jenjang Akreditasi Sekolah di Kabupaten Sukamara
Tahun 2019/2020



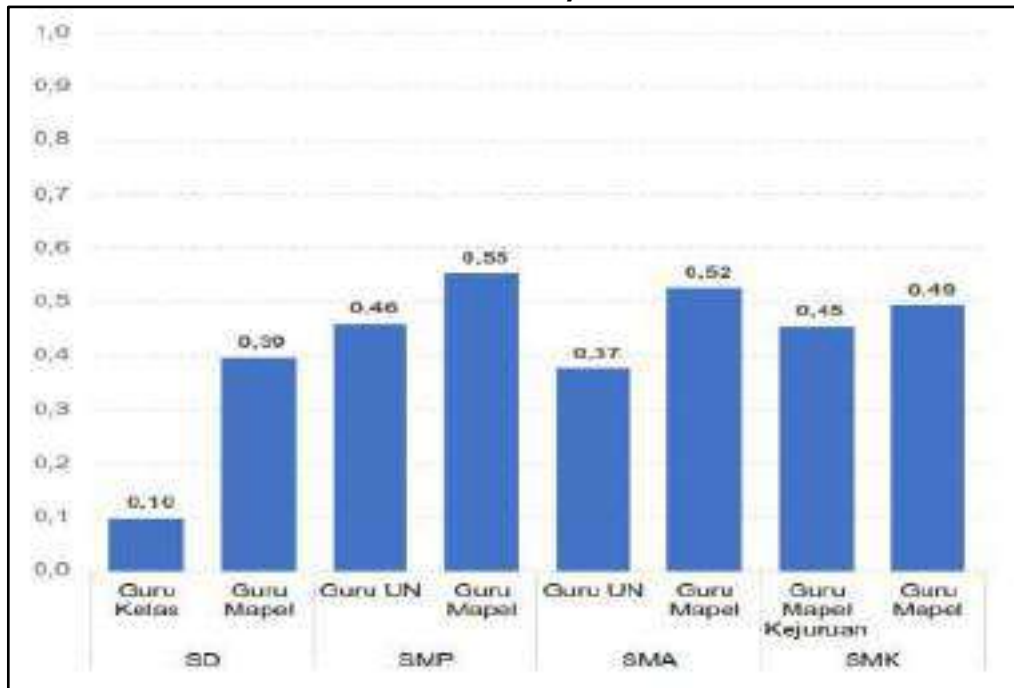
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud, 2021.

Pada aspek penyebaran guru khususnya guru PNS, terlihat derajat ketimpangannya cukup tinggi pada jenjang SD dan SMP. Berdasarkan nilai indeks pemerataan, jenjang SD memiliki indeks 0,1 untuk guru kelas yang artinya derajat penyebaran guru dari sisi jumlah sudah merata, namun indeks untuk guru mapel menunjukkan angka 0,39 yang artinya dari sisi kompetensi mata pelajaran belum merata.

Kondisi SMP terlihat lebih buruk lagi karena baik dari aspek guru kelas maupun guru mapel, nilai indeksnya cukup tinggi. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tidak merata penyebaran guru. Dengan demikian dari aspek ini masih terdapat permasalahan dalam hal penyebaran guru, khususnya untuk jenjang SMP.



Gambar 2.24.
Indeks Penyebaran Guru Kabupaten Sukamara
Tahun 2019/2020



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud, 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan pen di daerah kabupaten/kota. Koordinasi tersebut menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan minimal adalah meliputi (1) penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan (2) penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Untuk melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah, dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.



Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menerapkan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/35/2021 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukamara sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan SPM. Namun begitu, Pelayanan Dasar yang termuat di dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tetap dilaksanakan dan disampaikan kepada Gubernur yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Tabel 2.23.
Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya layanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang bermutu	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA (%)	47,85	84,47	47,85	84,47
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB / SPS / TPA / TK / RA) (%)	33,28	45,07	33,28	45,07
		Guru TK/RA berkualifikasi S1/D.IV (%)	29,00	54,27	29,00	54,27
		Guru TK/RA bersertifikasi (%)	5,20	9,15	5,20	9,15
		Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D.IV (%)	13,29	46,40	13,29	46,40
		Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi (%)	1,56	5,40	1,56	5,40
		Rasio lembaga PAUD dibanding Penduduk usia PAUD (0-6 tahun)	1 : 87	1 : 73	1 : 87	1 : 73
		Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun (%)	95,78	97,64	95,78	97,64
		2.	Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu	Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang usia 7 - 12 tahun (%)	99,80	91,96
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	109,19			93,88	109,19	93,88
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	90,83			86,64	90,83	86,64
Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang usia 13 - 15 tahun (%)	102,50			97,31	102,50	97,31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	93,90			81,90	93,90	81,90
Angka Partisipasi Murni	48,3			63,15	48,35	63,15



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
		(APM) SMP/MTs (%)				
		Rasio sekolah dibandingkan Jumlah penduduk Usia (7-12 tahun)	1 : 138	1 : 139	1 : 138	1 : 139
		Rasio sekolah dibandingkan Jumlah penduduk Usia (13-15 tahun)	1 : 144	1 : 141	1 : 144	1 : 141
		Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,12	0,13	0,12	0,13
		Angka Kelulusan SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Melanjutkan SD/MI (%)	94,69	89,13	94,69	89,13
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,12	0,13	0,12	0,13
		Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka melanjutkan SMP/MTs (%)	94,69	89,13	94,69	89,13
		Guru SD/MI berkualifikasi S1/D.IV	90,01	93,81	90,01	93,81
		Guru SD/MI bersertifikasi (%)	18,77	30,78	18,77	30,78
		Rasio guru dibandingkan Murid SD/MI	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11
		Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D.IV	96,87	93,21	96,87	93,21
		Guru SMP/MTs bersertifikasi (%)	12,90	22,01	12,90	22,01
		Rasio guru dibandingkan Murid SMP/MTs	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8

Sumber: LPPD Kabupaten Sukamara 2020.

Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk tahun 2020 adalah 83,90%, hal ini berdasarkan data Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 422 orang dibagi dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten yaitu 503 orang.

Data tersebut merupakan Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten adalah total jumlah Anak Usia 7-18 Tahun yang sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan ditambah dengan Jumlah Anak



Usia 7-18 Tahun yang sedang belajar di Satuan Pendidikan Formal. Berikut adalah table Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk Tahun 2020.

Tabel 2.24.
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Satuan
1	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	1	unit
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	422	orang siswa
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	422	orang siswa
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	151	orang guru
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	172	orang guru
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	164	orang guru

Sumber : LPPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020

Tabel 2.25.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No.	Indikator Kinerja	Target				Capaian Kinerja			
		Perjanjian Kinerja		RPJMD		Perjanjian Kinerja		RPJMD	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun (%)	98,15	97,70	98,15	97,70	95,78	97,64	95,78	97,64

Sumber : LPPD Kabupaten Sukamara Tahun 2020

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat PKBM adalah



lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan Non Formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara. Di Kabupaten Sukamara sampai dengan Tahun 2020 terdapat 4 (empat) PKBM yaitu PKBM Bahaum Janga, PKBM Karya Baru, PKBM Teratai, dan PKBM Berlian Mandiri 2.

Tabel 2.26
Data Jumlah Murid dan Jumlah Tenaga Pendidik yang terdapat dalam PKBM di Kabupaten Sukamara tahun 2020 dan 2021

No.	Nama Sekolah	Jumlah Murid		Jumlah Guru	
		2020	2021	2020	2021
1.	PKBM Bahaum Janga	109	104	4	8
2.	PKBM Karya Baru	195	77	22	19
3.	PKBM Teratai	0	0	0	0
4.	PKBM Berlian Mandiri 2	31	31	2	2

Sumber data Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara

Strategi dan Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pencapaian target SPM Pendidikan Kesetaraan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
2. Peningkatan peran dan fungsi lembaga pendidikan informal,
3. Publikasi Pendidikan non formal,
4. Meningkatkan Angka Melek Huruf dengan meningkatkan kualitas dan akses pembelajaran keaksaraan fungsional dasar bekerjasama dengan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan formal.

2.3.2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun telah menunjukkan pencapaian



yang positif. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 2.27
Capaian Indikator SPM Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No	Indikator SPM	Standar SPM (%)	Hasil Capaian 2020
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	86
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	78
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	91
4	Pelayanan kesehatan balita	100	67
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	45
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	37
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	83
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	48
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	58
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	90
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	60
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.

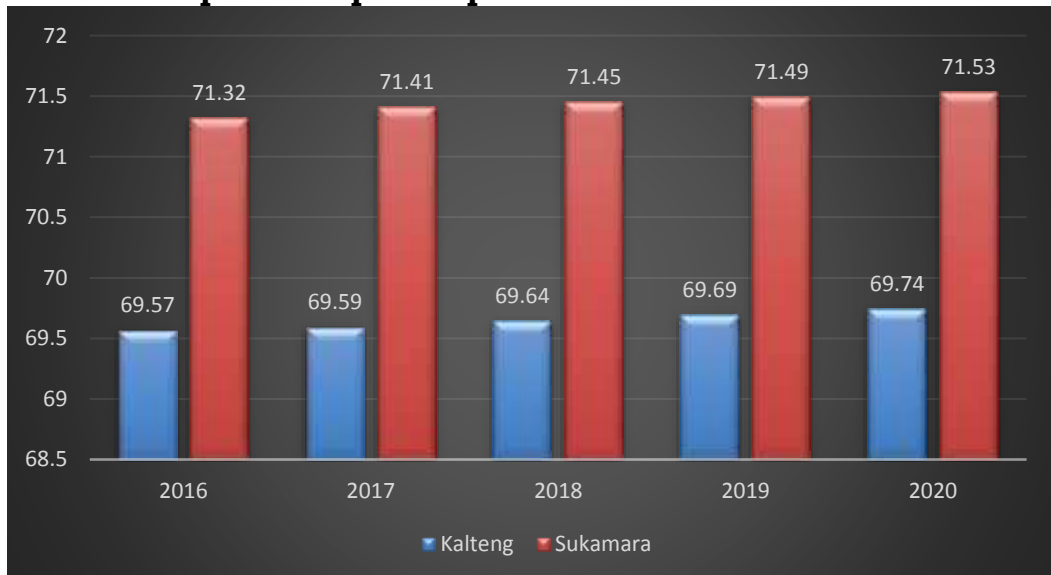
Selain penyelenggaraan kinerja yang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal, beberapa indikator dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain: Indeks Pembangunan Manusia, Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian (mortalitas), Morbiditas, Status Gizi Masyarakat, dan lain-lain.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi. Kemampuan untuk mendapatkan

pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan berpenghasilan yang memadai akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat ini diperoleh melalui survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Umur harapan hidup yang dihitung untuk Kabupaten Sukamara dari tahun 2010-2019 mengalami perubahan yang signifikan.

Gambar 2.25.
Umur Harapan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Gambar di atas memperlihatkan keadaan yang terus mengalami perubahan yang konsisten terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) sampai tahun 2020 yang nilai UHH Kabupaten Sukamara lebih tinggi dibandingkan provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 2016-2020. Perubahan UHH tersebut menunjukkan terjadinya perbaikan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukamara, selain itu peningkatan ini

juga menunjukkan bahwa penduduk usia lanjut semakin banyak. Untuk itu, pemerintah harus lebih waspada untuk mengantisipasi perawatan dan pengobatan penduduk usia lanjut.

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar, yang berperan terhadap mutu pelayanan kebidanan. Angka kematian bayi dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat karena kelompok ini rentan terhadap masalah kesehatan terutama terhadap paparan lingkungan sekitar. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatannya.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal (berumur kurang dari 1 tahun) dalam wilayah dan kurun waktu tertentu setiap 1.000 Kelahiran Hidup (KH).

Gambar 2.26.
Grafik Jumlah Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2019



Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2020.

Tren jumlah kematian bayi di Kabupaten Sukamara tahun



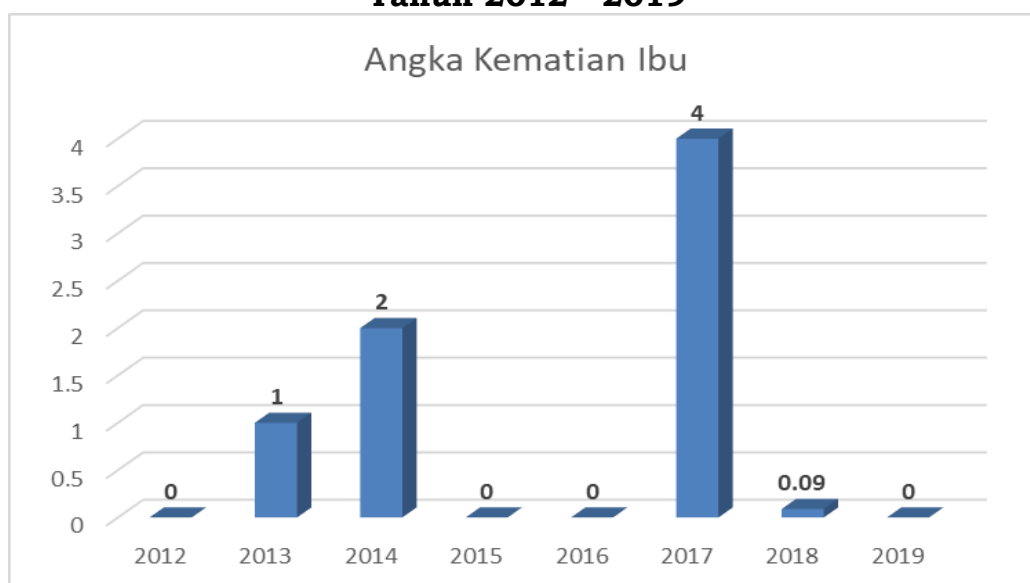
2012-2019 terlihat pada gambar di atas. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Sukamara meningkat sebanyak 13 bayi dengan 1.277 kelahiran hidup artinya AKB Kabupaten Sukamara turun dari 10 per 1.000 KH pada tahun 2017 dari sebelumnya 22 per 1.000 KH pada tahun 2016. Tahun 2018 AKB sedikit mengalami kenaikan menjadi 12, namun di tahun 2019 turun drastis menjadi hanya 2. Menurut WHO, Angka Kematian Bayi (AKB) di dunia saat ini adalah sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup dan AKB di *Sout East Asia Region* (SEAR) adalah sebesar 39 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya salah satu indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan di Kabupaten Sukamara adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, nifas, disuatu wilayah pada setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikan indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kabupaten Sukamara pada tahun 2017 terjadi 4 kasus Kematian Ibu dan jika dihitung maka Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini sebesar 313 per 100.000 Kelahiran Hidup.



Gambar 2.27.
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sukamara
Tahun 2012 - 2019



Sumber: BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2020.

Tahun 2017 di Kabupaten Sukamara merupakan tahun dengan kasus AKI tertinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara secara konsisten selalu berusaha menekan angka kematian bayi, balita dan ibu melalui program penyuluhan ibu hamil, kelas ibu hamil, pelatihan bidan dan kader kesehatan serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan terhadap manajemen ibu dan balita yang mengalami masalah kesehatan. Pemanfaatan dana BOK dan JAMPERSAL diharapkan dapat membantu penurunan Angka Kematian Ibu di Sukamara. Upaya ini membuahkan hasil dengan nilai AKI 0,09 di tahun 2018 dan 0 kasus di tahun 2019.

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait. Masalah gizi merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan generasi



penerus bangsa. Khusus pada balita pemantauan status gizinya dapat dilakukan melalui Program POSYANDU yang melibatkan peran serta masyarakat di daerah. Kekurangan gizi pada usia balita dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, kecerdasan dan bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya kematian.

Pada tahun 2017 jumlah balita yang ditimbang di Sukamara ada 3.545 orang dari seluruh balita yang menjadi sasaran kegiatan. Dari jumlah 3.545 orang balita yang ditimbang tersebut, pada tahun 2017 terdapat 1 balita dengan kasus gizi buruk yaitu terdapat di Kecamatan Sukamara dan telah mendapatkan perawatan oleh tim medis Puskesmas di daerahnya. Tahun 2018, terdapat 0 kasus balita gizi buruk, namun di tahun 2019 terdapat 3 persen kasus balita gizi buruk. Gizi buruk ini membawa dampak pada permasalahan stunting. Angka stunting Kabupaten Sukamara tahun 2020 cukup tinggi yaitu 13,08 persen (*sumber data: EPPBGM Kab. Sukamara*), sementara secara nasional ada diangka 23 persen. Stunting adalah dimana anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, sehingga berakhir pada kondisi kecebolan. Hal tersebut dinilai dapat menghilangkan generasi. Untuk mengatasai hal tersebut ada 11 dinas yang terlibat dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Sukamara, diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, PUPR-Perkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat menjadi jaminan semakin membaiknya taraf kesehatan masyarakat. Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, apotek, dan posyandu. Berdasarkan data Tahun 2017, kapasitas tempat



tidur di RSUD Kabupaten Sukamara sebanyak 78 tempat tidur. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai Tahun 2017 mencapai 5 unit Puskesmas Kecamatan dan 27 unit Puskesmas Pembantu. Hingga Tahun 2017. Dalam melayani warga tidak mampu, sampai Tahun 2017 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Kabupaten Sukamara melalui BPJS sebanyak 16.503 jiwa.

Terkait dengan penanggulangan penyakit menular, cakupan layanan pasien HIV/AIDS telah ditingkatkan dimana pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 2 orang pada Tahun 2017 dan pada tahun 2019 tidak ada kasus HIV. Cakupan penanganan kasus diare tahun 2017 404 kasus dan menurun di tahun 2019 menjadi 398 kasus, sedangkan TBC di tahun 2017 sebanyak 95 kasus dan meningkat menjadi 111 kasus di tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Sukamara telah meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada Tahun 2018-2019 jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sukamara telah mencapai 388 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan.

Meningkatnya kemajuan teknologi dan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat menjadi jaminan semakin membaiknya taraf kesehatan masyarakat. Kabupaten Sukamara memiliki rumah sakit daerah, puskesmas di lima kecamatan, puskesmas di masing-masing desa dan poskesdes sebagai tambahan. Pada Tahun 2019, di Kabupaten Sukamara terdapat 1 rumah sakit dan 5 unit puskesmas serta 44 Posyandu. Sementara itu, jumlah tenaga medis di Kabupaten Sukamara pada tahun 2018-2019 sebanyak 5 dokter spesialis, 16 dokter umum, 2 dokter gigi, 86 bidan, 40 tenaga farmasi dan 146 perawat.



Tabel 2.28.
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020 (Orang)

No	Tenaga Kesehatan	2018/2019
1	Tenaga Medis	
	- Dokter Spesialis	5
	- Dokter Umum	26
	- Dokter Gigi	2
2	Tenaga Psikologi Klinis	---
3	Tenaga Keperawatan	202
4	Tenaga Kebidanan	139
5	Tenaga Kefarmasian	41
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	24
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	12
8	Tenaga Gizi	18
9	Tenaga Keterampilan Fisik	5
10	Tenaga Keteknisian Medis	36
11	Tenaga Teknik Biomedika	3
12	Tenaga Kesehatan Tradisional	---
13	Tenaga Kesehatan Lain	---
JUMLAH		388

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2021.

Jika dilihat dari Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk maka sesuai dengan indikator yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan tenaga kesehatan Tahun 2011-2025 maka kondisi saat ini Kabupaten Sukamara dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.29.
Rasio Tenaga Kesehatan Tahun s/d Awal 2018

No	Jenis Tenaga	Target Rasio (per 100.000 Penduduk)	Realisasi s/d. Awal 2018
1	Dokter Spesialis	10	8
2	Dokter Umum	40	32
3	Dokter Gigi	12	3
4	Perawat	158	219
5	Bidan	100	161
6	Perawat Gigi	15	18
7	Apoteker	9	22
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	13	35



No	Jenis Tenaga	Target Rasio (per 100.000 Penduduk)	Realisasi s/d. Awal 2018
9	Gizi	10	30
10	Sanitarian	15	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2018.

Dari tabel di atas terlihat ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang masih kekurangan terutama dokter sedangkan tenaga yang lain secara umum sudah melebihi target tetapi penyebarannya masih belum merata.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/3/2017 tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah, mulai 01 Januari 2018 RSUD Kabupaten Sukamara sudah melaksanakan pola pengelolaan keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), selain itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara Nomor 503.9/001/DPMPSTP, Tanggal 18 September 2017 tentang Izin Operasional dan Penetapan Kelas Rumah Sakit, mulai tanggal 18 September 2018 RSUD Sukamara naik kelas menjadi Rumah Sakit Kelas C, selanjutnya Izin Operasional Rumah Sakit juga berubah mengikuti perubahan kelas rumah sakit yaitu Izin Operasional Kelas C.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta penyesuaian standar kelas RSUD yaitu Kelas C, maka harus dapat memenuhi:

- 1) Kebutuhan SDM terutama Dokter Spesialis dengan disertai pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah dinas, kendaraan operasional dan insentif yang sesuai.
- 2) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana antara lain



penyesuaian bangunan kesehatan dengan standar bangunan rumah sakit sesuai peraturan.

- 4) Pemenuhan fasilitas peralatan kesehatan yang sesuai standar baik kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 2.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Sukamara
Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017
1	Bed Occupancy Rate (BOR)			60-80%	42,70	43,78	48,53	40,36	38,36
2	Average Length Of Stay (ALOS)			6-9 Hari	2,77	3,21	2,81	2,60	2,40
3	Bed Turn Over (BTO)			40-50 Kali	44,00	38,25	47,77	40,47	41,72
4	Turn Over Interval (TOI)			1-3 Hari	4,75	5,37	3,93	5,39	5,47
5	Net Death Rate (NDR)			25/1000	5,29	3,45	6,23	2,91	3,74
6	Gross Death Rate (GDR)			45/1000	18,50	12,33	20,14	17,81	14,66
7	Persentase Pasien Rawat Inap			-	3,90	3,85	4,57	4,78	5,44
8	Pasien Keluar Hidup			-	1.857	2.002	2.481	2.703	3.207
9	Pasien mati ≤ 48 jam			-	25	18	35	41	35
10	Pasien mati ≥ 48 jam			-	10	7	16	8	12
11	Total Pasien mati			-	35	25	51	49	47
12	Pasien keluar (H +M)			-	1.892	2.027	2.532	2.752	3.254
13	Lama dirawat			-	5.240	6.512	7.124	7.150	7.785
14	Hari Perawatan			-	6.702	8.470	9.388	10.046	10.920
15	Jumlah TT			-	43	53	53	68	78

Sumber: RSUD Kabupaten Sukamara, 2018.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari ketersediaan Tempat Tidur pada RSUD Sukamara saat ini hanya memiliki 78 Tempat Tidur (TT) sesuai dengan kelasnya dan rasio ketersediaan Tempat Tidur Per 1.000 penduduk sudah sesuai yaitu 1 TT/1.000 Jiwa.

Jika di lihat dari beberapa indikator pembangunan kesehatan, maka ada beberapa tujuan yang menjadi dasar/target yang akan dicapai di Kabupaten Sukamara antara lain: Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), Program Indonesia Sehat, *Universal Health Coverage* (UHC) dan gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

SDGs merupakan kesepakatan Pembangunan Global yang secara resmi menggantikan MDGs serta dilaksanakan pada Tahun 2015 Hingga 2030. Khusus Bidang Kesehatan sebelumnya pada MDGs terdapat 4 Goals, 8 Target dan 31 Indikator sedangkan SDGs targetnya bertambah menjadi 19 indikator. Adapun keempat Goal tersebut antara lain:

1. Goals 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (gizi masyarakat).
2. Goals 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia (Sistem Kesehatan Nasional).
3. Goals 5: Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (Akses Kesehatan Reproduksi dan KB).
4. Goals 6: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Sanitasi dan Air Bersih).

Khusus program Indonesia Sehat dimana diharapkan keadaan masyarakat di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat,



perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Adapun indikator dampak yang diharapkan dari Program Indonesia Sehat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025 khususnya di Kabupaten Sukamara serta menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.31.
Pencapaian Indikator Indonesia Sehat di Kabupaten Sukamara

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,7	71,53
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	< 15,5	9,57
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	< 74	0,74
4	Prevalensi Gizi Kurang	%	9,5	0

Sumber: LKIP 2020 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, 2021.

Untuk *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Sukamara sudah mulai melaksanakan sistem jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat. Pada tahun 2019 sebanyak 46,96 persen masyarakat Kabupaten Sukamara mempunyai Jaminan Kesehatan.

Pada Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Kabupaten Sukamara berkomitmen melaksanakan program tersebut. Adapun tujuan dilaksanakannya GERMAS ini adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada terjaganya kesehatan, peningkatan produktifitas, kebersihan lingkungan dan berkurangnya pembiayaan untuk berobat.

Capaian kinerja urusan kesehatan secara lengkap hingga tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.32.
Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Sukamara
Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah pustu/poskesdes yang dilakukan perbaikan/rehabilitasi	7	8	9	10
		Jumlah pustu yang dibangun	1	0	1	0
		Persentase produk alkes dan PKRT yang memenuhi syarat (pengujian sampel)	72,39	85	72,39	85
		Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	100	80	100	80
		Persentase pustu dan poskesdes dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	82,14	80	82,14	80
2.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase penduduk yang tercover jaminan kesehatan BPJS kesehatan	100	96,13	100	96,13
3.	Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan melalui jaminan kesehatan nasional	Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	100	100	100	100
4.	Manajemen pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan lokakarya mini secara rutin	4	5	4	5
5.	Sumber daya manusia kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	100	95	100	95
		Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk	137	208,29	137	208,29
		Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk	244	286,21	244	286,21
		Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	0,28	38,96	0,28	38,96
		Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3	2,99	3	2,99
6.	Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	100	100	100	100
7.	Obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat esensial dan vaksin di puskesmas	95	89	95	89
		Puskesmas yang menerapkan aplikasi e-logistik (Unit)	5	5	5	5
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100	80	100	80
8.	Pengawasan obat dan makanan	Jumlah desa aman OMKABA (obat, makanan, kosmetika, dan bahan berbahaya)	0	0	0	0
9.	Kefarmasian dan alkes	Persentase penggunaan obat generik	98	98	98	98
		Persentase penggunaan obat rasional	31,33	50	31,33	50
10.	Pengembangan lingkungan sehat	Persentase desa melaksanakan STBM	84	83,90	84	83,90
		Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan (%)	56	64,80	56	64,80
		Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi	62,82	44	62,82	44



No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
		syarat higiene sanitasi (%)				
		Persentase jumlah desa ODF	46	46,88	46	46,88
11.	Program perbaikan gizi masyarakat	Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan (%)	-	0	-	0
		Persentase balita pendek (stunting)	-	4,24	-	4,24
		Presentase anemia ibu hamil	-	9,59	-	9,59
		Presentase mendapat tablet tambah darah remaja putri	-	40,59	-	40,59
12.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	90,60	85,80	90,60	85,80
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	80,90	91,21	80,90	91,21
		Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan	91	85,40	91	85,40
		Cakupan kunjungan bayi (%)	66,52	91,18	66,52	91,18
		Cakupan pelayanan anak balita (%)	87,23	66,98	87,23	66,98
13.	Upaya kesehatan masyarakat	IKM	2	2,5	2	2,5
		Persentase puskesmas yang melaksanakan SPM	60	20	46,40	20
		Proporsi kasus penyakit tidak menular (PTM) di puskesmas (%)	8,63	29,72	8,63	29,72
14.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan keluarga sehat	60%	80%	60%	80%
		Rasio posyandu per 100 balita	1:19.9 7	1:1	1:19.9 7	1:1
		Proporsi rumah tangga ber PHBS	50	60	50	60
		Persentase desa siaga aktif	9,38	12,50	9,38	12,50
15.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka kesakitan demam berdarah dengue (IR DBD) (%)	91	36	91	36
		Case notification rate (CNR) TB Paru (%)	72,32	55,44	72,32	55,44
		Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat (%)	-	100	-	100
		AFP Rate	-	0	-	0
		Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS (%)	26	2,50	26	2,50
		Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	-	70	-	70
		Cakupan imunisasi dasar lengkap (%)	91,40	87,40	91,40	87,40
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	100	100	100	100
		Persentase desa/kelurahan dengan posbindu	84,37	81,25	84,37	81,25
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	100	100	100	100

2.3.3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan



sarana infrastruktur wilayah mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem tata air, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan air minum layak, akses sanitasi layak, perumahan layak huni, prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai, sarana dan prasarana pendukung pemerintahan serta pelayanan penyediaan energi. Pengembangan sistem tata air terbagi menjadi sistem drainase dan pengendali banjir yang difokuskan pada pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana drainase dan pengendalian banjir. Untuk sistem drainase antara lain dilakukan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sungai dan saluran. Untuk pengendali banjir dilakukan dengan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana prasarana pengendali banjir. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten sampai tahun 2017 seluas 5,342 Ha, dari luas irigasi yang ada 57,76 persen dalam kondisi baik, sedangkan sisanya 42,24 kondisinya rusak. Tahun 2018, luas irigasi dalam kondisi baik sedikit menurun menjadi 51,63 persen dan tahun 2019 kembali naik menjadi 56,4 persen. Irigasi Primer 84,068 km/m, Irigasi Sekunder 158.935 km/m sedangkan Irigasi Tersier 106.074 km/m.

Panjang Drainase dalam kondisi mantap sampai dengan Tahun 2020 = 10.350,29 M2 dengan rincian Kondisi Baik = 8.280,24 M2, dan Rusak Ringan = 2.070,05 M2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perkim RI Nomor 14/PRT/M/2015 penanganan luas areal irigasi Kabupaten Sukamara 5.342 Ha untuk luasan areal irigasi sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2020 luas irigasi dalam kondisi baik 3.173 Ha sedangkan tahun 2019 = 2.923 Ha.



Untuk menunjang lancarnya arus perdagangan dan perekonomian, sarana dan prasarana infrastruktur seperti kondisi jalan sangat penting. Sebagian besar kondisi jalan di Kabupaten Sukamara sudah baik dengan mayoritas jalan yang sudah diaspal sepanjang 301,2 km.

Tabel 2.33.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)
di Kabupaten Sukamara 2012-2020

Tahun	Jenis Permukaan Jalan / Km				Jumlah
	di Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	115,49	106,55	132,86	18,74	373,64
2013	120,49	104,55	133,86	18,74	377,29
2014	129,16	108,70	128,97	18,74	385,57
2015	117,19	86,92	280,19	28,60	512,90
2016	183,39	77,30	222,51	29,74	512,93
2017	165,06	67,69	336,50	12,28	581,53
2018	183,34	63,27	322,11	12,60	581,53
2019	190,59	68,84	311,09	11,00	581,53
2020	191,5	88,6	295,3	6,1	581,5

Sumber: BPS dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, 2018 dan 2021.

Tabel 2.34.
Panjang Jalan, Luas dan Status Jalan Tahun 2020

Uraian	Jenis Satuan Jalan			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
A. Panjang Jalan (Km)	23,79	86,79	581,53	692,11
B. Luas Jalan (Km ²)	-	-	4, 399	4, 399

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara dalam Angka 2021. dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara, 2018.

Terkait penataan ruang, hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Struktur Ruang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang harus dicantumkan dalam Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukamara:

- Pusat kegiatan: PKL (Pusat Kegiatan Lokal) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- Jaringan Jalan yang termasuk ruas jalan pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer Provinsi KP1 adalah:



Ruas Jalan Sukamara/batas Kalimantan Barat - Sukamara - Tempayung - Riam Durian Batas Kotawaringin Barat sepanjang ± 49 Km.

- c. Jaringan Jalan yang termasuk ruas jalan pengembangan jaringan jalan Kolektor Primer K3 adalah meliputi:
1. Ruas Jalan Sukamara - Lunci - Teruntum - Batas Kotawaringin Barat sepanjang ± 55 Km;
 2. Ruas Jalan Lingkar Kota Sukamara $\pm 53,40$ Km;
 3. Ruas Jalan Kuala Jelai – Lunci sepanjang 63,20 Km;
 4. Ruas Jalan Simpang Penopa/Semantun – Lupu – Balai Riam sepanjang 40,12 Km;
 5. Ruas Jalan Lunci – Pulau Nibung sepanjang 38,07 Km.

Produksi sampah Kabupaten Sukamara pada Tahun 2017 mencapai 75 m^3 per tahun dengan tingkat pengangkutan baru mencapai 70 m^3 per tahun, yang berarti masih ada 5 m^3 sampah yang belum terangkut. Dalam menangani persoalan persampahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyediakan tong sampah 350 unit, tempat sampah terpilah *indoor* 7 unit. Jumlah wilayah yang terlayani sistem persampahan 1 (satu) kecamatan, 2 (dua) kelurahan dan 20 (dua puluh) RT.

Penyediaan air bersih terutama air minum layak disediakan secara mandiri oleh rumah tangga masing-masing. Hal ini disebabkan karena PDAM hanya dimiliki oleh sebagian masyarakat perkotaan di Kabupaten Sukamara. Tahun 2020, konsumsi air minum di Kabupaten Sukamara ada 338.110 m^3 air yang disalurkan untuk 1.902 pelanggan PDAM.

Berdasarkan cara memperolehnya, konsumen air minum dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni membeli dan tidak membeli. Dikategorikan membeli apabila rumah tangga menggunakan air minum dengan berlangganan PAM, membeli air kemasan, atau



pedagang air keliling. Sampai Tahun 2017 jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PDAM sebanyak 1.674 rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang memperoleh air bersih dengan cara tidak membeli umumnya berasal dari air tanah, yakni sumur dan pompa. Hal ini dapat diartikan bahwa masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan air permukaan.

Masyarakat rumah tangga memanfaatkan air minum layak yang berasal dari air permukaan ini sebanyak 1.986 SR, sehingga seluruh rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak baik dari PDAM maupun air permukaan berjumlah 3.223 SR atau baru mencapai 11,70% dari total rumah tangga di Kabupaten Sukamara.

Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2032 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara 2012-2032. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara. Untuk pelayanan kepada masyarakat, RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Untuk meningkatkan informasi penataan ruang Kabupaten Sukamara kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai media sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang bahkan sampai pada persil lahan yang mereka miliki.

- a. Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan;
- d. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.



Prasarana, sarana dan utilitas umum baik dalam kawasan perkantoran, ruang terbuka hijau, dan ruang publik kondisinya sebagian belum terpelihara dengan baik. Jumlah prasarana, sarana dan utilitas umum terdiri dari taman kota 5 persil, yaitu taman permata sukma, taman koramil, taman tirta indah, taman baca, taman sukma indah dan ruang publik sekitar perkantoran.

Sarana dan prasarana pemerintah dibangun dalam bentuk gedung, gudang, aula, balai pertemuan dan sarana lainnya untuk mendukung roda pemerintahan dalam melayani masyarakat sesuai standar pelayanan minimal guna memberikan rasa nyaman, mudah dan lancar.

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum yang masih dihadapi adalah:

- a. Jumlah kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih banyak dibanding laju pembangunan. Meskipun panjang jalan yang sudah dibangun yang menjadi kewenangan Kabupaten sudah 100%, yaitu sepanjang 581.525 KM berdasarkan Data Teknis Jalan Kabupaten Sukamara Tahun 2020 yang terverifikasi pada 12 Maret 2020, namun kondisi jalan yang dikategorikan mantap hanya sepanjang 181.730 KM (31,25%), sementara kondisi rusak masih sepanjang 399.795 KM (68,75%) dengan rincian 25.944 KM (4,46%) dengan kondisi rusak ringan dan 373.851 KM (64,29%) kondisi rusak berat;
- b. Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan;
- c. Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi, dalam kondisi baik sekitar 57,76 persen pada tahun 2020;
- d. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;



- e. Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang;
- f. Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan menindak lanjuti indikator dan target bidang Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Sukamara pada bidang Pekerjaan Umum telah ditetapkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35.
Target Bidang Air Minum dan Sanitasi Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara

Indikator	Target (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni	56,2	60,80	65,58	70,37	75,15
Akses Sanitasi Layak	75,5	75,9	76,7	77,8	79,0
Akses Sanitasi Aman	4,20	4,20	4,20	5,60	7,00
Stop BABS	63	73	83	88	95
Akses Air Minum Layak	79,04	84,28	89,52	94,76	100
Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	9,70	10,28	10,85	11,43	12,00
Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	69,34	74,01	78,67	83,34	88,00

Sumber: Surat Sekretariat Daerah hal Penyampaian Exercise Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, 2020.

Capaian kinerja bidang pekerjaan umum tahun hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36.



Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Bertambahnya Jalan Tanah Menjadi Jalan Beraspal (KM)	4,25	1,43	4,25	1,43
		Jalan Dalam Kondisi Baik	18,64%	32,77 %	18,64%	32,77 %
		Bertambahnya Jumlah Jembatan	0	0	0	0
2.		Jaringan Irigasi	0	0	0	0

2.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Akses sanitasi layak merupakan dambaan seluruh rumah tangga tempat tinggal, oleh karena itu pemerintah telah berbuat banyak tentang pengelolaan air limbah. Hingga saat ini sebanyak 75,19% rumah tangga tempat tinggal telah terlayani akses sanitasi layak.

Berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah berupaya meningkatkan mutu dan kualitasnya antara lain melalui program penyehatan lingkungan dengan harapan memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya.

Kondisi rumah tinggal sesuai kriterianya ada 2 (dua) yaitu rumah tinggal yang berada di kawasan kumuh dan rumah tinggal yang berada di kawasan non kumuh. Jumlah rumah tinggal di Kabupaten Sukamara sebanyak 27.554 Rumah Tinggal; yang berada di kawasan kumuh sebanyak 4.940 Rumah Tinggal (17,93%), Rumah Layak Huni sebanyak 24.741 Rumah Tinggal (89,79%), Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2.813 Rumah Tinggal (10,21%).

Tempat Pemakaman Umum telah tersedia di masing- masing desa dengan lokasi sebagian besar masih sporadis dan dalam kota Sukamara sudah terpusat, namun volumenya sudah hampir penuh. Jumlah tempat pemakaman umum secara kumulatif



berjumlah 47 TPU; kondisi yang sudah ada pagarnya 23 TPU sisanya 24 TPU masih belum ada pagar termasuk sarana/prasarana lainnya.

Dengan menindak lanjuti indikator dan target bidang Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Sukamara pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah ditetapkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37.
Target Bidang Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 Kabupaten Sukamara

Indikator	Target (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni	56,2	60,80	65,58	70,37	75,15

Sumber: Surat Sekretariat Daerah hal Penyampaian Exercise Target Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Tahun 2020-2024 Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah, 2020

Capaian kinerja bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah WargaNegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	65,20	52,5
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	-	-

2.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan



Terpenuhnya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dengan melalui penegakan peraturan dan adanya kepastian hukum. Langkah-langkah yang telah dilakukan melaksanakan koordinasi dan komunikasi intensif dengan komunitas intelijen, mengoptimalkan peran KOMINDA dan memberi pemahaman kepada generasi muda tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

Capaian kinerja bidang pekerjaan umum tahun hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	100	-	-
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	-	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	-	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	-	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	98	96,07

2.3.6 Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukamara, dari 2011 sampai dengan 2019 cenderung terus meningkat. Angkatan kerja tahun 2011 mencapai 22.725 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 31.177 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sukamara selama periode 2011-2020



mencapai angkut tertinggi di tahun 2014 yaitu 75,53 persen dan menurun cukup tajam di tahun 2015 menjadi 71,60 persen. Pada Tahun 2020 TPAK mencapai 65,60 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 73,37 persen.

Tabel 2.40.
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2020

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	22725	23234	25667	28558	28349	31728	33269	34398	31177
Bekerja	22593	23159	25193	28081	27021	30195	31807	32712	29711
Tingkat Kesempatan Kerja	99.42	99.68	98.15	98.33	95.32	95.17	95.61	95.1	95.3
TPAK	73.49	72.49	74.46	75.53	71.6	73.61	74.18	73.37	65.6

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara dan Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sukamara selama 2011-2020 cukup fluktuatif namun cenderung menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2011 TPT sebesar 1,17 persen dan tahun 2020 4,70 persen. Selama periode 2011-2020 TPT tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 4,9 persen sedang kenaikan TPT yang cukup drastis terjadi pada periode 2014-2015.

Gambar 2.28.



Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2020.

Sektor perekonomian yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yaitu sebesar 32,06 persen, disusul kemudian sektor jasa-jasa sebesar 5,46 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 21,81 persen. Bila dilihat dari distribusi nilai PDRB, kondisi ini konsisten karena kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Sukamara adalah yang terbesar. Untuk sektor industri pengolahan, kontribusinya terhadap PDRB cukup tinggi namun justru daya serap tenaga kerjanya hanya 5,09 persen.

Tabel 2.41.
Penduduk yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sukamara
Tahun 2020

No	Mata Pencaharian	(%)
1	Pertanian	32,06
2	Pertambangan dan Penggalian	0,83
3	Industri Pengolahan	21,81
4	Listrik, Gas, Air Bersih	8,46
5	Konstruksi	8,84
6	Perdagangan, Hotel dan Restaurant	16,76
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,96
8	Keuangan, Perbankan dan Jasa Perusahaan	1,86



No	Mata Pencaharian	(%)
9	Jasa-jasa	5,46
Jumlah		100

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021.

Selanjutnya, kualitas tenaga kerja merupakan hal yang sering menjadi perhatian khususnya bagi investor yang akan menanamkan investasinya di suatu daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kualitas tenaga kerja di Kabupaten Sukamara dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia kerja tersebut. Berikut ini disajikan rincian penduduk Kabupaten Sukamara berumur 15 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi:

Tabel 2.42.
Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kabupaten Sukamara menurut Tingkat Pendidikan Kondisi Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	14.788	22,77
2	Tidak Tamat SD / Sederajat	9.301	14,32
3	Tamat SD/Sederajat	19.526	30,07
4	SLTP/Sederajat	8.768	13,50
5	SLTA/Sederajat	9.042	13,92
6	Diploma III	378	0,58
7	Akademi/DiplomaIII/S.Muda	715	1,10
8	Diploma IV/STRATA 1	2.367	3,64
9	STRATA II	49	0,075
10	STRATA III	1	0,0015
JUMLAH		64.935	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, 2020.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara yang cenderung mengalami pertumbuhan positif, sedikit banyak akan berdampak kepada dinamika permasalahan ketenagakerjaan yang sudah cukup kompleks. Isu ketenagakerjaan yang perlu penanganan yang sinergi oleh jajaran pemerintahan Kabupaten Sukamara, antara lain adalah angka pengangguran angka



kecelakaan kerja, konflik hubungan industrial, rendahnya daya saing dan kualitas SDM, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja. Hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak, mengingat bahwa pembangunan di semua sektor pada akhirnya akan berimplikasi terhadap ketenagakerjaan.

Pada umumnya, permasalahan utama dalam penanganan pengangguran adalah ketidakcocokan antara jumlah ketersediaan tenaga kerja utamanya dalam hal kualifikasi dengan kualifikasi yang ditawarkan oleh pemberi kerja (*employer*). Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penempatan tenaga kerja, lowongan kerja yang tersedia, serta tingginya jumlah pencari kerja yang terjadi setiap tahun. Tabel berikut ini menyampaikan informasi secara rinci mengenai dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Sukamara.

Tabel 2.43.
Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sukamara

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	124	230	234	--	211	274
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Orang	460	416	254	342	619	453
Jumlah Lowongan	Loker	164	260	284	--	276	276
Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	Buah	---	---	--	--	--	--
Jumlah Tenaga Kerja Asing	Orang	0	0	0	0	0	0

Sumber: Sukamara Dalam Angka 2021 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2018.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkecil kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja adalah dengan cara memberikan berbagai jenis pelatihan kerja bagi tenaga kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan. Jumlah dan jenis pelatihan yang telah dilakukan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.44.
Data Pelatihan Keterampilan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Pelatihan	Jenis	1	1	2	2	2	2
Jumlah yang	Orang	10	10	30	30	30	30

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2018.

Permasalahan ketenagakerjaan tidak lepas dari masalah hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang mempekerjakan mereka. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah perselisihan upah, jam kerja, dan perselisihan kepentingan. Selain itu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja juga mempunyai kewajiban melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap perusahaan agar semua pekerja/buruh didaftarkan dalam penjaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja adalah dalam hal penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau upah yang didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak. Namun demikian tentunya tingkat upah akan berbanding lurus dengan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, serta diperkirakan masih banyak perusahaan terutama industri catering, dan jasa pertokoan/retail yang memberikan upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tabel berikut ini menyajikan perkembangan UMK dan nilai kebutuhan hidup minimum/layak Kabupaten Sukamara:



Tabel 2.45.
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten dan Kebutuhan
Hidup Layak Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2020

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Upah Minimum Kabupaten (UMK)	1.327.459	1.678.238	1.929.973	2.026.472	2.208.854	2.418.695	2.629.363	2.845.234	3.088.502
Kebutuhan Hidup Minimum (KHM / KHL)	2.200.980	2.300.230	2.300.250	2.400.320	2.493.959	2.682.797			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2021.

2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukamara khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan serta terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses dan pencapaian pembangunan serta upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang.

2.3.8. Pangan

Produksi Tanaman Pangan dengan indikatornya yaitu produksi padi (Sawah dan Ladang), jumlah tanam jagung, jumlah tanam kacang tanah, jumlah tanam ubi kayu dan jumlah tanam ubi jalar, sayuran dan buah-buahan, hampir semua komoditi tidak mencapai target yang ditetapkan, hanya produksi buah-buahan yang bisa mencapai target yang ditetapkan, produksi padi dari target sebesar 10.945 Ton terealisasi hanya 3.334,47 atau 30,47%, Produksi Padi Ladang dari target 1.390 Ton hanya terealisasi 171,45 Ton atau 12,33%, Produksi Jagung dari target 362 Ton hanya terealisasi 121,91 Ton atau 33,68%, Produksi Kedelai dari target 13 Ton tidak terealisasi atau 0%, Produksi Kacang Tanah dari target 72 Ton hanya terealisasi 9,47 Ton atau 13,15%, Produksi Kacang Hijau dari target 19 Ton tidak terealisasi atau 0%, Produksi



Ubi Kayu dari target 2.468 Ton hanya terealisasi 725 Ton atau 29,38%, Produksi Ubi Jalar dari target 1.224 Ton hanya terealisasi 99,32 Ton atau 8,11%, Produksi Sayur-sayuran dari target 1.233 Ton hanya terealisasi 445,23 Ton atau 36,11%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena banyak lahan yang tidak tertanami, sistem irigasi masih belum maksimal yang menyebabkan puso, penguasaan mekanisasi pengolahan lahan pertanian belum maksimal, pengolahan lahan oleh sebagian besar petani masih dengan cara membakar yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Pemerintah pada Tahun 2017 telah mengupayakan dan membangun sistem pengairan/irigasi dalam bentuk pembuatan irigasi air tanah, pembuatan Embung, dan pembuatan *Long Storage*.

2.3.9. Pertanian

Penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian Sebaran wilayah potensi, kendala dan limitasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukamara memperlihatkan bahwa wilayah ini sebagian besar merupakan Wilayah Potensi dengan luas mencapai 2.781,92 Km², atau sebesar 72,69 % dari luas wilayah daratan.

Khusus untuk Wilayah Kendala ini, pengembangan kawasan budidaya dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi (persyaratan teknis) dalam pembangunannya berupa pembatasan koefisien luas bangunan dan teknis konstruksi. Sedangkan wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat kegiatan budidaya mencapai 1.020,55 Km² atau hanya sebesar 26,67 % dari total luas wilayah.

Adapun untuk Wilayah Limitasi mencapai 23,53 Km² atau sebesar 0,61 % dari luas wilayahnya. Wilayah limitasi tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya dan selebihnya adalah wilayah kendala yang dalam pemanfaatannya untuk



kawasan budidaya diperlukan bantuan teknis dan persyaratan tertentu.

Konversi lahan yang di selesaikan oleh bidang pertanahan perlu koordinasi dan integrasi secara spasial dalam penerbitan pemberian izin lokasinya.

2.3.10. Lingkungan Hidup

Dalam hal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui berbagai program dan kebijakan untuk mencapai tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Sukamara yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah dilakukan upaya antara lain :

1. Pengelolan persampahan dalam rangka penataan kota Sukamara menuju kota Sehat Adipura, melalui :
 - a. Peningkatan sarana prasarana pengelolan persampahan (truk angkut sampah, dan TPS kawasan).
 - b. Sejak awal RPJMD (2018) bahkan sebelumnya DLH telah melakukan sosialisasi pengelolaan Sampah ke masyarakat (PROKLIM, kader lingkungan, dsb) dan ke sekolah (Adiwiyata). Dan mulai awal tahun 2021 dilaksanakan Program Kutip Sampah yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui KSM sebagai pelaksana kutipan sampah sekaligus implementasi retribusi sampah sesuai perda.
 - c. Peningkatan pengelolaan / pemrosesan sampah di TPA menuju *sanitary Landfill*.
 - d. Operasional pengelolaan persampahan di TPST desa pudu & TPS 3 R di Kelurahan Padang (2017), & TPS 3R di Desa Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci (2020), serta dalam



- proses pembangunan TPS 3R di Desa Bangun Jaya Kecamatan Balai Riam (2021) melalui Balai Pengelolaan Prasarana Wilayah Kalteng Kementerian PUPR.
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta pemantauan Kualitas Air, melalui :
 - a. Pengembangan Pemberdayaan MHA dengan koordinasi Lintas Sektoral Pusat, Provinsi, Kabupaten, Perusahaan, Camat, dan Desa. Khususnya peningkatan koordinasi dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSKL, BPDASHL, BKSDAE & Dishut Provinsi).
 - b. Penanganan pengaduan dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup dari masyarakat. (Dengan adanya Hotline Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang aktif 24 jam / online)
 - c. Peningkatan pengawasan terhadap potensi pencemar baik domestik dan non domestik.
 - d. Sosialisasi pengelolaan limbah B3, penataan ijin lingkungan, serta pemantauan kualitas air permukaan / sungai, air sumur penduduk dan air limbah.
 3. Pelaksanaan Konservasi Lingkungan Hidup melalui RTH dan mitigasi perubahan iklim melalui :
 - a. Penanaman pohon peneduh di lokasi RTH, yang sudah ditetapkan sebagai RTH dan ruang publik lainnya, serta penanaman tanaman hias/ bunga di plangson.
 - b. Sosialisasi pengendalian Karhutla di wilayah rawan Karhutla, ke masyarakat, sekolah dan perusahaan melalui kerja sama dengan KPHP Sukamara-Lamandau, Dishut Kalteng dan Manggala Agni Daops Pangkalan Bun.
 - c. Sosialisasi dan peningkatan kegiatan konservasi daerah / lahan kritis melalui reboisasi / penghijauan dan penanaman mangrove di wilayah pesisir.



Capaian kinerja urusan lingkungan hidup hingga tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.46.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	2	1	2	1
		Pengawasan Terhadap Jenis Usaha/Kegiatan	4	-	4	4
		Tayangan Iklan Pengelolaan B3, Dokumen Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	7	2	7	2
		Penyelesaian Perselisihan/Sengketa lingkungan Hidup	1	2	1	2
2.	Terjaganya Kelestarian fungsi lingkungan Hidup	Penanganan Kasus Kebakaran Hutan/Lahan	-	-	-	-
		Perlindungan & Konservasi SDA yang tertangani	-	-	-	-
3.	Optimalisasi dokumen AMDAL sebagai acuan dalam pembangunan	Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL	6	6	-	-
4.	Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah	-	-	-	-
		Penilaian Adipura	-	-	-	-

2.3.11. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Governance*. Program pendaftaran Kependudukan seperti pelayanan terpadu pelayanan e-KTP dan e-Akta dalam upaya cakupan kepemilikan serta data base kependudukan yang unggul dengan sistem informasi kependudukan guna pemenuhan informasi kependudukan yang lebih akurat dalam pembangunan.



2.3.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam mengatasi ketimpangan permasalahan di desa, maka penguatan lembaga sosial masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa dengan fasilitasi secara administrasi, peningkatan sumberdaya manusia dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa.

2.3.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kabupaten Sukamara menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Sukamara secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hasil dari kebijakan tersebut cukup menggembirakan dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15-49 tahun (TFR) 2,65 (Supas 2015), Capaian kesertaan ber-KB (CFR) 67,70 (Supas 2015), dan cakupan peserta KB aktif 6.801 dari target PPM 6.787 (100,21%) dengan proyeksi PUS 10.256 pada Tahun 2017.

2.3.14. Perhubungan

Dalam hal urusan perhubungan Kabupaten Sukamara telah banyak melakukan Pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat, sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas orang dan barang.

Upaya peningkatan pelayanan tersebut diwujudkan dengan tersedianya tempat-tempat pelayanan menaikkan dan menurunkan



penumpang yang telah terintegrasi antar alur transportasi sungai dan alur transportasi jalan. Tempat- tempat tersebut yaitu 5 dermaga/pelabuhan milik pemerintah daerah Kabupaten Sukamara, 2 pelabuhan milik swasta, 1 pelabuhan milik Pelindo dan 1 pelabuhan milik KSOP.

Dari sejumlah tempat-tempat pelayanan diatas dapat melayani penumpang sejumlah 28.870 dan bongkar muat barang pada tahun 2018 kurang lebih 896.373 ton.

Untuk menciptakan keselamatan lalu lintas jalan diperlukan kendaraan laik jalan, dengan upaya melakukan pengujian kendaraan bermotor tercatat 1.173 kendaraan wajib uji. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) lama waktu pengujian kendaraan bermotor 1 jam/kendaraan. Perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Perjanjian Kinerja RPJMD		
		2018	2019	2020
1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan	30.467	31.578	32.217
2.	Rasio Ijin Trayek	-	0,02	0,02
3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	55	74	74
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis/ Dermaga	9	11	11
5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	-	-	-
6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	95,29	94,29	92,82
7.	Pemasangan Rambu - Rambu	54	-	-
8.	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	0.041	0,043	0,043
9.	Jumlah Orang / Barang /yang Terangkut Angkutan Umum	29.200	36.000	-
10.	Jumlah Orang / Barang melalui Dermaga / Bandara / Terminal (Dibuat Dalam Tabel)	520.899	623.005	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara, 2021.



2.3.15. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukamara. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan e- government terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Antara lain dimulai dengan *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*.

Hasil yang telah diperoleh dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan internet dalam urusan pemerintah sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang efisien. Antara Lain aplikasi pelelangan elektronik (*e-procurement*), sistem informasi publik, sistem informasi kependudukan dsb.

Untuk meningkatkan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika, telah dilakukan peningkatan jumlah kegiatan pemantauan, pendataan, pengawasan dan penerapan serta kerjasama dengan pihak terkait.

Capaian kinerja hingga tahun 2020 untuk urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo
Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat diakses internet) serta terjangkau	-	20%	-	-
		Distribusi internet untuk seluruh OPD	-	0%	-	-
2.	Persentase pemanfaatan Data Center Kabupaten sebagai sebuah sistem terintegrasi	Jumlah aplikasi dibagi jumlah aplikasi di seluruh OPD	-	20%	-	-
3.	Hasil evaluasi terhadap	Penilaian hasil evaluasi	-	-	-	-



implementasi keterbukaan informasi publik	terhadap implementasi keterbukaan informasi publik				
	Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten Sukamara	0	10	-	-

2.3.16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Sukamara.

Koperasi sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat turut andil menciptakan kesejahteraan rakyat. Penduduk wilayah perdesaan dengan pekerjaan utama pertanian mengandalkan Koperasi Unit Desa untuk produksi pertanian. Lain hal dengan koperasi umum yang menyediakan berbagai hal untuk keperluan penunjang ekonomi. Di tahun 2017, terdapat 66 koperasi yang ada di Kabupaten Sukamara dan hanya satu diantaranya yang berstatus tidak aktif. Tahun 2019 jumlah koperasi yang tidak aktif naik menjadi 3 koperasi.

Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif Kabupaten Sukamara adalah 66 dan jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 6. Jumlah koperasi ini tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah atau urutan terkecil ketiga setelah Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur.

Tabel 2.49.
Perbandingan Jumlah Koperasi se-Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1. Kotawaringin Barat	235	11	246
2. Kotawaringin Timur	264	71	335
3. K a p u a s	355	94	449



Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
4. Barito Selatan	118	93	211
5. Barito Utara	229	7	236
6. Sukamara	67	6	73
7. Lamandau	160	33	193
8. Seruyan	230	36	266
9. Katingan	97	123	220
10. Pulang Pisau	145	26	171
11. Gunung Mas	213	30	243
12. Barito Timur	58	73	131
13. Murung Raya	31	66	97
14. Palangka Raya	248	27	275
Primer Provinsi	74	13	87
Sekunder Provinsi	4	2	6
Primer Nasional	89	-	89
Kalimantan Tengah	2 617	711	3 328

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021.

Secara umum capaian kinerja hingga tahun 2020 untuk urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase koperasi sehat	166,67	104,77	166,67	104,77
		Persentase koperasi berkualitas	121,21	102,04	-	-
2.	Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	58,11	25,94	58,11	25,94
3.	Meningkatnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	285,52	61,62	-	-

2.3.17. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah



peningkatan kualitas pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur layanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal. Untuk urusan peningkatan penanaman modal, dalam hal meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perijinan satu pintu (*one gate service*) sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien.

Peningkatan pelayanan penanaman modal telah berhasil meningkatkan investasi di Kabupaten Sukamara dari Rp 2,79 triliun pada Tahun 2013 menjadi Rp 4,32 triliun di Tahun 2017. Di tahun 2018 investasi di Kabupaten Sukamara turun menjadi Rp1,61 triliun dan tahun 2019 realisasi investasi turun lagi menjadi Rp848 milyar. Dalam hal daya serap terhadap tenaga kerja, PMDN/PMA di Kabupaten Sukamara menyerap tenaga kerja 8,16 persen pada Tahun 2013 meningkat menjadi 11,07 persen di Tahun 2017.

Hingga tahun 2020 terdapat 3 jenis PMA dan 16 PMDN di Kabupaten Sukamara. Jumlah PMA dan PMDN tersebut adalah yang terkecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. Upaya untuk menarik minat calon investor perlu dilaksanakan secara sistematis dan strategis, termasuk dukungan pemerintah daerah dalam hal infrastruktur maupun berbagai bentuk insentif sesuai peraturan perundangan.

Tabel 2.51.
Jumlah PMA dan PMDN di Kalimantan Tengah
Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018		2019		2020	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
1. Kotawaringin Barat	23	28	12	10	25	77
2. Kotawaringin Timur	71	33	9	19	80	160
3. K a p u a s	28	21	10	24	22	48
4. Barito Selatan	19	16	11	16	17	19
5. Barito Utara	32	12	22	36	11	55



Kabupaten/Kota	2018		2019		2020	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
6. Sukamara	1	6	10	33	3	16
7. Lamandau	7	8	23	70	4	28
8. Seruyan	25	15	109	74	11	31
9. Katingan	15	12	3	25	12	51
10. Pulang Pisau	6	4	15	25	3	22
11. Gunung Mas	26	19	1	16	15	32
12. Barito Timur	21	9	20	32	5	30
13. Murung Raya	24	14	2	21	21	26
14. Palangka Raya	47	2	17	42	19	55
Kalimantan Tengah	345	199	264	443	248	650

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021.

2.3.18. Kepemudaan dan Olahraga

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah membangun dan mengembangkan sarana olahraga serta melaksanakan PORDA pada Tahun 2017. Kegiatan olahraga di Kabupaten Sukamara Tahun 2017 sebanyak 25 Kegiatan, sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sukamara sampai Tahun 2018 adalah sebanyak 20 organisasi.

Tabel 2.52.
Organisasi Olahraga Tahun 2018-2020

Tahun	Organisasi yang aktif	Keterangan
2018	20 organisasi	PASI, POBSI, PABBSI, PERBASI, PBVSI, PBSI, PERCASI, PDBI, FORKI, PERBAKIN, IMI, PERPANI, FPTI, IPSI, PERSANI, PSTI, PSSI, PERSEROSI, PELTI, dan PTMSI
2019	20 organisasi	PASI, POBSI, PABBSI, PERBASI, PBVSI, PBSI, PERCASI, PDBI, FORKI, PERBAKIN, IMI, PERPANI, FPTI, IPSI, PERSANI, PSTI, PSSI, PERSEROSI, PELTI, dan PTMSI
2020	19 organisasi	PASI, POBSI, PABBSI, PERBASI, PBVSI, PBSI, PERCASI, PDBI, FORKI, PERBAKIN, IMI, PERPANI, FPTI, IPSI, PERSANI, PSTI, PSSI, PELTI, dan PTMSI

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2021



Beberapa penyelenggaraan olahraga tahunan berskala nasional dan internasional yang diikuti oleh atlet Sukamara sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2018 di antaranya PON, Sea Games dan Asian Games. Dalam pembinaan olahraga, Kabupaten Sukamara juga telah melahirkan beberapa prestasi di antaranya tenis meja (hanya sampai Pra PON) dan atletik.

Tabel 2.53.
Prestasi Atlit dari Kabupaten Sukamara di Kancah Nasional

Tahun	EVENT			KETERANGAN
	PON	SEA GAME	ASIAN GAMES	
2017	Medali Emas Medali Perak			Atletik
2019		Medali perunggu		Atletik
2021	Medali Perak Medali Perunggu			Atletik

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2021

Potensi dan peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai oleh pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara. Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga: 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah; 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) masih cukup tinggi; 3) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum memadai, belum memiliki stadion, baru memiliki 1 gelanggang olahraga dan 5 buah gedung olahraga se-Kabupaten; 4) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; 5) Pemuda belum sebagai “agent of change”; 6) Jumlah klub olahraga perkembangannya masih stagnan dari tahun ke tahun yaitu 20 klub tahun 2020; 7) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.



2.3.19. Statistik

Untuk meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di Kabupaten untuk pengumpulan, pengolahan, analisis untuk mengasilkan kualitas mutu data statistik sektoral.

2.3.20. Persandian

Urusan persandian dalam penyediaan layanan informasi pemerintah daerah yang berbasis elektronik di kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi

2.3.21. Kebudayaan

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Permasalahan urusan Kebudayaan: 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah; 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal; 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang; 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak; 5) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas; 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial; 7) Cagar budaya masih dalam tahap diidentifikasi oleh tim arkeolog BPCB Kaltim; 8) Belum tersedianya gedung seni dan budaya.



2.3.22. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat di lihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, Jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Kabupaten Sukamara memiliki 1 (satu) perpustakaan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat kunjungan yang meningkat dari Tahun 2013-2017. Capaian kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Capaian Kinerja				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perpustakaan khusus (PD)	Unit	-	-	-	-	-	12
2	Jumlah perpustakaan tempat ibadah	Unit	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah perpustakaan desa/kel	LP	-	32	32	32	32	32
4	Jumlah perpustakaan keliling	Unit	-	-	1	1	1	1
5	Jumlah perpustakaan sekolah	Unit	-	79	79	79	79	80
6	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	Orang	-	-	-	-	-	-
7	Pustakawan	Orang	-	-	-	-	-	-
8	Anggota Perpustakaan	Orang	-	-	74	729	1.020	1.146
9	Jumlah pengunjung perpustakaan per hari	Orang	-	15	35	43	47	56
10	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per hari	Orang	-	-	-	8	8	7

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara, 2018.



2.3.23. Kearsipan

Untuk urusan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara belum bisa mengumpulkan arsip inaktif dari instansi yang ada di Kabupaten Sukamara karena memiliki kendala yaitu belum adanya depo arsip untuk tempat penyimpanan arsip dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi urusan tersebut.

Untuk meningkatkan kinerja para pengelola arsip yang ada di seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sukamara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara telah melaksanakan bimtek di bidang kearsipan yaitu bimtek retensi arsip dan bimtek asistensi arsip. Dalam bimtek tersebut sebanyak 32 perangkat daerah di Kabupaten Sukamara telah mengikuti bimtek tersebut dan dibina untuk melaksanakan urusan tersebut.

Dalam rangka penyelamatan arsip daerah, pada Tahun 2015 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip yaitu penyusunan buku sejarah sukamara. Nilai capaian kinerja Bidang Kearsipan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan
Tahun 2013 - 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2012	Capaian Kinerja				
				2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jenis	-	-	-	1	-	-
2	Bimtek Manajemen Kearsipan	PD	-	32	32	32	32	32

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sukamara, 2018.

2.3.24. Perikanan

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki panjang pantai 75 km² ditambah dengan luas lahan



potensi perikanan budidaya kurang lebih 5.264,61 km² membuat wilayah Kabupaten Sukamara cukup kaya akan produk perikanan laut dan darat.

Produksi perikanan harus terus ditingkatkan lagi karena berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan penangkap ikan dan pembudidaya khususnya serta masyarakat pengolah produk yang berbahan baku ikan pada umumnya. Karena kebutuhan akan ikan segar dan olahannya bukan hanya datang dari dalam masyarakat Kabupaten Sukamara saja akan tetapi juga dari kabupaten tetangga.

Berikut ini disajikan tabel data perkembangan produksi perikanan menurut jenis kegiatannya (ton, basah).

Tabel 2.56.
Perkembangan Produksi Perikanan menurut Jenis Kegiatannya (Ton, Basah)

Tahun	Jenis Kegiatan			Jumlah
	Budidaya	Perairan Umum	Perairan Laut	
2012	517,12	194,20	4.823,50	5.534,82
2013	634,27	197,9	4.777,2	5.609,37
2014	658,89	199,9	4.821,4	5.680,19
2015	683,27	1.072,70	3.152,20	4.908,17
2016	1.307,21	840,30	2.986,00	5.133,51
2017	1.307,21	1.071,70	3.033,19	5.412,10
2018	1.520,19	1.539,91	3.093,86	6.153,96
2019		1.541,67	3.194,47	4.736,14
2020		1.059,3	2.083,83	3.143,13

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara, 2018 dan Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2019, 2020, 2021.

Naik turunnya produksi baik perikanan tangkap maupun budidaya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jumlah nelayan, jumlah alat tangkap, musim tangkapan, musim kemarau yang berkepanjangan juga berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan budidaya, termasuk bantuan yang sudah diberikan baik berupa alat tangkap maupun sarana prasarana perikanan budidaya.



2.3.25. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Sukamara memiliki potensi alam berupa pantai dan bukit selain itu juga terdapat berbagai peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yaitu makam tambak, dan rumah adat. Peninggalan terbanyak adalah rumah adat, yaitu sebanyak 7 buah yang terdapat di Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Jelai, dan Kecamatan Permata Kecubung.

Tabel 2.57.
Potensi Obyek Wisata Kabupaten Sukamara Tahun 2017

Kecamatan/ Subdistrict	Objek Wisata/ Public Recreation	Lokasi/ Location	Keterangan/ Notes
(1)	(2)	(3)	(4)
Jelai	Pantai Tanjung Nipah	Desa Sungai Raja	Dikelola Pemerintah
Pantai Lunci	Pantai Anugerah	Desa Sungai Tabuk	Dikelola Pemerintah
	Pantai Sungai Ramis	Desa Sungai Pasir	Tidak Dikelola Pemerintah
	Pantai Citra	Desa Sungai Cabang Barat	Tidak Dikelola Pemerintah
	Makam Mbah Sugi	Desa Sungai Pasir	Dikelola Pemerintah
	Makam Tu Ali	Desa Sungai Tabuk	Dikelola Pemerintah
	Makam Datuk Sanggul	Desa Sungai Damar	Dikelola Pemerintah
	Pantai Tanjung Selaka (Kalap)	Desa Sungai Damar	Tidak Dikelola Pemerintah
Sukamara	Agrowisata	Desa Natai Sedawak	Dikelola Pemerintah
	Danau Burung	Desa Natai Sedawak	Tidak Dikelola Pemerintah
	Makam Datuk Nahkoda	Kelurahan Mendawai	Dikelola Non-Pemerintah
Balai Riam	Bukit Patung	Kecamatan Balai	Tidak Dikelola Pemerintah
Permata Kecubung	-	-	-

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032, pasal 36 ayat 2 huruf (e) bahwa kawasan unggulan pariwisata pantai di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai. Hal ini selaras dengan perencanaan potensi pengembangan wilayah bahwa pengembangan pariwisata



diarahkan pada kawasan bagian selatan yang disebut sebagai kawasan JELUNCI. Oleh sebab itu pengembangan pariwisata Pantai Tanjung Nipah dan Pantai Anugerah akan menjadi prioritas pengembangan pariwisata selama lima tahun kedepan dan diharapkan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Sukamara.

Tabel 2.58.
Kunjungan Wisata di Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata								
	- Wisatawan Nusantara	10,200	12,050	13,150	16,500	20,800	36,700	7.548	48.316
	- Wisatawan Mancanegara	3	5	10	15	2	5	0	0
2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7,43	6,91	8,24	8,85	9,54			

Sumber: Dinas Porapar Kabupaten Sukamara, 2018, Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2019, 2021.

2.3.26. Pertanian

Struktur perekonomian di Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 masih didominasi oleh sektor pertanian, walaupun cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari relatif tingginya kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Sukamara. Di tahun 2020 misalnya, sektor Petanian memberikan sumbangan sebesar 32,06 persen terhadap total PDRB Kabupaten Sukamara. Kontribusi ini meningkat sebesar 1,68 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 30,38 persen. Sedangkan di tahun 2018, kontribusi sektor Pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Sukamara sedikit lebih baik yaitu sebesar 30,67 persen.

Capaian kinerja urusan pertanian secara umum hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.59.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
			Perjanjian Kinerja		RPJMD	
			2019	2020	2019	2020
1.	Optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, perkebunan dan peternakan	Produksi sektor pertanian	11.471	6.818	11.471	6.818
		Produksi sektor perkebunan	37.342	59.212	37.342	59.212
		Produksi sektor peternakan	395.576	319.377	370.520	389.046

2.3.27. Kehutanan

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menjadi 17 lapangan usaha. Dimana salah satunya mencakup lapangan usaha sektor Kehutanan dan mempengaruhi nilai produk PDRB. Berkaitan dengan pelepasan kawasan yang menjadi program pemerintah pusat hanya untuk menjadikan kawasan areal penggunaan lainnya (APL). Pelepasan kawasan dengan berkoordinasi pemerintah daerah hanya dilakukan pada areal vektor terluar kawasan dan kawasan yang telah terdapat fasilitas umum dan pemukiman. Pada tahun 2021 pelepasan kawasan telah dilaksanakan di Desa Pulau Nibung, Desa Cabang Barat, dan di sekitar perkantoran.

2.3.28. Energi dan Sumberdaya Mineral

Produksi Listrik adalah energi yang dibangkitkan/dihasilkan oleh mesin pembangkit, mencakup Pembangkit Listrik Kuala Jelai (Melayani Desa Kuala Jelai), Pembangkit Listrik Sukamara Baru (melayani Kota Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci serta Desa Sukaramai), dan Pembangkit Listrik Pangkalan Bun (melayani Desa Sukaraja, Pangkalan Muntai, Balai Riam sampai dengan Nibung Terjun an Kenawan).

Penyediaan energi khususnya pasokan listrik baik untuk



melayani kebutuhan perumahan maupun sebagai penerangan jalan umum sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa PJU yang perlu perhatian dan desa yang belum teraliri listrik, secara bertahap kebutuhan energi listrik ini perlu dilanjutkan.

Tabel 2.60.
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik di Kabupaten Sukamara Tahun 2018

No	Data Rasio Elektrifikasi	
1	Jumlah Desa/Kelurahan	32 Desa
2	Jumlah Rumah Tangga	12.343 Rumah Tangga
3	Jumlah Kelurahan/Desa Berlistrik	31
4	Belum Berlistrik	1
5	Jumlah Rumah Tangga Berlistrik	9.981 KK
6	Rasio Elektrifikasi PLN	66,80 %
7	Rasio Elektrifikasi Non PLN	14,06 %
8	Rasio Elektrifikasi	80,86 %
9	Rasio Desa Berlistrik	96,88 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalteng, 2019.

Pada tahun 2020 sebanyak 77, 12 persen rumah tangga di Kabupaten Sukamara menggunakan sumber listrik dari PLN dan 21,21 persen menggunakan sumber listrik non PLN serta sisanya 1,66 persen tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Sukamara tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 85,73 persen.

Tabel 2.61.
Sumber Penerangan Utama Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Sumber Penerangan Utama Listrik non PLN	Bukan Listrik	Total
Kotawaringin Barat	85,86	13,75	0,39	100,00
Kotawaringin Timur	95,66	3,81	0,53	100,00
Kapuas	89,49	8,27	2,24	100,00
Barito Selatan	79,81	18,55	1,64	100,00
Barito Utara	77,56	19,88	2,57	100,00
Sukamara	77,12	21,21	1,66	100,00
Lamandau	74,82	22,06	3,12	100,00
Seruyan	67,96	30,92	1,12	100,00
Katingan	79,43	19,42	1,15	100,00
Pulang Pisau	99,71	0,13	0,17	100,00



Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Sumber Penerangan Utama Listrik non PLN	Bukan Listrik	Total
Gunung Mas	62,76	31,28	5,96	100,00
Barito Timur	94,28	4,07	1,65	100,00
Murung Raya	66,84	23,84	9,33	100,00
Palangka Raya	99,57	0,25	0,18	100,00
Kalimantan Tengah	85,73	12,59	1,68	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2020.

2.3.29. Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas- fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional. Jumlah pasar pada Tahun 2017 sebanyak 12 unit. Selain urusan perdagangan, urusan perindustrian juga mendapat perhatian khusus guna mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Sukamara. Adapun sebaran pasar-pasar dan kondisinya di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62.
Sebaran Pasar-Pasar dan Kondisinya di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)	Kelurahan/Desa	Bentuk Bangunan	Kondisi Bangunan
1	Jelai	1	Kuala Jelai	Kios	Semi Permanen
2	Pantai Lunci	1	Sungai Pasir	Kios	Permanen
		1	Sungai Cabang Barat	Los	Permanen
3	Sukamara	1	Mendawai	Kios	Permanen
		1	Padang	Los + Kios	Permanen
4	Balai Riam	1	Sekuningan Baru	Kios	Permanen
		1	Bangun Jaya	Los	Permanen
		1	Bukit Sungkai	Los	Permanen
		1	Jihing	Kios	Permanen
		1	Lupu Peruca	Kios	Permanen
5	Permata Kecubung	1	Natai Kondang	Kios	Permanen
		1	Sembikuan	Kios	Permanen
JUMLAH		12			

Sumber: Dinas Koperasi UKMP Kabupaten Sukamara, 2018.



Tabel 2.63.
Banyaknya Pedagang menurut Jenis Pedagang dan Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020

No	Kecamatan	Pedagang Besar	Pedagang Menengah	Pedagang Kecil	Mikro	Jumlah
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Jelai	-	-	27	684	711
2	Pantai Lunci	-	-	8	446	454
3	Sukamara	-	-	33	2089	2122
4	Balai Riam	-	-	87	435	522
5	Permata Kecubung	-	-	18	279	297
Kabupaten Sukamara		-	-	173	3933	4106

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020.

Tabel 2.64.
Banyaknya Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sukamara	142	148	151	159	162
2	Balai Riam	85	91	93	97	98
3	Jelai	50	57	61	66	72
4	Permata Kecubung	78	84	86	88	90
5	Pantai Lunci	88	98	101	103	103
Kabupaten Sukamara		443	478	492	513	525

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, 2019.

Untuk usaha mikro dan usaha kecil, jumlah di Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 mencapai 517 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.236 orang dengan total nilai investasi Rp3.271.070.000. Meskipun jumlahnya relative tidak banyak, namun nilai produksi usaha mikro dan kecil termasuk besar dibandingkan dengan daerah lain.

Tabel 2.65.
Indikator Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
1. Kotawaringin Barat	617	1 908	64 955 010	110 689 302
2. Kotawaringin Timur	94	120	1 786 622	676 523
3. K a p u a s	1 108	8 433	71 775 000	126 513 500
4. Barito Selatan	562	1 177	1 382 050	2 557 885
5. Barito Utara	379	1 408	11 680 398	20 517 500
6. Sukamara	517	1 236	3 271 070	53 399 661
7. Lamandau	352	-	1 612 000	534 920



Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
8. Seruyan	534	1 410	13 490 581	45 300 568
9. Katingan	702	1 642	18 632 517	45 129 440
10. Pulang Pisau	318	996	10 109 640	18 992 316
11. Gunung Mas	377	873	23 889 040	381 301 597
12. Barito Timur	685	1 473	4 099 500	129 421 220
13. Murung Raya	563	1 251	12 496 150	16 037 050
14. Palangka Raya	1 916	4 362	66 452 200	246 619 570
Kalimantan Tengah	8 724	26 289	305 631 778	1 197 691 052

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021.

2.3.30. Perindustrian

Pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian pada pemerintah daerah Kabupaten untuk mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan usaha industri, produksi industri, prasarana dan informasi industri untuk menyiapkan dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) dengan mengacu Rencana Induk Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.31. Transmigrasi

Dengan kepadatan penduduk sebesar 16 jiwa per km² Kabupaten Sukamara masih memerlukan banyak penduduk untuk dapat mengelola wilayahnya yang luas sehingga dapat memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan transmigrasi. Sebagai kabupaten yang justru mengharapkan adanya Transmigran dari daerah lain untuk datang dengan maksud meningkatkan jumlah penduduk agar dapat mempercepat kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara serta memicu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka perlu upaya mengkoordinir penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman serta pengembangan kawasan transmigrasi, pembinaan transmigran yang antara lain adalah dalam hal pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran. Informasi mengenai indikator kinerja pelayanan khususnya urusan ketransmigrasian disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.66.
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan
Ketransmigrasian Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2017

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesepakatan dengan pemerintah daerah pengirim transmigran	Buah	5	---	---	---	---	---
Jumlah Transmigran baru yang ditempatkan	KK	55	---	---	---	---	---
Prosentase Transmigran yang menetap dibandingkan transmigran yang ditempatkan	%	98,18	96,36	96,36	96,36	96,36	96,36
Jumlah pengembangan kawasan transmigrasi baru	Kawasan	---	---	---	---	---	---
Sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi transmigrasi	Jenis	6	2	---	3	---	---
	Buah	6	2	---	3	---	---
Pelatihan ketrampilan untuk transmigran	Jenis	---	---	---	---	1	1
	Orang	---	---	---	---	25	20
Kegiatan sosial budaya yang diadakan pada lokasi transmigrasi	Kali	---	1	---	1	2	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara, 2018.

Permasalahan kawasan dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.529/menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, menjadi faktor penghambat penyelesaian penempatan transmigrasi di Kabupaten Sukamara. Pada awalnya target penempatan adalah 400 KK, namun sampai dengan tahun 2017 terealisasi hanya 55 KK.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

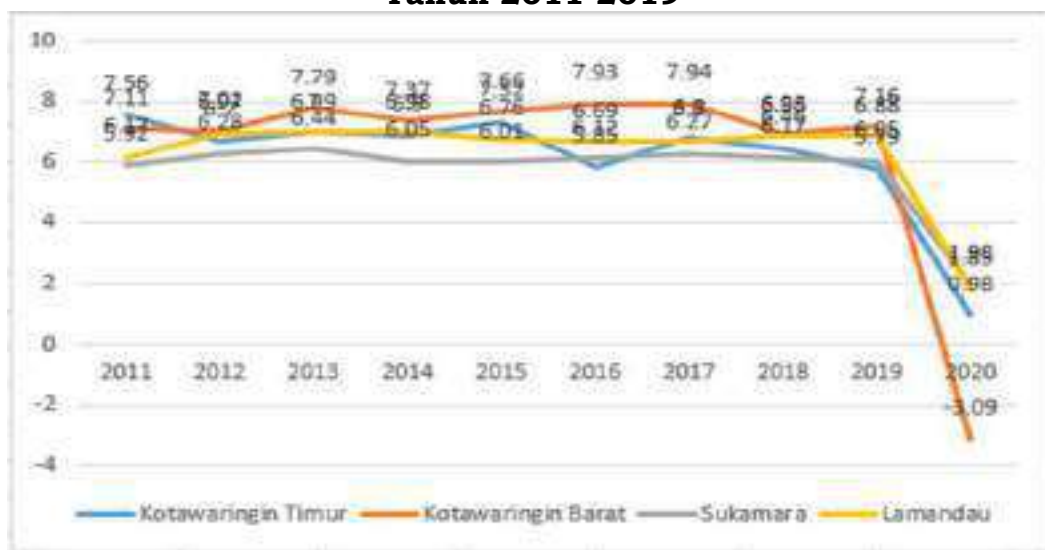
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Seperti kita ketahui, UMK di Kabupaten Sukamara mencapai 98,79 persen dari usaha yang ada di Kabupaten Sukamara. dengan begitu, UMK di Kabupaten Sukamara dapat memberikan dampak yang positif karena UMK di Kabupaten Sukamara secara umumnya menggunakan bahan baku lokal. Dengan penggunaan bahan baku lokal tersebut, Kabupaten Sukamara akan lebih aman dari guncangan perekonomian dari luar. Hal inilah yang membuat perekonomian Kabupaten Sukamara menjadi stabil dari tahun ke tahunnya. Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Kabupaten



Sukamara terlihat masih cukup stabil dan masih optimis. Dalam periode 2011-2019, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukamara masih berada di kisaran 6 persen. Hal ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh usaha- usaha yang ada di Kabupaten Sukamara, khususnya UMK.

Gambar 2.29.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat dan Kota Waringin Timur Tahun 2011-2019



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa Kabupaten Sukamara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Tetapi, terlihat bahwa Kabupaten Sukamara memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan dengan daerah sekitarnya maupun Provinsi Kalimantan Tengah (sedikit berfluktuasi) sepanjang 2016-2019 tersebut.

Kestabilan perekonomian Kabupaten Sukamara ini dikarenakan Kabupaten Sukamara masih merupakan wilayah pertanian (khususnya perkebunan), sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan guncangan ekonomi dari luar wilayah. Pada



tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara mencapai 6,12 persen dan terus berfluktuasi (tidak terlalu signifikan) setiap tahunnya, sampai akhirnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara turun hingga diangka 1,98 persen di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kab. Sukamara.

Semakin menggeliatnya dunia usaha dan perkembangan sektor riil juga mempengaruhi perkembangan sektor perbankan. Pada Tahun 2018 jumlah nasabah meningkat menjadi 37.325 orang dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 33.305 orang, dan tahun 2016 sebanyak 25.035 orang.

Tabel 2.67.
Perkembangan Indikator Perbankan Kabupaten Sukamara

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Nasabah (orang)	10.655	19.575	22.295	25.035	33.305	37.325
Tabungan (Juta Rupiah)	75.790	96.443	156.078	177.640	199.725	214.955
Giro (Juta Rupiah)	57.200	62.988	64.881	56.463	34.680	82.603
Deposito (Juta Rupiah)	13.887	57.024	33.195	50.728	47.013	50.300

Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2018.

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian suatu wilayah. Dengan infrastruktur yang baik, suatu wilayah dapat menjalankan perekonomiannya dengan lancar. Hal inilah yang membuat faktor infrastruktur dapat mempengaruhi gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi.

Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung

kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri, dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. Disisi lain, infrastruktur dapat

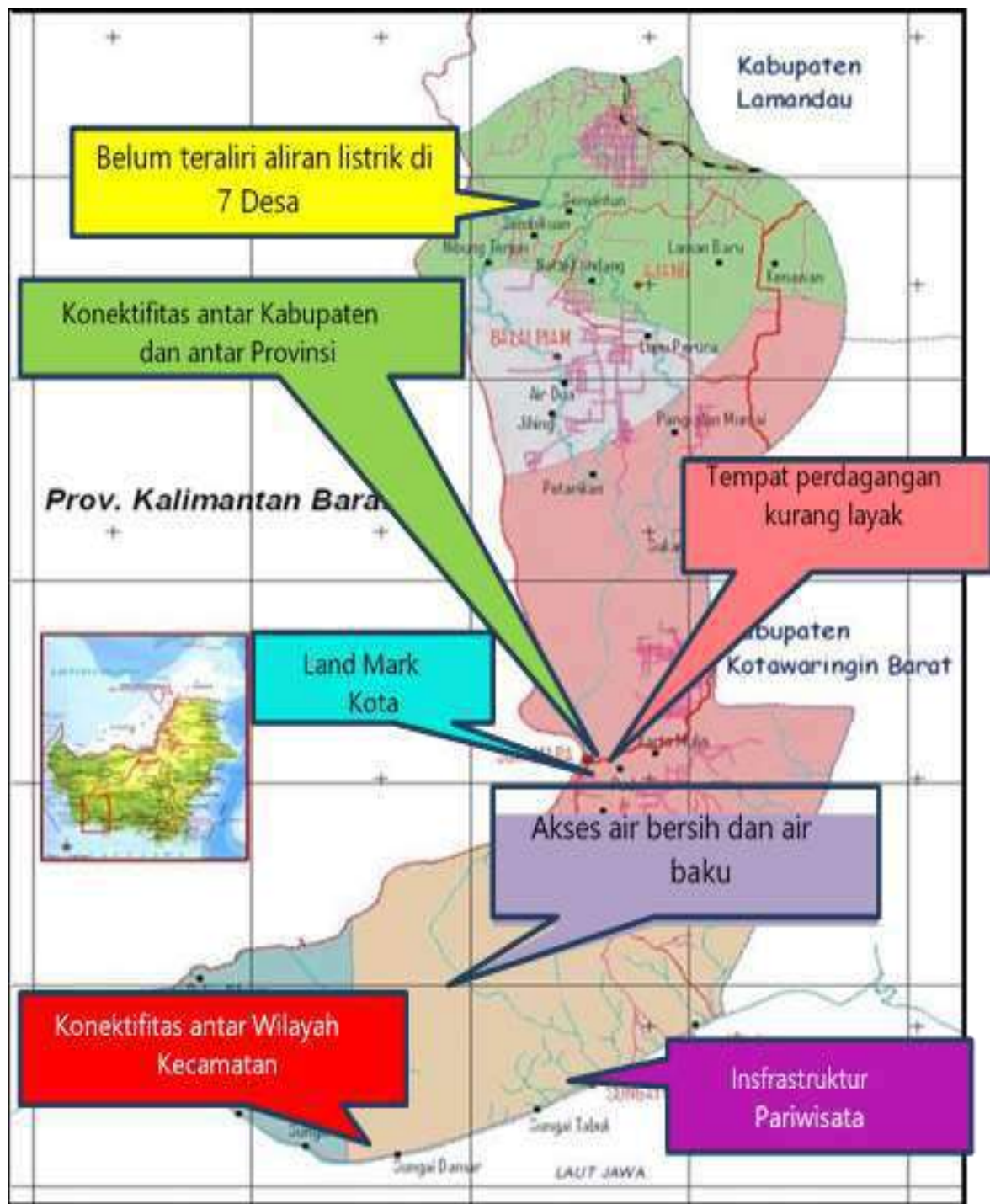


menjadi faktor pendorong positif terhadap penyerapan tenaga kerja karena sifatnya yang padat karya karena mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Infrastruktur di Kabupaten Sukamara terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan menjadi faktor pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Kategori Konstruksi yang merupakan kategori dengan kontribusi terbesar keempat (9,66 persen) terhadap perekonomian Kabupaten Sukamara pada tahun 2019.

Berdasarkan data 2019, kategori konstruksi merupakan kategori yang cukup bagus dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sukamara. Dari jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2019, sebanyak 7,07 persen adalah di sektor konstruksi. Kabupaten Sukamara terdapat 2.314 orang tenaga kerja sektor konstruksi.



Gambar 2.30.
Permasalahan Infrastruktur di Kabupaten Sukamara



Sumber: Data diolah, 2018.



Gambar 2.31.
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (Km) di Kabupaten Sukamara Tahun 2020



Sumber: BPS, Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020.

Disamping itu, Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten yang berada pada bagian paling selatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan kondisi wilayah yang paling ujung, maka akses jalan merupakan faktor yang paling penting di Kabupaten Sukamara. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara, terdapat sekitar 301,2 Km jalan di Kabupaten Sukamara merupakan jalan dengan permukaan aspal, sementara 390,9 Km lainnya merupakan jalan yang berpermukaan kerikil, tanah dan lainnya.

2.4.2. Iklim Investasi

1. Fungsi Investasi di Kabupaten Sukamara sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi sangat dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Kabupaten Sukamara antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas.



Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya dan politik, kepastian hukum dalam berusaha, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tingkat kriminalitas di Kabupaten Sukamara juga semakin menurun baik tipe maupun jenisnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Sukamara.

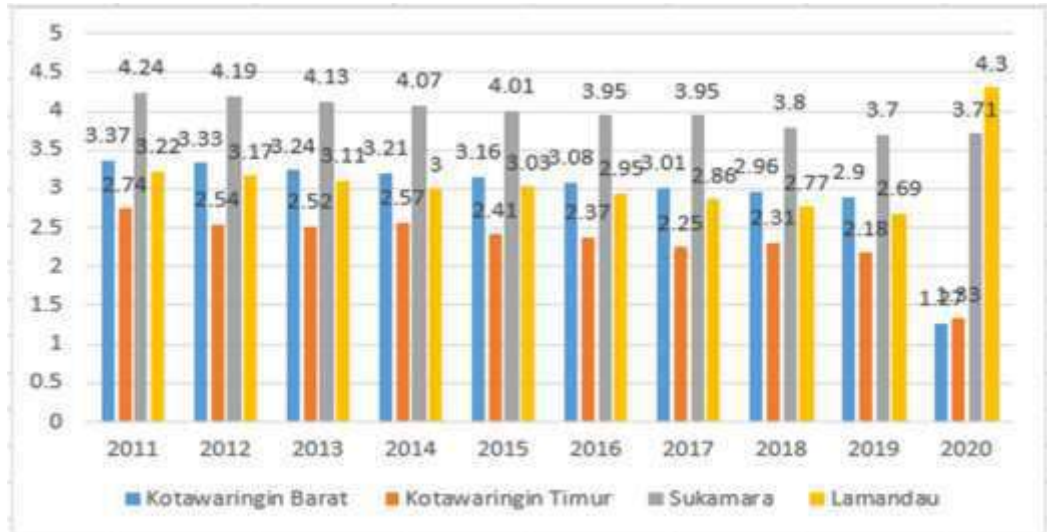
2. Kehidupan yang aman dan tenteram merupakan cita-cita hidup manusia. Penjagaan keamanan dari segala macam tindak kejahatan sudah dilakukan oleh aparat yang berwenang. Peran aparat tentunya tidak saja menjaga keamanan, tetapi juga ikut menjamin ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pada Tahun 2019 kejahatan yang ditangani kepolisian Sukamara berjumlah 39 kasus.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kabupaten Sukamara merupakan yang terkecil diantara kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2019, penduduk di Kabupaten Sukamara mencapai 64.342 jiwa penduduk atau sekitar 2,37 persen dari total penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah. Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, Kabupaten Sukamara merupakan kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan terbesar kedua di Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2019, penduduk Kabupaten Sukamara mengalami laju pertumbuhan sebesar 3,7 persen. Laju pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 2,0 persen.



Gambar 2.32.
**Laju Pertumbuhan Penduduk di Berbagai Wilayah
di Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2020**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

Dari gambar di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukamara cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Sukamara selalu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kalimantan Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini akan berdampak kepada struktur kependudukan di Kabupaten Sukamara, yang mana Kabupaten Sukamara akan mengalami bonus demografi apabila pertumbuhan penduduk terus tinggi. Dengan demikian, akan terdapat banyak sumber daya manusia dan akan membantu mendorong perekonomian Kabupaten Sukamara.

2.4.4. Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan



Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

SPM merupakan tolak ukur dalam pemberian pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM ini juga sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh masyarakat sehingga terwujudnya suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan



masyarakat; dan

6. Sosial.

Berdasarkan data Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sukamara Tahun 2020, tingkat capaian kinerja penyelenggaraan SPM di Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Tingkat capaian penyelenggaraan SPM bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	94,64
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	11,53
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	85,93

2. SPM Kesehatan

Tingkat capaian penyelenggaraan SPM bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	86
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	78
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	91
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan kesehatan balita	100	67
5	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia	100	45



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
	pada Usia Pendidikan Dasar	pendidikan dasar		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	37
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	83
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	48
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	58
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	90
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	60
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human Immunodeficiency Virus</i>)	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	32

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat capaian penyelenggaraan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	74,9
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	75,16
3	Penyediaan & Rehabitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	52,5
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	-



4. SPM Urusan Perumahan Rakyat

Tingkat capaian penyelenggaraan SPM Urusan Perumahan Rakyat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2000 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	52,5
3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	-

5. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat capaian penyelenggaraan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	-
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	96,07



6. SPM Urusan Sosial

Tingkat capaian penyelenggaraan SPM Urusan Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Persen	
			Standar	Tingkat Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	42,58
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	8,17
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100

Adapun analisis capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017 sebagai gambaran umum kondisi daerah, disajikan dalam Tabel 2.56 di bawah ini:



Tabel 2.68.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara
Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,33	34,33	33,03	32,36	31,94	5,86	<
	Pertambangan dan Pengalihan	0,97	0,97	0,97	0,97	0,93	0,70	>
	Industri Pengolahan	22,57	22,67	22,60	22,85	23,05	6,81	>
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	17,96	<
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	8,20	<
	Konstruksi	8,95	8,91	9,14	9,07	9,09	8,69	>
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,20	12,52	13,09	13,33	13,60	8,67	>
	Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,39	2,39	2,44	2,49	7,87	<
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,09	1,09	1,13	1,15	1,17	0,18	>
	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,25	1,25	1,27	1,26	7,68	<
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,84	1,88	1,90	1,90	1,84	10,29	<
	Real Estate	1,22	1,22	1,29	1,37	1,43	8,78	<
	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	7,09	<
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,27	6,01	6,11	6,08	6,05	9,76	<
	Jasa Pendidikan	4,47	4,35	4,59	4,65	4,60	8,05	<
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67	1,67	1,75	1,79	1,81	6,86	<
	Jasa lainnya	0,68	0,67	0,70	0,68	0,67	8,05	<
1.1.1.2	Laju Inflasi	--	--	--	4,04	4,13	3	<
1.1.1.3	PDRB per Kapita (ADHK)	2.336.339,40	2.619.748,70	2.619.748,70	3.202.548,40	3.572.744,10	-	-
1.1.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	6,44	6,05	6,01	6,18	6,27	6,11	>
1.1.1.5	Angka Kemiskinan (%)	4,56	4,29	4,32	3,73	3,36	2,01	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.1.1.6	Tingkat Pengganguran Terbuka (%)	1,83	1,67	4,68	--	4,83	0,32	<
1.1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,92	64,44	65,80	66,40	66,98	75,30	<
1.1.1.8	Indeks Gini	0,35	0,33	0,31	--	0,34	--	-
1.2	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	93,62	96,61	98,21	97,42	97,46	98,00	<
1.2.1.2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,21	7,30	7,81	7,32	7,83	7,93	<
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	--	--	--	--	--		
1.2.2	Kesehatan							
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	983	994	988	987,2	93,8	100	<
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,10	71,19	71,24	71,32	71,41	68,29	>
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,018	0,034	0,067	0,016	0,016	0	<
1.2.3	Ketenagakerjaan							
1.2.3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	98,17	98,33	95,32	--	95,17	99,68	<
1.3	Seni Budaya dan Olahraga							
1.3.1	Kebudayaan							
1.3.1.1	Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni (Buah)	--	--	--	--	2	45	<
1.3.1.2	Jumlah Gedung (Unit)	--	--	--	--	--	2	<
1.3.2	Pemuda dan Olahraga							
1.3.2.1	Jumlah Klub Olahraga (Buah)	20	20	20	20	20	100	<
1.3.2.2	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	--	--	--	--	--	5	<
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan Dasar (SD/MI)							
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	106,27	105,82	104,00	100,41	100,98	111,69	<
2.1.1.1.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1 : 113	1 : 115	1 : 118	1 : 121	1 : 136	1 : 110	>
2.1.1.1.3	Rasio Guru terhadap Murid	1 : 12	1 : 13	1 : 12	1 : 11	1 : 12	1 : 12	=
2.1.1.1.4	Prosentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S1/D4	56,26	70,65	86,60	83,73	91,73	100	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.1.5	Prosentase Guru SD/SDLB Bersertifikasi (%)	29,22	30,25	30,86	31,68	24,85	88,46	<
2.1.1.1.6	Angka Partisipasi Murni dan Paket A	98,44	96,09	98,88	92,46	88,02	107,21	<
2.1.1.1.7	Angka Partisipasi Kasar	115,44	122,66	111,09	110,28	109,05	117,90	<
2.1.1.2	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)							
2.1.1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	95,03	96,74	109,97	96,30	98,95	99,88	<
2.1.1.2.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1 : 138	1 : 148	1 : 152	1 : 156	1 : 129	1 : 138	<
2.1.1.2.3	Rasio Guru terhadap Murid	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 10	1 : 10	1 : 10	=
2.1.1.2.4	Prosentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4	87,64	87,07	93,93	95,34	95,77	100	<
2.1.1.2.5	Prosentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikasi (%)	30,12	29,18	26,79	27,60	13,07	91,98	<
2.1.1.2.6	Angka Partisipasi Kasar dan Paket B	113,05	106,81	113,27	101,49	96,87	99,88	<
2.1.1.2.7	Angka Partisipasi Murni	75,68	71,67	76,57	73,98	48,15	79,54	<
2.1.1.3	Pendidikan Menengah							
2.1.1.3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	69,87	60,57	78,11	74,32	--	89,17	<
2.1.1.3.2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	1 : 295	1 : 237	1 : 244	1 : 250	--	1 : 250	=
2.1.1.3.3	Rasio Guru terhadap Murid	1 : 8	1 : 8	1 : 9	1 : 7	--	1 : 8	<
2.1.1.3.4	Prosentase Guru SMA/SMALB/SMK Berkualifikasi S1/D4	96,24	96,04	98,73	95,56	--	100	<
2.1.1.3.5	Prosentase Guru SMA/SMALB/SMK Bersertifikasi (%)	25,35	24,67	25,74	24,19	--	76,74	<
2.1.1.3.6	Prosentase APK PLB setara SMALB (%)	--	--	--	--	--		
2.1.1.3.7	Angka Partisipasi Kasar	99,45	91,58	92,21	80,44	--	115,24	<
2.1.1.3.8	Angka Partisipasi Murni	58,43	57,72	60,81	62,26	--	71,06	<
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,87	0,86	0,85	0,84	0,82		
2.1.2.2	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	10,32	9,50	9,03	8,69	8,36		
2.1.2.3	Rasio Pustu per Satuan Penduduk	55,76	51,30	48,80	46,95	45,17		
2.1.2.4	Rasio Distribusi Tempat Tidur Rumah Sakit per Satuan Penduduk	88,81	112,11	95,80	104,34	130,49		
2.1.2.5	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	45,4	49,4	45,1	48,6	43,4		
2.1.2.6	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 100.000 Penduduk)	45,4	49,4	45,1	48,6	43,4		
2.1.2.7	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	17	6	12	12,8	6,2	<23	>
2.1.2.8	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	93	193	0	0	313	<102	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.2.9	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)	0,018	0,034	0,067	0,016	0,016	0	<
2.1.2.10	AKABA per 1.000 Balita	19	23	14	22	13	<32	>
2.1.2.11	Posyandu Aktif (Unit)	0	0	0	0	0	5	<
2.1.3	Pekerjaan Umum							
2.1.3.1	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	91.50	42.32	53.92	109.13	103.33	385,5	<
2.1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi dan Rawa (Ha)	0.82	0.54	1.36	0.32	2.58		
2.1.3.3	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	--	--	--	--	--		
2.1.3.4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	--	--	--	--	--		
2.1.3.5	Rasio Rumah Layak Huni	34.53	37.42	34.43	--	--		
2.1.3.6	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	67.00	76.6	99.85	--	--		
2.1.3.7	Panjang Jalan dilalui Roda 4 (Km)	112	128	215	235	235	50	>
2.1.3.8	Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (Minimal dilalui Roda 4) (Km)	230.29	230.29	230.29	230.29	230.29	50	>
2.1.3.9	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) (Km)	39.34	100	100	78.92	100	148,12	<
2.1.3.10	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) (Km)	1.470,46	2.811,10	1.101,88	3.850,34	5.677		
2.1.3.11	Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Km)	--	--	--	--	8.280,24		
2.1.3.12	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	2.62	1.72	4.36	1.02	8.28	25	<
2.1.3.13	Lingkungan Pemukiman (Ha)	--	--	--	--	--		
2.1.3.14	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	42	78.5	99.85	96.80	--	51,38	>
2.1.4	Perumahan							
2.1.4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	--	--	16,85	25	100		
2.1.4.2	Rumah Tangga Pengguna Listrik (Unit)	--	--	--	--	--		
2.1.4.3	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	--	--	45	60	75	53,81	>
2.1.4.4	Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	--	--	--	355	--		
2.1.4.5	Rumah Layak Huni (Unit)	--	--	--	11.644	--		
2.1.5	Penataan Ruang							
2.1.5.1	Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan (%)	5,84	9,72	12,19	14	0.13	--	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.6	Perencanaan Pembangunan							
2.1.6.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	--	--	--	--	--		
2.1.6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	--	--	1	--	--	1	=
2.1.6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	2	2	2	2	2	=
2.1.6.4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPDP (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	=
2.1.7	Perhubungan							
2.1.7.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (PnP)	28.000	28.800	31.573	30.467	31.335		
2.1.7.2	Load Factor Angkutan Jalan (%)	36 %	36 %	36 %	36 %	36 %		
2.1.7.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Unit)	40	45	50	55	60		
2.1.7.4	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit)	3	3	3	3	3		
2.1.7.5	Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada)	0	0	0	0	0		
2.1.7.6	Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	14	19	20	22	25		
2.1.7.7	Jumlah Angkutan Sungai (Unit)	31	31	31	31	31		
2.1.7.8	Jumlah Dermaga Sungai (Buah)	4	4	4	4	4		
2.1.7.9	Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	0	0	1	1	1		
2.1.7.10	Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Unit)	40	45	50	55	60		
2.1.7.11	Lama Pengurusan Uji Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Hari)	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam		
2.1.7.12	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.Ribu)	65.000 -110.000	65.000 -110.000	65.000 -110.000	65.000 -110.000	65.000 -110.000		
2.1.7.13	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	0	44	8	171	34		
2.1.7.14	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	0	2	2	2	17		
2.1.7.15	Pemasangan Rambu SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran) (Unit)	0	0	0	0	0		
2.1.8	Lingkungan Hidup							
2.1.8.1	Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
2.1.8.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.8.3	Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA, Keanekaragaman Hayati dan LH							
2.1.8.4	Pemantauan, Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut (Jumlah Lokasi)							
2.1.8.5	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Lingkungan Hidup (%)							
2.1.8.6	Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)							
2.1.9	Pertanahan							
2.1.9.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	--	--	--	--	--		
2.1.9.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara (Jumlah Kasus)	--	--	--	--	--		
2.1.9.3	Penyelesaian Izin Lokasi	--	--	--	--	--		
2.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.1.10.1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	73,11	70,16	75,51	80,94	83,96	98	<
2.1.10.2	Rasio Bayi Ber-akte Kelahiran	43,98	48,18	52,68	57,61	69,13		
2.1.10.2	Rasio Pasangan Ber-akte Nikah	242	257	277	306	324		
2.1.10.4	Kepemilikan KTP (Orang)	29.192	30.725	31.413	34.301	36.521	38.781	<
2.1.10.5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 Penduduk	32,69	21,72	22,42	25,47	29,42	41,70	<
2.1.10.6	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.1.10.7	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
2.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.11.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	10,91	44	44	32	32	44,50	<
2.1.11.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	--	--	--	--	10,24	21,50	<
2.1.11.3	Rasio KDRT	1	1	1	3	5	0	<
2.1.11.4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	--	--	--	--	--		
2.1.11.5	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	=
2.1.11.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,32	60,27	61,24	--	--		
2.1.11.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,61	90,14	90,09	--	--		
2.1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.12.1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	tad	tad	tad	tad	tad		
2.1.12.3	Rasio Akseptor KB	78,64	79,28	74,18	84,01	83,80	81,00	>
2.1.12.4	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	8.455	8.592	9.836	9.863	10.716	10.258	>
2.1.12.5	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	3.140	2.092	tad	tad	tad	1.800	
2.1.13	Sosial							
2.1.13.1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	2	<
2.1.13.2	PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial (Orang)	1.456	1.471	3.336	5.110	9.624	2.868	>
2.1.13.3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Kasus)	--	--	--	--	--		
2.1.14	Ketenagakerjaan							
2.1.14.1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	27,049	28,558	28,349	--	30,195	61,97	<
2.1.14.2	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun (Kasus)	5	8	8	10	10	8	<
2.1.14.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74.64	75.53	71.60	--	73.61	62	>
2.1.14.4	Pencari kerja Yang Ditempatkan (Orang)	185	112	124	260	230 (911)	2.400	<
2.1.14.5	Keselamatan dan Perlindungan	-	-	-	-	-		
2.1.14.6	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Kasus)	0	0	0	0	0		
2.1.15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
2.1.15.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	92,98	92,98	93,75	92,42	95,31	100	<
2.1.15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	158	158	182	145	145		
2.1.15.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	0	1	1	1	1	1	=
2.1.15.4	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	1.971	1.971	1.888	1.907	150	295	<
2.1.16	Penanaman Modal							
2.1.16.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Unit)	7	7	7	7	7	120	<
2.1.16.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (juta rupiah)	2.798.271.340.300	3.497.983.519.831	3.741.809.527.266	4.040.254.491.921	6.284.514.769.122		
	- PMDN (juta rupiah)	-	-	-	-	4.321.055.839.073	-	
	- PMA (US \$ Ribu)	-	-	-	-	130.897	-	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.16.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (%)	8,16	8,57	10,31	10,47	11,07		
2.1.16.4	Kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	-	622.712.179.531	243.826.007.435	298.444.954.665	280.801.347.152	-	
2.1.17	Kebudayaan							
2.1.17.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	--	--	--	--	1	26	<
2.1.17.2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	--	--	--	--	--		
2.1.17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Buah)	--	--	--	--	24		
2.1.18	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.18.1	Jumlah Organisasi Pemuda	49	49	49	49	49	49	=
2.1.18.2	Jumlah Organisasi Olahraga	20	21	21	21	21	20	>
2.1.18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	4	4	5	2	7	<
2.1.18.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	20	20	20	4	8	20	<
2.1.18.5	Gelanggang /Balai Remaja (selain Milik Swasta) (Buah)	4	4	4	5	5	6	<
2.1.18.6	Lapangan Olahraga (lapangan Volly, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Basket) (Buah)	54	54	54	54	99	54	>
2.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
2.1.19.1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)	--	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.1.19.2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Parpol)	--	ada	ada	ada	ada	ada	=
2.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.1.20.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,0085	>
2.1.20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	0,0400	0,0417	0,0399	--	--	0,035	
2.1.20.3	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan	--	--	--	--	--		
2.1.20.4	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	--	--	--	--	--		
2.1.20.5	Penegakan Perda (Buah)	--	2	5	10	10	16	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.20.6	Cakupan Penegakan Perda (%)	85	85	85	90	90	72	>
2.1.20.7	Cakupan Patroli Petugas SATPOL PP (X Sehari)	2	2	2	3	3		=
2.1.20.8	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten (%)	90	90	90	90	90	100	<
2.1.20.9	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang)	400	417	399	--	--		
2.1.20.10	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	80	80	80	80	80		
2.1.20.11	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	75	75	75	75	75		
2.1.20.12	Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui Kegiatan Percetakan Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana (Paket Kegiatan)	--	--	--	--	--		
2.1.20.13	Pengadaan Paket Logistik (Paket Kegiatan)	1	1	--	--	--		
2.1.20.14	Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Paket Kegiatan, Posko Siaga Bencana)	--	--	--	--	1		
2.1.20.15	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik (Paket)	tad	tad	tad	tad	tad		
2.1.20.16	Sistem Informasi Manajemen Pemda	--	--	--	--	--		
2.1.20.17	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	--	--	--	--	--		
2.1.20.18	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	--	--	--	--	--		
2.1.20.19	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	39,47	40,79	41,94	45,01	Dalam Proses Penilaian		
2.1.20.20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik	--	--	--	--	--		
2.1.20.21	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	--	--	--	--	--		
2.1.20.22	Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	84	83	84	81	84		
2.1.20.23	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah	7	7	7	1	1		
2.1.21	Ketahanan Pangan							
2.1.21.1	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup)	--	--	--	--	--		
2.1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.1.22.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	--	--	--	--	--		
2.1.22.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	37	37	37	37	37	38	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.22.3	Jumlah LSM (Buah)	--	--	--	--	--	--	
2.1.22.4	PKK aktif (Unit)	38	38	38	38	38	28	>
2.1.22.5	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (Paket)	--	--	--	--	--		
2.1.23	Statistik							
2.1.23.1	Buku "Kabupaten Sukamara Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1	=
2.1.23.2	Buku "PDRB Kabupaten Sukamara"	1	1	1	1	1	1	=
2.1.24	Kearsipan							
2.1.24.1	Pengelolaan Arsip secara Baku Jumlah SOPD/Desa Arsip Baku x100% Jumlah SOPD/Desa	0	0	0	0	0	115	<
2.1.24.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang) Jumlah SDM Pengelola Arsip Baru x100% Jumlah SDM Pengelola Arsip Tahun Lalu	0	0	0	0	100	187	<
2.1.25	Komunikasi dan Informatika							
2.1.25.1	Jumlah Jaringan Komunikasi	--	--	--	--	3		
2.1.25.2	Desa Dering/Telepon Pedesaan (Unit)	--	--	--	--	--	32	<
2.1.25.3	Warung Masyarakat Informasi	--	--	--	--	3		
2.1.25.4	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	--	--	--	--	--	5	<
2.1.25.5	Pusat Komunitas Kreatif (Buah)	--	--	--	--	4		
2.1.25.6	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)	--	--	--	--	--		
2.1.25.7	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (Unit)	--	--	--	--	--	6	
2.1.25.8	Data Center (Buah)	--	--	--	--	--	1	
2.1.25.9	Media Center (Buah)	--	--	--	--	1	1	=
2.1.25.10	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	--	--	--	--	5	6	<
2.1.25.11	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	--	--	--	--	3	1/2	>
2.1.25.12	Web Site milik Pemerintah Daerah (Buah)	--	--	--	--	12	1	<
2.1.25.13	Pameran/Expo terkait Kominfo	--	--	--	--	--	1	<
2.1.26	Perpustakaan							
2.1.26.1	Jumlah Perpustakaan (Unit)	1	1	1	1	1	1	=
2.1.26.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (Orang)	4.163	12.500	9.767	13.124	15.140	10.971	>



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.26.3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Jumlah Judul)	4.247	4.247	4.394	4.876	5.009	6.600	<
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian dan Peternakan							
2.2.1.1	Luas Tanam Tanaman Pangan							
2.2.1.1.1	Padi Sawah (Ha)	3.767	3.351	3.484	2.952	2.643	5.352	>
2.2.1.1.2	Padi ladang (Ha)	1.457	1.482	1.157	488	337	2.360	>
2.2.1.1.3	Jagung (Ha)	319	346	201	93	488	301	>
2.2.1.1.4	Kedelai (Ha)	14	40	11	1	0	14,35	<
2.2.1.1.5	Kacang Tanah (Ha)	47	75	35	7	26	316	<
2.2.1.1.6	Kacang Hijau (Ha)	4	1	6	5	0	107	<
2.2.1.1.7	Ubi Kayu (Ha)	282	312	228	160	619	289,12	>
2.2.1.1.8	Ubi Jalar (Ha)	129	142	95	47	83	132,26	>
2.2.1.2	Luas Panen Tanaman Pangan							
2.2.1.2.1	Padi sawah (Ha)	2.440	1.825	1.610	1.981	850	11.131	<
2.2.1.2.2	Padi ladang (Ha)	881	645	747	400	88	3.277	<
2.2.1.2.3	Jagung (Ha)	271	258	168	58	68	956	<
2.2.1.2.4	Kedelai (Ha)	11	29	11	1	0	51	<
2.2.1.2.5	Kacang Tanah (Ha)	33	53	31	6	9	316	<
2.2.1.2.6	Kacang Hijau (Ha)	2	1	3	6	0	107	<
2.2.1.2.7	Ubi Kayu (Ha)	164	222	162	96	62	912	<
2.2.1.2.8	Ubi Jalar (Ha)	106	129	67	42	10	591	<
2.2.1.3	Produktivitas Tanaman Pangan							
2.2.1.3.1	Padi Sawah (Ku/Ha)	34,93	39,21	39,19	39,23	39,21	48,50	<
2.2.1.3.2	Padi Ladang (Ku/Ha)	17,98	19,47	19,42	19,48	19,48	20,85	<
2.2.1.3.3	Jagung (Ku/Ha)	17,95	17,96	17,97	17,93	17,79	18,35	<
2.2.1.3.4	Kedelai (Ku/Ha)	10,72	10,50	10,56	10,77	10,77	11,12	<
2.2.1.3.5	Kacang Tanah (Ku/Ha)	10,95	58,27	11,01	11,14	11,20	11,17	<
2.2.1.3.6	Kacang Hijau (Ku/Ha)	8,00	0,80	8,00	0,00	8,00	8,65	<
2.2.1.3.7	Ubi Kayu (Ku/Ha)	117,10	116,96	116,80	116,93	116,97	117,10	<
2.2.1.3.8	Ubi Jalar (Ku/Ha)	99,68	99,27	99,30	99,32	99,72	99,70	<
2.2.1.4	Produksi Tanaman Pangan							



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.1.4.1	Padi Sawah (Ton)	8.523,28	7.156,28	6.309,68	7.210,09	3.334,47	49.093	<
2.2.1.4.2	Padi Ladang (Ton)	1.583,62	1.255,54	1.450,45	779,34	171,45	6.728	<
2.2.1.4.3	Jagung (Ton)	486,49	459,87	292,86	58,70	121,91	1.750	<
2.2.1.4.4	Kedelai (Ton)	11,79	30,45	11,62	0,00	0,00	57	<
2.2.1.4.5	Kacang Tanah (Ton)	36,13	10,99	30,83	4,48	9,47	352	<
2.2.1.4.6	Kacang Hijau (Ton)	1,60	8,00	1,60	3,20	0,00	92	<
2.2.1.4.7	Ubi Kayu (Ton)	1.920,52	2.584,76	1.892,16	865,61	724,99	10.674	<
2.2.1.4.8	Ubi Jalar (Ton)	0,00	1.270,62	705,01	329,07	99,32	5.865	<
2.2.1.5	Luas Panen Tanaman Hortikultura							
2.2.1.5.1	Buah-Buahan (Ha)	359	392	443	502	788,00	2.583	<
2.2.1.5.2	Sayuran (Ha)	1.357	1.036	431	290	137,00	1.507	>
2.2.1.5.3	Tanaman Hias (M ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.2.1.5.4	Tanaman Obat (M ²)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.2.1.6	Produksi Tanaman Hortikultura							
2.2.1.6.1	Buah-Buahan (Ku)	2.426,00	1.674,21	1.200,44	18.531,40	48.037,00	59.518	>
2.2.1.6.2	Sayuran (Ku)	4.356,00	3.394,06	1.405,42	1.234,20	445,23	5.911	>
2.2.1.6.3	Tanaman Hias (Tangkai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.2.1.6.4	Tanaman Obat (Kg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.2.1.7	Populasi Ternak							
2.2.1.7.1	Sapi Potong (Ekor)	2.687	2.794	2.794	3.017	3.447	15.886	<
2.2.1.7.2	Kambing (Ekor)	249	207	558	753	859	1.602	>
2.2.1.7.3	Domba (Ekor)	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.7.4	Babi (Ekor)	2.489	1.015	2.651	4.226	5.635	14.414	<
2.2.1.7.5	Ayam Buras (Ekor)	29.635	29.156	37.975	51.663	65.125	157.308	>
2.2.1.7.6	Ayam Ras Petelur (Ekor)	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.7.7	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	44.100	44.935	49.665	49.783	75.276	234.138	<
2.2.1.7.8	Kerbau (Ekor)	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.7.9	Itik (Ekor)	1.241	1.784	5.416	4.028	4.752	6.523	>
2.2.1.8	Produksi Ternak							
2.2.1.8.1	Sapi Potong (Ton)	57.590	36.140	70.910	73.812	73.811	334.134	<
2.2.1.8.2	Kambing (Ton)	1.395	1.470	3.252	3.618	3.618	8.095	>
2.2.1.8.3	Domba (Ton)	0	0	0	0	0	0	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.1.8.4	Babi (Ton)	15.106	5.044	78.764	79.856	79.856	87.642	>
2.2.1.8.5	Ayam Buras (Ton)	11.596	2.918	55.601	19.646	19.646	61.557	>
2.2.1.8.6	Ayam Ras Petelur (Ton)	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.8.7	Ayam Ras Pedaging (Ton)	88.900	89.870	261.000	172.600	172.600	471.892	>
2.2.1.8.8	Kerbau (Ton)	0	0	0	0	0	0	
2.2.1.8.9	Itik (Kg)	441	181	3.518	1.516	2.444	2.355	>
2.2.1.9	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (%)	0,78	0,82	0,81	0,71	0		
2.2.1.10	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	2,27	2,19	2,25	2,23	0		
2.2.1.11	Peningkatan Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB (%)	0,12	0,13	-1,14	-0,40	0		
2.2.1.12	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB %	0,25	0,26	0,24	0,22	0		
2.2.1.13	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (%)	25,15	25,31	24,14	23,88	0		
2.2.2	Perkebunan							
2.2.2.1	Peningkatan Produktivitas Perkebunan dari Potensi Produksi di Lapangan (%)	51,05	54,51	57,90	61,90	64,52	67,76	<
2.2.2.2	Peningkatan Jumlah SDM Perkebunan Berkualitas (%)	3,04	3,45	4,25	4,92	0	6,28	<
2.2.2.3	Penyerapan Tenaga Kerja Baru di Sektor Perkebunan (Jumlah Tenaga Kerja Baru/Tahun)	165	309	264	189	0	1.008	<
2.2.2.4	Peningkatan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (%)	0,60	1,75	2,91	4,06	5,22	6,37	<
2.2.2.5	Penumbuhan Sentra-sentra Komoditas Wilayah Pengembangan Perkebunan (Jumlah Sentra Pengembangan Perkebunan)	2	0	3	4	0	5	<
2.2.2.6	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)	69.531,30	309	264	189	0	70.611,30	<
2.2.2.7	Nilai Tukar Petani (%)	98,66	98,80	99,00	99,15	99,65	100	<
2.2.3	Perikanan							
2.2.3.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	634,27	658,89	683,27	1.307,21	1.307,21		
2.2.3.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.975,1	5.021,3	4.224,90	3.826,30	4.104,898		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.3.3	Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	38,7	39,94	41,48	41,48	54,32	54,5	<
2.2.3.4	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	808,55	820,27	757,63	756,63	786,67		
2.2.3.5	Peningkatan Produksi Benih Ikan (Juta Ekor/Tahun)	63.400	64.750	46.650	73.312	60.375		
2.2.3.6	Nilai Tukar Nelayan (%)	-	-	-	-	-		
2.2.3.7	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	3,74	3,68	3,53	3,31			
2.2.4	Pariwisata							
2.2.4.1	Kunjungan Wisata							
	- Wisatawan Nusantara	10.200	12.050	13.150	16.500	20.800	13.500	>
	- Wisatawan Mancanegara	3	5	10	15	2		
2.2.4.2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7,43	6,91	8,24	8,85	9,54	0,70	>
2.2.5	Perdagangan							
2.2.5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,20	12,52	13,09	13,33	13,60	16,21	<
2.2.6	Perindustrian							
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	22,57	22,67	22,60	22,85	23,05	2,53	>
2.2.6.2	Pertumbuhan Industri (Unit)	44	62	57	4	18	30	>
2.2.6.3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin/Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	--	--	--	--	--	--	
2.2.7	Ketranmigrasian							
2.2.7.1	Transmigran Swakarsa (KK)	55	-	-	-	-		
2.2.7.2	Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-		
3	ASPEK DAYA SAING							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0.041	0.041	0.041	26,85 Unit/KM	26,85 Unit/KM		
3.2.1.2	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum (Orang/Barang)	2.482/520899,06	2.482/520899,06	2.482/520899,06	2.482/520899,06	2.482/520899,06		
3.2.1.3	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	28.000	28.800	31.573	30.467	31.335		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan Ruang terhadap RTRW (%)							
3.2.2.2	Luas Wilayah Produktif (Ha)							
3.2.2.3	Luas Wilayah Industri (Ha)							
3.2.2.4	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)							
3.2.2.5	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)							
3.2.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.2.3.1	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit)	3	3	3	4	5		
3.2.3.2	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit)							
3.2.3.3	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran (Buah)							
3.2.3.4	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel (Buah)							
3.2.4	Komunikasi dan Informatika							
3.2.4.1	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (%)	--	--	--	--	79,18		
3.3	Iklm Berinvestasi							
3.3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.3.1.1	Angka Kriminalitas (Kejadian)	--	--	11	13	25	68	>
3.3.1.2	Jumlah Demo							
3.3.1.3	Lama Proses Perijinan (Ijin/Hari)	7	7	7	7	7	7	=
3.3.1.4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah (Perda/% : Retribusi Daerah/%)							
	Pajak Daerah 10 (sepuluh) Jenis Pajak	177,77	134,89	134,14	123,01	317,28	100	>
	Retribusi Daerah	127,82	144,78	108,92	107,57	100,51	100	>
	Retribusi Jasa Umum 14 Jenis Pungutan	130,19	153,76	107,07	102,24	96,20	100	>
	Retribusi Jasa Usaha 10 Jenis Pungutan	111,67	104,39	126,15	161,42	132,03	100	>
	Retribusi Perijinan Tertentu 4 Jenis Pungutan	145,70	128,22	106,84	104,42	111,69	100	>
3.3.1.5	Jumlah Perda yang Mendukung Iklm Usaha (Perda)	3	6	3	1	6	8	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
3.4	Sumber Daya Manusia							
3.4.1	Kepegawaian							
3.4.1.1	Jumlah Lulusan SMA	321	313	309	303	252		
3.4.1.2	Jumlah Lulusan S1	950	1008	1108	1132	997		
3.4.1.3	Jumlah Lulusan S2	28	29	28	28	37		
3.4.1.4	Jumlah Lulusan S3	--	--	--	--	--		
3.4.1.5	Rasio Lulusan SMA : S1 (%)	25.26	23.69	21.81	21.11	20.18		
3.4.1.6	Rasio Lulusan S1 : S2 (%)	97.14	97.20	97.54	97.59	96.42		
3.4.2	Ketenagakerjaan							
3.4.2.1	Jumlah Lulusan SMA	4,770	5,261	6,778	-	6,900		
3.4.2.2	Jumlah Lulusan S1	1,796	2,293	1,648	-	2,934		

Tabel 2.69.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara
Tahun 2019-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,52	68	67,95	68,03	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	53	53	55,87	68,62	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,19	5,9	6,05	1,98	
4	Angka Kemiskinan	%	3,36	3,36	3,16	3,32	
5	Laju Inflasi	%	0,65	0,65	1,22	0,52	
6	PDRB Per Kapita (ADHK)		42,36	42,42		43,53	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	4,83	3,57	4,39	4,7	
8	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)		TAD	45	45	45	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82,25	89,3	92,49	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1	Angka melek huruf (penduduk usia > 15 tahun)	%	97,58	97,62	97,48	98,56	
2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7,83	7,9	7,91	8,01	
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	10,2	10,5	12,11	12,12	
4	Angka usia harapan hidup	tahun	71,41	71,61	71,49	71,53	
5	Persentase balita gizi buruk	%	2,00	≤ 1			
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,61	73,91	73,37	65,6	
7	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	%	95,17	96,43	96,61	95,3	
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHB)	%	31,73		30,67	30,39	
10	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	13,55		14,36	14,59	
11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	23,36		22,37	21,79	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR							
1 URUSAN PENDIDIKAN							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA	%	54,95	88	54,37	84,47	
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA)	%	38,36	87,52	33,28	45,07	
1.2	Pendidikan Menengah						
1.2.1	Angka Partisipasi Murni						
1.2.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	88,20	90	84,72	86,64	
1.2.1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48,15	79	61,17	63,15	
1.2.2	Angka partisipasi sekolah						
1.2.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun	%	100,98	102	89,91	91,96	
1.2.2.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	%	98,95	99,25	96,7	97,31	
1.2.3	Angka Putus Sekolah:						
1.2.3.1	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,15	0,14	0,13	0,13	
1.2.3.2	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,52	0,5	0,45	0,13	
1.2.4	Penyelenggaraan UN/USBN/US dan Ulangan Akhir Semester Bersama Pendas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	90	94	100	100	
2 URUSAN KESEHATAN							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	AKB	10	≤ 10	10,73	9,57	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	AKI	3.00	≤ 3	0	0,74	
2.3	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	20.00	20.00	100	100	
2.4	Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan	%	58.50	75.00	100	96,13	
2.5	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	80.00	80.00	100	80	
2.6	Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart	%	75	80	100	80	
2.7	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)		47	80	91	36	
2.8	Case Notification Rate (CNR) TB Paru	%	61.20	70.00	72,32	55,44	
2.9	Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	76.00	70.00	0	100	
2.10	AFP Rate		1	1	0	0	
2.11	Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS	%	2.50	80.00	26	2,50	
2.12	Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	%	4.00	60.00	0	70	
2.13	Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit	%	TAD	15	80	20	
2.14	Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit		<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	
2.15	Persentase penggunaan obat tradisional	%	39.00	45.00	31,33	-	
2.16	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	%	70.00	75.00	27,08	-	
2.17	Persentase produk Alkes dan PKRT yang memenuhi syarat (pengujian sampel)	%	80.00	80.00	72,39	85,00	
2.18	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana sesuai standar	%	20.00	40.00	100	80	
2.19	Persentase Pustu dan Poskesdes dengan kondisi sarana dan prasarana sesuai standar	%	10.00	20.00	82.14	80	
2.20	Jumlah desa aman OMKABA (Obat, Makanan, Kosmetika, dan Bahan Berbahaya)		0	5	0	0	
2.21	Persentase Desa melaksanakan STBM	%	100.00	100.00	84,00	80,00	
2.22	Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	45.00	60.00	56,00	75,00	
2.23	Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	%	30.00	50.00	62,82	50,00	
2.24	Persentase jumlah desa ODF	%	46.90	50.00	46	46,88	
2.25	Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi	%	100	20	100	100	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.26	Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit	%	75	75	100	85	
2.27	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	77.00	80.00	90,6	74,47	
2.28	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	85.00	85.00	80,9	90,37	
2.29	Persentase Persalinan ditolong Tenaga kesehatan	%	91.30	92.00	91	75,07	
2.30	Cakupan kunjungan bayi	%	72.00	82.00	50,6	63,75	
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	%	72.00	82.00	87,23	66,98	
2.32	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100.00	100.00	100	100	
2.33	Persentase balita pendek (stunting)	%	29.70	≤ 20	16,27	4,24	
2.34	Prevalensi anemia ibu hamil	%	29.00	≤ 28	12,37	9,59	
2.35	Prevalensi anemia remaja putri	%	20.00	≤ 30	TAD	40,59	
2.36	Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat	%	20.00	60.00	100	100	
2.37	Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut	%	75	80	80	60	
2.38	Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	%	60.00	100.00	100	100	
2.39	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini Secara Rutin	Unit	2	3	4	5	
2.40	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek (%)	%	60.00	100.00	100	100	
2.41	Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk	%	100	100	200	199,33	
2.42	Rasio tenaga perawat per 100.000 penduduk	%	158	158	278	295,21	
2.43	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	%	40	40	19	31,47	
2.44	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	%	12	12	3	3	
2.45	Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan		25	100	100	75	
2.46	Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit	%	65	70	65	85	
2.47	IKM	IKM	TAD	2	0	2,5	
2.48	Persentase desa siaga aktif	%	6.25	9.38	0	9,38	
2.49	Proporsi Rumah Tangga ber-PHBS	%	30.00	50.00	71,88	-	
2.50	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SPM	%	20.00	20.00	100	100	
2.51	Persentase Murid SD/MI diperiksa (UKGS)	%	5.32	6.00	48,8	-	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.52	BOR	%	38,36	60	30,45	21,63	
2.53	Av-Los	hari	2.4	06-Sep	2,49	2,51	
2.54	TOI	hari	5.47	01-Mar	7,98	12,88	
2.55	BTO	hari	41.72	40-50	37,04	20,54	
2.56	NDR		3.74	25/1000	3,18	12,05	
2.57	GDR		14.66	45/1000	11,75	26,99	
2.58	Angka Kematian Ibu	AKI	1	<5	0	TAD	
2.59	Angka Kematian Bayi	AKB	TAD	<5	0	TAD	
2.60	IKM	IKM	75	80	77	78	
2.61	Cakupan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	%	19.000	20.000	16.133	12.789	
2.62	Cakupan SPM	%	80	80	80	80	
2.63	Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi	%	25	60	44,18	16,3	
2.64	Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK)	%	80	80	80	80	
2.65	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart	%	75	50	80	80	
2.66	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart dan terkalibrasi di rumah sakit	%	75	50	96,44	68	
2.67	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit	%	75	90	90	96	
2.68	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart	%	75	75	75	64	
2.69	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart dirumah saki	%	36	50	89	58	
2.70	Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	%	75	80	89	85	
2.71	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	%	75	80	80	94	
2.72	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit	%	75	80	80	84	
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG						
3.1	Pekerjaan Umum:						
3.1.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	%	17,77	30,17	61,78	32,77	
		per tahun					



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2	Persentase jalan kabupaten yang ditangani	%	1,13	1,92	3,2	15,99	
		per tahun					
3.1.3	Persentase drainase dan gorong-gorong yang terpelihara	%	14,65	17,65	11,81	62	
3.1.4	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	57,34	7,59	86,9	87,8	
		per tahun					
3.1.5	Persentase tersedianya air baku	%	42,5	50,98	-	-	
3.1.6	Persentase Masyarakat yang dapat Mengakses Air Minum Layak	%	8,85	3,42	-	16,52	
3.1.7	Persentase Jaringan Irigasi dlm Kondisi baik	%	57,34	64,93	86,9	87,8	
3.1.8	Rasio jalan poros desa dan jembatan dalam kondisi baik	%	13,04	19,79	-	32,77	
3.1.9	Persentase pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	%	32	38,4	24,61	1,453	
3.1.10	Persentase Wilayah bebas banjir perkotaan	%	32	37,71	12,21	-	
3.1.11	Persentase Wilayah bebas banjir perdesaan	%	57,34	64,93	-	-	
3.1.12	Meningkatnya jaringan drainase	%	25	30	23,17	62	
3.2	Penataan Ruang:						
3.2.1	Persentase Pelaksanaan Perijinan, Peraturan Zonasi, Pengenaan Sanksi	%	TAD	9	64,5	60,21	
3.2.2	Jumlah Perda/perbub. Rencana Tata Ruang yang disusun	%	33,3	44,4	-	-	
3.2.3	Persentase tata ruang yang digunakan sebagaimana mestinya	%	63,15	68,15	-	-	
3.2.4	Persentase Pengadaan Tanah	%	50	57,8	33,3	-	
3.2.5	Persentase ruang publik yang tertata dan pertamanan yang representatif	%	45,45	9,09	7,28	-	
3.2.6	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana umum dan pemerintah lengkap dengan fasilitas pendukungnya	%	85,18	2,27	-	-	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.1	Persentase Penurunan Kawasan dan Permukiman Kumuh	%	38,44	2,5	15,23	12,32	
4.2	Persentase Rumah Layak Huni	%	37,97	5,06	68,32	45,43	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Sanitasi Layak	%	75,19	4,81	78,23	3,33	
4.4	Persentase pelaksanaan pembangunan sanimas	%	13,56	14,06	15,49	2,23	
4.5	Persentase luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	38,44	40,94	52	31,34	
4.6	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	62,03	64,63	52,55	9,83	
4.7	Persentase penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi MBR	%	28,13	37,51	30,86	0	
4.8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana air limbah	%	37,97	43,03	40,61	42,21	
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	0.00	0.00	80	0,5	
5.2	Jumlah kasus Kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA)	Kasus	32	40	39	33	
5.3	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	%	TAD	0.00	0	-	
5.4	Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100.00	0.00	0	0,5	
5.5	Prosentase pencapaian Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100.00	97	95	
5.6	Jumlah Pengamanan Pengawal Bupati dan Wakil Bupati	orang	30	30	34	10	
5.7	Persentase Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	%	75.62	100.00	90	0,75	
5.8	Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk		2	2	2	-	
5.9	Prosentase Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kab.Sukamara	%	53,95	20	20	20	
5.10	Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	TAD	0.00	0	-	
5.11	Jumlah kegiatan Keagamaan	Kegiatan	TAD	12	TAD	6	
5.12	Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan NKRI masyarakat di Kabupaten Sukamara	%	92,14	22,85	22,85	26,57	
5.13	Terselenggaranya peringatan hari - hari besar	Hari	45	9	7	6	
5.14	Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja, Hindu kaharingan dan Buddha	Orang	TAD	100	TAD	TAD	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.15	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang organisasi kemasyarakatan/LSM dan OKP	%	TAD	18,75	0	0	
5.16	Termonitornya Pelaksanaan Pileg / Pilpres / Pilkada di Kabupaten Sukamara	%	0,00	33,33	33,33	100	
5.17	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang di tindaklanjuti	%	TAD	0,00	50	0,5	
6	URUSAN SOSIAL						
6.1	cakupan potensi masyarakat yang menerima bantuan sosial	%	9,624	10,586	11,178	11,459	
6.2	persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	95,9	95,9	97,19	94,31	
6.3	persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan dan penanganan	%	100	100	94,25	100	
6.4	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	
6.5	Jumlah pasangan pengantin yang mengikuti Sidang Isbat/ Nikah Massal	Pasang	100	100	0	-	
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
1	URUSAN TENAGA KERJA						
1.1	Rasio kasus sengketa ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan kasus yang tercatat/dilaporkan	%	95	95	80	100	
1.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45,34	75	44,1	44,1	
1.3	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	95	95	87,11	87,11	
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	30	210	15	15	
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.1	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Sukamara		18,5	100	100	-	
2.2	Cakupan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan PUG, PP PA	%	TAD	5	5	0,1	
2.3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	TAD	< 2	1	>1	
2.4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	%	5	5	3	1	
3	URUSAN PANGAN						



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Ketersediaan pangan utama	kg	209	215	61,74	187,4	
3.2	Penguatan cadangan pangan	ton	32,97	35,09	29,7	23,4	
3.3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	83,9	89,3	83,6	84,7	
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
5.1	Indeks Kualitas Pencemaran Air	Indeks	47,2	47,2	47,2	56,67	
5.2	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	Indeks	91,2	91,2	91,2	90,93	
5.3	Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air	%	20	40	50	60,95	
5.4	Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau merusak lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	
5.5	Persentase penanganan sampah	%	60	60	86,13	46,46	
5.6	Persentase Luasan Lahan yang direhabilitasi akibat dampak Kebakaran hutan dan laha	%	5	35	10	6,25	
5.7	Persentase RTHK Publik	%	2	40	42	0,17	
5.8	Presentase peningkatan kapasitas TPA, TPS, TPS3R	%	24,76	2,86	49	13,74	
5.9	Persentase ketersediaan akses informasi lingkungan hidup	%	60	60	80	71,2	
5.10	Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin	%	61	70	83	-	
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
6.1	Persentase Cakupan penduduk ber KTP persatuan penduduk	%	0,84	0,9	0,96	93,76	
6.2	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	0,37	0,41	0,41	47,76	
6.3	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0,25	0,35	0,34	37,27	
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
7.1	Persentase aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	%	100	100	100	-	
7.2	Jumlah dokumen laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Dok	TAD	29	TAD	29	
7.3	persentase persentase lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang aktif	%	83,33	100	100	100	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4	persentase desa yang mengadakan musrenbangdes tepat waktu + P3MD	%	TAD	100	100	100	
7.5	Persentase BUMDes aktif	%	34	45	77,8	58	
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
8.1	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Tahun	87	51	32	26	
8.2	persentase ketersediaan alokon	%	85	0	95	100	
8.3	persentase ketersediaan KIE KB	%	50	0	80	80	
8.4	Cakupan Pelayanan PIK KRR Terhadap Remaja	%	60	75	80	75	
8.5	Cakupan Kader terlatih	%	70	75	3,37	70	
8.6	Cakupan peserta MKJP	%	12,36	17,03	15,75	14,03	
8.7	Persentase keluarga Pra Sejahtera	%	4,1	4,07	4,14	3,8	
8.8	Cakupan PUS yang ingin berKB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	12,52	11	11,42	9,6	
9	URUSAN PERHUBUNGAN						
9.1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)	%	85	3	3,53	2	
9.2	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	55	9	16,36	5	
9.3	Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	37,35	0	0	15	
9.4	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	%	55	4,77	8,67	18	
9.5	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	91,4	71,6	78,34	60	
9.6	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	0,21	0,23	1,09	1	
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
10.1	Tersedianya Roadmap TIK	dok	TAD	1	0	-	
10.2	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	18,75	25	25	26	
10.3	Persentase pengelolaan aplikasi layanan publik	%	20	30	30	30	
10.4	Prosentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	100	100	58	85	
10.5	Persentase peningkatan menuju lembaga DPRD yang transparan	%	TAD	100		0,5	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.6	persentase ketersediaan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi antar OPD	%	50	55	90,9	90,9	
10.7	Terfasilitasinya kerjasama pemerintah daerah dan media massa	keg	11	11	11	TAD	
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
11.1	Persentase koperasi sehat	%	12	20	33,33	56,66	
11.2	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	%	10	15	11	70	
11.3	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	8	13	7,55	66,66	
11.4	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	10	20	12	50	
11.5	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	10	20	12	50	
11.6	Persentase OVOP yang berkembang	%	2	4	2	50	
12	URUSAN PENANAMAN MODAL						
12.1	Persentase peningkatan investasi	%	2,75	3,69	1,1	-	
12.2	Nilai Realisasi Investasi	Rp	7,008,931,296,905	7.115.008.941,07	7.858.595.883.217	4.357.160.000	
12.2.1	-PMDN	Rp	5,009,646,482,699	5,114,724,126,866,00	5.827.563.878.386	2.729.400.000	
12.2.2	-PMA	US \$	133,285,654.28	133,352,320.95	135.402.133,66	1.842.200.000	
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
13.1	Cakupan pembinaan cabang olahraga	%	TAD	78	95,65	17,54	
13.2	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	12,5	12,5	78,26	4,17	
13.3	Sarana dan Prasarana berstandar nasional dan internasional	unit	7	2	0	-	
13.4	Jumlah Tenaga Keolahragaan	orang	23	30	37	-	
13.5	Cakupan pembinaan kecintaan dan rasa kebangsaan pemuda terhadap NKRI	%	15,9	15,9	17,36	1,2	
13.6	Cakupan organisasi kepemudaan yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	4,65	4,65	0	-	
14	URUSAN STATISTIK						
14.1	Tersedianya buku statistik sektoral	buku	0	2	3	93	
15	URUSAN PERSANDIAN						



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.1	persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	20.00	0.40	93	-	
16	URUSAN KEBUDAYAAN						
16.1	Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi	buah	1	3	4	14	
16.2	Persentase Perkembangan Sanggar Seni/Budaya	%	10	40	25	20	
16.3	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif	%	10	40	25	20	
16.4	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	keg	1	1	1	0	
16.5	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	buah	-	-	-	-	
17	URUSAN PERPUSTAKAAN						
17.1	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	buah	2	4	10	4	
18	URUSAN URUSAN KEARSIPAN						
18.1	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	0.00	0.00	0	-	
18.2	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar	%	0.00	10.00	0	0	
18.3	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	%	0.00	0.00	0	0	
18.4	Jumlah Buku himpunan PERDA, PERBUP, Keputusan Bupati, Berita Daerah, Lembaran Daerah dan peraturan perundang undangan	buku	81	250	1	1	
18.5	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0.00	3.00	0	0	
	LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1	URUSAN PARIWISATA						
1.1	Kunjungan wisata						
1.1.1	- Wisman	Orang	5	5	2	-	
1.1.2	- Wisnus	Orang	15,667	23,8	47,882	48.316	
1.2	Jumlah obyek wisata unggulan	Buah	2	2	3	3	
1.3	PAD sektor pariwisata	Rp	884,38	1.003,38	1.028.617.945	2.341.700.000	
1.4	Jumlah desa wisata	desa	TAD	2.00	0	3	
2	URUSAN PERTANIAN						



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	27.14	27.14	28,37	25,58	
2.2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	73.01	73.01	78,1	73,98	
2.3	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	6.39	6.39	6,2	7,4	
2.4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Per ha	37.3	37.41	41,61	41,77	
2.5	Produksi sektor perkebunan	Ton	35,869.00	36,587.00	37,342,00	59.212	
2.6	Produksi sektor peternakan	Kg	351,994.00	370,520.00	395.576,00	389.946	
2.7	Produksi sektor peternakan	Kg	351,994.00	370,520.00	395.576,00	0	
2.8	Produksi sektor pertanian	Ton	25,560.00	26,843.00	11.471,00	6.818	
2.9	Produksi sektor perkebunan	Ton	35,869.00	36,587.00	37.342,00	0	
5	URUSAN PERDAGANGAN						
5.1	Persentase promosi dagang produk unggulan daerah	%	TAD	67	42,86	0	
5.2	Persentase pasar tradisional, modern dan SPBU yang diawasi	%	25	17	12,5	100	
5.3	persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	47	12	0,1	0,47	
5.4	Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	0.00	25.00	25.00	0	
5.5	persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	47	12	0,1	0	
5.6	Tersedianya lapak berjualan bagi pedagang makanan dibulan Puasa	unit	TAD	50	50	0	
6	URUSAN PERINDUSTRIAN						
6.1	Jumlah sentra industri yang berkembang	unit	0	0	0	-	
6.2	Persentase pelaksanaan fasilitasi usaha furniture	%	0.00	0.00	0	0	
6.3	Persentase pembinaan sentra industri	%	0.00	0.00	0	0	
6.4	Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	Unit /tahun	12	9	9	100	
6.5	Persentase kube aktif	%	0.00	100	100	100	
7	URUSAN TRANSMIGRASI						
7.1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Orang	55	0	0	0	
7.2	Jumlah Transmigran yang menetap	%	98,18	98,18	96,36	96	
8	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
8.1	Konsumsi Ikan	Kg	55,57	50,2	55,98	55,98	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.2	Meningkatnya produksi benih ikan	Ekor	70.000	70.000	73.400	73.400	
8.3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.633,78	4.259,93	4.755,94	4.755.938	
8.4	Sarana dan prasarana perikanan tangkap	Unit	TAD	TAD	3.061,00	3.061.00	
8.5	Produksi perikanan budidaya	Ton	1.520,19	1.183,71	1.520,19	1.520.19	
8.6	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan yang Baik (BPIB)	kel	TAD	2 Kelompok	0	-	
8.7	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB (ADHB)	Rp/tahun	112,286.30	125.534,30	74.561,00	74.561,00	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
1.1	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perencanaan		TAD	0	1	11	
1.2	Tersusunnya Rancangan PERDA RPJMD	dok	2	2	1	-	
1.3	Tersusunnya Rancangan PERDA RKPD	dok	1	1	2	1	
1.4	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Rencana Pembangunan Daerah Daerah	Keg	3	3	3	2	
1.5	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Keg	15	15	15	-	
1.6	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	%	TAD	76	80	68	
1.7	Jumlah Segmen batas antar desa/Kelurahan	unit	20	39	4	TAD	
1.8	Cakupan peningkatan aparaturnya perencanaan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis perencanaan	%	TAD	0.00	0.00	33	
1.9	Persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan	%	TAD	0.00	0.00	50	
1.10	Persentase ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat	%	100	100	0	50	
1.11	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	dok	TAD	0	0	-	
2	URUSAN KEUANGAN						
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.2	Tingkat keterpaduan program kegiatan APBD untuk pencapaian RPJMD	%	100.00	100.00	100.00	100,00	
2.3	Tingkat tertib administrasi penatausahaan keuangan SKPD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Tingkat tertib pelaporan keuangan SKPD sesuai SAP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.5	peningkatan pendapatan pajak dan redistribusi terhadap pendapatan Asli Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.6	Tertib Perencanaan dan Penggunaan BMD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.7	Tertib Pencatatan dan Pengamanan Aset Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
3.1	persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	90	95	92,91	75,50	
3.2	Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	%	TAD	0.95	91,22	100,00	
3.3	persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	TAD	95	32,63	72,67	
3.4	Prosentase SOPD yang menyusun Anjab	%	TAD	100	100	39	
3.5	Prosentase SOPD yang menyusun ABK	%	TAD	100	100	90	
3.6	Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	%	TAD	95	85,36	0	
3.7	persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	TAD	95	105,26	100	
4	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
4.1	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	keg	TAD	0	1	1	
5	URUSAN PENGAWASAN						
5.1	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti: keuangan negara/daerah dan administrasi	%	85	50	65,67	71,69	
5.2	Meningkatnya level Zona Integritas pada Kabupaten Sukamara	%	-	0.00	0	0	
5.3	Rasio tenaga pengawas dalam meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	%	100	90	100	90	
5.4	Persentase berkurangnya jumlah kerugian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara	%	20	20	33,39	48,87	
5.5	Persentase membaiknya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara	%	40	40	92,31	50	
6	URUSAN SEKRETARIAT DEWAN						



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2018)	Target dan Capaian Kinerja			Ket
				Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Capaian	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD	%	TAD	100	81,97	81,97	
6.2	Persentase peningkatan menuju lembaga DPRD yang responsif dan partisipatif	%	TAD	100	99,04	99,04	
6.3	Persentase Jumlah Raperda yang dijadikan produk hukum daerah	%	TAD	100	39	4,50	
6.4	Persentase peningkatan SDM menuju lembaga DPRD yang kapabel	%	TAD	100	94,63	94,63	
6.5	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD	%	TAD	100	72,57	72,57	
7	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
7.1	Tersusunnya LAKIP Kabupaten	Dok	5	10	10	10	
7.2	Nilai LKjIP	Skor	54,72/CC	55,60/CC	55,29/CC	Penilaian belum keluar	
7.3	Tersusunnya LPPD	Dok	300	60	60	10	
7.4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100		92,42	
7.5	Nilai Evaluasi AKIP	skor		65	-	0	
7.6	Persentase PERDA yang memenuhi aspek legalitas	%	100.00	100.00	100.00	20	
7.7	Jumlah Dialog/Audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota sosial masyarakat	Keg	TAD	12	12	TAD	
7.8	Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Forkopimda	Keg	TAD	12	12	9	
7.9	Jumlah Koordinasi KDH/WKDH dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya	Keg	50	50	62	34	
7.10	Tersedianya dokumen grand design dan Road Map Reformasi Birokrasi dan evaluasi reformasi birokrasi	dok	TAD	1	TAD	1	
7.11	Presentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	%	80.00	80.00	100.00	80	
7.12	Tersusunnya dokumen kajian penataan desa/kelurahan	Dok	TAD	1	TAD	TAD	
7.13	Presentase SOPD yang menyusun SOP	%	TAD	100.00	TAD	TAD	
7.14	Jumlah dokumen Rapat/Monev	dok	5	5	5	6	
7.15	Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan penerapan dan pencapaian SPM	dok	2	2	2	4	
7.16	Presentase SOPD yang menyusun SPP	%	TAD	100.00	TAD	TAD	



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama lima tahun sebelumnya untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Periode yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari



Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada periode 2015-2020, dengan menggunakan rata-rata geometric, pendapatan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1,11% dengan rata-rata pendapatan daerah yang diukur menggunakan rata-rata hitung sebesar Rp. 684.328.312.430 per tahun selama 2015-2020. Pendapatan daerah terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 744.507.431.372. Kabupaten Sukamara masih mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan (Dana Transfer berupa DAU dan DAK), yang dihitung dengan rata-rata hitung 83,37% dari total seluruh pendapatan daerah. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Sedangkan pendapatan asli daerah sebagai penyokong kemandirian APBD hanya menyumbang rata-rata sebesar 5,89% dari keseluruhan pendapatan daerah. Sementara itu lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,99% dari total keseluruhan pendapatan daerah.

Dari sisi belanja, hal yang sama juga terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan per tahun yaitu -2,94% dengan rata-rata belanja per tahun sebesar Rp.595.835.313.466. Rata-rata pertumbuhan penurunan belanja per tahun ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan. Di dalam komponen belanja terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan komponen belanja operasi sebesar 3,81% per tahun, dan di dalam komponen belanja operasi tersebut untuk belanja pegawai rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 8,02%. Untuk belanja modal setiap tahun terjadi penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,94%. Dari aspek proporsinya, selama 2015-2020 proporsi belanja operasi rata-rata mencapai 60,33%; selanjutnya belanja barang dan jasa



rata-rata sebesar 19,61%, dan belanja pegawai rata-rata proporsinya 35,52% per tahun.

Dalam hal pembiayaan, selama 2015-2020 penerimaan pembiayaan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,19% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan per tahun sebesar 1,77%. Informasi APBD Kab. Sukamara selama periode 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:



Tabel 3.1.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019*)	2020**)	
1	PENDAPATAN DAERAH	683.998.195.876	744.507.431.372	673.516.439.891	691.264.975.942	665.854.810.855	646.828.020.646	-1,11%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.733.928.708	38.622.540.535	49.848.715.290	44.572.551.816	37.385.558.135	40.995.658.489	6,63%
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.067.616.652	5.003.197.363	16.690.026.831	6.323.190.974	6.368.739.678	6.003.105.860	8,10%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.920.256.140	11.229.576.335	11.001.619.128	2.269.783.087	1.619.872.052	1.850.448.463	-29,89%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.520.936.435	6.685.826.045	8.261.703.903	9.109.911.988	9.903.578.509	9.665.385.656	8,19%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.225.119.481	15.703.940.792	13.895.365.427	26.869.665.767	19.493.367.895	23.476.718.510	23,34%
1.2	DANA PERIMBANGAN	643.955.607.642	705.804.956.220	623.152.684.595	636.824.775.074	619.006.038.875	596.227.932.208	-1,53%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.008.484.610	46.011.286.224	34.234.494.194	41.965.799.701	35.278.374.319	60.779.691.724	7,16%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	407.283.888.000	428.055.095.000	420.535.543.000	420.535.543.000	432.962.550.000	388.663.735.000	-0,93%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	143.791.096.000	193.136.012.453	114.420.630.234	122.277.982.314	71.229.133.876	53.435.283.622	-17,96%
1.2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29.424.380.000	21.426.006.000	33.868.843.000	28.277.201.000	57.039.377.000	74.885.931.217	20,54%
1.2.5	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.197.759.032	17.176.556.543	19.943.174.167	22.268.249.059	22.496.603.680	18.313.290.645	8,47%
1.2.6	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.250.000.000	0	150.000.000	1.500.000.000	0	150.000.000	-55,13%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.372.080.641	79.934.617	515.040.007	9.867.649.052	9.463.213.845	9.604.429.949	-1,53%
1.3.1	Pendapatan Hibah	743.686.935	-	366.000.000	9.660.795.000	8.849.000.000	9.578.630.000	66,72%
2.3.2	Pendapatan Lainnya	9.628.393.706	79.934.617	149.040.007	206.854.052	614.213.845	25.799.949	-69,41%
2	BELANJA DAERAH	609.321.966.129	671.465.638.259	596.582.307.546	576.024.959.592	596.675.343.645	524.941.665.621	-2,94%
2.1	Belanja Operasi	316.652.507.149	328.032.909.615	343.424.908.243	355.416.617.815	412.909.665.369	381.701.598.449	3,81%
2.1.1	- Belanja Pegawai	169.272.434.886	182.968.533.499	204.455.841.403	213.674.061.063	234.363.157.312	248.976.001.683	8,02%



No	Uraian	Tahun						Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019*)	2020**)	
2.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	105.643.907.798	114.209.830.101	108.621.948.500	104.737.374.595	146.114.917.603	117.767.321.767	2,20%
2.1.3	- Belanja Subsidi	0	0	0	0	700.000.000	800.000.000	
2.1.4	- Belanja Hibah	40.731.639.465	30.302.531.015	30.059.498.340	36.851.362.157	31.167.090.454	13.879.675.000	-19,37%
2.1.5	- Belanja Bantuan Sosial	1.004.525.000	552.015.000	287.620.000	153.820.000	564.500.000	278.600.000	-22,62%
2.2	Belanja Modal	292.669.458.980	343.432.728.644	253.157.399.303	219.950.090.494	183.638.763.276	130.315.452.884	-14,94%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	658.251.283	126.915.000	12.924.614.288	-
2.4	Belanja Transfer	59.449.659.567	67.692.354.391	75.435.191.391	75.495.290.453	85.290.763.637	82.141.606.719	6,68%
2.4.1	- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	2.524.997.566	1.600.000.000	1.650.000.000	699.550.662	1.001.433.100	911.376.826	-18,44%
2.4.2	- Belanja Bantuan Keuangan	56.924.662.001	66.092.354.391	73.785.191.391	74.795.739.791	84.289.330.537	81.230.229.893	7,37%
	SURPLUS/DEFISIT	15.226.570.180	5.349.438.722	1.498.940.954	39.744.725.897	-16.111.296.427	39.744.748.305	21,15%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD

**): Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Secara rinci perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara

URAIAN	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1. Aset	5,35%
11. Aset Lancar	-0,79%
111. Kas dan Setara Kas	-0,13%
117. Persediaan	-9,61%
12. Investasi Jangka Panjang	11,48%
122. Investasi Jangka Panjang Permanen	11,48%
13. Aset Tetap	3,73%
131. Tanah	1,33%
132. Peralatan dan Mesin	5,46%
133. Gedung dan Bangunan	6,60%
134. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10,81%
135. Aset Tetap Lainnya	21,32%
136. Konstruksi Dalam Pengerjaan	10,25%
137. Akumulasi Penyusutan	20,90%
15. Aset Lainnya	43,32%
151. Tagihan Jangka Panjang	-1,75%
153. Aset Tidak Berwujud	-37,39%
154. Aset Lain-Lain	53,42%
2. Kewajiban	78,71%
21. Kewajiban Jangka Pendek	78,71%
211. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	10,23%
216. Utang Jangka Pendek Lainnya	9,23%
3. Ekuitas	4,42%
31. Ekuitas	4,42%
311. Ekuitas	4,42%
312. Ekuitas SAL	

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.



Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2013-2017, dapat di lihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Kondisi Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Periode 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar (Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek)	297,82	2,38	160,47	26,73	28,28
Rasio quick (Aset Lancar-Persediaan)/Kewajiban Jangka Pendek)	251,82	1,88	115,60	24,44	25,27
Rasio Solvabilitas					
Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset	0,000134763	0,014475581	0,000121729	0,001695233	0,001115733
Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas)	0,000130188	0,014116246	0,000117221	0,001631053	0,001116979

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada tahun 2019 adalah sebesar 28,28. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar 28,28 kali.



2. *Quick Ratio*

Quick ratio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, *Quick ratio* pada tahun 2019 adalah sebesar 25,27. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya cukup baik.

3. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Besar Rasio Total Hutang terhadap Total Aset pada tahun 2019 sebesar 0,0011. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

4. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2019 Rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar 0,0011. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Sukamara, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.



3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai disini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Proporsi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka persentasenya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun 2015	169.272.434.886	623.821.966.129	27,13
2	Tahun 2016	182.968.533.499	687.316.541.331	26,62
3	Tahun 2017	204.455.841.403	611.830.160.280	33,42
4	Tahun 2018	213.674.061.063	583.101.397.948	36,64
5	Tahun 2019	234.363.157.312	607.283.779.348	38,59
6	Tahun 2020	248.976.001.683	540.769.548.809	46,04
Rata-Rata				34,74%

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Proporsi belanja aparatur, semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2019, porsi belanja aparatur sebesar 38,59% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 46,04% dari total Pengeluaran Daerah. Selama 2015-2020 proporsi belanja aparatur tap tahun rata-rata 34,74%. Kementerian Dalam Negeri memberikan batasan bahwa belanja aparatur maksimum 30% karena diharapkan APBD lebih banyak proporsinya untuk belanja



publik. Diharapkan proporsi belanja aparatur atau pegawai dapat ditekan hingga di bawah 30% agar alokasi untuk belanja publik semakin besar.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi Pembiayaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.



Tabel 3.5.
Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Sukamara
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.666.339.282	51.334.327.179	40.760.819.049	43.186.237.022	75.854.688.563	49.134.974.490
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.500.000.000	15.850.903.072	15.247.852.734	7.076.438.356	10.608.435.703	15.827.883.188
PEMBIAYAAN NETTO	34.166.339.282	35.483.424.107	25.512.966.315	36.109.798.666	65.246.252.860	33.307.091.302
SURPLUS/ DEFISIT	15.226.570.180	5.349.438.722	1.498.940.954	39.744.725.897	-16.111.296.427	39.744.748.305
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	49.392.909.462	40.832.862.829	27.011.907.269	75.854.524.563	49.134.956.433	73.051.839.608

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD

**): Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit



Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pembiayaan dalam komponen APBD Kabupaten Sukamara tidak menunjukkan terjadinya defisit sepanjang 2016-2018, dan defisit terjadi pada tahun 2019 sebesar -Rp.16.111.296.427. Defisit tersebut ditutup dengan menggunakan SiLPA sebesar Rp.75.854.524.563 sehingga SiLPA tahun 2019 menjadi Rp.49.134.956.433. Defisit yang terjadi tidak lepas dari dampak penanganan Pandemi COVID-19.

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran dan sisa saldo kas pada BLUD. Rasio SiLPA terhadap total belanja di Kabupaten Sukamara tahun 2015-2020 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2020, dengan kontribusi sebesar 13,92%. Rasio negatif menggambarkan terjadinya defisit APBD yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan neto. Secara umum rasio dan kontribusi SiLPA terhadap Total Belanja Daerah trennya masih fluktuatif. Rasio Kontribusi SiLPA terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015-2020 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6.
Persentase SiLPA terhadap Belanja Tahun 2015-2020

TAHUN	REALISASI		%
	SiLPA	BELANJA	
2015	49.392.909.462	609.321.966.129	8,11
2016	40.832.862.829	671.465.638.259	6,08
2017	27.011.907.269	596.582.307.546	4,53
2018	75.854.524.563	576.024.959.592	13,17
2019	49.134.956.433	596.675.343.645	8,23
2020	73.051.839.608	524.941.665.621	13,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.



3.3. KERANGKA PENDANAAN DAERAH

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2023

3.3.1.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2015-2020, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah antara lain dengan mengembangkan kerjasama operasi/investasi melalui pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi produksi dan pemasaran;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, misalnya penagihan dipermudah dengan cara jemput bola selain itu perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara *online* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- 3) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- 4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan



- optimalisasi aset daerah;
- 6) Revitalisasi produk hukum yang berkaitan dengan tarif pajak dan retribusi sesuai kebutuhan;
 - 7) Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah;
 - 8) Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan meminimalisir terjadinya efek distortif dari pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan;
 - 9) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD; serta
 - 10) Untuk mendanai program-program prioritas unggulan melalui usaha kerjasama atau pinjaman pihak ketiga.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 disusun dengan asumsi:

- 1) Berdasarkan arah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah 2015-2019, maka ditetapkan pertumbuhan pendapatan 4,69% dari PAD;
- 2) Pertumbuhan untuk dana perimbangan adalah sebesar 0,77%;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 8,14%.



Proyeksi sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah selama Tahun 2019-2023 diformulasikan secara rinci sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.7.



Tabel 3.7.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2019*)	2020**)	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN DAERAH	665.854.810.855	646.828.020.646	629.054.605.366,00	639.234.581.534,30	691.609.426.611,02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.385.558.135	40.995.658.489	42.403.661.449,00	44.523.844.521,45	46750036.747,52
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.368.739.678	6.003.105.860	5.569.000.000,00	5.847.450.000,00	6.139.822.500,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.619.872.052	1.850.448.463	2.427.881.184,00	2.549.275.243,20	2.676.739.005,36
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.903.578.509	9.665.385.656	9.402.248.605,00	9.872.361.035,25	10.365.979.087,01
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.493.367.895	23.476.718.510	25.004.531.660,00	26.254.758.243,00	27.567.496.155,15
1.2	DANA PERIMBANGAN/ PENDAPATAN TRANSFER	619.006.038.875	596.227.932.208	579.139.743917,00	586.448.417.012,85	635.770.837.863,49
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.278.374.319	60.779.691.724	42.170.291.000,00	44.278.805.550,00	46.492.745.827,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	432.962.550.000	388.663.735.000	394.536.235.000,00	414.263.046.750,00	434.976.199.087,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	71.229.133.876	53.435.283.622	67.402.370.000,00	70.772.497.950,00	74.311.122.847,50
1.2.4	Dana Intensif Daerah			20.617.442.000,00	-	20.000.000.000,00
1.2.5	Dana Desa	57.039.377.000	74.885.931.217	39.753.175.000,00	41.740.833.750,00	16.162.894.663,49
1.2.6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.496.603.680	18.463.290.645	14.660.221.917,00	15.393.233.012,85	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.463.213.845	9.604.429.949	7.511.200.000,00	8.262.320.000,00	9.088.552.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.849.000.000	9.578.630.000	7.511.200.000,00	8.262.320.000,00	9.088.552.000,00
2.3.2	Pendapatan Lainnya	9.628.393.706	79.934.617	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD

**): Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit



3.3.1.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah akan diarahkan pada:

1. Menitik beratkan pada Urusan Wajib Dasar, Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
2. Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian/peternakan, perkebunan, perikanan pariwisata, penataan kota dan UMKM;
3. Melakukan efisiensi belanja, melalui:
 - a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan manfaatnya pada masyarakat;
 - b. Melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program;
 - c. Melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*) dengan memperhatikan prinsip *money follow program*;
5. Memberikan bantuan-bantuan khususnya keuangan, dalam bentuk:



- a. Subsidi, untuk menolong kelompok ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk /komunitas sebagai *seed money* yang berperan mendorong perangkat kelurahan/desa berperan sebagai *urban manager*;
 - c. Bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial, santunan kematian, jaminan sosial untuk lansia, bantuan biaya personal siswa, insentif bagi guru ngaji/rohaniawan, bantuan modal untuk UMKM.
6. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Arah pengelolaan belanja daerah Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:



Tabel 3.8.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023

No	Jenis Belanja	Realisasi		Proyeksi		
		2019*)	2020**)	2021	2022	2023
2.	BELANJA DAERAH	596.675.343.645	524.941.665.621	646.554.605.366,00	662.809.447.104,00	715.999.788.208,67
2.1	Belanja Operasi	412.909.665.369	381.701.598.449	435.089.053.091,00	411.685.750.828,87	464.492.480.709,38
2.1.1	Belanja Pegawai	234.363.157.312	248.976.001.683	216.830.077.451,00	275.226.365.535,62	295.893.657.205,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	146.114.917.603	117.767.321.767	191.075.212.273,00	129.576.872.144,65	146.417.132.107,94
2.1.3	Belanja Subsidi	700.000.000	800.000.000	800.000.000,00	954.212.359,53	1.042.131.594,68
2.1.4	Belanja Hibah	31.167.090.454	13.879.675.000	23.324.763.367,00	16.555.196.789,12	18.080.559.801,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	564.500.000	278.600.000	304.269.651,69	332.304.454,21	3.059.000.000,00
2.2	Belanja Modal	183.638.763.276	130.315.452.884	118.532.381.533,00	126.903.089.098,29	127.810.219.294,42
2.3	Belanja Tidak Terduga	126.915.000	12.924.614.288	9.547.050.000,00	15.285.736.268,44	16.694.133.705,27
2.4	Belanja Transfer	85.290.763.637	82.141.606.719	83.386.120.742,00	97.975.670.454,14	107.002.954.499,60
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan pemerintah Desa	1.001.433.100	911.376.826	810.595.121,00	1.087.058.789,69	1.187.218.231,55
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	84.289.330.537	81.230.229.893	82.575.525.621,00	96.888.611.664,45	105.815.736.268,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD

**): Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit



3.3.1.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019-2023

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, maka asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan terutama SILPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh.

Proyeksi pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada Tabel 3.9.



Tabel 3.9.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019-2023
(Dengan Perhitungan Perda Penyertaan Modal Bank Kalteng)

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi		
		2019*)	2020**)	2021	2022	2023
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	75.854.688.563	49.134.974.490	74.831.804.947,28	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.608.435.703	15.827.883.188	16.107.500.000,00	25.659.000.000,00	23.402.422.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	65.246.252.860	33.307.091.302	58.724.304.947,28	4.341.000.000,00	1.597.578.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Sukamara, 2021.

Keterangan: *) : Realisasi APBD Tahun 2015 sampai dengan 2019 telah disesuaikan dengan PERDA Pertanggungjawaban APBD

**): Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan data LRA yang sudah diaudit



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 3.10.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.11. Sehingga, dapat diketahui kapasitas riil Keuangan Daerah yang dialokasikan untuk memenuhi Belanja Prioritas I, II, dan III sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.11.



Tabel 3.10.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapatan	665.854.810.855	646.828.020.646	628.728.647.293,72	661.468.447.104,21	711.158.788.208,67
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0			
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	49.134.956.433	73.051.839.608	73.494.975.377	71.923.262.638	70.113.183.537
Total Penerimaan		714.989.767.288	696.082.121.451,64	702.223.622.670,90	733.391.709.741,92	781.271.971.745,79
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	117.849.269.091,43	109.915.256.507,20	120.042.630.342,16	131.103.120.325,43	143.182.701.929,09
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.608.435.703	15.607.500.000	15.838.950.877	16.073.834.046	16.312.200.407
Kapasitas Kemampuan Keuangan		586.532.062.492,30	570.559.364.944,44	566.342.041.452,08	586.214.755.370,46	621.777.069.409,53

Sumber: Hasil Kompilasi Data, 2021.

Tabel 3.11.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Kapasitas Kemampuan Keuangan	586.532.062.492,30	570.559.364.944,44	566.342.041.452,08	586.214.755.370,46	621.777.069.409,53
Prioritas I	293.266.031.246,15	285.279.682.472,22	283.171.020.726,04	293.107.377.685,23	310.888.534.704,77
Prioritas II	175.959.618.747,69	171.167.809.483,33	169.902.612.435,62	175.864.426.611,14	186.533.120.822,86
Prioritas III	117.306.412.498,46	114.111.872.988,89	113.268.408.290,42	117.242.951.074,09	124.355.413.881,91
Total Belanja Prioritas	586.532.062.492,30	570.559.364.944,44	566.342.041.452,08	586.214.755.370,46	621.777.069.409,53



Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Sedangkan Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Sukamara telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, sampai saat ini Sukamara tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Sukamara meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, ketahanan pangan, sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional, dan daya saing ekonomi daerah.

Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kabupaten Sukamara terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Sukamara dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2005-2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN Tahun 2015-2019; Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024; RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2021; RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.1.
Mekanisme Penetapan Isu-Isu Strategis di Kabupaten Sukamara



Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Sukamara dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu



pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Permasalahan Urusan Pendidikan:

- 1) Anak usia sejak lahir s/d 6 tahun belum semuanya terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2) Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs, rata-rata lama sekolah sekitar 8,01 tahun (2020) dan termasuk kelompok yang terendah di Kalimantan Tengah;
- 3) Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi);
- 4) Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs belum 100 persen tercukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- 5) Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang;
- 6) Kondisi sarana prasarana dan kompetensi guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring belum siap dalam menghadapi kondisi pandemi.
- 7) Distribusi tenaga pendidik belum merata, berdasarkan data neraca pendidikan daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8) Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi dengan peringkat baik (A dan B) masih sedikit, bahkan masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi.

Secara lebih spesifik, permasalahan pendidikan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pandemi COVID-19 selama Tahun 2020 menyebabkan kegiatan persekolahan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan, sehingga sulit untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mendorong tercapainya sasaran kinerja



- 2) Adanya pandemi COVID-19 selama Tahun 2020 menyebabkan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendidik sangat terbatas.
- 3) Terjadi *refocusing* anggaran menyebabkan banyaknya anggaran pendidikan yang dialihkan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga kegiatan pembangunan infrastruktur sekolah banyak yang terhambat.
- 4) Guna meningkatkan IPM urusan pendidikan dengan mendirikan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Polnep di Kabupaten Sukamara.

4.1.1.2. Urusan Kesehatan

Pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Sukamara juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri. Jika dilihat dari hasil yang dicapai terhadap 12 indikator SPM yang harus dipenuhi oleh daerah, hanya 1 indikator yaitu pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang telah sesuai standar 100%, sedangkan indikator yang lain perlu untuk ditingkatkan.

Permasalahan lainnya adalah pelaksanaan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat adalah program yang dicanangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Dalam rangka memenuhi salah satu hak pelayanan dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, dan



angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk.

Di samping itu, permasalahan COVID-19 merupakan permasalahan yang memerlukan antisipasi dan penanganan yang serius. Pandemi COVID-19 berdampak ke semua aspek kehidupan, COVID baik perekonomian maupun bidang kesehatan. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukamara mengalami pergerakan dinamis. Dampak positif pandemi COVID-19 bagi nakes yang menangani penderita COVID-19 nakes lebih waspada dan memproteksi dirinya sendiri.

Permasalahan urusan Kesehatan:

- 1) Kasus COVID-19 yang bergerak dinamis dan disebabkan oleh lingkungan internal dan eksternal dan di sisi lain masih terbatasnya tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan;
- 2) Ketersediaan sumber daya kesehatan yang belum memadai yaitu kurangnya dokter Puskesmas;
- 3) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah, ditunjukkan dengan masih adanya kasus DBD dan TBC serta meningkatnya keluhan kesehatan selama 2017-2020;
- 4) Kasus balita gizi buruk masih ada sekitar masih sebanyak 3 persen;
- 5) Kualitas lingkungan rendah, cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah tangga sehat rendah;
- 6) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang sesuai ketentuan;
- 7) Masih rendahnya jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki izin edar produk pangan olahan rumah tangga sebagai jaminan keamanan produk.



- 8) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai.

Secara lebih spesifik, permasalahan kesehatan yang berkaitan langsung dengan SPM adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalanya akses pelayanan pada ibu hamil di tengah situasi pandemi COVID-19 sehingga menuntut ibu hamil melakukan test swab antibody dan antigen yang berdampak pada kurangnya kunjungan ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan kehamilannya di faskes;
- 2) Dengan terjadinya kasus COVID-19 pada ibu bersalin di RSUD menyebabkan tutupnya pelayanan rujukan persalinan sehingga mengakibatkan kesulitan ibu bersalin dalam melakukan rujukan bila terdapat penyulit pada saat persalinan;
- 3) Ketersediaan APD dan logistik pada pelayanan bayi baru lahir belum dipersiapkan dengan baik;
- 4) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan pada balita sakit dan sehat. Untuk pelayanan pada balita sakit sudah terlaksana sesuai dengan standar dengan pelayanan kesehatan balita yang berkunjung ke faskes. Namun untuk pelayanan pada balita sehat, tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Kegiatannya berupa posyandu, sweeping, dan DDTK yang tidak dapat dijalankan karena dampak terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukamara. Sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang di minimalisir demi mengurangi angka penularan pada bayi dan balita;
- 5) Kegiatan skrining kesehatan sempat akan dilaksanakan di awal tahun 2020. Namun karena terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID, maka terjadi penutupan di semua



sekolah seiring dengan kebijakan sekolah yang melakukan pembelajaran daring. Sehingga skrining kesehatan/penjaringan tidak berjalan;

- 6) Terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sukamara, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang dan berbagai program kesehatan diminimalisir demi mengurangi angka penularan pada usia-usia yang rentan tertular dan kelompok komorbid. Untuk konsultasi via media sosial tetap berjalan;
- 7) Pencarian suspek kurang aktif serta pelayanan laboratorium tidak bisa melakukan pemeriksaan *sputum* selama pandemi COVID-19.

Permasalahan yang juga menjadi issue penting menurut WHO yang merupakan salah satu dari 6 “building block” atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara adalah Sistem Informasi Kesehatan. Dalam tatanan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kesehatan (SIK) termasuk ke dalam sub sistem ke – 6 mengenai “Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan”. WHO juga menjabarkan manfaat dari investasi sistem informasi kesehatan antara lain : membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya serta pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

Terkait permasalahan Bencana Alam yang banyak menimbulkan kerugian materiil terutama terhadap masalah Kesehatan masyarakat. Bukanhanya fasilitas Kesehatan dan sarana prasarana yang rusak tetapi dapat menimbulkan masalah Kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Dampak bencana banjir misalnya membuat minimnya akses terhadap fasilitas air bersih,



binatang perantara bibit penyakit merajalela (tikus, lalat, nyamuk dan zoonosis lainnya) yang potensial menimbulkan epidemi penyakit (malaria, demam berdarah, filariasis, cikungunya, leptospirosis, kolera, diare, dan penyakit infeksi lainnya).

4.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung. Penataan ruang mengatur kepastian hukum tentang pemanfaatan ruang.

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) Jumlah kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih banyak dibanding laju pembangunan;
- 2) Masih tingginya proporsi jalan yang belum diaspal berupa jalan kerikil dan jalan tanah;
- 3) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan sehingga jalan yang rusak berat di tahun 2020 meningkat dibandingkan 2018;
- 4) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi, dalam kondisi baik sekitar 57,76 persen;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- 6) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang;



- 7) Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Masih lemahnya kepastian hukum (insentif dan desinsentif) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 9) Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat di bidang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- 10) Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan;
- 11) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Panjang ruas jalan Kabupaten yang ditangani 581,525 km berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/136/2018 tanggal 11 Januari 2018.

Kondisi ruas jalan Kabupaten sampai dengan tahun 2020 yaitu:

1. Kondisi Baik = 108,4 Km
2. Kondisi Sedang = 73,4 Km
3. Kondisi Rusak Ringan = 25,9 Km
4. Kondisi Rusak Berat = 373,9 Km

Ruas jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2020

1. Kondisi Baik = 86,8 Km
2. Kondisi Sedang = 0 Km
3. Kondisi Rusak Ringan = 0 Km
4. Kondisi Rusak Berat = 0 Km

Ruas jalan Nasional/Negara sampai dengan Tahun 2020

1. Kondisi Baik = 23,8 Km
2. Kondisi Sedang = 0 Km
3. Kondisi Rusak Ringan = 0 Km
4. Kondisi Rusak Berat = 0 Km



Panjang drainase dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018 = 10.350,29 (M')

1. Kondisi Baik = 8.280,24
2. Rusak Ringan = 2.070,05.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perkim RI Nomor 14/PRT/M/2015 penanganan luas areal irigasi Kabupaten Sukamara 5.342 Ha untuk luasan areal irigasi sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik 3.173 Ha sedangkan tahun 2017 = 2.923 Ha.

4.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan, sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, dan pemakaman.

Permasalahan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang;
- 2) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sukamara terutama untuk masyarakat di daerah sekitar Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai;
- 3) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat;
- 4) Sampai saat ini 75,19 % rumah tangga tempat tinggal telah terlayani akses sanitasi layak. Sanitasi dan pengelolaan air limbah masih perlu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sertaultilitasnya. Sepanjang bantaran sungai di



kawasan perkotaan Sukamara dan di ibukota Kecamatan Jelai telah dibangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) skala komunal (50-100 KK) dan IPAL Kawasan (>100 KK), sementara sasaran nasional 100-0-100 artinya 100 % akses air minum, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % akses sanitasi layak. Namun masih belum maksimalnya masyarakat memanfaatkan dan mendapatkan akses sanitasi yang sudah dibangun;

- 5) Rumah tidak layak huni masih cukup banyak sekitar 2.813 rumah tinggal (10,21 persen);
- 6) Pengelolaan sistem drainase belum memadai;
- 7) Rumah walet yang belum ber-IMB masih cukup banyak.

4.1.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Permasalahan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

- 1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat;
- 2) Penegakan Perda belum optimal;
- 3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal;
- 4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;
- 5) Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang;
- 6) Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;
- 7) Kualitas dan kuantitas sumber daya Linmas masih kurang, baru sekitar 2 % per 10.000 penduduk.



4.1.1.6. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Permasalahan urusan Sosial:

- 1) KK miskin di Sukamara 2,13 persen tahun 2020;
- 2) Wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
- 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai;
- 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.



Permasalahan urusan Tenaga Kerja:

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja sekitar 65,60 persen;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum memadai;
- 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai.

4.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumber daya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun kesenjangan tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
- 2) Masih terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, hal ini ditandai dengan masih adanya pekerja anak dibawah umur;
- 4) Indeks pembangunan gender (IPG) masih di bawah provinsi dan nasional;
- 5) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- 6) Masih kurangnya perlindungan anak terhadap pengaruh media yang bersifat negatif.



4.1.2.3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan suatu wilayah sampai dengan perseorangan, tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup ditingkat rumah tangga baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri dari tiga subsistem yaitu ketersediaan jumlah, keamanan dan keterjangkauan harga, untuk dapat meningkatkan kualitas SDM.

Permasalahan urusan Pangan:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- 2) Pola konsumsi masyarakat masih belum menunjukkan kaedah Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat dibanding pangan lainnya;
- 3) Pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan belum optimal;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan lokal masih rendah;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman sayur-sayuran;
- 6) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani di Bidang Ketahanan Pangan;
- 7) Pengelolaan lumbung pangan yang belum efisien;
- 8) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah belum tersedia.



4.1.2.4. **Urusan Pertanahan**

Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sukamara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program PTSL.

Permasalahan urusan Pertanahan:

- 1) Belum semua tanah bersertifikat dan belum semua tanah sertifikat sesuai dengan peruntukannya dan atau penggunaannya;
- 2) Sulitnya pengendalian penggunaan lahan, antara lain disebabkan karena persepsi masyarakat bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri;
- 3) Terbatasnya ketersediaan lahan yang akan dijadikan dan ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
- 4) Belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail (*data base*) belum akurat.

4.1.2.5. **Urusan Lingkungan Hidup**

Kondisi lingkungan di Kabupaten Sukamara secara umum masih cukup baik. Ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hampir semua parameter masih di bawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan



Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGMRI) dan stakeholder swasta lainnya dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Sukamara.

Permasalahan urusan Lingkungan Hidup:

1. Kekeringan, lahan kritis, erosi, abrasi dan sedimentasi pada daerah tangkapan pantai dan sungai;
2. Kerusakan ekosistem Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai;
3. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
4. Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas;
5. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua daerah;
6. Potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi;
7. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi penyelesaian masalah-masalah di atas, maka diperlukan Kebijakan PPLH yang terencana dan terstruktur dalam pencapaian kinerjanya. Seperti pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukamara yang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukamara masih tergolong rendah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara), IKAL (Indeks Kualitas Air Laut), IKTL/ITH (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Tutupan Hutan), dan IKPS (Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah).



Tabel 4.1.
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah Total (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jelai	1.169,01228	6.119,52266	7.288,53494
2	Pantai Lunci	383,79597	42.919,27276	43.303,06873
3	Sukamara	4.758,55803	9.405,80960	14.164,51204
4	Balai Riam	9.128,53115	4.134,32704	13.262,85819
5	Permata Kecubung	13.713,19948	5.992,49578	19.705,69526
	Total	29.153,09691	68.571,42784	97.724,66916

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukamara, 2014.

Luas lahan kritis di Kabupaten Sukamara seluas 97.724,67 Ha dengan rincian sangat kritis 68.571,42 Ha, kritis 29.153,09 Ha. Jumlah luasan lahan kritis tersebut merupakan 25,5 persen dari luas wilayah administrasi Kabupaten Sukamara. Untuk luas lahan kritis berbeda di tiap Kecamatan, luas lahan kritis terbesar adalah Kecamatan Pantai Lunci, sedangkan luas lahan kritis terkecil adalah Kecamatan Jelai. Luas lahan kritis pada Kecamatan Pantai Lunci terbesar karena kondisi geografis Kecamatan Pantai Lunci yang hampir sebagian besar wilayahnya berpasir, tandus dan bersemak.

4.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukamara dipengaruhi oleh kelahiran/kematian dan migrasi dari daerah lain. Hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit.

Permasalahan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- 1) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;



- 2) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.

4.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar dapat memperkuat Pasar Desa, BUMDes dan Inovasi tentang peningkatan kapasitas aparatur desa dan antisipasi peredaran narkoba di desa.

Permasalahan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- 1) Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;
- 3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perdesaan cenderung rendah;
- 4) Belum optimalnya peran BUMDes dalam mendorong aktivitas ekonomi perdesaan;
- 5) Peran perempuan dalam pembangunan Desa belum optimal;
- 6) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

4.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sukamara cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan



melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

Permasalahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- 3) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 4) Pasangan usia subur tidak ber-KB cukup tinggi;
- 5) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal.

4.1.2.9. Urusan Perhubungan

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Permasalahan urusan Perhubungan:

- 1) Sarana dan prasarana terminal belum ada;
- 2) Fasilitas rambu jalan masih terbatas;
- 3) Pelayanan angkutan umum belum memadai, armada angkutan didominasi oleh truk dan *pick up*;
- 4) Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
- 5) Pelabuhan penumpang dan barang belum memadai;
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan.



4.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informasi

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permasalahan urusan Komunikasi dan Informasi:

- 1) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- 2) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) *e-government* belum diimplementasikan secara optimal;
- 4) Kualitas sumber daya manusia belum memadai.

4.1.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

Permasalahan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

- 1) Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga koperasi/UMKM berjalan stagnan;
- 2) Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;
- 3) Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;



- 4) Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UKM, padahal jumlah UMKM cukup banyak;
- 5) Akses modal bagi UMKM masih terbatas, karena terbatasnya akses informasi terkait permodalan bersubsidi.

4.1.2.12. Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor.

Permasalahan urusan Penanaman Modal:

- 1) Promosi potensi investasi belum optimal;
- 2) Iklim investasi belum maksimal;
- 3) Ketersediaan lahan kawasan industri berskala besar/ menengah terbatas;
- 4) Belum ada pelabuhan untuk kapal yang dapat mengangkut hasil produksi skala besar.

4.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai oleh pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga:

- 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;



- 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) masih cukup tinggi;
- 3) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah;
- 4) Pemuda belum sebagai “*agent of change*”;
- 5) Jumlah klub olahraga perkembangannya masih stagnan dari tahun ke tahun;
- 6) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

4.1.2.14. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah.

Permasalahan urusan Statistik:

- 1) Belum konsistennya data-data statistik yang dipublikasikan dan masih adanya beberapa data statistik yang belum tersedia, data tahun yang lalu baru disusun tahun berjalan;
- 2) Belum tersedianya data statistik yang valid dan akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, data masih berada di masing-masing perangkat daerah;
- 3) Penetapan data tunggal belum disepakati, perangkat daerah masih memiliki data sendiri-sendiri;
- 4) Data sektoral dari Perangkat Daerah kurang konsisten;
- 5) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;
- 6) Kualitas SDM di bidang statistik belum memadai;
- 7) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai.



4.1.2.15. **Urusan Persandian**

Persandian adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian, perumusan kebijakan teknis di bidang persandian, dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang persandian.

Permasalahan urusan Persandian:

- 1) Belum maksimalnya tata kelola pengamanan informasi serta manajemen keamanan komunikasi dan informasi lingkup Pemerintah Daerah;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terlatih dan tersertifikasi di bidang manajemen keamanan komunikasi serta informasi Pemerintah Daerah belum memadai;
- 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam hal mendukung manajemen Keamanan Komunikasi Dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 4) Belum terbentuknya *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* lingkup Pemerintah Daerah sebagai penunjang keamanan serta keandalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4.1.2.16. **Urusan Kebudayaan**

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukamara bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan



keaktivitas dalam mengelola museum, sebagai aset daerah yang bernilai tinggi.

Permasalahan urusan Kebudayaan:

- 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- 5) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

4.1.2.17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan.

Permasalahan urusan Perpustakaan:

- 1) Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai. Di Kabupaten Sukamara baru terdapat 1 (satu) unit perpustakaan daerah;
- 2) Pemberdayaan perpustakaan dalam rangka peningkatan IPM masih belum optimal;
- 3) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perpustakaan belum memadai.



4.1.2.18. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah.

Permasalahan urusan Kearsipan:

- 1) Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai;
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM (arsiparis) belum memadai;
- 3) Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal.

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Secara geografis Kabupaten Sukamara mempunyai wilayah perairan laut dan perairan sungai, tetapi perkembangan komoditas perikanan budidaya produksinya masih belum optimal.

Permasalahan urusan Kelautan dan Perikanan:

- 1) Tata guna dan tata kelola perikanan belum optimal;
- 2) Fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal;
- 3) Akses permodalan petani perikanan masih kurang;
- 4) Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang;
- 5) Potensi budidaya perikanan yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan;
- 6) Perlu adanya sistem pengolahan perikanan yang berkelanjutan.

4.1.3.2. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sukamara



menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam yang menjadi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan.

Permasalahan urusan Pariwisata:

- 1) Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;
- 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;
- 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;
- 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;
- 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

4.1.3.3. Urusan Pertanian

Penduduk Kabupaten Sukamara mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukamara sebesar 32,06 persen pada tahun 2020, dan menyerap tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki.

Data peternakan tahun 2020 di Kabupaten Sukamara potensi lahan penggembalaan 19,450 Ha dan potensi lahan hijauan makanan ternak 13,5 Ha berpotensi untuk pengembangan hijauan pakan baik tumbuhan rumput (grass) dan kacang (legume) yang bergizi tinggi untuk kebutuhan makanan ternak ruminansia.

Permasalahan urusan Pertanian:



- 1) Produksi tanaman pangan utama menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun dikarenakan:
 - a. Semakin menurunnya luasan panen dikarenakan larangan membakar hutan;
 - b. Belum menggunakan pemupukan secara berimbang;
 - c. Masih minimnya penggunaan bantuan alat mesin pertanian dalam pengolahan lahan maupun pasca panen;
 - d. Tata guna dan tata kelola air untuk pertanian belum optimal;
 - e. Alih fungsi lahan pertanian.
- 2) Harga hasil produksi pertanian belum stabil;
- 3) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;
- 4) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;
- 5) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;
- 6) Pengelolaan peternakan sapi masyarakat masih secara semi intensif;
- 7) Sudah banyaknya tanaman sawit yang tidak produktif;
- 8) Penggunaan bibit sawit yang tidak jelas (tidak bersertifikat);
- 9) Pendapatan petani pekebun menurun akibat Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);
- 10) Kurangnya Hijauan Pakan Ternak (HMT) dan rendahnya kandungan protein rumput pada lokasi kawasan peternakan pendukung *Food Estate*.

4.1.3.4. Urusan Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sukamara sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi guna menyelamatkan sumber air dan mencegah erosi serta sedimentasi.

Permasalahan urusan Kehutanan:

- 1) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
- 2) Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;



3) Luas lahan kritis masih cukup banyak.

4.1.3.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Di bidang energi, belum semua desa di Kabupaten Sukamara tersedia jaringan listrik dari PLN, masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum teraliri listrik PLN. Kelompok rumah yang belum terjangkau aliran listrik terutama pada daerah terpencil dan permukiman baru. Di bidang sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Sukamara semua masuk kategori bahan galian golongan C (BGGC). Potensi yang paling besar adalah pasir.

Permasalahan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral:

- 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- 2) Potensi energi terbarukan seperti energi matahari belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Perubahan pola penggunaan energi fosil dan kayu bakar ke gas LPG belum semua dilakukan oleh masyarakat;
- 4) Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih cukup banyak.

4.1.3.6. Urusan Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah.

Permasalahan urusan Perdagangan:

- 1) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- 2) Daya saing produk Kabupaten Sukamara di pasar nasional maupun global tergolong rendah;
- 3) Kelancaran distribusi bahan pokok/barang strategis belum optimal;



- 4) Sistem informasi pasar belum optimal;
- 5) Perlindungan konsumen belum optimal;

4.1.3.7. Urusan Perindustrian

Sebagai daerah penyangga bagi daerah lain, Pemerintah Kabupaten Sukamara mengeluarkan kebijakan untuk menarik industri besar yang secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Industri di Kabupaten Sukamara diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja yang banyak (padat karya) tanpa mematikan industri kecil dan menengah.

Permasalahan urusan Perindustrian:

- 1) Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UMKM masih kurang;
- 2) Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM masih rendah;
- 3) Akses permodalan bagi UMKM masih rendah;
- 4) Ketersediaan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja belum maksimal;
- 5) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.

4.1.3.8. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Sukamara selama ini berdasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya. Sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM).

Permasalahan urusan Transmigrasi:

- 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan Pemerintah Pusat;



- 2) Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana, dan status administrasi pertanahan;

4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Urusan Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan hendaknya memenuhi 5 prinsip/pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Politik, (2) Pendekatan Teknokratik, (3) Pendekatan Partisipatif, (4) Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*), dan (5) Pendekatan Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Permasalahan urusan Perencanaan Pembangunan:

- 1) Masih perlunya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
- 2) Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa daftar keinginan (*wish list*) dan belum menunjukkan daftar kebutuhan (*need list*);
- 3) Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang disusun tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan;
- 4) Adanya ego atau kepentingan sektoral yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi. Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;
- 5) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai



sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah;

- 6) Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya;
- 7) Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

4.1.4.2. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan terkait kinerja tingkat penerimaan daerah baik langsung maupun tidak langsung dengan menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah unggulan guna peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga diperlukan regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi capaian yang ditargetkan.

4.1.4.3. Urusan Kepegawaian

Permasalahan pada urusan kepegawaian;

- 1) Peningkatan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis/fungsional dan penyusunan formasi di daerah sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat, sistem informasi dan data kepegawaian belum dapat berjalan secara optimal;
- 2) Peningkatan SDM melalui penyelenggaraan diklat teknis/fungsional dan penyusunan formasi di daerah sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat terutama di masa pandemi *Covid-19*, sistem informasi dan data kepegawaian belum dapat berjalan secara optimal;



- 3) Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisis beban kerja dan analisis jabatan yang merupakan kewenangan Perangkat Daerah;
- 4) Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah;

4.1.4.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan Pendidikan dan Pelatihan:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3) Mengoptimalkan kompetensi ASN Kabupaten Sukamara dibandingkan tuntutan kinerja yang semakin tinggi;
- 4) Belum tersusunnya pola diklat yang terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

4.1.4.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan Penelitian dan Pengembangan:

- 1) Belum optimalnya kerjasama antar daerah, daerah dengan swasta, dan daerah dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Perlunya optimalisasi inovasi daerah dalam rangka peningkatan SDM dan lingkungan berkelanjutan;
- 3) SDM Kelitbangan masih belum memadai.
- 4) Masih minimnya pengalokasian anggaran untuk penelitian dan pengembangan.



4.2. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023

Analisis isu-isu strategis Kabupaten Sukamara untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2018-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Permasalahan daerah tidak terlepas dari permasalahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya dilakukan pembobotan melalui konsultasi dengan perangkat daerah dan dihasilkan daftar isu strategis per urusan pemerintahan.

Dari kompilasi ini diperoleh kesimpulan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sukamara dalam penyusunan program pembangunan daerah 2018-2023, yaitu: (1) Situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional berkaitan dengan COVID-19 yang berdampak pada semua sector; (2) Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; (3) Untuk meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pasar tradisional (pasar rakyat); (4) Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program pendidikan gratis yang berkualitas; (5) peningkatan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian dan perikanan. Dalam RPJMN 2020-2024 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi



pemerintah pada periode 2020-2024 sebagaimana dalam RPJM Nasional adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi yang perlu diperkuat untuk pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan, tata kelola sumber daya ekonomi, transformasi struktural, serta revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
2. Pengembangan wilayah yang mampu untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan melalui peningkatan perlindungan sosial, peningkatan layanan dasar, pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan (anak, perempuan, dan pemuda), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing.
3. Pembangunan budaya dan karakter bangsa;
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung kemajuan ekonomi dan pelayanan dasar. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk: (a) peningkatan investasi, (b) efisiensi biaya logistic, (c) pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, (d) serta hambatan peningkatan kualitas layanan dasar.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat, padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan



terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Peraturan perundangan tersebut perlu direformasi.

7. Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar. Menggali sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.
8. Mempertahankan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
9. Penguatan stabilitas keamanan, ketertiban, serta percepatan transformasi pelayanan publik.
10. Pengelolaan SPM mulai dari tim penerapan SPM hingga monitoring dan evaluasi SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.1. Isu Global

Kondisi geo ekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi domestik Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestic.

Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia



Pasifik. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.

Ketiga, *trend* perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global.

Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam *trend* meningkat.

Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs).

Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang telah dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN.

Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah *plurilateral* dan mega blok. Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome*) akibat banyaknya kesepakatan bilateral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat *plurilateral*, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas.



Kedelapan, isu resesi dunia akibat situasi dan kondisi pasca pandemi COVID-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia, yang diperkirakan akan membawa dampak pada tata dunia baru. Perekonomian global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif dan resesi global akan mengancam. Isu ini memerlukan kebijakan dan strategis yang antisipatif melalui berbagai skenario kemungkinan yang bisa terjadi. Kondisi ini membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia yang pada akhirnya juga akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Sukamara.

Konstelasi geo-politik global dan regional akan menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Amerika Serikat menjadi kekuatan utama dunia. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam *Trans Pacific Partnership* (TPP). Bagi Indonesia, stabilitas dan keamanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Selain kawasan LTS, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang serius adalah kawasan samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan samudera Hindia mengandung potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerjasama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Secara geografis Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor



Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar.

Kesembilan, isu *SDG's* yang berkaitan dengan bidang kesehatan, utamanya penguatan peran Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu dalam rangka menuju Indonesia Sehat 2025. Aspek kesehatan mejadi sangat penting, sehingga penguatan peran Pusekemas dan Puskesmas Pembantu sangat vital bukan saja di masa pandemi namun juga pasca pandemi. Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta unsur pemerataan pelayanan juga menjadi isu penting yang memerlukan perhatian.

4.2.2. **Lingkungan Regional**

Permasalahan di Kalimantan Tengah berdasarkan kondisi lima tahun terakhir adalah: 1) kemiskinan; 2) pengangguran; 3) kesejahteraan pekerja; 4) pendidikan; 5) kesehatan; 6) penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); 7) keadilan gender dan perlindungan anak; 8) seni budaya; 9) ketimpangan pendapatan masyarakat dan antar wilayah; 10) energi; 11) pangan; 12) iklim investasi; 13) koperasi dan UMKM; 14) pariwisata; 15) aset daerah; 16) reformasi birokrasi; 17) politik; 18) keamanan dan ketertiban masyarakat; 19) infrastruktur dan perhubungan; 20) sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 21) penanggulangan bencana, 22) pandemi COVID-19 yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Isu terjadinya kelesuan ekonomi di Kalimantan Tengah pasca pandemi COVID-19 didorong oleh stagnannya pergerakan ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Isu pengangguran dan defisit APBD akibat kelesuan ekonomi tersebut dapat memberikan dampak yang cukup panjang.



Di dalam RPJMN 2020-2024 secara eksplisit dinyatakan bahwa pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Strateginya adalah: (a) pengembangan komoditas unggulan, terutama tanaman perkebunan, industri manufaktur (antara lain: industri batubara dan pengilangan migas, industri kayu, barang dari kayu, gabus dll), pertambangan batu bara dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan (b) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama, yang diprioritaskan untuk pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Isu ini akan membawa dampak pada pembangunan di Kabupaten Sukamara baik melalui transmisi sosial, ekonomi, budaya, terkait lagi dalam hal *food estate* untuk pengolahan udang vaname dan perternakan.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukamara pada



dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan (berbasis keunggulan daerah/*core competence*). Dari kedua urusan tersebut kemudian di analisis berbagai permasalahan yang akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program dalam Perubahan RPJMD di Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2023. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Dampak pandemi COVID-19 yang akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi makroekonomi daerah. Hal ini akan mendorong Pemerintah Daerah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan pembangunan maupun penganggaran.
2. Masih banyaknya infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penggerak roda ekonomi dan pembangunan yang rusak atau dalam kondisi tidak baik.
3. Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama di daerah perdesaan dan wilayah perbatasan.
4. Kurangnya pemerataan dan perluasan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis.
5. Kurang memadainya sarana dan prasarana pasar tradisional sebagai penampung aktivitas ekonomi masyarakat dan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Masih banyaknya sarana dan prasarana irigasi pertanian yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik.



7. Kurangnya pemanfaatan bantuan alat-alat mesin pertanian oleh petani untuk mendukung produktivitas pertanian.
8. Kurangnya pengembangan kawasan sentra tanaman lokal.
9. Kurangnya pengembangan budidaya ikan lokal.
10. Belum optimalnya penanganan masalah kemiskinan penduduk.
11. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
12. Belum optimalnya pengelolaan penanganan bidang kesehatan khususnya dalam aspek stunting, pandemi, dan pasca pandemi COVID-19 akibat keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan.

Sedangkan isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana dan tata ruang.
2. Terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih ada penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.
3. Belum optimalnya aksesibilitas, sarana prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Masih rendahnya daya saing produk Kabupaten Sukamara di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis, dan kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional.
5. Masih banyaknya penduduk miskin di wilayah perdesaan.



6. Belum optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perlu adanya pengembangan kluster perekonomian baru dalam rangka menanggulangi penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
8. Terbukanya akses Sukamara dari arah Manis Mata dan sekitarnya di Kabupaten Ketapang akibat fungsionalnya Jembatan Jelai.

4.2.3. Lingkungan Strategis

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan, serta memperhatikan dinamika yang berkembang maka kondisi lingkungan strategis perlu mendapat perhatian sebagai pertimbangan untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan ke depan.

1) Internal Kekuatan (*Strength*)

- a) Secara geografis, Kabupaten Sukamara yang berada di perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah di Kalimantan Tengah. Kondisi topografi yang terdiri dari hutan, laut, danau dan dataran yang terbentang luas, menjadikan Kabupaten Sukamara memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. Karakter topografi inilah yang membentuk pola hidrologi dan iklim yang sangat baik, dan mendukung pengembangan industri dan pertanian sebagai sektor utama pembangunan di Kabupaten Sukamara. Potensi sumber daya alam yang beragam, menjadikan wilayah Kabupaten Sukamara cukup strategis sebagai wilayah penyangga di bagian barat Kalimantan Tengah. Sebagai daerah penyangga dengan karakteristik wilayah



berupa dataran, menjadikan Kabupaten Sukamara sebagai daerah menarik sebagai lokasi investasi ataupun tempat tinggal.

- b) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Kabupaten Sukamara dalam membangun adalah jumlah penduduk yang terus berkembang, yang tersebar merata di seluruh wilayah. Bukan hanya jumlah penduduk, juga didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sukamara. Kekuatan lain yang dimiliki masyarakat Sukamara adalah karakter masyarakat yang kuat dan ulet dalam bekerja dan berbudaya, mengedepankan tenggang rasa, gotong royong, dan pekerja keras, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang beragam warisan nenek moyang. Kekuatan ini dapat menjadi modal dasar pada pembentukan masyarakat Sukamara yang berbudaya.

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) Kependudukan, jumlah penduduk yang besar, selain menjadi kekuatan dapat pula menjadi kelemahan jika tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam menghasilkan barang/jasa. Besarnya penduduk akan menjadi beban berat dalam pembangunan jika pola konsumsi tumbuh lebih cepat dibanding dengan kemampuan berproduksi masyarakatnya pada masa-masa mendatang. Penyebaran penduduk yang lebih terfokus

di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukamara. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya kantong-kantong



ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan perdesaan. Hal inilah yang menjadi kelemahan Kabupaten Sukamara, yang harus segera dilakukan penyelesaian strategis agar percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud.

- b) Kesenjangan Antar Wilayah, kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Sukamara, ditunjukkan dengan ketidakmerataan penyebaran penduduk, sumber-sumber ekonomi, infrastruktur jalan dan jembatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan.
- c) Birokrasi, keterbukaan birokrasi, keakuan (ego) sektoral Perangkat Daerah dan tidak mudahnya koordinasi dan perhatian sumber daya aparatur pemerintah tidak seperti yang diharapkan, juga menjadi sebab penentuan kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Selain itu juga, didukung dengan penetapan kebijakan anggaran yang tidak proporsional untuk masyarakat juga menjadi kendala besar dalam birokrasi saat ini, dimana anggaran untuk publik berbasis proyek bukan berbasis kebutuhan masyarakat.

3) Eksternal Peluang (*Opportunity*)

- a) Perkembangan daerah sekitar yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dapat memberi peluang/kesempatan meningkatkan pendapatan bagi daerah untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Kabupaten Sukamara mempunyai peran yang penting terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hasil pertanian dan lahan. Hal ini juga didukung oleh kondisi geografis dan aksesibilitas yang mudah. Peluang inilah yang harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Sukamara



guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

- b) Perkembangan Teknologi, teknologi yang semakin maju dan tak terbatas, terutama bidang teknologi informasi, menjadikan akses informasi ke seluruh belahan dunia dapat dengan mudah didapatkan. Sehingga hal ini menjadi peluang yang besar bagi Kabupaten Sukamara untuk mempromosikan produk barang dan jasa lokal ke luar daerah.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka peluang untuk meningkatkan nilai tambah serta varian produk-produk Indonesia juga semakin terbuka. Tuntutan akan kreativitas, inovasi dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi hal penting dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia yang semakin pesat. Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, maka Kabupaten Sukamara harus mengambil peran dengan cara menyediakan akses informasi yang mudah, murah dan cepat, khususnya sebagai sarana dalam memasarkan produk unggulan daerah yang dapat dipromosikan melalui media internet.

- c) Arah pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2020-2024 akan mampu menjadi stimulant kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukamara yang dinamis.

4) Ancaman (*Threat*)

- a) Globalisasi, pengaruh arus globalisasi berdampak pula pada kondisi di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Globalisasi sebagai sebuah bentuk proses interaksi antar individu dan negara tanpa dibatasi wilayah teritorial administratif, tidak hanya membuka peluang positif bagi relasi Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia,



tetapi juga memberikan dampak negatif bagi perkembangan karakter dan budaya bangsa. Selain itu, globalisasi kerap menjadi sumber kemiskinan ekonomi suatu negara, yang berdampak bagi daerah-daerah, apabila tidak dibarengi dengan proteksi yang kuat dari negara tersebut. Terbukanya Pasar Bebas Asean, juga akan memberikan dampak negatif berupa kemudahan produk-produk negara ASEAN yang masuk ke Indonesia, karena Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar merupakan pasar terbesar di ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan cara proteksi yang cukup, serta upaya peningkatan nilai tambah produk lokal Indonesia, maka Pasar Bebas Asean dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah.

- b) Perubahan Iklim, posisi geografis Kabupaten Sukamara yang memiliki banyak kawasan hutan, laut dan perbukitan berkaitan dengan fenomena perubahan iklim mempunyai peran sangat penting. Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian, dan lain-lain. Ancaman paling serius akibat perubahan iklim terjadi di sektor pertanian. Dengan anomali cuaca yang tidak menentu, maka produksi dan produktivitas pertanian dapat terpengaruh, yang berdampak pada ketersediaan pangan yang tidak pasti.
- c) Kondisi perekonomian nasional yang mengalami goncangan akibat pandemi COVID-19 akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kinerja pembangunan di Kabupaten Sukamara.



Sedangkan isu-isu strategis sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.2.4. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.2.4.1. Urusan Pendidikan

Isu strategis pada Urusan Pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan distribusi jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata sehingga mempengaruhi nilai IPM Kabupaten, maka dengan itu Pemerintah Kabupaten Sukamara bekerjasama dengan Politeknik Negeri Pontianak mendirikan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).

4.2.4.2. Urusan Kesehatan

Isu strategis pada Urusan Kesehatan adalah terbatasnya sumber daya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta stunting yang masih cukup tinggi akibat gizi buruk. Selain itu sebagai substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintah, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM) menjadi isu strategis Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepala daerah serta akan berfungsi sebagai instrument untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgetting*. Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif -preventif sehingga berdampak pada penurunan kasus kuratif yang harus ditanggung JKN.



Adapun Target capaian kinerja Pemerintah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM harus mencapai 100% sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adanya perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular selama periode tiga dekade terakhir menyebabkan peningkatan *Disability Adjusted Life Years (DALYs)* terutama di negara Indonesia. Hal ini terjadi akibat perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Ancaman penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, Corona Virus – 19 juga masih menjadi masalah nasional yang berdampak pada peningkatan terhadap pembiayaan penanganan dan pencegahan penyakit tersebut.

4.2.4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu Strategis pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana dan tata ruang.

4.2.4.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Isu Strategis pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

4.2.4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat kesatuan bangsa dan politik dalam negeri



Isu Strategis pada urusan ini adalah masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.

4.2.4.6. Urusan Sosial

Isu Strategis pada urusan sosial adalah masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

4.2.5. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.2.5.1. Urusan Tenaga Kerja

Isu Strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.

4.2.5.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

4.2.5.3. Urusan Pangan

Isu Strategis pada urusan pangan adalah konsumsi pangan masyarakat yang belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman), belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, masih adanya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan serta kesadaran masyarakat dalam mengembangkan tanaman lokal masih rendah, serta



rendahnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lumbung pangan.

4.2.5.4. Urusan Pertanahan

Isu Strategis pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.

4.2.5.5. Urusan Lingkungan Hidup

Isu strategis pada urusan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Bencana (Karhutla, Banjir, Kekeringan, Erosi, dan Abrasi);
2. Alih Fungsi Lahan;
3. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
4. Keterbatasan Akses terhadap Air Bersih;
5. Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah belum optimal;
6. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang masih terbatas;
7. Kemiskinan dan Pengangguran yang diperparah Pandemi Covid-19.

4.2.5.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu Strategis pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

4.2.5.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Isu Strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan perlu dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa yang masih perlu perbaikan.



4.2.5.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isu Strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), serta cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak ber-KB.

4.2.5.9. Urusan Perhubungan

Isu Strategis pada urusan perhubungan adalah kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

4.2.5.10. Komunikasi dan Informatika

Isu Strategis pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya implementasi *e-government* menuju *smart city* dan pelayanan perijinan telekomunikasi.

4.2.5.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Isu Strategis pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah terbatasnya akses modal, pasar dan adopsi teknologi.

4.2.5.12. Urusan Penanaman Modal

Isu Strategis pada urusan penanaman modal adalah belum optimalnya pengelolaan potensi investasi.

4.2.5.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

Isu Strategis pada urusan kepemudaan dan olahraga adalah banyaknya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya



sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olahraga.

4.2.5.14. Statistik

Isu Strategis pada urusan statistic adalah belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.

4.2.5.15. Urusan Persandian

Isu Strategis pada urusan persandian adalah belum maksimalnya tata kelola pengamanan informasi serta manajemen keamanan komunikasi dan informasi lingkup pemerintah daerah, SDM bidfang persandian yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas serta belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

4.2.5.16. Urusan Kebudayaan

Isu Strategis pada urusan kebudayaan adalah masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.

4.2.5.17. Urusan Perpustakaan

Isu Strategis pada urusan perpustakaan adalah belum memadainya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan dan bagaimana meningkatkan peran perpustakaan dalam peningkatan IPM Kabupaten Sukamara.

4.2.5.18. Urusan Kearsipan

Isu Strategis pada urusan kearsipan adalah belum memadainya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan.



4.2.6. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.2.6.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Isu Strategis pada urusan kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya tataguna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan. Selain itu konsep pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan belum di lakukan dengan benar.

4.2.6.2. Urusan Pariwisata

Isu Strategis pada urusan pariwisata adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.

4.2.6.3. Urusan Pertanian

Isu Strategis pada urusan pertanian adalah masih rendahnya produktivitas tanaman pangan, pemupukan belum berimbang, masih kecilnya prosentase penggunaan alat mesin pertanian dalam pengolahan lahan maupun pasca panen, tata guna dan tata kelola air untuk pertanian belum optimal, alih fungsi lahan pertanian, harga hasil produksi pertanian belum stabil, jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal, kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal, pengelolaan peternakan sapi masyarakat masih semi intensif, sudah banyaknya tanaman sawit yang tidak produktif dan penggunaan bibit sawit yang tidak jelas (tidak bersertifikat) serta pendapatan petani pekebun yang dilakukan Peremajaan Sawit Rakyat menurun pada saat tanaman belum menghasilkan, serta kurangnya Hijauan Pakan Ternak (HMT)



dan rendahnya kandungan protein rumput pada lokasi kawasan peternakan pendukung *Food Estate*.

4.2.6.4. Urusan Kehutanan

Isu Strategis pada urusan kehutanan adalah semakin berkurangnya secara drastis luas hutan rakyat dan masih cukup luasnya lahan kritis.

4.2.6.5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Isu Strategis pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum teraliri listrik, dan masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan.

4.2.6.6. Urusan Perdagangan

Isu Strategis pada urusan perdagangan adalah belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis, kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional, dan belum optimalnya kerjasama perdagangan antar daerah dengan daerah produsen.

4.2.6.7. Urusan Perindustrian

Isu Strategis pada urusan industri adalah masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM, inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha, kualitas kapasitas SDM-IKM masih kurang dan minat usaha di bidang industri masih kurang dan perlunya penetapan kawasan industri di sukamara sebagai daya tarik investor agar masuk ke Kabupaten Sukamara.



4.2.6.8. Urusan Transmigrasi

Isu Strategis pada urusan transmigrasi adalah karena belum siap untuk lokasi, sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan di lokasi lahan transmigrasi.

4.2.7. Penunjang Urusan Pemerintahan

4.2.7.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Isu Strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah perlunya sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran berdasarkan dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD dan KUA PPAS.

4.2.7.2. Urusan Keuangan

Isu Strategis urusan Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, kompetitif, serta meningkatkan kontribusi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga arah kebijakan yang tepat dan selaras dengan perkembangan keuangan daerah.

4.2.7.3. Urusan Kepegawaian

Isu strategis urusan Kepegawaian dalam mewujudkan birokrasi kaya fungsi secara optimal dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4.2.7.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Isu strategis urusan Pendidikan dan Pelatihan dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional maupun teknis dalam perwujudan untuk peningkatan SDM untuk perbaikan kinerja dan profesionalisme pegawai.



4.2.7.5 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Isu Strategis urusan penelitian dan pengembangan adalah rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai data dan bahan untuk perencanaan pembangunan daerah.

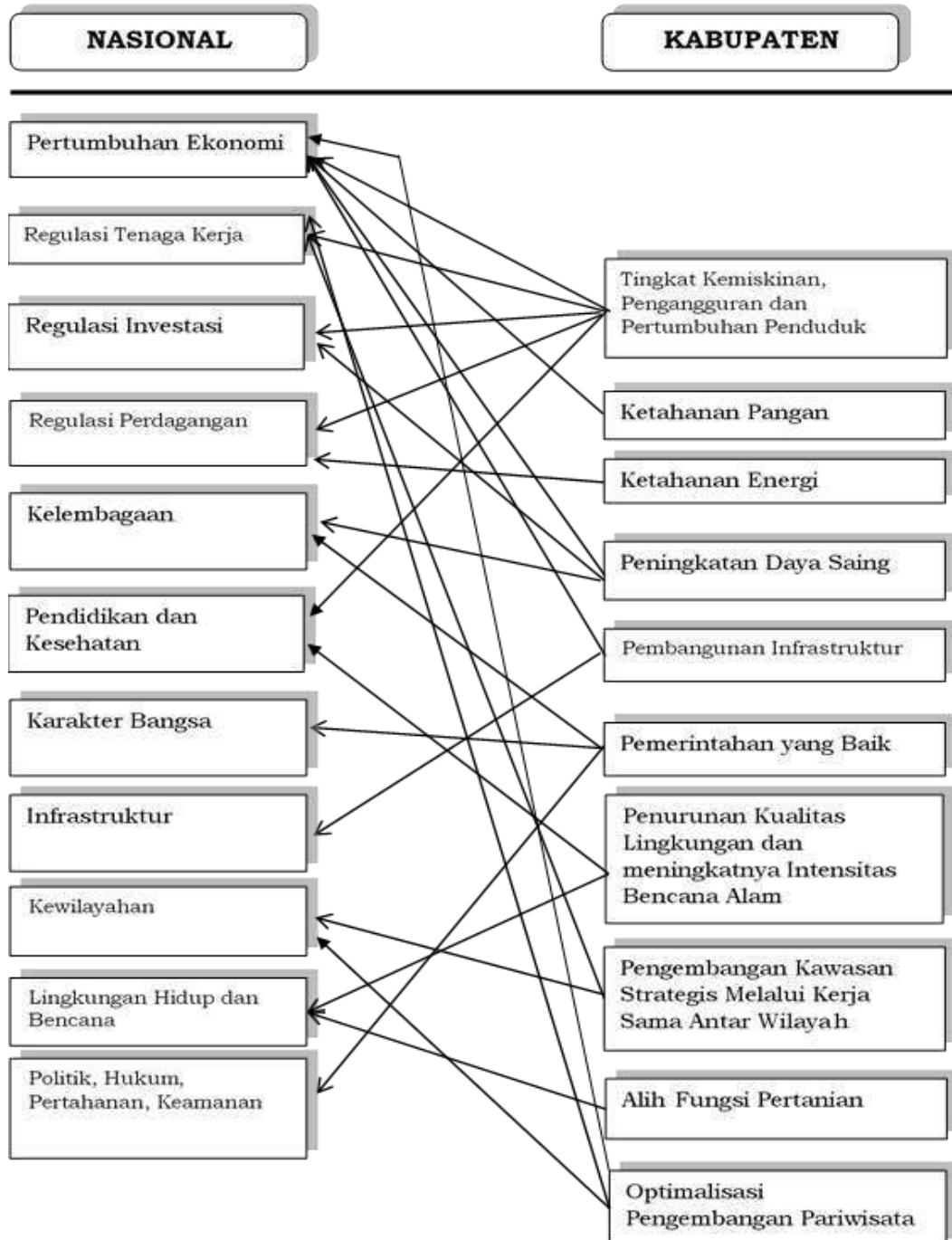
4.3. TELAAH/KETERKAITAN ISU STRATEGIS NASIONAL, PROVINSI DENGAN KABUPATEN

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional, dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan rencana jangka menengah daerah yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global mampu mempengaruhi dan merembesi isu regional dan isu daerah.

Keterkaitan isu-isu strategis nasional dengan isu strategis Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:



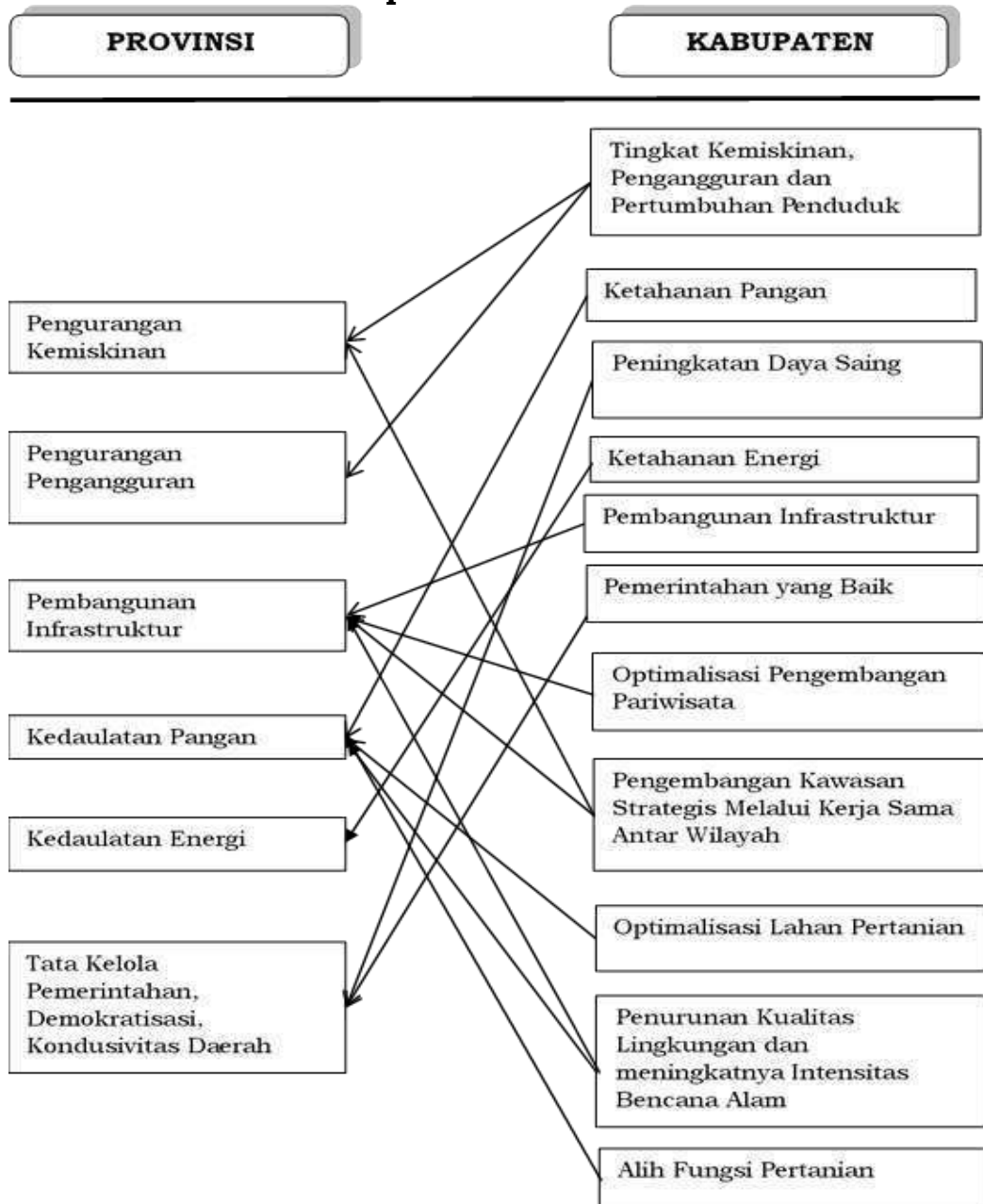
Gambar 4.2.
Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan Isu-Isu Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023





Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi dengan isu strategis Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3.
Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Sukamara dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023





Tabel 4.2.
Telaah Kebijakan Pembangunan dengan Kabupaten Sekitarnya

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
1	Kabuapten Ketapang	2016-2021	Melaksanakan pemerintahan yang baik	Terciptanya sinergitas kerjasama antar pemerintah daerah lainnya	Bersama dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat saling bekerjasama untuk menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan.
			Meningkatkan infrastruktur daerah	Terciptanya infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ketapang	Permasalahan infrastruktur membutuhkan integrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya karena kabupaten tidak dapat berdiri sendiri dalam perencanaan pembangunan karena dalam berbagai hal, terutama infrastruktur, permasalahan yang terjadi di wilayah sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah yang satu dengan yang lain, kerjasama untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Jelai.
			Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia	Tersedianya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah	Salah satu Unsur IPM adalah pendidikan. Untuk meningkatkan IPM, Kabupaten Sukamara harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan daerah lain, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sukamara
				Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar PUSKESMAS dan RSUD	Usia Harapan Hidup Sebagai salah satu unsur IPM. UHH ini dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu kebijakan dalam



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
					Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara
			Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan	Masalah lingkungan yang paling rawan di Kabupaten Sukamara adalah kebakaran hutan dan lahan, demikian juga dengan tiga kabupaten tetangga (Kabupaten Lamandau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kotawaringin Barat), sehingga diperlukan kerjasama dan sinergitas antar wilayah tersebut dalam hal pencegahan dan penanganan kebakaran hutan secara tepat.
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	2017-2022	Medorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Dari segi infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan dan konektivitas antar daerah dapat dilakukan kerjasama dalam membangun konektivitas antar kabupaten sekitar.
				Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tanggap bencana	Menjaga dan memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan serta melakukan antisipasi terhadap bencana alam, banjir dan kebakaran hutan/lahan
				Meningkatnya pengembangan potensi daerah	Menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan ekstensifikasi pertanian terpadu dan potensi unggulan lainnya dengan memperhatikan kearifan lokal
			Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata	Meningkatnya nilai kearifan lokal produk dan destinasi wisata	Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki potensi pariwisata yang sama salah satunya wisata pesisir/pantai sehingga hal tersebut dapat menjadi potensi yang baik untuk melaksanakan pengembangan potensi



No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Misi	Sasaran	Keterangan Keterkaitan
					wisata yang mampu berdaya saing sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3	Kabupaten Lamandau	2018-2023	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup	Menurunnya kemiskinan dan meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan	Meningkatkan kerjasama perekonomian dalam rangka meningkatkan perekonomian antar daerah (Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Ketapang)
			Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	Diperlukan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
			Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur daerah	Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau masih ada permasalahan perbatasan diharapkan dengan penataan ruang perbatasan dapat diselesaikan. Dari segi infrastruktur untuk membantu percepatan pembangunan dan konektivitas antar daerah, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perbatasan

4.3.1. Isu Strategis Kewilayahan

Isu strategis kewilayahan berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024:

1. Penurunan Ketimpangan Antar Wilayah

- Kemiskinan di KTI (18,01%)*, KBI (10,33%)*, perdesaan (13,47%)* dan perkotaan (7,20%)* yang tinggi.
- Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324), dan Perkotaan (0,4).
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa.



2. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (1 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata).
- Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang lemah.
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

3. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah

- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%*, air minum 72%*, sanitasi layak 67,5%*, dsb).
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kabupaten/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal.
- Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang.
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi.

4. Pengelolaan Urbanisasi

- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030.
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB).

5. Pemanfaatan Ruang

- Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018).
- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa).



- Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).

4.3.2. Isu Lingkungan Hidup Nasional:

1. Persampahan

Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini akan menimbulkan sejumlah persoalan lanjutan, diantaranya adalah produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016. Jumlah ini naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya.

2. Banjir

Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunung sampah, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi Sungai.

3. Pencemaran Sungai

Indonesia masih menghadapi masalah pencemaran sungai yang sangat serius. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai.

4. Pemanasan Global

Permasalahan lain yang juga menjadi persoalan lingkungan adalah pemanasan global, yakni proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan permukaan bumi. Banyak dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global seperti rusaknya ekosistem makhluk hidup serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di Kutub.



5. Pencemaran Udara

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia. Kondisi ini menimbulkan munculnya masalah pencemaran udara.

6. Rusaknya Ekosistem Laut

Selain sebagai negara Agraris, Indonesia dikenal dengan julukan negara Maritim. Sebagai negara Maritim upaya untuk menjaga ekosistem laut menjadi sebuah keharusan.

7. Sulitnya Air Bersih

Kesulitan air bersih banyak dialami sebagian besar masyarakat di Indonesia. Salah satu daerah yang cukup lama mengalami masalah ini adalah Papua. Distribusi Sumber Daya Air (SDA) yang tidak merata menjadi salah satu penyebab masyarakat sulit mendapatkan air bersih.

8. Kerusakan Hutan

Pembekalakan liar atau *Illegal Logging* menjadi penyebab utama dari berkurangnya lahan hutan. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas hutan di Indonesia saat ini mencapai 124 juta hektar. Namun sejak tahun 2010 – 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 hektar per tahunnya.

9. Abrasi

Abrasi atau biasa juga disebut dengan erosi pantai dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Kerusakan garis pantai ini bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering kali disebut sebagai penyebab utama terjadinya masalah ini.

10. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah kondisi dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Akibatnya tanah menjadi tidak lagi murni seperti sebelumnya.



Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini diantaranya mengurangi kesuburan tanah, rusaknya ekosistem makhluk hidup serta timbulnya wabah penyakit.

Dengan demikian, strategi yang akan dirumuskan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 harus selaras dan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 khususnya terkait langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan/atau isu strategis nasional yang relevan dengan kondisi Kabupaten Sukamara, antara lain: meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

4.3.3. Isu Strategis RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

1) Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.

Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah perlu diperhatikan keberlanjutannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dampak bencana asap akibat kebakaran lahan, hutan dan kebun yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya tahun 2015 yang lalu sangat mengganggu aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial



masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan perlu dilanjutkan.

2) Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi. Realisasi potensi sumber daya manusia yang telah menjadi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Sebanyak 46,92 % penduduk di Kalimantan Tengah yang bekerja adalah penduduk dengan pendidikan SD kebawah sementara penduduk yang bekerja hingga perguruan tinggi sebanyak 11,42 %. Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah.

3) Pengembangan *Green Economy* dan *Green Government* dalam realisasi pembangunan daerah.

Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan merupakan pelaksanaan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian kualitas lingkungan hidup dengan tetap menggerakkan roda pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengurangi prinsip etika lingkungan. Provinsi Kalimantan Tengah telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan tahunan *Governors Climate and Forest*



(GCF) *Taskforce* sejak tahun 2009. Melalui GCF ini telah lahir berbagai kerjasama terkait penyelamatan lingkungan hidup, terutama wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki fungsi sebagai salah satu paru-paru dunia terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif pembangunan.

4) Pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Namun adanya keterbatasan aksesibilitas di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan aksesibilitas fisik wilayah baik di internal maupun eksternal Provinsi Kalimantan Tengah.

5) Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.

Ketahanan pangan merupakan salah satu ancaman Provinsi Kalimantan Tengah yang dikarenakan berkurangnya lahan pertanian akibat pengalihan fungsi lahan, keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penggunaan teknologi tepat guna bagi pengembangan sektor pertanian menjadi basis peningkatan produktivitas sektor saat ini. Peran aktif pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui



penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara sinergi.

6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga, penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait aksesibilitas wilayah sangat diperlukan guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya. Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain.

7) Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.

Eksplorasi setiap sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan



perekonomian daerah dengan berimbang positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur melalui CSR serta tetap memperhatikan lingkungan hidup untuk menghindari degradasi lingkungan.

8) Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan berlandaskan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata dan berkesinambungan.

4.3.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan, makna pendekatan tersebut bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah strategi yang cenderung bersifat persuasif dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan/*stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup pada Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup



Strategis, memiliki 6 prinsip KLHS yang seyogyanya dianut sebagai berikut:

Prinsip 1: Penilaian Diri (*Self Assessment*)

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau program.

Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (*Improvement of the Policy, Plan, and/or Program*)

Prinsip ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal dan KLHS dapat memicu perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program bersangkutan.



Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial (*Social Learning and Capacity Building*)

Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS, dapat dicapai masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan yang lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.

Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (*Influencing Decision Making*)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip 5: Akuntabel (*Accountable*)

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak. KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak, karena lingkup KLHS terbatas, sedangkan tuntutan dapat berdimensi luas.

Prinsip 6: Partisipatif

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program serta penyusunan rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 telah dilaksanakan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya isu utama, indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kondisi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem di Kabupaten Sukamara. Dari hasil uji publik yang telah dilaksanakan telah disepakati 7 (tujuh) isu utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukamara, adapun isu utama pembangunan berkelanjutan tersebut adalah:

1. Bencana (kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, erosi, dan abrasi).
2. Alih fungsi lahan.
3. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Keterbatasan akses terhadap air bersih.
5. Sarana-prasarana pembangunan daerah belum optimal.
6. Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih terbatas
7. Kemiskinan dan pengangguran yang diperparah oleh pandemi COVID-19.

Berdasarkan indikator pencapaian TPB, dapat diketahui indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (RPJMN 2019). Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 54 (lima puluh empat) indikator, artinya indikator-indikator tersebut sudah dilaksanakan dengan baik selama lima tahun terakhir. Namun demikian berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukamara, dengan semakin minimnya



dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini kedalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023.

4.3.5. Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional

Dalam penelaahan isu global/agenda pembangunan internasional akan diuraikan beberapa isu-isu strategis berskala internasional yang erat kaitannya dengan pembangunan Kabupaten Sukamara di masa mendatang yakni menyangkut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

4.3.5.1. Masyarakat Ekonomi ASEAN

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan *ASEAN community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk 3 (tiga) komunitas dalam *ASEAN community* yang disesuaikan ke dalam 3 (tiga) pilar di dalam ASEAN vision 2021, yakni bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic-Security Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun *blue print* MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi,



dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan *ecommerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni:

Strategi 1: Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui: (1) menjalin kerjasama riset dengan perguruan tinggi; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor.



Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui: (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2: Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui: (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan dan perijinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang menjadi target investasi.

Strategi 3: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan utilisasi pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar daerah di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme *Public-Private Partnership* (PPP).

Strategi 5: Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka



regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.3.5.2. **Sustainable Development Goals (SDGs)**

Seiring dengan berakhirnya *MDGs* pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan *Rio+20 Summit*, 192 anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*new global partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, *high level panel* mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

- 1) ***Leave No One Behind*** - **Tidak meninggalkan siapapun di belakang.** Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas,



ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

- 2) ***Put Sustainable Development at the Core - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti.*** Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
- 3) ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif.*** Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- 4) ***Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua.*** Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.



5) *Forge a New Global Partnership - Membina kemitraan global baru.* Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/*indigenous*. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.



Gambar 4.4
Tujuh Belas tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Adapun 17 Tujuan dari SDGs terdiri dari:

1. **No Poverty** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. **Zero Hunger** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. **Good Health and Well-being** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. **Quality Education** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;



5. **Gender Equality** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. **Clean Water and Sanitation** - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. **Affordable and Clean Energy** - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. **Decent Work and Economic Growth** - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. **Industry, Innovation and Infrastructure** - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. **Reduced Inequalities** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11. **Sustainable Cities and Communities** - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12. **Responsible Consumption and Production** - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Climate Action** - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. **Life Below Water** - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15. **Life on Land** - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan



memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. ***Peace, Justice and Strong Institutions*** - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan; dan
17. ***Partnerships for the Goals*** - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2018-2023. Visi, misi dalam konteks ini merupakan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023 yaitu Bapak H. Windu Subagio dan Bapak H. Ahmadi, S.H. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1. VISI

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 yaitu H. Windu Subagio dan H. Ahmadi, S.H. adalah sebagai berikut:

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKAMARA YANG SEJAHTERA,
MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL”***

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

SUKAMARA :

Meliputi wilayah dan isinya. Artinya Kabupaten Sukamara dengan 5 (lima) kecamatan dan 32 desa/kelurahan.



SEJAHTERA:

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

MAJU:

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

BERMARTABAT:

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat.

PROFESIONAL:

Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien) dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).



Gambar 5.1.
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Sukamara



- Visi Kabupaten Sukamara dalam point “Sejahtera” telah selaras dengan Visi Nasional point “berdaulat” dan Visi Provinsi Kalimantan Tengah untuk point “Kuat”, hal ini pada dasarnya bertujuan mewujudkan kondisi masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya baik materiil maupun imateriil.
- Visi “Maju” telah selaras dengan Visi Nasional “Mandiri” dan Visi Kalimantan Tengah dalam point “Kuat”, hal ini pada dasarnya hendak menciptakan kondisi yang mencerminkan kemakmuran dan kemajuan semua bidang.
- Visi “bermartabat” telah selaras dengan Visi Nasional “Berkepribadian” dan Visi Kalimantan Tengah “Bermartabat”, hal ini menunjukkan kondisi yang ingin dicapai Kabupaten Sukamara yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang.



- Visi “Pemerintah yang profesional” telah selaras dengan Visi Nasional “Mandiri dan Berkepribadian” dan Visi Kalimantan Tengah “Amanah”, hal ini menunjukkan keinginan Kabupaten Sukamara berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi.

5.2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplentasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukamara 2018-2023 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

1. *Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Kabupaten Sukamara sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuhkembangkan kemampuannya. Birokrasi di Kabupaten Sukamara harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga mampu mewujudkan tata pemerintah yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat



namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat

Sumber daya manusia Kabupaten Sukamara yang terdidik diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan.

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang sehat merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu Sukamara yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan

Misi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dijelaskan secara lebih rinci adalah meningkatkan pembangunan daerah dan desa; mengurangi kesenjangan sosial, keberpihakan kepada masyarakat dan kaum lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana prasarana ekonomi, mewujudkan infrastruktur dan utilitas daerah yang terpadu dan efisien dengan melakukan upaya integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, bendungan, jaringan irigasi dan sungai), serta memantapkan



sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah dan partisipatif.

4. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sukamara. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

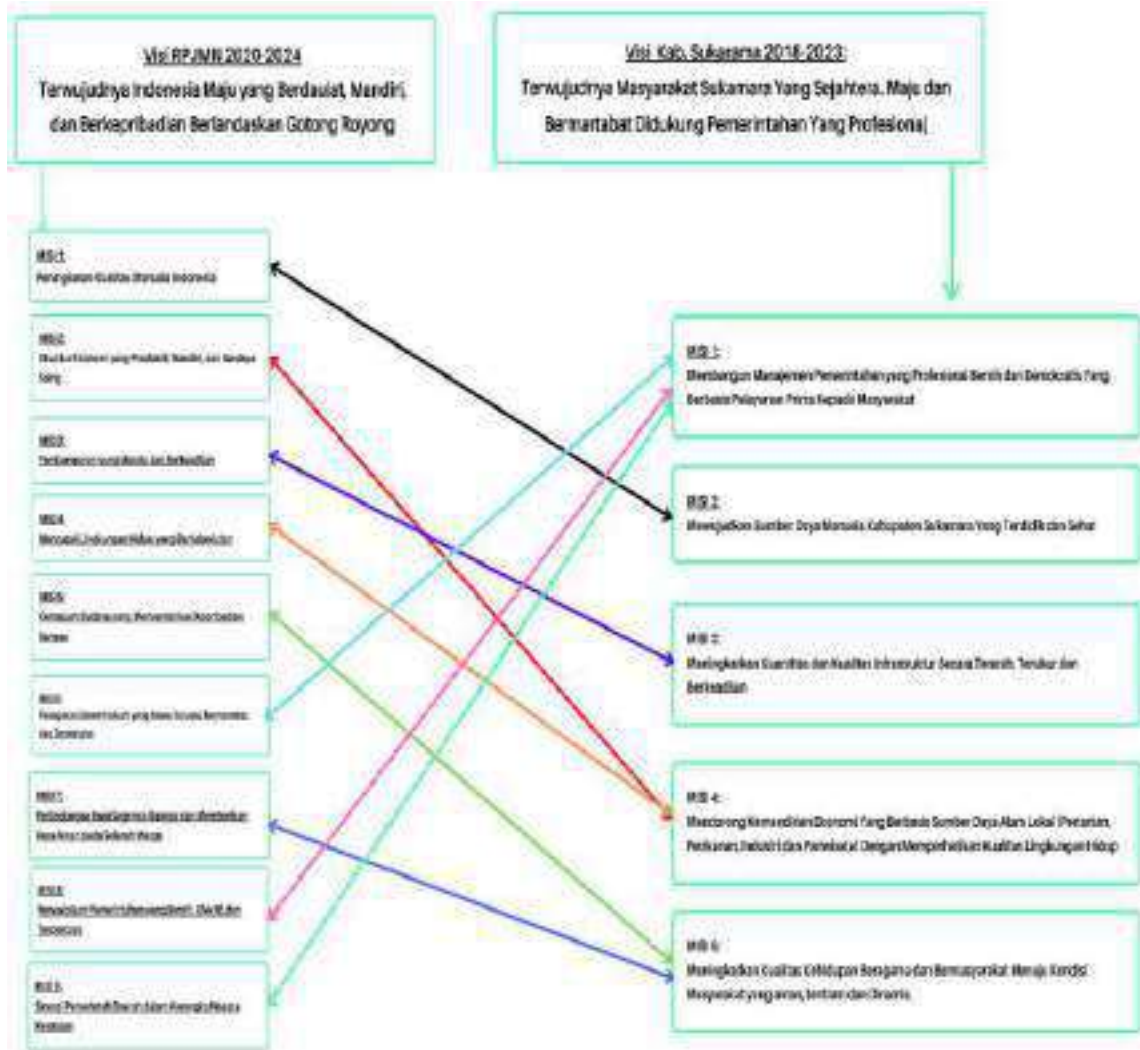
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Sukamara yang religius, tenteram dan dinamis. Sukamara sebagai daerah yang aman bagi setiap penghuninya. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Menjadikan gotong royong sebagai gerakan dalam membangun Sukamara.



Semua golongan masyarakat hadir membentuk wajah Kabupaten Sukamara yang dinamis dan majemuk serta memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Sukamara. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan sehingga sudah selainya menjadi modal utama pembangunan Sukamara. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Sukamara.

Gambar 5.2.
Keterkaitan Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023





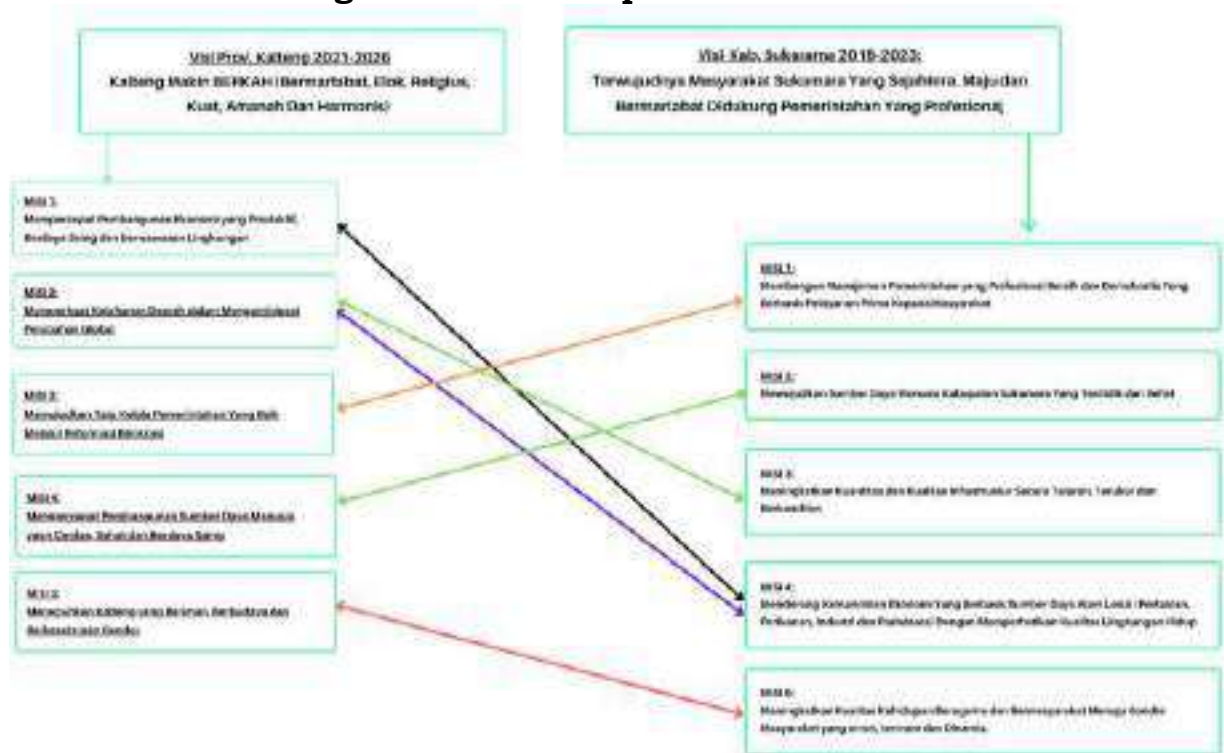
Misi RPJMD Kabupaten Sukarama sudah selaras dengan Misi Pembangunan Nasional 2020-2024 yang ada pada dokumen RPJMN 2020-2024.

- Misi ke-1 (Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat) pada RPJMD Kabupaten Sukarama selaras dengan Misi ke-6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya), Misi ke-8 (Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya) dan misi ke-9 (Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan) pada RPJMN 2020-2024.
- Misi ke-2 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat) selaras dengan misi ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia) RPJMN 2020-2024.
- Misi ke-3 (Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan) selaras dengan misi ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan) RPJMN 2020-2024.
- Misi ke-4 (Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup) selaras dengan misi ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan misi ke-4 (Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan) RPJMN 2020-2024.
- Dan misi ke-5 (Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis) selaras dengan misi ke-5 (Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa) dan misi ke-7 (Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga).



Sedangkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Misi Kabupaten Sukarama juga sudah selaras dengan Misi Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026.

Gambar 5.3.
Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara 2018-2023



- Misi ke-1 (Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat) pada RPJMD Kabupaten Sukarama selaras dengan Misi ke-3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
- Misi ke-2 (Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat) selaras dengan misi ke-4 (Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas,



Sehat dan Berdaya Saing) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

- Misi ke-3 (Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan) selaras dengan misi ke-2 (Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
- Misi ke-4 (Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup) selaras dengan misi ke-1 (Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan) dan misi ke-2 (Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global) pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.
- Dan misi ke-5 (Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis) selaras dengan misi ke-5 (Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender).

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta berdasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun



adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat

Tujuan : Mewujudkan masyarakat Sukamara yang berdaya saing.

Sasaran : Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan

Tujuan : Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh.



Misi Keempat : Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Pertama: Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing.

Sasaran 1 : Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Sasaran 2 : Meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tujuan Kedua : Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup yang lestari.

Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis.

Tujuan : Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis.

Sasaran : Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan.

Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolok ukur dalam pengawasan dan



pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukamara selama periode 2019-2023. Sebagai standar pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Infrastruktur, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Angka Kriminalitas. Indikator makro ini merupakan penunjuk atas dampak (*impact*) pembangunan lokal, regional, dan nasional. Dengan hubungan, bahwa tercapainya target dari indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator makro pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara bisa dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:



Tabel 5.1.
Indikator Makro Pemerintah Kab. Sukamara 2018-2023

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					Indikator Pembangunan	Realisasi	RPJMD KALTENG 2021-2026						Indikator Pembangunan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	RPJMD PERUBAHAN KAB. SUKAMARA 2018-2023			2024
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025					2026	2018	2019	
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,8	6,1	6,4	6,7	6,9	Pertumbuhan ekonomi	-1,40	-	5.60 %	5.7%	5.8%	5.9%	6.0%	Pertumbuhan ekonomi	6,17	6,05	1,98	2,4	4,13	4,8	
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	4,75	4,44	4,19	3,85	3,55	Prosentase Penduduk Miskin	4.82	4.58	4.4	4.21	4.01	3.81	3.62	Angka Kemiskinan	3,19	3,36	3,36	3,36	3,2	3,2	
3	Tingkat Pengangguran terbuka	3,70	3,70	3,60	3,30	3,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.10 (2019)	4.24	3.65	3.56	3.47	3.38	3.29	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,83	3,57	3,13	2,72	2,33	1,98	
4	Indek Pembangunan Manusia						Indeks Pembangunan Manusia	71.05	71.83	72.36	72.89	73.42	73.95	74.48	Indeks Pembangunan Manusia	67,52	67,95	68,03	68,62	69,21	69,81	
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp)														PDRB Per Kapita	62,47	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	
6	Indeks Reformasi Birokrasi						Predikat Indeks Reformasi Birokrasi	59,59 (CC)	CC	B	B	BB	A	A	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	45,00	45	45	50	55	60	
7	Indek Kualitas Lingkungan Hidup						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.74	74.07	74.3	74.53	74.75	74.97	75.16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,00	53,00	54,00	54,5	55	55,5	
10	Indeks Gini						Indeks Gini	0.16	0.155	0.149	0.143	0.138	0.132	0.127	Indeks Gini	0,357	0,33	0,3	0,298 25	0,296 5	0,294 75	
11	Indeks Resiko Bencana						Indeks Resiko Bencana	130	129	127	125	123	121	120	Indeks Resiko Bencana							
12	Indeks Demokrasi Indonesia (ID)						Indeks Demokrasi Indonesia (ID)	81,16 (2019)	81.25	81.50	82.00	82.25	82.50	83.00	Indeks Demokrasi Indonesia (ID)							



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					Indikator Pembangunan	Realisasi	RPJMD KALTENG 2021-2026						Indikator Pembangunan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	RPJMD PERUBAHAN KAB. SUKAMARA 2018-2023			2024	
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025					2026	2018	2019		2020
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama						Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,82 (2019)	77.92	77.97	78.02	78.07	78.12	78.17	Indeks Kerukunan Umat Beragama								
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.03	89.05	89.07	89.09	89.11	89.13	89.15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)								



Selain indikator makro daerah tersebut, ada beberapa daerah dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah dirumuskan untuk periode 2018-2023 mendatang. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Sukamara 2018-2023 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:



Tabel 5.2.
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target			Kondisi Akhir
									2021	2022	2023	
1	Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkat dari 45 Menjadi 60 Diakhir Periode	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Nilai LKJIP	54,72 / CC	55,60 / CC	58,60 / CC	B (>60)	B (>60)	BB (>70)	BB (>70)
					Indek Kepuasan Masyarakat	82,00%	89,3	90	90	95	95	95
					Tingkat Maturiti SPIP	Rintisan	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
					Nilai EKPPD	2,8073 / Tinggi	2,8073 / Tinggi	2,85 / Tinggi	Tinggi (minimal 3,41)	Tinggi (minimal 3,41)	Sangat Tinggi (minimal 4,21)	Sangat Tinggi (minimal 4,21)
2	Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat	Mewujudkan Masyarakat Sukamara yang berdaya saing	Nilai IPM Meningkat dari 67,52 menjadi 69,81 diakhir periode RPJM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,10	12,11	12,12	12,29	12,75	12,95	12,77
					Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,84	7,91	8,01	8,15	8,49	8,64	8,48
					Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,45	71,49	71,53	71,55	71,58	71,6	71,6
					Persentase balita gizi buruk	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %	≤ 1 %
					Konsumsi per kapita (ribuan/kapita/tahun)	8482	8738	8674	8826	8980	9137	8826
3	Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Gini Ratio Menurun dari 0,357 menjadi 0,2947 di akhir periode	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	17,77 %	30,17 %	36,37	42,57 %	48,77 %	55 %	55 %
					Persentase penduduk berakses air minum	33,2 %	33,2 %	-	-	35 %	35 %	35 %
					Rasio Jaringan Irigasi	-	64,91 %	72,05	79,57 %	87,29	95 %	95 %
					Cakupan Layanan Telekomunikasi	88%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
					Persentase rumah tinggal bersanitasi	na	na	na	75,90%	76,70%	77,80%	77,80%
					Persentase rumah tangga pengguna listrik	98,75	97,45	98,34	98,50	99,00	99,50	99,50



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target			Kondisi Akhir
									2021	2022	2023	
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Rasio rumah layak huni (Jumlah Rumah)	207 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit
4	Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi bertahan di 4,18 pada akhir periode	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,13	3,57	3,13	2,72	2,33	1,98	1,98
					Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,18	73,37	65,60	65,71	65,83	65,94	65,94
					Angka Kemiskinan	3,19	3,16	3,23	3,07	2,93	2,79	2,79
					Tingkat Inflasi	6,02 %	2,02%	1,62%	4%	4%	4%	4%
					PDRB Per Kapita ADHB (Juta rupiah/tahun)	62,47	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	79,02
				Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	1.189.064,7	1.274.424,1	1.417.944,9	1.436.270,6	1.513.308,7	1.590.346,7	1.590.346,7
					Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	112.286	125.534	132.225	137.014	144.363	151.712	151.712
					Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB	47	52	52	55	59	62	62
					Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14
					Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 2.879.273.378.498	Rp. 849.382.600.658	Rp. 201.465.345.151	Rp. 647.917.255.507	Rp. 680.313.118.283	Rp. 714.328.774.198	Rp. 5.972.680.472.295
					Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2	86,8	89,5	92,1	94,7	100	100
		Meningkatnya kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari 53,00 menjadi 55,00. di akhir periode	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	< 5	< 10	< 5	< 10	< 10	< 10	< 10
					Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	100	100	100	100	100	100	100



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target			Kondisi Akhir
									2021	2022	2023	
5	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis.	Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis	Kasus tindakan konflik sosial dan radikalisme berkurang dari 33 kasus menjadi 3 kasus diakhir periode	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	55	70	85	85
					Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	55	70	85	85
					Indeks Pembangunan Gender	91,45	90,84	91,40	91,96	92,53	93,10	93,10
	5	6	6	8	33							



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukamara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukamara menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan. Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya **“berpikir strategic”** untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh



sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

6.1. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur pentahapan dan prioritasnya. Prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan



kedalam bentuk program-program pembangunan. Prioritas pembangunan merupakan penjabaran atas Misi RPJMD Kabupaten Sukamara yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2018-2023. Pada bagian ini akan diuraikan prioritas dan fokus tahapan pencapaiannya dari segi substansi isi kebijakan, supaya pencapaian Visi lebih mudah untuk diterjemahkan dalam perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Prioritas ini akan dicapai dalam 5 tahun, sehingga diperlukan pentahapan tahunan. Fokus prioritas dalam pentahapan tahunan dinyatakan sebagai tema pembangunan tahunan. Tema pembangunan merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukamara selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, yaitu dari tahun 2018-2023. Tema pembangunan yang akan diangkat untuk masing-masing tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

1. Tahun Pertama: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat.
2. Tahun Kedua: Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal.
3. Tahun Ketiga: Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional.
4. Tahun Keempat: Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi



dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang.

5. Tahun Kelima: Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat.

Berdasarkan tema pembangunan daerah Kabupaten Sukamara 2018-2023, maka prioritas selama 5 tahun adalah:

1. Penataan pemerintahan yang baik untuk mendukung hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat berlandaskan prinsip transparan, akuntabel, responsibel dan adil melalui peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, peningkatan sumber daya dan peningkatan pelayanan dasar wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sukamara.
2. Pengelolaan potensi ekonomi daerah, melalui peningkatan industri pengolahan dengan peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan alat-alat sarana produksi pertanian, perluasan pemasaran hasil melalui sektor perdagangan, dan jasa dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana ekonomi dengan pembangunan pasar, meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan untuk menggerakkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sukamara.
3. Peningkatan kerjasama secara regional dan nasional berdasarkan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui kerjasama investasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar



kesehatan, pendidikan, papan, dan pangan didukung pengembangan sarana prasarana daerah yang mantap, dan pembangunan sosial budaya kemasyarakatan yang lestari dan tata pemerintahan yang profesional menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat.

6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan antara lain:

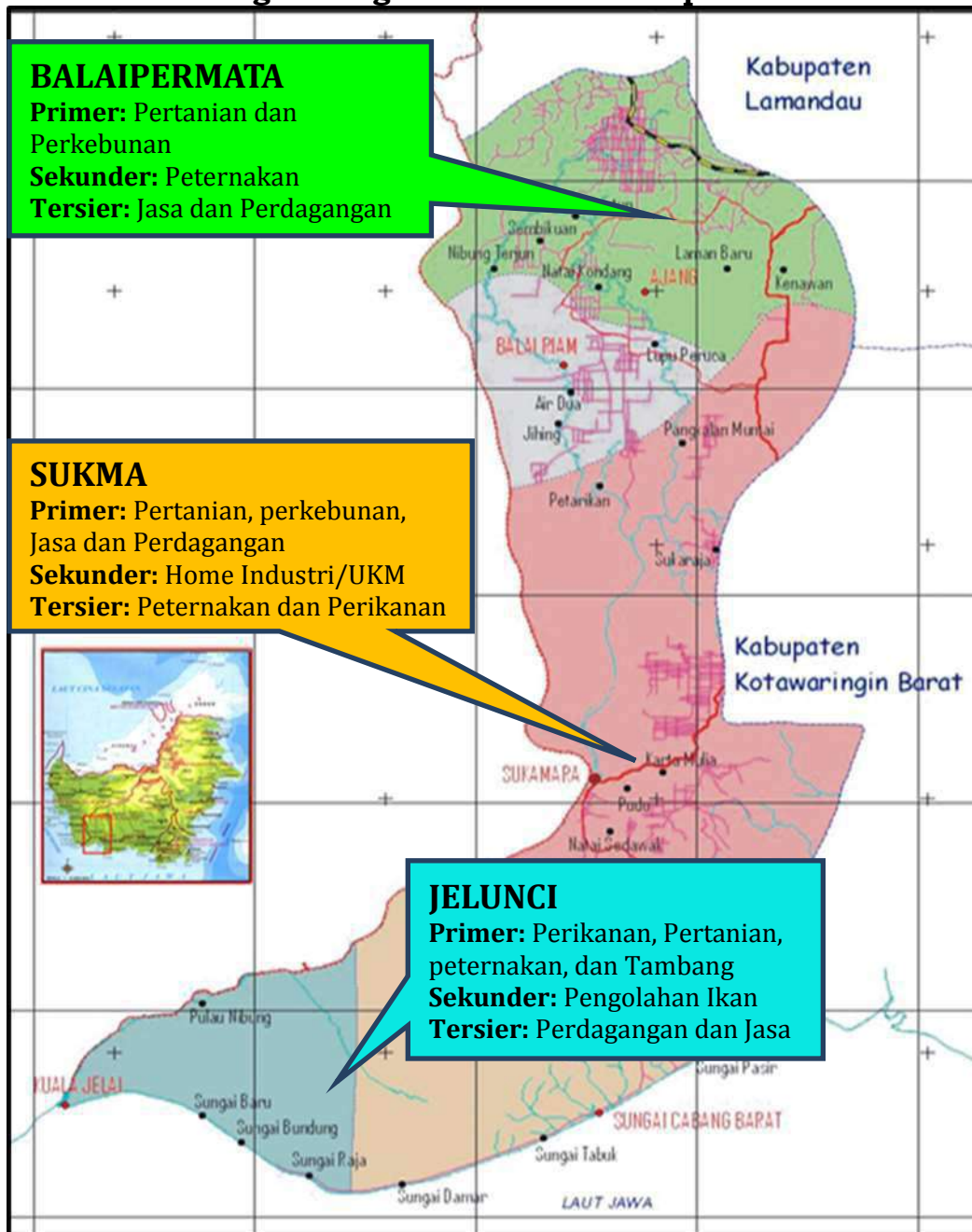
1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional, dan faktor;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Pengembangan potensi di Kabupaten Sukamara dilakukan melalui pembagian kawasan. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Kabupaten Sukamara, yang dibagi menjadi 3 Kawasan. Antara lain **Kawasan 1 (Kawasan Bagian Utara - BALAI PERMATA)**, **Kawasan 2 (Kawasan Bagian**



Tengah - SUKMA), dan Kawasan 3 (Kawasan Bagian Selatan - JELUNCI), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Kawasan Pengembangan Potensi di Kabupaten Sukamara



Sumber: Data diolah, 2018.

1. **Kawasan Bagian Utara - Kawasan BALAI PERMATA :** Kawasan ini meliputi Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung,

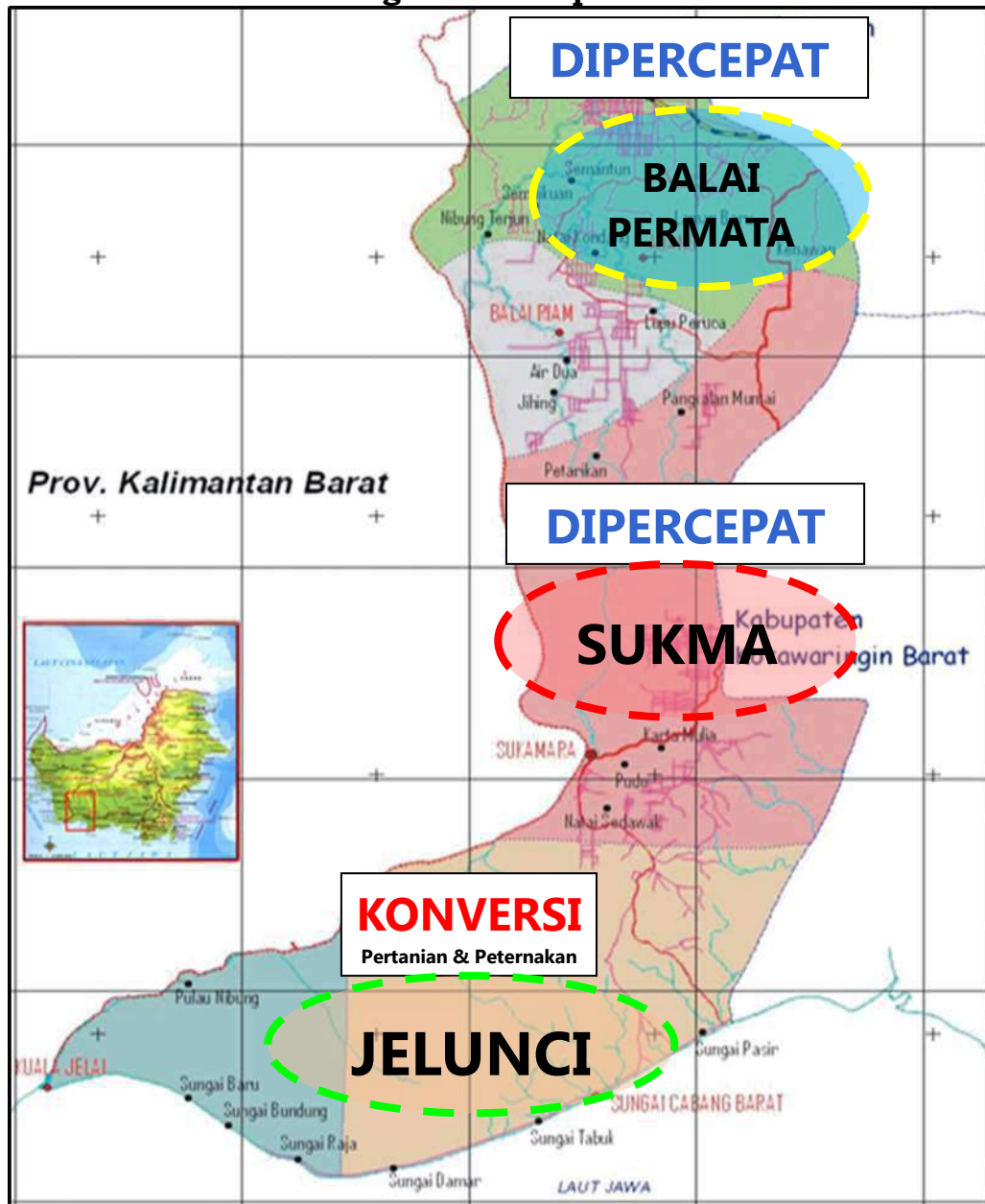


perkembangan dipengaruhi oleh migran karyawan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Karakteristik merupakan permukiman pedesaan, dan perkebunan Kelapa Sawit. Arah pengembangan kawasan Primer (Pertanian dan Perkebunan), Sekunder (Peternakan), dan Tersier (Jasa dan Perdagangan).

2. **Kawasan Bagian Tengah - Kawasan SUKMA** : Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukamara, perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukamara sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman-permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama. Arah pengembangan kawasan Primer (Pertanian, perkebunan, Jasa dan Perdagangan), Sekunder (Home Industri/UKM), dan Tersier (Peternakan dan Perikanan).
3. **Kawasan Bagian Selatan - Kawasan JELUNCI** : Kawasan ini meliputi Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci, merupakan kawasan pantai, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok. Kegiatan perdagangan dan jasa pariwisata serta industri perikanan berkembang linier terhadap jaringan pantai. Arah pengembangan kawasan Primer (Perikanan, Pertanian, peternakan, dan Tambang), Sekunder (Pengolahan Ikan), dan Tersier (Perdagangan dan Jasa).



Gambar 6.2.
Arah Pembangunan Kabupaten Sukamara

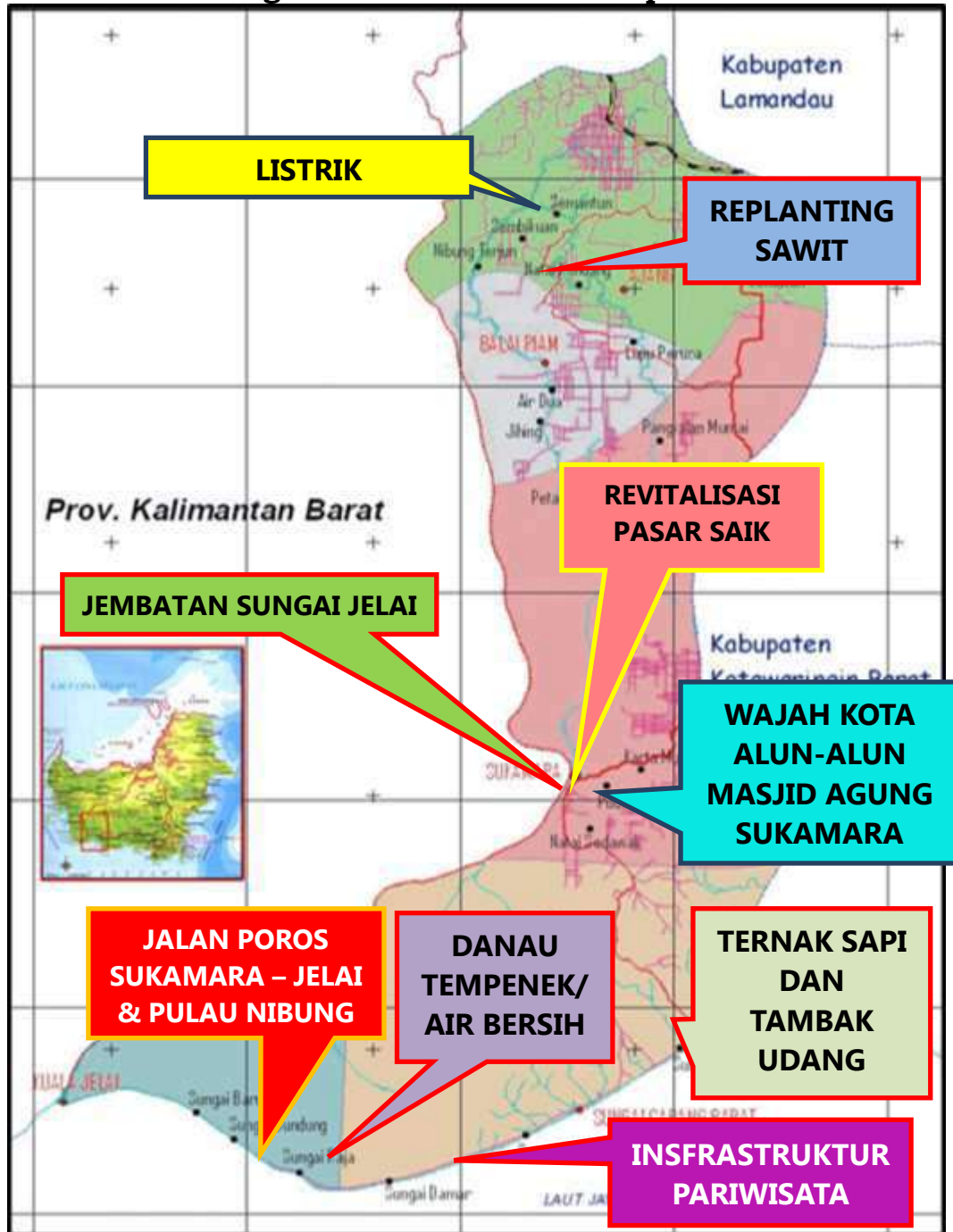


Sumber: Data diolah, 2018.

Sedangkan arah kebijakan untuk pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Sukamara dapat di lihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 6.3.
Arah Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sukamara



Sumber: Data diolah, 2018.

Dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2018-2023, maka strategi pembangunan daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023

Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik	1.1	Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui: 1) Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 2) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat; 3) Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum. 4) Penguatan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan PAD
				1.2	Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan 2) Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi.
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat	2.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan	2.1	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan dilakukan melalui: 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif.



Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
					<ol style="list-style-type: none">2) Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.3) Mengembangkan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.4) Menirikan Program Studi di Luar Kampus (PSDKU) Politeknik Negeri Pontianak dengan menyesuaikan potensi keadaan kebutuhan Program Studi di Kabupaten Sukamara.
				2.2	<p>Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;3) Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan4) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
3.	Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat	3.1	Meningkatnya cakupan penyediaan infastruktur dasar publik	3.1	<p>Upaya peningatan kualitas pembangunan infrastruktur layanan dasar akan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;2) Peningkatan kualitas dan kuantitas jasa kontruksi sesuai standar kualifikasi;3) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah;4) Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;5) Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke



Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan				
Tujuan		Sasaran		Strategi
				seluruh wilayah; 6) Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 7) Peningkatan pelayanan jaringan air minum; 8) Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu; 9) Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan 10) Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.
		3.2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	3.2 Upaya untuk meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh dilakukan melalui: 1) Pengadaan perumahan layak huni bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat terkena bencana; 2) Penataan kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh; 3) Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pemukiman; 4) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup				
Tujuan		Sasaran		Strategi
4.	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing	4.1	Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	4.1 Upaya menurunkan angka pengangguran akan dilakukan melalui: 1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2) Meningkatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; 3) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; 4) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
				4.2 Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena



Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan		Sasaran		Strategi	
					<p>dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan;</p> <p>2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (sapronek, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak covid 19;</p> <p>3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dan pengembangan wirausahaan;</p> <p>4) Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.</p>
		4.2	Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	4.3	<p>Upaya peningkatan peran sektor pertanian akan dilakukan melalui:</p> <p>1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak;</p> <p>2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas;</p> <p>3) Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian;</p> <p>5) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna;</p> <p>6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas, terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.</p>



Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
				4.4	Upaya peningkatan peran sektor perikanan akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4) Penerbitan tanda daftar dan penerbitan ijin pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya; 5) Mempermudah perijinan usaha perikanan; 6) Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan; 7) Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan; 8) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 9) Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia Perikanan
				4.5	Upaya peningkatan peran sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi Covid 19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM; 2) Melakukan percepatan/akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.
				4.6	Upaya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism akan dilakukan melalui:



Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan		Sasaran		Strategi	
					<ol style="list-style-type: none">1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya;2) Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata;3) Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata.
				4.7	<p>Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pemberian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif;2) Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif;3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan



Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan		Sasaran		Strategi	
					SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.
5.	Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	5.1	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	5.1	Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dilakukan melalui: 1) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; 2) Mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan; 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.

Misi 5: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat menuju kondisi masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis

Tujuan		Sasaran		Strategi	
6.	Mewujudkan Sukamara yang aman, tertib dan dinamis	6.1	Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	6.1	Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan dilakukan melalui: 1) Upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3) Peningkatan kualitas ASN yang menangani keamanan dan ketertiban lingkup kabupaten; 4) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) 5) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 6) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 7) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 8) Penataan sistem informasi dan sistem dasar penanggulangan bencana 9) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah 10) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara 2018-2023 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat



6.3. TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus pembangunan pada masing-masing tahun fiskal yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah yang kemudian akan terorganisir melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan implementasi strategi dan arah kebijakan tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi disusun secara berkesinambungan selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diuraikan sebagai berikut:

2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemanfaatan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pematangan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan berkeadilan

Adapun arah kebijakan dalam tiap tahapan adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 6.3 berikut:



Tabel 6.3.
Pemetaan Waktu Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
Misi 1: Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis Berbasis Pelayanan Prima kepada Masyarakat						
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik	Upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah akan dilakukan melalui: 1. Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi secara tepat; 3. Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan secara umum.	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	4. Penguatan dan optimalisasi (BUMD) dalam rangka peningkatan PAD					
	Upaya meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan pada unit-unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum; dan 2) Peningkatan kinerja layanan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel terutama dengan pemanfaatan secara tepat penggunaan Teknologi Informasi.	√	√	√	√	√
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat						



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan	Upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan dilakukan melalui: 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, penyediaan beasiswa dan biaya personil peserta didik yang tidak mampu, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik yang lebih kondusif. 2) Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, baik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	√	√		√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>maupun Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.</p> <p>3) Mengembangkan unsur muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal dalam upaya membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.</p> <p>4) Mendirikan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) bersama POLNEP dengan menyesuaikan potensi keadaan</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	kebutuhan Program Studi di Kabupaten Sukamara.					
	4) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap	√	√	√	√	√
	Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan; 3) Penyediaan dan pendistribusian farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman; dan 4) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	√	√	√	√	√
Meningkatnya cakupan penyediaan infastruktur dasar publik	Upaya peningatan kualitas pembangunan infrastruktur	√	√			√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	layanan dasar akan dilakukan melalui: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan; 2) Pengembangan dan peningkatan sistem transportasi wilayah; 3) Pengembangan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif; 4) Peningkatan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah; 5) Peningkatan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; 6) Peningkatan pelayanan jaringan air minum 7) Peningkatan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu; 8) Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	9) Pengembangan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Upaya untuk meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh dilakukan melalui: 1) Pengadaan perumahan layak huni bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat terkena bencana; 2) Penataan kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh; 3) Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pemukiman; 4) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Upaya menurunkan angka pengangguran akan dilakukan melalui: 1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2) Meningkatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; 3) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;			√	√	



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	4) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja					
	Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (saprotrak, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan		√	√	√	



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak covid 19;</p> <p>3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dan pengembangan wirausahaan;</p> <p>4) Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.</p>					
Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	<p>Upaya peningkatan peran sektor pertanian akan dilakukan melalui:</p> <p>1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak;</p> <p>2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas;</p> <p>3) Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian;</p> <p>5) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna;</p> <p>6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas,</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.					
	Upaya peningkatan peran sektor perikanan akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4) Penerbitan tanda daftar dan penerbitan ijin pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya;</p> <p>5) Mempermudah perijinan usaha perikanan;</p> <p>6) Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan;</p> <p>7) Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan;</p> <p>8) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p>					
	<p>Upaya peningkatan peran sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui:</p> <p>1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi Covid 19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha IKM;</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	2) Melakukan percepatan/akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.					
	Upaya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya; 2) Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata; 3) Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata.</p> <p>Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif;					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>2) Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif;</p> <p>3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif,</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju
						bermartabat
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dilakukan melalui: 1) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung; 2) Mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan; 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.					
Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan						
Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam		√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>sinergitas pembangunan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3) Peningkatan kualitas ASN yang menangani keamanan dan ketertiban lingkup kabupaten; 4) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) 5) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 6) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 7) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	8) Penataan sistem informasi dan sistem dasar penanggulangan bencana					
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Upaya untuk meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh dilakukan melalui: 1) Pengadaan perumahan layak huni bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat terkena bencana; 2) Penataan kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh; 3) Peningkatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pemukiman; 4) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	√	√	√	√	√
Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup						



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran	Upaya menurunkan angka pengangguran akan dilakukan melalui: 1) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; 2) Meningkatkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; 3) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;	√		√	√	



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	4) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja					
	Upaya menurunkan angka kemiskinan akan dilakukan melalui upaya: 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi fakir miskin, yatim piatu & orang tua jompo yang terlantar termasuk warga terdampak Covid-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, dan bantuan perumahan; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (sapronek, saprodi, alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju berbasis teknologi, dan penyelenggaraan	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	pendidikan dan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) bagi warga miskin dan warga terkena dampak covid 19; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dan pengembangan wirausahaan; 4) Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan.					
Meningkatnya peran sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Upaya peningkatan peran sektor pertanian akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian terutama yang berkaitan dengan penyediaan, pengawasan dan pengendalian bibit unggul usaha pertanian		√	√	√	



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>dalam artian luas dan penyediaan, pengawasan dan pengendalian pakan ternak;</p> <p>2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian dalam artian luas;</p> <p>3) Memanfaatkan dan memperluas basis produksi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian;</p> <p>5) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna;</p> <p>6) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dalam artian luas,</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	terutama terkait dengan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kebakaran, bencana alam dan non alam, serta penanganan pasca bencana pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.					
	Upaya peningkatan peran sektor perikanan akan dilakukan melalui: 1) Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2) Pemberdayaan nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); 4) Penerbitan tanda daftar dan penerbitan ijin pengadaan kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di		√	√		



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya;</p> <p>5) Mempermudah perijinan usaha perikanan;</p> <p>6) Peningkatan kapasitas usaha pembudidaya ikan;</p> <p>7) Peningkatan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan;</p> <p>8) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>9) Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia Perikanan</p>					
	<p>Upaya peningkatan peran sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dilakukan melalui:</p> <p>1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi Covid 19 di sektor IKM dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja IKM, dan memberikan</p>		√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>insentif kepada pelaku usaha IKM;</p> <p>2) Melakukan percepatan/akselerasi upaya pemulihan aktivitas usaha IKM dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha IKM dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha dan pekerja IKM dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor IKM, mengembangkan dan membangun kepercayaan pasar produk IKM;</p> <p>3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan pelaku usaha IKM yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas,</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku usaha IKM, peningkatan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah besar, inkubasi usaha, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola usaha IKM.					
	Upaya pengembangan pariwisata berbasis sustainable tourism akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di sektor pariwisata dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja wisata, wisatawan dan masyarakat, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata serta		√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<p>pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan budaya;</p> <p>2) Melakukan akselerasi upaya pemulihan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal, memberikan stimulus fiskal dan non fiskal kepada pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, pengembangan pasar pariwisata, serta membangun kepercayaan pasar di sektor pariwisata;</p> <p>3) Menyiapkan sumberdaya pariwisata pasca pandemi dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan</p>					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	SDM pariwisata yang berdaya saing tinggi, memperkuat tata kelola pariwisata dan manajemen krisis, mengakselerasikan transformasi dan inovasi digital di sektor pariwisata, mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, mendorong pengembangan pasar dan destinasi, memperkuat pariwisata untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem industri dan investasi pariwisata.					
	Upaya pengembangan sektor ekonomi kreatif akan dilakukan melalui: 1) Mengelola krisis dan mitigasi dampak pandemi covid 19 di	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	sektor ekonomi kreatif dengan mengutamakan keselamatan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang terkait pengembangan ekonomi kreatif, pemberian bantuan likuiditas bagi pelaku usaha ekonomi kreatif, pembeian insentif kepada pelaku usaha dan pekerja ekonomi kreatif, dan percepatan pemulihan "lingkungan" ekonomi kreatif; 2) Melakukan percepatan dan stimulus untuk pemulihan dampak pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, penyediaan akses permodalan dan insentif yang kompetitif, penguatan infrastruktur fisik dan digital ekonomi kreatif serta penciptaan, perluasan dan peningkatan kepercayaan					



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	pasar bagi karya, usaha dan individu ekonomi kreatif; 3) Menciptakan nilai tambah pasca pandemi dengan penguatan SDM dan usaha ekonomi kreatif yang inklusif dan merata, mendorong penyediaan bahan baku yang berkualitas, beragam dan kompetitif, penyediaan skema permodalan dan insentif yang kompetitif dan mudah diakses pelaku ekonomi kreatif, mendorong perluasan pasar dan mendorong digitalisasi dalam tata kelola ekonomi kreatif.					
Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari dilakukan melalui: 1) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung;	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan; 3) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; 4) Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung. 					
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis						
Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan	Upaya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1) Upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten; 2) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 	√	√	√	√	√



SASARAN	STRATEGI	TEMA PEMBANGUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat	Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal	Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional	Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang	Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat
	3) Peningkatan kualitas ASN yang menangani keamanan dan ketertiban lingkup kabupaten; 4) Penegakan Peraturan Daerah (Perda) 5) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); 6) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 7) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 8) Penataan sistem informasi dan sistem dasar penanggulangan bencana. 9) Meningkatkan peran perempuan dalam pembanguna daerah. 10) Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.					



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara periode 2019-2023.

1. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2019)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara pada tahun 2019 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Tema pembangunan pada tahun pertama (2019) adalah "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur dalam rangka menyiapkan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penguatan fasilitas pelayanan dasar masyarakat". Arah pembangunan berfokus pada Misi ke 1 yaitu Membangun manajemen Pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis yang berbasis pada pelayanan prima masyarakat. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.



2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2020)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2020 berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2019. Pada tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sukamara yang Terdidik dan Sehat, dan Misi ke 3 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur secara terarah, terukur dan berkeadilan. Berdasarkan strategi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2020 adalah "Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan yang didukung oleh kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur wilayah serta pelayanan birokrasi yang optimal". Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster;
- 2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan;
- 4) Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama;
- 6) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- 7) Integrasi pembangunan dan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, jaringan irigasi dan sungai) dalam mendukung



sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan;

- 8) Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang pengembangan kawasan/wilayah berbasis pada kemampuan potensi lokal;
- 9) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.

3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2021)

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 diarahkan kepada "Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha serta masyarakat untuk mencapai keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan, budaya, dan pariwisata di tingkat regional dan nasional". Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Misi ke 1 yaitu Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Demokratis yang berbasis kepada Pelayanan Prima Masyarakat, dan Misi ke 4 yaitu Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis sumberdaya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan sarana prasarana pendukung serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka menuju ketahanan pangan;
- 3) Peningkatan keterampilan pengolahan hasil pertanian dan



- perikanan;
- 4) Mendorong investasi untuk industri pengolahan sumber daya alam, baik hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - 5) Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana prasarana penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna;
 - 6) Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif;
 - 7) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal;
 - 8) Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan;
 - 9) Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata;
 - 10) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas;
 - 11) Menjadikan gotong royong sebagai gerakan dalam membangun Sukamara.

4. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2022)

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 diarahkan kepada "Pemantapan keunggulan kompetitif produk lokal Sukamara di tingkat regional maupun nasional dibarengi dengan pemantapan kualitas pelayanan dasar untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Sukamara yang setara di segala bidang". Arah pembangunan tersebut fokus untuk mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis



sumberdaya alam lokal (pertanian, perikanan, industri dan pariwisata) dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif;
- 3) Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Sukamara dalam pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran;
- 4) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 5) Mewujudkan Kabupaten Sukamara yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Sukamara yang religius, tenteram dan dinamis;
- 6) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan;
- 8) Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2023)

Arah kebijakan tahun 2023 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati



periode 2018-2023, pada tahun 2023 ini diharapkan semua prioritas dapat diselesaikan. Pada tahun 2023 ini pembangunan menitikberatkan pada seluruh aspek guna "Terwujudnya Masyarakat Sukamara yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Profesional". Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada akhir periode adalah "Perluasan kerjasama investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi berbasis kerakyatan, sarana prasarana infrastruktur daerah, sosial, dan budaya, yang berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi menuju masyarakat Sukamara yang sejahtera dan bermartabat".

Pada akhir periode ini dicapai kondisi ekonomi masyarakat Sukamara memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang baik. Selain itu, kemandirian ekonomi di Kabupaten Sukamara mulai terwujud yang selaras dengan peningkatan perekonomian rakyat. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan kompetitif daerah yang didukung oleh penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pada akhir periode pembangunan jangka menengah ini, daya saing Kabupaten Sukamara meningkat melalui penguatan ekonomi kerakyatan sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan SDA secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Kondisi ini didukung oleh pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata keseluruh wilayah termasuk sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum; pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



6.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional. Selain itu, Program Pembangunan Daerah merupakan program-program yang diharapkan mampu untuk mewadahi kegiatan yang merupakan prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian pemenuhan janji politik. Beberapa kegiatan prioritas tersebut, antara lain: peningkatan kesejahteraan guru GTT/PTT dan guru madin, terselenggaranya pembinaan pelaksanaan SNP dan pendidikan budi pekerti (pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Kabupaten Sukamara), beasiswa siswa kelas ukir, pelayanan gratis Kelas III di Puskesmas dan Jaringannya serta RS untuk Penduduk Sukamara yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan dan pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW)/Obyek Wisata Kabupaten.

Program Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4.
Pemetaan Program pendukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023

MISI	OPD TERKAIT	RENCANA PROGRAM TERKAIT
Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat	Dinsos PMD	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		



MISI	OPD TERKAIT	RENCANA PROGRAM TERKAIT
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Program Aplikasi Informatika
	DPMPTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal
	DisDukcapil	Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Kecamatan-Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Jumlah	11
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Rumah Sakit Umum Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
Program Pengelolaan Arsip		
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		
Program Perijinan Penggunaan Arsip		
Jumlah	3	7
Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung



MISI	OPD TERKAIT	RENCANA PROGRAM TERKAIT	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Program Pengembangan Perumahan	
	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian	Program Pengelolaan Pelayaran	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
	Jumlah	3	15
Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah b3)	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Program pengelolaan izin lokasi
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		
	Program Penetapan Tanah Ulayat		
	Program Pengelolaan Tanah Kosong		
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah		
	Program Penatagunaan Tanah		
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		
	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	



MISI	OPD TERKAIT	RENCANA PROGRAM TERKAIT
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	DINSONPMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Kecamatan-Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	DinsosPMD	Program Pemberdayaan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial		



MISI	OPD TERKAIT	RENCANA PROGRAM TERKAIT
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Jumlah	11	43
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penanggulangan Bencana
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penanganan Bencana
	Kecamatan-kecamatan	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
		Program Perlindungan Khusus Anak
Jumlah	5	11
RENCANA PROGRAM PRIORITAS VISI MISI		94

Selengkapnya implimentasi misi Kepala Daerah ke dalam program pembangunan Daerah yang disertai dengan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.5.



Tabel 6.5.
Implementasi Misi Kepala Daerah dalam Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Misi 1. Membangun Manajemen Pemerintahan yang Profesional Bersih dan Demokratis Yang Berbasis Pelayanan Prima Kepada Masyarakat					17.011.7 04.665		12.591.8 78.241		124.713. 823.148		132.179. 701.552		134.474. 788.653		420.971. 896.259			
Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	45,00	45	17.011.7 04.665	45	12.591.8 78.241	50	124.713. 823.148	55	132.179. 701.552	60	134.474. 788.653	60	420.971. 896.259			
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah		Opini BPK	WTP	WTP	17.011.7 04.665	WTP	12.591.8 78.241	WTP	124.713. 823.148	WTP	132.179. 701.552	WTP	134.474. 788.653	WTP	420.971. 896.259			
		Nilai LKJIP	54,72 / CC	55,60 / CC		58,60 / CC		B (>60)		B (>60)		BB (>70)		BB (>70)				
		Indek Kepuasan Masyarakat	82,00%	89,3		90		90		95		95						
		Tingkat Maturiti SPIP	Rintisan	Terdefi nisi		Terdefi nisi		Terdefi nisi		Terkel ola dan teruku r		Optimu m		Optimu m				
		Nilai EKPPD	2,8073 / Tinggi	2,8073 / Tinggi		2,85 / Tinggi		Tinggi (minim al 3,41)		Tinggi (minim al 3,41)		Sangat Tinggi (minim al 4,21)		Sangat Tinggi (minim al 4,21)				
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	90	100	3.100.000.000	100	2.100.000.000	90	96.390.937.892	90	96.805.487.742	90	96.805.487.742	295.201.913.376	BPKAD	
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	90	100	1.000.000.000	100	1.288.850.000	90	896.269.700	90	896.269.700	90	896.269.700	4.977.659.100	BPKAD	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	90	100	3.100.000.000	100	2.100.000.000	90	1.684.655.910	90	1.816.495.910	90	1.816.495.910	10.517.647.730	BPKAD	
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	0	1.085.479.000	1	1.370.535.000	0	1.291.489.030	0	702.229.000	0	1.474.229.000	1	5.923.961.030	BAPPEDA
				Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah	1	1		1		1		0		1		2		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		ditetapkan dengan PERDA/PERKADA															
		Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	2		2		2		2		2		2		10	
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	TAD	100		100		100		100		100		100		100	
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	TAD	100		100		100		100		100		100		100	
6	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Serta Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.146.367.665	100%	1.149.551.241	100%	705.450.000	100%	873.450.000	100%	1.121.500.000	100%	4.996.318.906	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Dokumen Standar Operasional Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan KPK dan Satgas SABER PUNGLI	100%	100%	177.210.000	100%	200.312.000	100%	289.766.000	100%	357.466.000	100%	455.000.000	100%	1.479.754.000	INSPEKTORAT DAERAH
7	1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	TAD	0	-	0	-	0	-	100%	159.000.000	100%	169.000.000	100%	328.000.000	Kecamatan Balai Riam
7	1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	100	100	10.170.000	100	11.280.000	100	11.280.000	100	11.880.000	100	11.880.000	100	56.490.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	100	0	-	0	-	100	51.390.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	261.390.000	Kec. Jelai
7	1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	TAD	0	-	0	-	0%	-	100%	159.000.000	100%	169.000.000	100%	328.000.000	Kecamatan Permata Kecubung



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	-	0	-	100	2.491.773.453	100	5.154.679.350	100%	5.154.679.350	100%	12.801.132.153	Kecamatan Sukamara	
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	92,65					95,00		95,00		95,00		95,00	BKPSDM	
				Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	70,57					95,00	1.366.169.258	95,00	2.209.470.000	95,00	2.209.470.000	95,00		5.785.109.258
				Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN	93,80					95,00		95,00		95,00		95,00		
				Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100,00					95,00		95,00		95,00		95,00		
			Persentase pengelolaan data kepegawaian						95,00		95,00		95,00		95,00			
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	80,23				95,00	1.244.951.000	95,00	3.555.497.000	95,00	4.124.595.000	95,00	8.925.043.000	BPSDM	
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI DPRD	80%	0,8	3.519.706.000	0,8	0,8	5.566.650.000	0,8	5.903.325.000	0,8	5.903.325.000	80%	20.893.006.000	Sekretariat DPRD	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan					100 Persen	8.365.008.400	100 Persen	7.876.468.000	100 Persen	8.664.112.000	100 Persen	24.905.588.400	Sekretariat Daerah	
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Penyelesaian Masalahdi Sektor Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam					100 Persen	1.743.157.515	100 Persen	2.587.495.000	100 Persen	2.846.244.000	100 Persen	7.176.896.515	Sekretariat Daerah	
2	1	3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	789.225.000	100	2.845.000.000	100	1.914.877.355	100	625.000.000	100	700.000.000	Dinsos PMD	



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
4	1 8	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,42%	80,00%	162.500.0 00	80,25%	116.350.0 00	92,00%	149.210.8 00	92%	257.340.0 00	92,50%	257.340.0 00	92,50%	942.740.8 00	DPMPTSP
2	1 6	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	0	0,1	430.000.0 00	0,4	1.350.000. 000	0,6	1.323.000. 000	80%	2.850.000. 000	100%	2.450.000. 000	100%	8.403.000. 000	Dsikominfosa ndi
				Jumlah Sarana Information Center	1	1		2		2		200%		200%				
2	1 2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90,50	95	830.349.0 00	90,50	20.000.00 0	94	37.772.50 0	96	536.088.7 50	98	576.228.3 90	98	2.000.438. 640	DisDukcapil
2	1 2	3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta Pencatatan Sipil	43,09	41	830.349.0 00	43	20.000.00 0	45	39.030.00 0	46	740.780.4 50	47	783.513.7 18	47	2.413.673. 168	DisDukcapil
2	1 2	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan	ADA	ADA	830.349.0 00	ADA	20.000.00 0	ADA	894.141.8 50	ADA	589.774.6 50	ADA	622.662.8 43	ADA	2.956.928. 343	DisDukcapil
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara Yang Terdidik dan Sehat							92.214.3 18.600		95.238.2 59.100		123.809. 883.312		137.372. 577.844		341.257. 922.058		789.892. 960.914	
Mewujudkan Masyarakat Sukamara yang berdaya saing				Indek Pembangunan Manusia	67,52	67,95	92.214.3 18.600	68,03	95.238.2 59.100	68,62	123.809. 883.312	69,21	137.372. 577.844	69,81	341.257. 922.058	69,81	789.892. 960.914	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan				Harapan Lama Sekolah	12,10	12,11	92.214.3 18.600	12,12	95.238.2 59.100	12,29	123.809. 883.312	12,75	137.372. 577.844	12,95	341.257. 922.058	12,77	789.892. 960.914	
				Rata-rata Lama Sekolah	7,84	7,91		8,01		8,15		8,49		8,64		8,48		
				Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,45	71,49		71,53		71,55		71,58		71,6		71,6		
				Persentase balita gizi buruk	≤ 1 %	≤ 1 %		≤ 1 %		≤ 1 %		≤ 1 %		≤ 1 %		≤ 1 %		
				Konsumsi per kapita	8482	8738		8674		8826		8980		9137		8826		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA	84,47%	88,00%	41.043.56 8.600	88,25%	41.332.75 9.100	88,50%	40.858.18 3.312	88,75%	66.948.57 7.844	89,00%	254.262.4 72.058	89,00%	444.445.5 60.914	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA)	45,07%	87,52%		88,00%		88,25%		88,50%		89,00%				
				Rasio lembaga PAUD : jumlah penduduk usia PAUD	1:73	1 : 100		1 : 100		1 : 100		1 : 100		1 : 100				
				Persentase TK yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD		TAD		21,95%		30,49%		36,59%		36,59%		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) (Kesetara)	97,64%	97,62%		97,70%		97,80%		98,00%		98,15%		98,15%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun	91,96%	92%		92,25%		92,5%		92,75%		93%		93%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	93,88%	94%		94,25%		94,5%		94,75%		95%		95%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	86,64%	90,00%		90,15%		90,25%		90,35%		90,45%		90,45%		
		Rasio sekolah : jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun)	03:19	1 : 134		1 : 130		1 : 127		1 : 125		1 : 122		1 : 122		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,58%	0,14%		0,13		0,12%		0,11%		0,10%		0,10%		
		Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00 %		100,00		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	89,13%	100,00 %		100,00		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD		TAD		34,69%		51,02%		61,22%		61,22%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13- 15 tahun	96%	96,5%		96,75%		97%		97,25%		97,5%		97,5%		
		Angka Partipasi Kasar (APK) SMP/MTs	81,90%	85%		85,5%		85,75%		86%		86,5%		86,5%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	63,15%	70%		79,50%		80,00%		80,25%		80,50%		80,50%		
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,97%	0,50%		0,48%		0,46%		0,44%		0,42%		0,42%		
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	86,50%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		
		Rasio sekolah per jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun)	1:141	1 : 125		1 : 125		1 : 122		1 : 122		1 : 120		1 : 120		
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD		TAD		57,14%		71,43%		85,71%		85,71%		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru TK/RA berkualifikasi S1/D4	46,91%	58,00%	2.262.250.000	60,00%	2.422.500.000	61,00%	90.700.000	63,00%	250.000.000	64,00%	5.375.450.000	64,00%	10.400.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D4	5,40%	27,00%	28,00%		29,00%		29,50%		30,00%		30,00%				
			Guru TK/RA bersertifikasi	54,27%	58,00%	58,50%		58,75%		59,00%		59,50%		59,50%				
			Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi	9,15%	28,00%	28,25%		28,50%		28,75%		29,00%		29,00%				
			Rasio guru : murid (G/M) SD/MI	01:11	1 : 11	1 : 11		1 : 11		1 : 10		1 : 10		1 : 10				
			Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	91,73%	92,00%	93,00		94,00%		94,5%		94,75%		94,75%				
			Guru SD/MI sertifikasi	20%	20%	22,5%		25,5%		27,5%		30%		30%				
			Rasio guru : murid (G/M) SMP/MTs	1:8	1 : 9	1 : 9		1 : 9		1 : 9		1 : 9		1 : 9				
			Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	93,21%	96,00%	96,5%		96,75%		96,8%		97%		97%				
			Guru SMP/MTs sertifikasi	22,01%	23,5%	25%		27,5%		30%		33,5%		33,5%				
2	1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha	4,85	4,85	1.756.370.000	8,08	2.056.270.000	7,52	1.372.668.245	5,26	3.038.090.000	5,26	3.015.600.000	5,26	11.238.998.245	PORAPAR
2	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan cabang olahraga	90,48	100	4.954.190.000	100	8.518.970.000	100	11.755.914.037	100	13.789.488.000	100	14.957.480.000	100	53.976.042.037	PORAPAR
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Puskesmas	100	100	28.920.000.000	100	34.309.000.000	100	46.556.000.000	100	40.858.000.000	100	52.506.000.000	100	203.149.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,2	>0,2	512.000.000	>0,2	507.000.000	>0,3	426.000.000	>0,3	545.000.000	>0,3	549.000.000	>0,3	2.539.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	TAD	<6	314.000.000	<6	310.000.000	<5	280.000.000	<5	295.000.000	<5	328.000.000	<5	1.527.000.000	Dinas Kesehatan



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu per satuan balita	5	>6	-	>6	100.000.0 00	>7	160.000.0 00	>7	170.000.0 00	>7	200.000.0 00	>7	630.000.0 00	Dinas Kesehatan	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penanganan Covid-19 di rumah sakit	TAD	0		0	25,00%		80,00%		90,00%		100				
				Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan	25,00%	100,00 %		100,00 %	100,00 %										
				Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit	TAD	15,00%		20,00%	20,00%										
				Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit	<1,5	<1,5		<1,5	<1,5										
				Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut	75,00%	80,00%		80,00%	80,00%										
				BOR	38,36%	60,00%		60,00%	60,00%										
				Av-Los	2,4	2,4	19.162.50 0.000	2,4	2,4										
				TOI	5,47	5,47		5,47	5,47	35.439.00 0.000									
				BTO	41,72	40-50		40-50	40-50										
				NDR	3,74	25/100 0		25/100 0	25/100 0										
				GDR	14,66	45/100 0		45/100 0	45/100 0										
				Angka Kematian Ibu	1	<5		<5	<5										
				Angka Kematian Bayi	TAD	<5		<5	<5										
				IKM	75,00%	80,00%		80,00%	80,00%										
				Cakupan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	15000	15000		15000	20000										
				Cakupan SPM	80,00%	80,00%		80,00%	80,00%										
				Persentase penanggulangan krisis dan keawatdaruratan	80,00%	80,00%		80,00%	80,00%										



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		maternal dan neonatal (PONEK)														
		Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart	75,00%	80,00%		85,00%		90,00%		90,00%		90,00%				
		Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat hygiene sanitasi	80,00%	90,00%		90,00%		90,00%								
		Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit	75,00%	75,00%		75,00%		75,00%								
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit	75,00%	90,00%		90,00%		90,00%								
		Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart	75,00%	75,00%		75,00%		70,00%								
		Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart di rumah sakit	36,00%	50,00%		60,00%		70,00%								
		Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	75,00%	80,00%		80,00%		80,00%								
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	75,00%	80,00%		80,00%		80,00%								
		Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit	75,00%	80,00%		80,00%		80,00%								
		Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit	65,00%	70,00%		75,00%		75,00%		80,00%		90,00%		90,00%		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi	25,00%	60,00%		60,00%		70,00%										
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	12000	11500	150.000.000	12000	200.000.000	8000	100.000.000	8000	100.000.000	8000	100.000.000	8000	100.000.000	DISPERPUSI N
				Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	32	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	DISPERPUSI N
				Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	5.000	5.000	800.000.000	5.000	800.000.000	5.000	800.000.000	5.000	800.000.000	5.000	800.000.000	5.000	800.000.000	DISPERPUSI N
2	2 4	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	13%	3%	50.000.000	13%	50.000.000	23%	75.000.000	33%	75.000.000	38%	75.000.000	38%	325.000.000	DISPERPUSI N
2	2 4	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	TAD	0%	0	0%	0	50%	10.000.000	50%	10.000.000	50%	10.000.000	50%	30.000.000	DISPERPUSI N
2	2 4	4	PROGRAM PERLIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	TAD	0%	0	0%	0	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	150.000.000	DISPERPUSI N
Misi 3: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Secara Terarah, Terukur dan Berkeadilan																		
Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat				Gini Ratio	0,357	0,33	133.058.926.000	0,3	135.820.390.000	0,29825	141.989.162.900	0,2965	149.401.243.900	0,29475	135.046.540.000	0,29475	712.683.762.802	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	17,77%	30,17%	130.611.426.000	36,37	133.110.390.000	42,57%	139.421.662.900	48,77%	147.083.743.900	55%	132.879.040.000	55%	698.936.762.802	
				Persentase penduduk berakses air minum	33,2%	33,2%		-		-		35%		35%				
				Rasio Jaringan Irigasi	-	64,91%		72,05		79,57%		87,29		95%		95%		
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	88%	88%		91%		94%		97%		100%		100%		
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	na	na		na		75,90%		76,70%		77,80%		77,80%		
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	98,75	97,45		98,34		98,50		99,00		99,50		99,50		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	57,34 %	64,93 %	8.070.000.000	72,07 %	7.590.000.000	79,59 %	7.990.000.000	87,29 %	8.190.000.000	95 %	8.190.000.000	95 %	40.030.000.000	DPUPRPRKP
				Rasio Jaringan Irigasi (RASIO)	-	64,91 %	5.238.237.000	72,05	5.468.595.000	79,57 %	6.357.643.000	87,29	7.149.051.000	95 %	7.780.500.000	95 %	31.994.026.000	DPUPRPRKP
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	33,2 %	33,2 %	2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000	35 %	35 %	35 %	2.600.000.000	35 %	10.400.000.000	DPUPRPRKP
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	26 %	26 %	1.700.000.000	-	55 %	55 %	55 %	55 %	1.500.000.000	55 %	55 %	55 %	3.200.000.002	DPUPRPRKP
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase limbah yang ditangani dengan baik	35 %	35 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	4.250.000.000	DPUPRPRKP
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	76,20 %	76,20 %	2.750.000.000	79,90 %	2.750.000.000	81 %	2.700.000.000	84 %	2.700.000.000	87,74 %	2.700.000.000	87 %	13.600.000.000	DPUPRPRKP
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	30 %	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	25.000.000.000	DPUPRPRKP
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (RASIO = Jumlah Bangunan Unit)	985 Unit	818 Unit	3.500.000.000	309 Unit	3.500.000.000	309 Unit	8.993.049.900	309 Unit	8.993.049.900	309 Unit	3.500.000.000	309 Unit	28.486.099.800	DPUPRPRKP
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Luasan=Ha)	17,41 Ha	1,89 ha	4.600.000.000	3,7 Ha	4.600.000.000	3,7 Ha	4.600.000.000	4,16 Ha	7.413.817.000	5,3 Ha	4.600.000.000	5,3 Ha	25.813.817.000	DPUPRPRKP
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Panjang Jalan/Jarak = Meter/Kilometer)	72,075 Km	72,075 Km	9.957.200.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	32.326.800.000	DPUPRPRKP
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (Panjang	41 m	41 m	1.750.000.000	45,36 m	1.750.000.000	49,72 m	1.750.000.000	54,08 m	1.750.000.000	58,44 m	1.750.000.000	58,44 m	8.750.000.000	DPUPRPRKP



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
		Jalan/Jarak = Meter/Kilometer																		
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	17,77 %	30,17 %	80.300.00 0.000	36,37	90.200.00 0.000	42,57 %	90.200.00 0.000	48,77 %	90.200.00 0.000	55 %	90.200.00 0.000	55 %	441.100.0 00.000	DPUPRPRKP				
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	25 %	30 %	3.200.000. 000	45 %	3.200.000. 000	50 %	3.200.000. 000	55 %	3.200.000. 000	60 %	3.200.000. 000	60	16.000.00 0.000	DPUPRPRKP				
1	3	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	70 %	78 %	425.500. 000	85 %	450.495. 000	85 %	647.589. 850	85 %	647.589. 850	85 %	2.818.76 4.550	DPUPRPRKP				
1	3	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	52%	60%	175.500.0 00	63%	523.825.0 00	65%	408.400.0 00	67%	930.000.0 00	70%	930.000.0 00	70%	2.967.725. 000	DPUPRPRKP		
				Ruang publik yang berubah peruntukannya	52%	52 %	650.000.0 00	63%	47.625.00 0	65%	117.150.0 00	67%	930.000.0 00	70%	930.000.0 00	70%	2.674.775. 000	DPUPRPRKP		
				Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (Luasan=Ha)	30 Ha	34 Ha	1.528.615. 000	34 Ha	1.825.615. 000	34 Ha	930.000.0 00	34 Ha	930.000.0 00	34 Ha	930.000.0 00	34 Ha	930.000.0 00	34 Ha	6.144.230. 000	DPUPRPRKP
				Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	3,13	3,13	97.000.00 0	8,25	150.000.0 00	9,35	150.000.0 00	12,5	150.000.0 00	15,62	150.000.0 00	15,62	150.000.0 00	15,62	697.000.0 00	DPUPRPRKP
2	1	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0%	0	25.000.00 0	0%	25.000.00 0	16%	105.000.0 00	31%	105.000.0 00	50%	105.000.0 00	50%	365.000.0 00	Dsikominfosa ndi		
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	88%	88%		91%		94%		97%		100%		100%				
2	1	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,21	0,23	319.874.0 00	0,25	187.330.0 00	0,27	578.020.0 00	0,29	1.500.426. 000	0,31	1.651.640. 000	1,50	4.237.290. 000	Dinas Perhubungan		
				Rasio ijin trayek	0	0		0		0		0		0						
				Jumlah uji kir angkutan	4	4		4		2000		3000		7500		7500				



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Pemasangan Rambu rambu	1	100 %		50 %		50 %		50 %		50 %		100 %				
		Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum																
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	30,467	30,467		30,967		31,467		31,967		32,467		187,802				
2	1 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tersedianya Dermaga Penyeberangan	TAD	0	-	0	-	0	-	1	300.000.000	1	600.000.000	2	900.000.000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasasn kumuh		Rasio rumah layak huni	37,97 %	43,03 %	2.447.500.000	48,09 %	2.710.000.000	53,15 %	2.567.500.000	58,21 %	2.317.500.000	63,28 %	2.167.500.000	63,28	13.747.000.000			
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni (Jumlah Rumah)	207 Unit	30 Unit	1.037.500.000	30 Unit	2.117.500.000	30 Unit	2.117.500.000	30 Unit	1.817.500.000	30 Unit	9.207.500.000	DPUPRPRKP		
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	3 Lokasi	20%	960.000.000	10%	142.500.000	-	-	-	-	30%	1.102.500.000	DPUPRPRKP		
				Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	25 Ha	25 Ha	450.000.000	25 Ha	450.000.000	25 Ha	450.000.000	30 Ha	200.000.000	40 Ha	350.000.000	62 Ha	1.900.000.000	DPUPRPRKP
1	4	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15%	32%	577.000.000	38%	200.000.000	42%	160.000.000	48%	250.000.000	53%	350.000.000	65%	1.537.000.000	DPUPRPRKP
Misi 4: Mendorong Kemandirian Ekonomi Yang Berbasis Sumber Daya Alam Lokal (Pertanian, Perikanan, Industri dan Pariwisata) Dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup							30.364.076.424		27.621.699.300		40.871.182.292		120.980.524.093		109.993.649.905		329.831.132.014	
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing		Pertumbuhan Ekonomi	6,17	5,9	19.562.915.550	5,9	23.138.868.500	5,9	30.112.409.541	6	108.157.595.593	6,1	95.756.721.405	6,1	276.728.510.589			
Berkurangnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran		Tingkat Pengangguran terbuka	3,13	3,57	5.804.498.900	3,13	3.052.913.500	2,72	8.219.240.772	2,33	10.834.063.366	1,98	11.693.753.152	1,98	39.604.469.690			
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,18	73,37		65,60		65,71		65,83		65,94						
		Angka Kemiskinan	3,19	3,16		3,23		3,07		2,93		2,79						
		Tingkat Inflasi	6,02 %	2,02%		1,62%		4%		4%		4%						
		PDRB Per Kapita (Juta rupiah/tahun)	62,47	65,18		66,27		70,27		74,52		79,02						



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagkerjaan	0	1	153.375.000	0	153.375.000	0	153.375.000	0	250.000.000	1	250.000.000	3	960.125.000	DINAS NAKERTRANS
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14	10	330.000.000	14	330.000.000	12,8	330.000.000	15	1.450.000.000	16	1.600.000.000	67,8	4.040.000.000	DINAS NAKERTRANS
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55	48	639.092.000	55	650.000.000	55	700.000.000	55	1.420.000.000	55	1.670.000.000	55	5.079.092.000	DINAS NAKERTRANS
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat	80	70	222.224.000	80	290.500.000	80	290.500.000	90	540.000.000	100	540.000.000	100	1.883.224.000	DINAS NAKERTRANS
3	2	8	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi	6,02 %	2,02%		1,62%		4%		4%		4%			Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
					Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,9	5,9	36.590.000	0	5,9	0	18.200.000	0	5,9	0	5,9	0	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	-	0	100%	104.500.000	100%	135.381.116	100%	140.381.116	100%	145.022.040	100%	525.284.272	Kecamatan Balai Riam
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	97,45	97	62.726.000	97	63.981.000	98	65.260.000	98	66.566.000	99	67.897.000	99	326.430.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100	-	0	-	0	100	50.000.000	100	191.840.000	100	199.840.000	100	441.680.000	Kecamatan Jelai
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri		100%	75.000.000	99,22%	116.427.500	100%	149.025.040	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	750.452.540	Kecamatan Permata Kecubung
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	0	-	-	0	0	-	100	200.000.000	100%	210.000.000	100%	410.000.000	Kecamatan Sukamara
2	1	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	100	53	114.060.600	-	0	100	34.244.000	100	34.244.000	100	50.000.000	100	232.548.600	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
2	1	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	5	4	170.061.300	-	0	4	793.884.821	4	945.000.000	4	450.000.000	16	2.358.946.121	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3 2 6 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	20	20	145.530.000	20	189.180.000	20	231.968.415	40	312.150.000	40	630.000.000	140	1.508.828.415	PORAPAR	
2 1 3 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa	11,11	11,11	218.350.000	100	150.000.000	100	2.463.200.000	100	2.168.200.000	100	2.168.200.000	100	7.167.950.000	Dinsos PMD	
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Diberdayakan	0	0	-	82%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	201.287.250	100%	208.984.112	100%	890.271.362	Dinas Sos PMD	
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	530.070.000	100%	196.660.000	100%	442.660.000	100%	1.739.120.000	100%	2.100.860.000	100%	5.009.370.000	Dinas Sos PMD	
1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		100%	3.107.420.000	100%	550.090.000	100%	1.675.580.000	100%	853.990.000	100%	1.066.490.000	100%	7.253.570.000	Dinas Sos PMD	
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Perikanan dan pariwisata terhadap perekonomian daerah		Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	1.189.064,7	1.274.424,1	13.758.416.650	1.417.944,9	20.085.955.000	1.436.270,6	21.893.168.769	1.513.308,7	97.323.532.227	1.590.346,7	84.062.968.253	1.590.346,7	237.124.040.899		
		Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	112.286	125.534		132.225		137.014		144.363		151.712		151.712			
		Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB	47	52		52		55		59		62		62			
		Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14	27,14		27,14		27,14		27,14		27,14		27,14			
		Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.930.121.324.307	1,06078E+11		108.199.197.051		647.917.255.507		680.313.188.283		714.328.774.198		5.972.680.542.295			
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2	86,8		89,5		92,1		94,7		100		100			
2 0 9 0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (%)	29,87	61,73	214.650.000,00	80,68	74.345.000,00	80,84	8.654.600,00	81,55	129.500.000,00	82,27	135.975.000,00	82,27	563.124.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 0 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,20	86,80	211.675.0 00,00	89,50	506.750.0 00,00	92,1	715.804.0 70,00	94,70	985.050. 000,00	100,00	1.034.30 2.500,00	100,00	3.453.58 1.570,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penguatan cadangan pangan (Ton)	21,64	22,53	842.725.0 00,00	23,43	866.785.0 00,00	24,4	332.747.1 50,00	25,39	2.361.93 5.000,00	26,42	2.480.03 1.750,00	26,42	6.884.22 3.900,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 0 9 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan	5,00	1,00	36.750.0 00,00	1,00	20.075.0 00,00	1,00	20.384.60 0,00	1 Dok	58.475.00 0,00	1 Dok	61.398.75 0,00	1 Dok	197.083.3 50,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 0 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	5,00	13,00	27.325.0 00,00	17,00	33.150.0 00,00	31,00	24.340.00 0,00	32,00	45.000.00 0,00	33,00	47.250.00 0,00	33,00	177.065.0 00,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 2 7 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	27,14	27,14	1.763.285. 650	27,14	1.672.550. 000	27,14	1.136.958. 980	27,14	27.948.10 9.193	27,14	29.345.51 4.653	27,14	61.866.41 8.476	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 2 7 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian (Ton)	4.989,60	5.243.7 9	1.607.915. 000	6.818,0 3	1.784.535. 000	7.158,9 3	2.127.333. 099	7.516,8 8	22.488.03 0.000	7.892,7 2	23.612.43 1.500	22.568, 53	51.620.24 4.599	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 2 7 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus kesehatan hewan (ekor)	230	663	117.170.0 00	1.110,0 0	64.970.00 0	1.150,0 0	111.714.0 60	1.250,0 0	377.470.0 00	1.300,0 0	396.343.5 00	3.700,0 0	1.067.667. 560	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 2 7 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	105	65	98.750.00 0	63,4	26.190.00 0	20	22.761.00 0	15	150.000.0 00	10	157.500.0 00	10	455.201.0 00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 2 7 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (%)	5,53	5,95	220.380.0 00	6,38	205.980.0 00	6,80	357.308.0 30	7,66	594.212.0 00	8,51	623.922.6 00	35,32	2.001.802. 630	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3 2 8 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	100	100	0	100	0	100	931.030.5 35	100	20.587.02 0.000	100	550.000.0 00	100	22.068.05 0.535	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
3	2 8	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah	TAD	-	0	-	0	-	0	4	742.872.8 75	4	775.000.0 00	4	1.517.872. 875	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	2 8	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang informal	30	30	48.085.00 0	3000,0 0%	56.525.00 0	30	52.270.15 9	30	52.270.15 9	40	65.000.00 0	40	274.150.3 18	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	2 9	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri	TAD	-	0	-	0	Tidak	79.052.00 0	Ada	643.018.0 00	Ada	739.996.0 00	Ada	1.462.066. 000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	2 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	4633,77	4259,9 3	2.205.890. 000	4336,6 1	6.998.890. 000	4414,6 7	6.563.890. 000	4494,1 2	5.163.890. 000	4547,0 2	3.603.890. 000	4547,0 2	24.536.45 0.000	perikanan
3	2 5	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan Budidaya Peningkatan produksi benih	1520,19 70000	1183,7 1 70000	2.127.195. 000	1213,3 2 70000	2.077.545. 000	1243,6 4 70000	2.517.895. 000	1274,7 0 70000	3.530.000. 000	1309,2 1 70000	8.390.000. 000	1309,2 1 70000	18.642.63 5.000	perikanan
3	2 5	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan sumberdaya sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	TAD	-	0	-	0	-	0	-	0	10%	30.000.00 0	10%	30.000.00 0	perikanan
3	2 5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB	118890,5	125534 ,3	907.000.0 00	132224 ,6	1.627.000. 000	138968 ,5	5.462.000. 000	145773	4.802.000. 000	152645 ,6	4.307.000. 000	152645 ,6	17.105.00 0.000	perikanan
3	2 6	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD Sektor Pariwisata	15,39	15,39	3.154.440. 000	13,58	4.100.770. 000	17,42	1.009.623. 530	19,07	7.396.270. 000	18,6	8.560.000. 000	18,6	24.221.10 3.530	PORAPAR
3	2 6	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata	1 Hari	1 Hari	1.256.000. 000	1 Hari	1.471.000. 000	1 Hari	1.169.527. 476	1 Hari	1.942.000. 000	1 Hari	2.000.000. 000	1 Hari	7.838.527. 476	PORAPAR
2	1 8	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12	1	32.950.00 0	1	0	1	-	1	332.800.0 00	1	332.800.0 00	5	698.550.0 00	DPMPPTSP
2	1 8	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	1	1	155.006.0 00	1	0	1	16.635.00 0	1	318.180.0 00	1	318.180.0 00	5	808.001.0 00	DPMPPTSP
2	1 8	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 2.879.273. 378.498	Rp. 849.38 2.600.6 58	64.350.00 0	Rp. 201.46 5.345.1 541	0	Rp. 647.91 7.255.5 07	335.169.9 00	Rp. 680.31 3.188.2 83	255.390.0 00	Rp. 714.32 8.774.1 98	255.390.0 00	Rp 5.972.6 80.542. 295	910.299.9 00	DPMPPTSP
Meningkatnya kualitas pendayagunaan dan pengelolaan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		53,00	53,00	10.801.16 0.874	54,00	4.482.830 .800	54,5	10.758.77 2.751	55	12.822.92 8.500	55,5	14.236.92 8.500	55,5	53.102.62 1.425		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
lingkungan, sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan																		
		Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	< 5	< 10		< 5		< 10		< 10		< 10		< 10			
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	100	100	10.801.16 0.874	100	4.482.830 .800	100	10.758.77 2.751	100	12.822.92 8.500	100	14.236.92 8.500	100	53.102.62 1.425		
2	1 1	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	< 5	< 10	185.780.000	< 5	< 10	60.151.850	< 10	87.500.000	< 10	87.500.000	< 10	420.931.850	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1 1	4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	20	-		20		20		20		20				
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	100	100	45.000.000	100	107.680.000	100	119.859.876	100	160.000.000	100	180.000.000	100	612.539.876	Dinas Lingkungan Hidup
				Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (Masuk Kegiatan)	2 Dokumen	-				2		2		2		2		
2	1 1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah b3)	Cakupan penanganan limbah B3 yang ditangani	100	100	61.900.000	100	6.400.000	100	18.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	136.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah limbah B3 yang dikelola (Masuk Kegiatan)	6 Sumber Limbah B3	7	7		7		7		8		9		9	
2	1 1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	94.020.000	100		100	7.650.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	301.670.000	Dinas Lingkungan Hidup
				jumlah kegiatan pengawasan usaha yang memiliki izin lingkungan	6	6		14		14		14		14		14		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		dan atau izin PPLH (Masuk Kegiatan)															
2	1 1 7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	4	4	49.875.00 0	4	0	4	14.950.00 0	4	50.000.00 0	4	50.000.00 0	4	164.825.0 00	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1 1 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6	4	34.000.00 0	6	50.000.00 0	6	81.132.72 5	6	100.000.0 00	6	100.000.0 00	6	365.132.7 25	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1 1 0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	-	0	-	0	100	11.599.80 0	100	35.000.00 0	100	45.000.00 0	100	91.599.80 0	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1 1 1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	100		100	100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	80	80	10.330.58 5.874	80	4.318.750. 800	80	9.695.428. 500	81	11.515.42 8.500	82	12.899.42 8.500	85		48.759.62 2.174
			Persentase peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan prasarana persampahan	80	80		80		80		81		82		85		
1	3 4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	TAD	-	0	-	0	55%	750.000.0 00	55%	750.000.0 00	55%	750.000.0 00	55%	2.250.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
2	1 0 2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	TAD	16%	150.000.0 00	32%	150.000.0 00	32%	150.000.0 00	67%	150.000.0 00	67%	150.000.0 00	67%	150.000.0 00	Pekerjaan Umum, Penataan	



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
																	Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
2	1 0 4	0	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara	TAD	5%	97.000.00 0	10%	975.900.0 00	15%	170.537.0 00	20%	200.000.0 00	25%	200.000.0 00	25%	200.000.0 00	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	1 0 5	0	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan	TAD	2 Bidang	1.296.535. 000	3 Bidang	229.900.0 00	1 Bidang	298.150.0 00	2 Bidang	350.000.0 00	2 Bidang	350.000.0 00	10 Bidang	2.524.585. 000	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	1 0 6	0	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tingkat Cakupan Redistribusi tanah (IKD)	TAD	-	0	-	0	-	0	-	0	10%	200.000.0 00	10%	200.000.0 00	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Presentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (IKD)	TAD	-	0	-	0	-	0	-	0	10%	200.000.0 00	10%	200.000.0 00	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Menuju Kondisi Masyarakat yang aman, tentram dan Dinamis.is.							2.080.24 9.401		3.335.96 6.653		4.926.86 2.604		12.094.4 58.900		12.854.7 94.100		35.292.3 31.658	
Mewujudkan masyarakat Sukamara yang aman, tertib dan dinamis			Kasus tindakan konflik sosial dan radikalisme	0,07	0,05	2.080.24 9.401	0,05	3.335.96 6.653	0,04	4.926.86 2.604	0,03	12.094.4 58.900	0,02	12.854.7 94.100	0,02	35.292.3 31.658		
Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam sinergitas pembangunan			Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan	TAD	-	2.080.24 9.401	-	3.335.96 6.653	55	4.926.86 2.604	70	12.094.4 58.900	85	12.854.7 94.100	85	35.292.3 31.658		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ketertiban yang ditindaklanjuti														
		Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	TAD	-		-		55		70		85		85		
		Indeks Pembangunan Gender	91,45	90,84		91,40		91,96		92,53		93,10		93,10		
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	TAD	50		50	55		70		85		85		
			Persentase Laporan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti													
			Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti (Masuk Kegiatan)		339.164.401		442.098.320	55	576.472.552	70	2.468.715.000	85	3.004.690.000	85	6.831.140.273	
			Persentase peningkatan kapasitas PPNS (Masuk Kegiatan)					-		100		100		100		
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	TAD	-		-	-		85		85		100		
			Persentase daerah rawan bencana yang dibina													
			Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	TAD	-		100	100	2.055.548.700	100	2.723.333.700	100	3.101.719.600	100	9.118.420.333	
			Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	TAD	-		-	100		100		100		100		
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	TAD	100		100	100		100		100		100		
			Persentase Pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran													
			Persentase Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia (Masuk Kegiatan)	TAD	-	1.348.555.000	-	-	1.172.872.002	90	3.372.872.000	95	3.522.872.000	95	10.771.721.002	
			Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Masuk Kegiatan)	TAD	-		-	-		80		85		85		



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase cakupan Korban Bencana Sosial dan Alam yang ditangani	100%	100%	212.680.000	100%	75.000.000	100%	513.990.000	100%	783.140.000	100%	122.500.000	100%	1.707.310.000	Dinas Sos PMD
2	8	2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan PPRG yang aktif	13,33	16,6		29,4		44,1		58,8		73,5		1	1.067.102.500	DP3APPKB
				Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG	13,33	16,6	129.900.000	29,4	132.500.000	44,1	256.320.000	58,8	262.620.000	73,5	285.762.500	1		
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD								45		45		45		
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	TAD	-		-	5%		4%		3%		3%	1.647.300.000	DP3APPKB	
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	TAD	0,5	24.950.000	0,6	50.000.000	70%	74.850.000	80%	526.250.000	90%	971.250.000			100%
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	TAD	-	0	-	0	0	0	29,4	103.625.000	58,8	150.000.000	100%	253.625.000	DP3APPKB
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak					500	134.000.000	600	134.000.000	700	134.000.000	700	402.000.000	DP3APPKB	
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif.	TAD	-		-	50%	24.950.000	75%	31.800.000	100%	75.000.000	100%	131.750.000	DP3APPKB	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	-	0	0	-	0	-	100%	115.000.000	100%	125.000.000	100%	240.000.000	Kecamatan Balai Riam
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100	100	25.000.000	100	44.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	100	52.000.000	100	217.000.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	-	0	0	-	0	-	100	85.000.000	100	85.000.000	100	170.000.000	Kecamatan Jelai



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Kinerja				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	-	0	0	-	0%	-	100%	115.000.000	100%	125.000.000	100%	240.000.000	Kecamatan Permata Kecubung
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	-	0	0	-	0	-	100	115.000.000	100%	125.000.000	100%	240.000.000	Kecamatan Sukamara
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakat dan Ekonomi	TAD	-	0	0	-	100%	19.525.000	100%	625.000.000	100%	525.000.000	100%	1.169.525.000	Badan Kesbangpol
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan	TAD	-	0	-	0	100%	50.334.350	100%	688.728.200	100%	600.000.000	100%	1.339.062.550	Badan Kesbangpol
Total Anggaran Belanja Pemenuhan Misi						274.729.275.090		274.608.193.294		436.310.914.256		552.028.506.289		733.627.694.716		2.288.672.083.647		



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini akan membahas seluruh program yang dirumuskan selama periode 2018-2023 beserta indikator kinerja, kerangka pendanaan, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang diperinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Selengkapnya mengenai kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dapat di lihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 sebagai berikut:



Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2023

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Realisasi		Proyeksi			
		2019	2020	2021	2022	2023	
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH							
5	BELANJA DAERAH	596.675.343.645	524.941.665.621	646.554.605.366,00	662.809.447.104,00	715.999.788.208,67	
5	1 Belanja Operasi	412.909.665.369	381.701.598.449	435.089.053.091,00	411.685.750.828,87	464.492.480.709,38	
5	1 1 - Belanja Pegawai	234.363.157.312	248.976.001.683	216.830.077.451,00	275.226.365.535,62	295.893.657.205,06	
5	1 2 - Belanja Barang dan Jasa	146.114.917.603	117.767.321.767	191.075.212.273,00	129.576.872.144,65	146.417.132.107,94	
5	1 4 - Belanja Subsidi	700.000.000	800.000.000	800.000.000,00	954.212.359,53	1.042.131.594,68	
5	1 4 - Belanja Hibah	31.167.090.454	13.879.675.000	23.324.763.367,00	16.555.196.789,12	18.080.559.801,70	
5	1 6 - Belanja Bantuan Sosial	564.500.000	278.600.000	304.269.651,69	332.304.454,21	3.059.000.000,00	
5	2 Belanja Modal	183.638.763.276	130.315.452.884	118.532.381.533,00	126.903.089.098,29	127.810.219.294,42	
5	3 Belanja Tidak Terduga	126.915.000	12.924.614.288	9.547.050.000,00	15.285.736.268,44	16.694.133.705,27	
5	4 Belanja Transfer	85.290.763.637	82.141.606.719	83.386.120.742,00	97.975.670.454,14	107.002.954.499,60	
5	4 1 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	1.001.433.100	911.376.826	810.595.121,00	1.087.058.789,69	1.187.218.231,55	
5	4 2 - Belanja Bantuan Keuangan	84.289.330.537	81.230.229.893	82.575.525.621,00	96.888.611.664,45	105.815.736.268,05	



Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sukamara, Tahun 2019-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	177.49 4.954.478	100%	194.406. 168.351	100%	286.260. 462.142	100%	342.559. 279.301	100%	353.326. 809.389	100%	1.358.38 0.228.59 2	Semua Perangkat Daerah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					232.22 7.900. 001		236.345. 753.253		273.393. 461.816		298.798. 939.544		489.208. 448.814		1.546.44 2.003.43 0		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			43.755 .259.1 00		43.755.2 59.100		40.948.8 83.312		67.0676 25.456		259.637. 922.058		454.846. 460.914		
1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA	84,47%	88,00%	1.954.4 55.648	88,25%	1.954.45 5.648	88,50%	1.945.62 7.777	88,75%	3.188.02 7.516	89,00%	12.107.7 36.765	89,00%	12.107.7 36.765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA)	45,07%	87,52%	1.954.4 55.648	88,00%	1.954.45 5.648	88,25%	1.945.62 7.777	88,50%	3.188.02 7.516	89,00%	12.107.7 36.765	89,00%	12.107.7 36.765	
			Rasio lembaga PAUD : jumlah penduduk usia PAUD	1:73	1 : 100	1.954.4 55.648 1	1 : 100	1.954.45 5.648	1 : 100	1.945.62 7.777	1 : 100	3.188.02 7.516	1 : 100	12.107.7 36.765	1 : 100	12.107.7 36.765	
			Persentase TK yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD	1.954.4 55.648	TAD	1.954.45 5.648	21,95%	1.945.62 7.777	30,49%	3.188.02 7.516	36,59%	12.107.7 36.765	36,59%	12.107.7 36.765	
			Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) (Kesetara)	97,64%	97,62%	1.954.4 55.648	97,70%	1.954.45 5.648	97,80%	1.945.62 7.777	98,00%	3.188.02 7.516	98,15%	12.107.7 36.765	98,15%	12.107.7 36.765	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun	91,96%	92%	1.954.4 55.648	92,25%	1.954.45 5.648	92,5%	1.945.62 7.777	92,75%	3.188.02 7.516	93%	12.107.7 36.765	93%	12.107.7 36.765	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	93,88%	94%	1.954.4 55.648	94,25%	1.954.45 5.648	94,5%	1.945.62 7.777	94,75%	3.188.02 7.516	95%	12.107.7 36.765	95%	12.107.7 36.765	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	86,64%	90,00%	1.954.4 55.648	90,15%	1.954.45 5.648	90,25%	1.945.62 7.777	90,35%	3.188.02 7.516	90,45%	12.107.7 36.765	90,45%	12.107.7 36.765	
			Rasio sekolah : jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun)	03:19	1 : 134	1.954.4 55.648	1 : 130	1.954.45 5.648	1 : 127	1.945.62 7.777	1 : 125	3.188.02 7.516	1 : 122	12.107.7 36.765	1 : 122	12.107.7 36.765	
			Angka Putus Sekolah (APts) SD/MI	0,58%	0,14%	1.954.4 55.648	0,13	1.954.45 5.648	0,12%	1.945.62 7.777	0,11%	3.188.02 7.516	0,10%	12.107.7 36.765	0,10%	12.107.7 36.765	
Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00 %	1.954.4 55.648	100,00	1.954.45 5.648	100,00 %	1.945.62 7.777	100,00 %	3.188.02 7.516	100,00 %	12.107.7 36.765	100,00 %	12.107.7 36.765				



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
		Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	89,13%	100,00 %	1.954.455.648	100,00	1.954.455.648	100,00 %	1.945.627.777	100,00 %	3.188.027.516	100,00 %	12.107.736.765	100,00 %	12.107.736.765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD	1.954.455.648	TAD	1.954.455.648	34,69%	1.945.627.777	51,02%	3.188.027.516	61,22%	12.107.736.765	61,22%	12.107.736.765			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	96%	96,5%	1.954.455.648	96,75%	1.954.455.648	97%	1.945.627.777	97,25%	3.188.027.516	97,5%	12.107.736.765	97,5%	12.107.736.765			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	81,90%	85%	1.954.455.648	85,5%	1.954.455.648	85,75%	1.945.627.777	86%	3.188.027.516	86,5%	12.107.736.765	86,5%	12.107.736.765			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	63,15%	70%	1.954.455.648	79,50%	1.954.455.648	80,00%	1.945.627.777	80,25%	3.188.027.516	80,50%	12.107.736.765	80,50%	12.107.736.765			
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,97%	0,50%	1.954.455.648	0,48%	1.954.455.648	0,46%	1.945.627.777	0,44%	3.188.027.516	0,42%	12.107.736.765	0,42%	12.107.736.765			
		Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00%	100,00 %	1.954.455.648	100,00%	1.954.455.648	100,00 %	1.945.627.777	100,00 %	3.188.027.516	100,00 %	12.107.736.765	100,00 %	12.107.736.765			
		Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	86,50%	100,00 %	1.954.455.648	100,00%	1.954.455.648	100,00 %	1.945.627.777	100,00 %	3.188.027.516	100,00 %	12.107.736.765	100,00 %	12.107.736.765			
		Rasio sekolah per jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun)	1:141	1 : 125	1.954.455.648	1 : 125	1.954.455.648	1 : 122	1.945.627.777	1 : 122	3.188.027.516	1 : 120	12.107.736.765	1 : 120	12.107.736.765			
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD	1.954.455.648	TAD	1.954.455.648	57,14%	1.945.627.777	71,43%	3.188.027.516	85,71%	12.107.736.765	85,71%	12.107.736.765			
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru TK/RA berkualifikasi S1/D4	46,91%	58,00%	226.225.000	60,00%	242.250.000	61,00%	9.070.000	63,00%	11.904.762	64,00%	255.973.810	64,00%	255.973.810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D4	5,40%	27,00%	226.225.000	28,00%	242.250.000	29,00%	9.070.000	29,50%	11.904.762	30,00%	255.973.810	30,00%	255.973.810	
				Guru TK/RA bersertifikasi	54,27%	58,00%	226.225.000	58,50%	242.250.000	58,75%	9.070.000	59,00%	11.904.762	59,50%	255.973.810	59,50%	255.973.810	
				Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi	9,15%	28,00%	226.225.000	28,25%	242.250.000	28,50%	9.070.000	28,75%	11.904.762	29,00%	255.973.810	29,00%	255.973.810	
				Rasio guru : murid (G/M) SD/MI	01:11	1 : 11	226.225.000	1 : 11	242.250.000	1 : 11	9.070.000	1 : 10	11.904.762	1 : 10	255.973.810	1 : 10	255.973.810	
				Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	91,73%	92,00%	226.225.000	93,00	242.250.000	94,00%	9.070.000	94,5%	11.904.762	94,75%	255.973.810	94,75%	255.973.810	
				Guru SD/MI sertifikasi	20%	20%	226.225.000	22,5%	242.250.000	25,5%	9.070.000	27,5%	11.904.762	30%	255.973.810	30%	255.973.810	
				Rasio guru : murid (G/M) SMP/MTs	1:8	1 : 9	226.225.000	1 : 9	242.250.000	1 : 9	9.070.000	1 : 9	11.904.762	1 : 9	255.973.810	1 : 9	255.973.810	
Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	93,21%	96,00%	226.225.000	96,5%	242.250.000	96,75%	9.070.000	96,8%	11.904.762	97%	255.973.810	97%	255.973.810					



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	
		Guru SMP/MTs sertifikasi	22,01%	23,5%	226.225.000	25%	242.250.000	27,5%	9.070.000	30%	11.904.762	33,5%	255.973.810	33,5%	255.973.810		
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			29.746.000.000		35.226.000.000		47.422.000.000		41.868.000.000		53.583.000.000		207.845.000.000		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Puskesmas	100	100	28.920.000.000	100	34.309.000.000	100	46.556.000.000	100	40.858.000.000	100	52.506.000.000	203.149.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,2	>0,2	512.000.000	>0,2	507.000.000	>0,3	426.000.000	>0,3	545.000.000	>0,3	549.000.000	2.539.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	TAD	<6	314.000.000	<6	310.000.000	<5	280.000.000	<5	295.000.000	<5	328.000.000	1.527.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio Posyandu per satuan balita	5	>6	-	>6	100.000.000	>7	160.000.000	>7	170.000.000	>7	200.000.000	630.000.000	Dinas Kesehatan
		RSUD			19.162.500.000		16.257.000.000		35.439.000.000		28.306.000.000		28.037.000.000		127.201.500.000		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penanganan Covid-19 di rumah sakit	TAD	0	0	0	0	25,00%	18.362.000.000	80,00%	19.145.000.000	90,00%	18.570.000.000	100	62.522.000.000
				Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan	25,00%	100,00%	1.155.000.000	100,00%	1.075.000.000	100,00%	425.000.000	100,00%	425.000.000	100,00%	425.000.000	100,00%	425.000.000
				Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit	TAD	15,00%	20.000.000	20,00%	25.000.000	20,00%	25.000.000	20,00%	25.000.000	20,00%	25.000.000	20,00%	25.000.000
				Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit	<1,5	<1,5	10.000.000.000	<1,5	20.000.000	<1,5	20.000.000	<1,5	20.000.000	<1,5	20.000.000	<1,5	20.000.000
				Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut	75,00%	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000
				BOR	38,36%	60,00%	30.000.000	60,00%	30.000.000	60,00%	30.000.000	60,00%	30.000.000	60,00%	30.000.000	60,00%	30.000.000



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
		Av-Los	2,4	2,4	30.000.000	2,4	30.000.000	2,4	30.000.000	2,4	30.000.000	2,4	30.000.000	2,4	30.000.000	
		TOI	5,47	5,47	30.000.000	5,47	30.000.000	5,47	30.000.000	5,47	30.000.000	5,47	30.000.000	5,47	30.000.000	
		BTO	41,72	40-50	30.000.000	40-50	30.000.000	40-50	30.000.000	40-50	30.000.000	40-50	30.000.000	40-50	30.000.000	
		NDR	3,74	25/1000	30.000.000	25/1000	30.000.000	25/1000	30.000.000	25/1000	30.000.000	25/1000	30.000.000	25/1000	30.000.000	
		GDR	14,66	45/1000	30.000.000	45/1000	30.000.000	45/1000	30.000.000	45/1000	30.000.000	45/1000	30.000.000	45/1000	30.000.000	
		Angka Kematian Ibu	1	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	
		Angka Kematian Bayi	TAD	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	<5	30.000.000	
		IKM	75,00%	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	80,00%	30.000.000	
		Cakupan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	15000	15000	30.000.000	15000	30.000.000	20000	30.000.000	20000	30.000.000	20000	30.000.000	20000	30.000.000	
		Cakupan SPM	80,00%	80,00%	585.000.000	80,00%	725.000.000	80,00%	810.000.000	80,00%	810.000.000	80,00%	810.000.000	80,00%	810.000.000	
		Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK)	80,00%	80,00%	250.000.000	80,00%	250.000.000	80,00%	250.000.000	80,00%	300.000.000	80,00%	300.000.000	80,00%	1.500.000.000	
		Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart	75,00%	80,00%	200.000.000	85,00%	200.000.000	90,00%	200.000.000	90,00%	6.081.000.000	90,00%	6.287.000.000	90,00%	57.289.500.000	
		Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi	80,00%	90,00%	10.000.000	90,00%	10.000.000	90,00%	10.000.000	90,00%	10.000.000	90,00%	10.000.000	90,00%	10.000.000	
		Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit	75,00%	75,00%	250.000.000	75,00%	50.000.000	75,00%	50.000.000	75,00%	50.000.000	75,00%	50.000.000	75,00%	50.000.000	
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit	75,00%	90,00%	6.300.000.000	90,00%	6.500.000.000	90,00%	7.500.000.000	90,00%	675.666.666,67	90,00%	689.555.555,65	90,00%	6.365.500.000	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
		Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart	75,00%	75,00%	7.080.500.000	75,00%	5.500.000.000	70,00%	4.500.000.000	70%	675.666.666,67	70%	689.555.555,65	70%	6.365.500.000	
		Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart di rumah sakit	36,00%	50,00%	1.500.000.000	60,00%	1.500.000.000	70,00%	1.500.000.000	70,00%	675.666.666,67	70,00%	689.555.555,65	70,00%	6.365.500.000	
		Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	75,00%	80,00%	90.000.000	80,00%	90.000.000	80,00%	90.000.000	80,00%	675.666.666,67	80,00%	689.555.555,65	80,00%	6.365.500.000	
		Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	75,00%	80,00%	325.000.000	80,00%	325.000.000	80,00%	325.000.000	80,00%	675.666.666,67	80,00%	689.555.555,65	80,00%	6.365.500.000	
		Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit	75,00%	80,00%	272.000.000	80,00%	272.000.000	80,00%	272.000.000	80,00%	675.666.666,67	80,00%	689.555.555,65	80%	6.365.500.000	
		Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit	65,00%	70,00%	935.000.000	75,00%	935.000.000	75,00%	720.000.000	90%	1.170.000.000	90%	689.555.555,65	80%	6.365.500.000	
		Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi	25,00%	60,00%	150.000.000	60,00%	250.000.000	70,00%	350.000.000	80%	450.000.000	80%	689.555.555,65	80%	6.365.500.000	
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			131.442.052.000		134.098.555.000		140.136.232.750		155.068.306.750		132.519.989.850		700.003.237.352	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	57,34 %	64,93 %	8.070.000.000	72,07 %	7.590.000.000	79,59 %	7.990.000.000	87,29 %	8.190.000.000	95 %	40.030.000.000	DPUPRPRKP
				Rasio Jaringan Irigasi (RASIO)	0	64,91 %	5.238.237.000	72,05	5.468.595.000	79,57 %	6.357.643.000	87,29	7.149.051.000	95 %	31.994.026.000	DPUPRPRKP
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	33,2 %	33,2 %	2.600.000.000	0	2.600.000.000	35 %	2.600.000.000	35 %	2.600.000.000	35 %	10.400.000.000	DPUPRPRKP
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	26 %	26 %	1.700.000.000	0	1.500.000.000	55 %	1.500.000.000	55 %	1.500.000.000	55 %	3.200.000.002	DPUPRPRKP



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)			
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	45 %	45 %	750.000.000	50 %	750.000.000	55 %	750.000.000	55 %	750.000.000	55 %	3.750.000.000	DPUPRPRKP			
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase limbah yang ditangani dengan baik	35 %	35 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	850.000.000	40 %	4.250.000.000	DPUPRPRKP			
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	76,20 %	76,20 %	2.750.000.000	79,90 %	2.750.000.000	81 %	2.700.000.000	84 %	2.700.000.000	87,74 %	2.700.000.000	13.600.000.000	DPUPRPRKP		
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	30 %	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	30 %	5.000.000.000	25.000.000.000	DPUPRPRKP		
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	985 Unit	818 Unit	3.500.000.000	309 Unit	3.500.000.000	309 Unit	8.993.049.900	309 Unit	8.993.049.900	309 Unit	3.500.000.000	28.486.099.800	DPUPRPRKP		
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	17,41 Ha	1,89 ha	4.600.000.000	3,7 Ha	4.600.000.000	3,7 Ha	4.600.000.000	4,16 Ha	7.413.817.000	5,3 Ha	4.600.000.000	25.813.817.000	DPUPRPRKP		
1	3	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	72,075 Km	72,075 Km	9.957.200.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	5.592.400.000	36,037 Km	32.326.800.000	DPUPRPRKP	
				Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	41 m	41 m	1.750.000.000	45,36 m	1.750.000.000	49,72 m	1.750.000.000	54,08 m	1.750.000.000	58,44 m	1.750.000.000	58,44 m	1.750.000.000	8.750.000.000	DPUPRPRKP
				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	17,77 %	30,17 %	80.300.000.000	36,37	90.200.000.000	42,57 %	90.200.000.000	48,77 %	90.200.000.000	55 %	90.200.000.000	55 %	90.200.000.000	441.100.000.000	DPUPRPRKP
				Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	25 %	30 %	3.200.000.000	45 %	3.200.000.000	50 %	3.200.000.000	55 %	3.200.000.000	60 %	3.200.000.000	60 %	3.200.000.000	16.000.000.000	DPUPRPRKP
1	3	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	70 %	78 %	425.500.000	85 %	450.495.000	85 %	647.589.850	85 %	647.589.850	85 %	647.589.850	2.818.764.550	DPUPRPRKP		
1	3	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	52%	60%	175.500.000	63%	523.825.000	65%	408.400.000	67%	930.000.000	70%	930.000.000	2.967.725.000	DPUPRPRKP		
				Ruang publik yang berubah peruntukannya	52%	52 %	650.000.000	63%	47.625.000	65%	117.150.000	67%	930.000.000	70%	930.000.000	70%	2.674.775.000	DPUPRPRKP	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	30 Ha	34 Ha	1.528.615.000	34 Ha	1.825.615.000	34 Ha	930.000.000	34 Ha	930.000.000	34 Ha	930.000.000	34 Ha	6.144.230.000	DPUPRPRKP	
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	3,13%	3,13%	97.000.000	8,25%	150.000.000	9,35%	150.000.000	12,5%	150.000.000	15,62%	150.000.000	15,62%	697.000.000	DPUPRPRKP	
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			2.447.500.000		2.710.000.000		2.567.500.000		2.517.500.000		2.167.500.000		13.747.000.000		
1	4	2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	20,7%	14,49%	1.037.500.000	32%	2.117.500.000	32%	2.117.500.000	30 %	2.117.500.000	32%	1.817.500.000	32%	9.207.500.000	DPUPRPRKP
1	4	4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	25%	20%	960.000.000	10%	142.500.000	0	0	0	0	0	30%	1.102.500.000	DPUPRPRKP	
			Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	25%	25%	450.000.000	25%	450.000.000	25%	450.000.000	30 %	200.000.000	30%	350.000.000	40%	1.900.000.000	DPUPRPRKP
1	4	5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15%	32%	577.000.000	38%	200.000.000	42%	160.000.000	48%	250.000.000	53%	350.000.000	65%	1.537.000.000	DPUPRPRKP
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.687.719.401		3.034.466.653		3.804.893.254		8.564.920.700		9.629.281.600		26.721.281.608		
1	5	2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	TAD	50	339.164.401	50	442.098.320	55	576.472.552	70	1.854.690.000	85	2.104.690.000	85	4.535.852.552	SatpolPP, DAMKAR
			Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	0	0	55	0	70	514.025.000	85	800.000.000	85	1.314.025.000	
			Persentase peningkatan kapasitas PPNS (IKD)	TAD	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	TAD	0	0	0	0	0	85	300.000.000	85	350.000.000	100	650.000.000	BPBD	
				Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	TAD	0	0	100	1.237.818.333	100	1.641.929.500	100	1.641.929.500	100	1.970.315.400	100		5.254.174.400
				Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	TAD	0	0	0	0	100	413.619.200	100	781.404.200	100	781.404.200	100		1.976.427.600
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran	TAD	100	1.348.555.000	100	1.354.550.000	100	1.172.872.002	100	2.372.872.000	100	2.372.872.000	100	5.918.616.002	SatpolPP, DAMKAR
				Persentase Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia	TAD	0	0	0	0	0	0	90	500.000.000	95	650.000.000	95	1.150.000.000	
				Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (IKD)	TAD	0	0	0	0	0	0	80	500.000.000	85	500.000.000	85	1.000.000.000	
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.436.310.000		1.264.472.500		3.074.952.500		3.668.033.250		3.633.755.306		16.077.523.556	
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Diberdayakan	0	0	0	82%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	201.287.250	100%	208.984.112	100%	890.271.362	Dinas Sos PMD
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	100%	100%	530.070.000	100%	196.660.000	100%	442.660.000	100%	1.739.120.000	100%	2.100.860.000	100%	5.009.370.000	Dinas Sos PMD
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		100%	3.107.420.000	100%	550.090.000	100%	1.675.580.000	100%	853.990.000	100%	1.066.490.000	100%	7.253.570.000	Dinas Sos PMD
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase cakupan Korban Bencana Sosial dan Alam yang ditangani	100%	100%	212.680.000	100%	75.000.000	100%	513.990.000	100%	783.140.000	100%	122.500.000	100%	1.707.310.000	Dinas Sos PMD
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan TMP dalam Kondisi baik	100%	100%	586.140.000	100%	202.722.500	100%	202.722.500	100%	90.496.000	100%	134.921.194	100%	1.217.002.194	Dinas Sos PMD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							37.957.030.630		32.146.477.086		41.357.695.209		66.004.074.641		68.671.194.083		245.608.116.649	
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.344.691.000		1.423.875.000		1.473.875.000		3.660.000.000		4.060.000.000		11.962.441.000	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	0	1	153.37 5.000	0	153.375. 000	0	153.375. 000	0	250.000. 000	1	250.000. 000	3	960.125. 000	DINAS NAKERTRANS
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14	10	330.00 0.000	14	330.000. 000	12,8	330.000. 000	15	1.450.00 0.000	16	1.600.00 0.000	67,8	4.040.00 0.000	DINAS NAKERTRANS
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55	48	639.09 2.000	55	650.000. 000	55	700.000. 000	55	1.420.00 0.000	55	1.670.00 0.000	55	5.079.09 2.000	DINAS NAKERTRANS
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat	80	70	222.22 4.000	80	290.500. 000	80	290.500. 000	90	540.000. 000	100	540.000. 000	100	1.883.22 4.000	DINAS NAKERTRANS
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	8	2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan PPRG yang aktif	13,33	13,33	25.000. 000	16,67	27.000.0 000	25	76.995.0 00	25	76.995.0 00	25	84.700.0 00	25	238.690. 00	DP3APPKB
				Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG	13,33	16,6	104.90 0.000	29,4	105.500. 000	44,1	154.375. 000	58,8	154.375. 000	73,5	169.812. 500	100	478.562. 500	
				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	TAD	0	0	0	0	0	45	100.000. 000	45	100.000. 000	45	200.000. 000		
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	TAD	0	0	0	0	0,048	24.950.0 00	0,036	31.250.0 00	0,03	31.250.0 00	31.250. 000	31.250.0 00	DP3APPKB
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	TAD	50%	24.950. 000	60%	50.000.0 000	70%	49.900.0 00	80 %	495.000. 000	90 %	940.000. 000	100%	940.000. 000	
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak,	0	0	0	0	0	0	250	103.625. 000	300	150.000. 000	300	253.625. 000	DP3APPKB	
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0	0	0	0	0	50%	134.000. 000	75%	134.000. 000	100%	134.000. 000	100%	402.000. 000	DP3APPKB



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif.	TAD	0	0	0	0	50%	24.950.000	75%	31.800.000	100%	75.000.000	100%	131.750.000	DP3APPKB
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (%)	29,87	61,73	214.650.000	80,68	74.345.000	80,84	8.654.600	81,55	129.500.000	82,27	135.975.000	82,27	563.124.600	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2	86,8	211.675.000	89,5	506.750.000	92,1	715.804.070	94,7	985.050.000	100	1.034.302.500	100	3.453.58.570	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
				Penguatan cadangan pangan (Ton)	21,64	22,53	845.725.000	23,43	866.785.000	24,4	332.747.150	25,39	2.361.935.000	26,42	2.480.031.750	26,42	6.884.223.900	
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan	5,00	1 Dok	36.750.000	1 Dok	20.075.000	1 Dok	20.384.600	1 Dok	58.475.000	1 Dok	61.398.750	1 Dok	197.083.350	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	5	13	27.325.000	17	33.150.000	31	24.340.000	32	45.000.000	33	47.250.000	33,00	177.065.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peranian
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi	TAD	16%	150.000.000	32%	150.000.000	32 %	150.000.000	67%	150.000.000	67 %	150.000.000	67 %	750.000.000	DPUPRPRKP
2	10	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara	TAD	5%	97.000.000	10%	975.900.000	15%	170.537.000	20%	200.000.000	25%	200.000.000	25%	1.643.437.000	DPUPRPRKP
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan	TAD	2 Bidang	1.296.535.000	3 Bidang	229.900.000	1 Bidang	298.150.000	2 Bidang	350.000.000	2 Bidang	350.000.000	10 Bidang	2.524.585.000	DPUPRPRKP



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	106	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tingkat Cakupan Redistribusi tanah (IKD)	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	200.000.000	10%	1.000.000.000	DPUPRPRKP	
		Presentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (IKD)	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 %	200.000.000	10 %	2.500.000.000	DPUPRPRKP	
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.986.810.874		4.526.230.800		10.038.204.751		13.892.928.500		14.836.928.500		54.311.103.425			
2	112	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	TAD	0	0	0	0	0	0	2	800.000.000	1	100.000.000	3	900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ADA	500.000.000	ADA		500.000.000
			Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota	TAD	0	0	0	0	0	0	0	2	800.000.000	1	500.000.000	3		1.300.000.000
2	113	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	< 5	< 10	185.780.000	< 5	0	< 10	60.151.850	< 10	87.500.000	< 10	87.500.000	< 10	420.931.850	Dinas Lingkungan Hidup	
2	114	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	100	100	45.000.000	100	60.000.000	100	86.355.476	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem (Masuk Kegiatan)	2 Dokumen	0	0	0	0	2	13.024.700	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000		
2	115	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah b3)	Cakupan penanganan limbah B3 yang ditangani	100	100	61.900.000	100	6.400.000	100	18.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	136.300.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	116	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi	100	100	94.020.000	100	0	100	7.650.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	301.670.000	Dinas Lingkungan Hidup	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten														
2	1 1 7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (mha), kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	4	4	49.875.000	4	0	4	14.950.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6	4	34.000.000	6	50.000.000	6	81.132.725	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Ada	Ada	185.650.000	Ada	43.400.000	Ada	29.432.000	Ada	250.000.000	Ada	250.000.000	Ada	758.482.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	0	0	0	0	100	11.599.800	100	35.000.000	100	45.000.000	100	91.599.800	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1 1	Program Pengelolaan Persampahan	100	100	10.330.585.874	100	4.318.750.800	100	9.695.428.500	100	11.515.428.500	100	12.899.428.500	100	48.759.622.174	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.321.396.000		80.000.000		1.070.944.350		1.966.643.850		2.082.404.951		8.521.389.151	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	1 2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90,50	95	830.34 9.000	90,50	20.000.0 00	94	37.772.5 00	96	536.088. 750	98	576.228. 390	98	2.000.43 8.640	DisDukcapil
2	1 2	3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta Pencatatan Sipil	43,09	41	830.34 9.000	43	20.000.0 00	45	39.030.0 00	46	740.780. 450	47	783.513. 718	47	2.413.67 3.168	DisDukcapil
2	1 2	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database kependudukan	ADA	ADA	830.34 9.000	ADA	20.000.0 00	ADA	894.141. 850	ADA	589.774. 650	ADA	622.662. 843	ADA	2.956.92 8.343	DisDukcapil
2	1 2	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan Buku Profil kependudukan	ADA	ADA	830.34 9.000	ADA	20.000.0 00	ADA	100.000. 000	ADA	100.000. 000	ADA	100.000. 000	ADA	1.150.34 9.000	DisDukcapil
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	1 3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	789.22 5.000	100	2.845.00 0.000	100	1.914.87 7.355	100	625.000. 000	100	700.000. 000	100	6.874.10 2.355	Dinsos PMD
2	1 3	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa	11,11	11,11	218.35 0.000	100	150.000. 000	100	2.463.20 0.000	100	2.168.20 0.000	100	2.168.20 0.000	100	7.167.95 0.000	Dinsos PMD
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	1 4	2	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2,62	2,62	0	2,60	127.210. 000	2,58	493.794. 000	2,57	543.173. 400	2,56	592.570. 800	2,56	1.756.74 8.200	DP3APPKB
2	1 4	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	79,58	79,58	0	8,379	741.314. 000	8,59	1.184.57 3.610	8,804	1.303.03 9.971	9,024	1.421.52 4.332	9,024	4.650.45 1.913	DP3APPKB
2	1 4	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,07	4,07	0	3,86	97.930.0 00	3,67	107.723. 000	3,49	209.380. 000	3,30	230.318. 000	3,30	230.318. 000	DP3APPKB
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0,2	100.000. 000	0,3	100.000. 000	0,3	200.000. 000	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	1 5				319.87 4.000		187.330. 000		578.020. 000		1.500.42 6.000		1.651.64 0.000		4.237.29 0.000			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0,21	0,23	143.90 0.000	0,25	131.160. 000	0,27	200.000. 000	0,29	742.440. 000	0,31	742.440. 000	1,50	1.960.14 0.000	Dinas Perhubungan
				Jumlah uji kir angkutan	4	4	1.200.0 00	4	1.200.00 0	2000	50.000.0 0	3000	75.000.0 00	7500	75.000.0 00	7500	75.000.0 00	
				Pemasangan Rambu rambu	1	100 %	40.000. 000	50 %	50.000.0 00	50 %	215.820. 000	50 %	248.786. 000	50 %	400.000. 000	100 %	954.606. 000	
				Jumlah arus penumpang angkutan umum	30,467	30,467	134.77 4.000	30,967	4.970.00 0	31,467	112.000. 000	31,967	434.200. 000	32,467	434.200. 000	187,80 2	1.120.14 4.000	
2	1 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tersedianya Dermaga Penyeberangan	TAD	0	0	0	0	0	0	1	300.000. 000	1	600.000. 000	2	900.000. 000	Dinas Perhubungan
2	1 6						455.00 0.000		1.375.00 0.000		1.428.00 0.000		2.955.00 0.000		2.555.00 0.000		8.768.00 0.000	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	1 6	2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	16%	80.000.0 00	31%	80.000.0 00	50%	80.000.0 00	50%	240.000. 000	Dinas KOMINFO & PERSANDIAN
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	88%	88%	25.000. 000	91%	25.000.0 00	94%	25.000.0 00	97%	25.000.0 00	100%	25.000.0 00	100%	125.000. 000	
2	1 6	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	0	10%	30.000. 000	40%	1.150.00 0.000	60%	1.150.00 0.000	80%	1.150.00 0.000	100%	1.150.00 0.000	100%	4.630.00 0.000	Dinas KOMINFO & PERSANDIAN
				Jumlah Sarana Information Center			400.00 0.000	2	200.000. 000	2	173.000. 000	2	1.700.00 0.000	2	1.300.00 0.000	2	3.773.00 0.000	
2	1 7						420.92 1.900				943.422. 741		1.094.53 7.920		845.000. 000		3.303.88 2.561	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	1 7	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Cakupan Palayanan izin usaha simpan pinjam yang disetujui	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	100	55.000.0 00	100	55.000.0 00	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
2	1 7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	94	40	29.820. 000	94	0	95	47.006.9 20	97	47.006.9 20	98	60.000.0 00	98	183.833. 840	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	1 7	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase KSP/USP Koperasi sehat	TAD	0	0	0	0	0	0	0	50	150.000.000	50	150.000.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	
2	1 7	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	43	53	106.98 0.000	0	0	53	68.287.0 00	53	68.287.0 00	67	80.000.0 00	67	80.000.0 00	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM Aktif	100	53	114.06 0.600	0	0	100	34.244.0 00	100	34.244.0 00	100	50.000.0 00	100	50.000.0 00	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
2	1 7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	5	4	170.06 1.300	0	0	4	793.884. 821	4	945.000. 000	4	450.000. 000	16	2.188.88 4.821	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				445.90 1.000		132.815. 000		520.540. 700		1.198.51 0.000		1.181.11 0.000		3.461.47 6.700	
2	1 8	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12	1	32.950. 000	1	0	1	0	1	332.800. 000	1	332.800. 000	5	698.550. 000	DPMPPTSP
2	1 8	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	1	1	155.00 6.000	1	0	1	16.635.0 00	1	318.180. 000	1	318.180. 000	5	808.001. 000	DPMPPTSP
4	1 8	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,42%	80,00%	162.50 0.000	80,25%	116.350. 000	92,00%	149.210. 800	92%	257.340. 000	92,50%	257.340. 000	92,50%	942.740. 800	DPMPPTSP
2	1 8	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.930.12 1.324.30 7	106.07 7.644.3 67	64.350. 000	108.199. 197.051	0	647.91 7.255.5 07	335.169. 900	680.31 3.188.2 83	255.390. 000	714.32 8.774.1 98	255.390. 000	5.972.6 80.542. 295	910.299. 900	DPMPPTSP
2	1 8	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah data penanaman modal	1	1	31.095. 000	1	16.465.0 00	1	19.525.0 00	1	17.400.0 00	1	17.400.0 00	1	101.885. 000	DPMPPTSP
				Jumlah sistem yang dikembangkan	2	2	31.095. 000	2	16.465.0 00	2	19.525.0 00	1	17.400.0 00	1	17.400.0 00	2	101.885. 000	



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
2	1	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
					6.710.560.000		10.575.240.000		13.128.582.282		16.827.578.000		17.973.080.000		65.215.040.282			
2	1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha	4,85	4,85	1.756.370.000	8,08	2.056.270.000	7,52	1.372.668.245	5,26	3.038.090.000	5,26	3.015.600.000	5,26	11.238.998.245	PORAPAR
2	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan cabang olahraga	90,48	100	4.954.190.000	100	8.518.970.000	100	11.755.914.037	100	13.789.488.000	100	14.957.480.000	100	53.976.042.037	PORAPAR
2	2	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				60.000.000		65.000.000		86.000.000		80.000.000		80.000.000		371.000.000	
2	2	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia	Tersedia	25.000.000	Tersedia	25.000.000	Tersedia	40.000.000	Tersedia	45.000.000	Tersedia	45.000.000	Tersedia	371.000.000	Diskominfosandi
				Buku "kabupaten dalam angka"	Tersedia	Tersedia	35.000.000	Tersedia	35.000.000	Tersedia	46.000.000	Tersedia	35.000.000	Tersedia	35.000.000	Tersedia	371.000.000	Diskominfosandi
2	2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				45.000.000		36.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		681.000.000	
2	2	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	TAD	100%	45.000.000	100%	36.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	681.000.000	Diskominfosandi
2	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.457.790.856		3.494.127.286		330.200.000		8.583.447.000		8.583.447.000		24.381.012.142	
2	2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah sanggar seni budaya	20	5 group	2275.322.171	8 group	139.467.229	10 group	38.840.000	13 group	1.616.689.400	15 group	1.616.689.400	15p	1.616.689.428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah sanggar seni budaya yang terdaftar dan aktif	20	5 group	2275.322.171	8 group	139.467.229	10 group	38.840.000	13 group	1.616.689.400	15 group	1.616.689.400	15 group	1.616.689.428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi	14	3 group	2275.322.171	5 group	139.467.229	7 group	38.840.000	10 group	1.616.689.400	14 group	1.616.689.400	14 group	1.616.689.428	Dinas Pendidikan



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah gedung seni budaya	TAD	1 Unit	2275.3 22.171	1 Unit	139.467. 229	1 unit	38.840.0 00	1 unit	1.616.68 9.400	1 unit	1.616.68 9.400	1 unit	1.616.68 9.428	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan festival/pegelaran seni budaya	TAD	3 Even	2275.3 22.171	4 Even	139.467. 229	5 even	38.840.0 00	6 even	1.616.68 9.400	7 even	1.616.68 9.400	7 even	1.616.68 9.428	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 2 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	TAD	25 cagar budaya	1.040.5 90.000	20 cagar budaya	699.818. 333	15 cagar budaya	17.000.0 00	10 cagar budaya	100.000. 000	10 cagar budaya	100.000. 000	80 cagar budaya	1.049.72 7.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah yang diduga cagar budaya yang dilestarikan (didaftar/registrasi)	TAD	20 cagar budaya	1.040.5 90.000	17 cagar budaya	699.818. 333	13 cagar budaya	17.000.0 00	10 cagar budaya	100.000. 000	10 cagar budaya	100.000. 000	70 cagar budaya	1.049.72 7.000	
		Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	TAD	0	0	1 cagar budaya	699.818. 333	1 cagar budaya	17.000.0 00	1 cagar budaya	100.000. 000	1 cagar budaya	100.000. 000	4 cagar budaya	1.049.72 7.000	
		Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat	TAD	0	0	0	0	1 lokasi	17.000.0 00	1 lokasi	100.000. 000	1 lokasi	100.000. 000	3 lokasi	1.049.72 7.000	
		Jumlah museum yang didirikan	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	100.000. 000	0	0	1 unit	1.049.72 7.000	
		Penyelenggaraan pameran cagar budaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 even	100.000. 000	1 even	1.049.72 7.000	
2	2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			1.550.000.000		1.600.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000	
2	2 3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	12000	11500	150.000.000	12000	200.000.000	8000	100.000.000	8000	100.000.000	8000	100.000.000	DISPERPUSIN
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	32	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	32	600.000.000	DISPERPUSIN
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5000	5000	800.000.000	5000	800.000.000	5000	800.000.000	5000	800.000.000	5000	800.000.000	25000	800.000.000	DISPERPUSIN
2	2 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			50.000.000				135.000.000		135.000.000		135.000.000		505.000.000	
2	2 4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	13%	3%	50.000.000	13%	50.000.000	23%	75.000.000	33%	75.000.000	38%	75.000.000	DISPERPUSIN
2	2 4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	TAD	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0%	0	0	0%	0	50%	10.000.000	50%	10.000.000	50%	10.000.000	DISPERPUSIN



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
3	2	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
					3.807.500.650		3.754.225.000		3.756.075.169		51.557.821.193		54.135.712.253		117.011.334.265			
3	2	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	27,14	27,14	1.763.285.650	27,14	1.672.550.000	27,14	1.136.958.980	27,14	27.948.109.193	27,14	29.345.514.653	27,14	61.866.418.476	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian (Ton)	4.989,60	5.243.79	1.607.915.000	6.818,03	1.784.535.000	7.158,93	2.127.333.099	7.516,88	22.488.030.000	7.892,72	23.612.431.500	22.568,53	51.620.244.599	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus kesehatan hewan (ekor)	230	663	117.170.000	1.110,00	64.970.000	1.150,00	111.714.060	1.250,00	377.470.000	1.300,00	396.343.500	3.700,00	1.067.667.560	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	105	65	98.750.000	63,4	26.190.000	20	22.761.000	15	150.000.000	10	157.500.000	10	455.201.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (%)	5,53	5,95	220.380.000	6,38	205.980.000	6,80	357.308.030	7,66	594.212.000	8,51	623.922.600	35,32	2.001.802.630	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
					84.675.000		74.725.000		1.447.463.074		22.892.948.034		1.566.460.000		26.066.271.108			
3	2	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	100%	100%	0	100%	0	100	931.030.535	100	20.587.020.000	100	550.000.000	100	22.068.050.535	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	2	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi	6,02 %	2,02%	21.090.000	1,62%	9.850.000	4%	15.459.380	4%	71.460.000	4%	71.460.000	4%	766.697.380	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,9	5,9	15.500.000	5,9	8.350.000	5,9	37.775.000	5,9	49.825.000	5,9	55.000.000	5,9	766.697.380	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	2	5		Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah	TAD	0	0	0	0	0	0	4	742.872.875	4	775.000.000	4	1.517.872.875	Dinas Koperasi



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR															UMKM dan Perdagangan	
2	286	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	TAD	0	0	0	0	0	0	0,10%	1.389.500.000	0,20%	50.000.000	0,20%	1.439.500.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	287	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang informal	30	30	48.085.000	30	56.525.000	30	52.270.159	30	52.270.159	40	265.000.000	40	265.000.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0		0		79.052.000		643.018.000		839.996.000		1.562.066.000		
3	292	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri	TAD	0	0	0	0	Tidak	79.052.000	Ada	643.018.000	Ada	739.996.000	Ada	1.462.066.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	293	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	294	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	TAD	0	0	0	0	0	0	0	0	Ada/Tidak	50.000.000	Ada/Tidak	50.000.000	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			400.000.000		2.060.000.000		1.539.244.542		5.803.250.000		6.355.000.000		16.157.494.542		
3	302	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	50	50	100.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	75	2.775.000.000	75	2.870.000.000	75	6.145.000.000	DINAS NAKERTRANS
3	303	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang ditempatkan	0	0	100.000.000	0	1.455.000.000	0	909.244.542	90	2.453.250.000	50	2.800.000.000	140	7.717.494.542	DINAS NAKERTRANS
			Jumlah Transmigran yang menetap	55	55	100.000.000	55	255.000.000	55	275.000.000	145	325.000.000	195	375.000.000	195	1.330.000.000	DINAS NAKERTRANS



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	
3	3 0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan	50	50	100.00 0.000	50	150.000. 000	50	155.000. 000	75	250.000. 000	75	310.000. 000	75	965.000. 000	DINAS NAKERTRANS
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						18.817 .881.6 00		0		24.317.2 99.783		25.009.7 71.868		26.056.1 64.868		94.201.1 18.119	
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				0		0		10.108.1 65.915		10.463.9 63.000		11.510.3 56.000		32.082.4 84.915	
4	1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	0	0	0	0	0	100 Persen	8.365.00 8.400	100 Persen	7.876.46 8.000	100 Persen	8.664.11 2.000	100 Persen	24.905.5 88.400	Sekretariat Daerah
4	1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Penyelesaian Masalah di Sektor Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	100 Persen	1.743.15 7.515	100 Persen	2.587.49 5.000	100 Persen	2.846.24 4.000	100 Persen	7.176.89 6.515	Sekretariat Daerah
4	2	SEKRETARIAT DPRD				18.817 .881.6 00		0		14.209.1 33.868		14.545.8 08.868		14.545.8 08.868		62.118.6 33.204	
4	2 1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD	100%	100%	7.649.0 87.800	0	0	100%	8.642.48 3.868	100%	8.642.48 3.868	100%	8.642.48 3.868	100%	25.927.4 57.604	Sekretariat DPRD
4	2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusunya dan terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakann Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada/Tidak	3.519.7 06.000	Ada/Tidak	0	Ada/Tidak	5.566.65 0.000	Ada/Tidak	5.903.32 5.000	Ada/Tidak	5.903.32 5.000	Ada/Tidak	17.373.3 00.000	Sekretariat DPRD



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.321.609.000		7.120.994.000		104.265.611.090		106.902.477.532		108.287.362.070		334.898.053.692					
5	1	PERENCANAAN			1.121.609.000		1.444.195.000		1.608.867.010		1.070.091.380		1.878.880.918		7.123.646.308					
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	0	0	Ada/Tidak	27.400.000	0	0	0	0	0	Ada/Tidak	270.400.0000	BAPPEDA			
				Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada/Tidak	305.969.00	Ada/Tidak	524750.000	Ada/Tidak	533.959.000	0	0	Ada/Tidak	750.000.000	Ada/Tidak	2.114678.000	BAPPEDA		
				Tersedianya Dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada/Tidak	381.925.000	Ada/Tidak	404.880.000	Ada/Tidak	550.109.030	Ada/Tidak	491.811.000	Ada/Tidak	506.811.000	Ada/Tidak	1.548.731.030	BAPPEDA		
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	TAD	100	70.980.000	100	73.780.000	100	67.418.000	100	67.418.000	100	67.418.000	100	67.418.000	100	202.245.000	BAPPEDA
				Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	TAD	100	326.605.000	100	339.725.000	100	140.003.000	100	143.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	433.000.000	BAPPEDA
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan konsistensi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	100	100	36.130.000	100	73.660.000	100	317.377.980	100	367.865.380	100	404.651.918	100	1.199.685.278	BAPPEDA		
5	2	KEUANGAN			7.200.000.000		5.488.850.000		98.971.863.502		99.518.253.352		99.518.253.352		310.697.220.206					
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	90	100	3.100.000.000	100	2.100.000.000	90	96.390.937.892	90	96.805.487.742	90	96.805.487.742	90	295.201.913.376	BPKAD		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	90	100	1.000.000.000	100	1.288.850.000	90	896.269.700	90	896.269.700	90	896.269.700	90	4.977.659.100	BPKAD		
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	90	100	3.100.000.000	100	2.100.000.000	90	1.684.655.910	90	1.816.495.910	90	1.816.495.910	90	10.517.647.730	BPKAD		



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
5	3	KEPEGAWAIAN			0		-		1.366.16 9.258		2.209.47 0.000		2.209.47 0.000		5.785.10 9.258			
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	92,65	0	0	0	0	95,00	1.059.85 9.000	95,00	1.497.17 0.000	95,00	1.497.17 0.000	95,00	4.054.19 9.000	BKPSDM
				Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	100,00	0	0	0	0	100,00	33.382.7 58	100,00	95.000.0 00	100,00	95.000.0 00	100,00	223.382. 758	BKPSDM
				Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN	70,57	0	0	0	0	95,00	77.580.0 00	95,00	185.000. 000	95,00	185.000. 000	95,00	447.580. 000	BKPSDM
				Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	93,80	0	0	0	0	95,00	174.072. 500	95,00	326.300. 000	95,00	326.300. 000	95,00	826.672. 500	BKPSDM
				Persentase pengelolaan data kepegawaian	100,00	0	0	0	0	95,00	21.75.00 0	95,00	106.000. 000	95,00	106.000. 000	95,00	233.275. 000	BKPSDM
5	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				0		0		1.244.95 1.000		3.555.49 7.000		4.124.59 5.000		8.925.04 3.000		
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	80,23	0	0	0	0	95,00	1.244.95 1.000	95,00	3.555.49 7.000	95,00	4.124.59 5.000	95,00	8.925.04 3.000	BKPSDM
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				0		0		1.073.76 0.320		549.162. 800		556.162. 800		2.367.03 4.920		
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	TAD	0	0	100	187.949. 000	100	1.030.30 3.520	100	505.706. 000	100	512.706. 000	100	2.236.66 4.520	BAPPEDA
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	TAD	0	0	100	0	100	21.728.4 00	100	21.728.4 00	100	21.728.4 00	100	65.185.2 00	BAPPEDA
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	TAD	0	0	3,23	0	6,45	21.728.4 00	9,68	21.728.4 00	12,9	21.728.4 00	32,26	65.185.2 00	BAPPEDA



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					1.323.577.665		1.349.863.241		995.216.000		1.230.916.000		1.576.500.000		6.476.072.906			
6	1	INSPEKTORAT DAERAH			1.323.577.665		1.349.863.241		995.216.000		1.230.916.000		1.576.500.000		6.476.072.906			
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Serta Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	1.146.367.665	100%	1.149.551.241	100%	705.450.000	100%	873.450.000	100%	1.121.500.000	100%	4.996.318.906	INSPEKTORAT DAERAH
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Dokumen Standar Operasional Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan KPK dan Satgas SABER PUNGLI	100%	100%	177.210.000	100%	200.312.000	100%	289.766.000	100%	357.466.000	100%	455.000.000	100%	145.022.040	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN					541.606.000		550.188.500		3.365.959.609		8.132.386.466		8.454.088.390		21.289.228.965			
7	1	KECAMATAN BALAI RIAM			91.590.000		104.500.000		269.151.116		774.151.116		808.792.040		2.048.184.272			
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	TAD	0	0	0	0	0	-	100%	159.000.000	100%	169.000.000	100%	328.000.000	Kecamatan Balai Riam
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	0	0	100%	104.500.000	100%	135.381.116	100%	140.381.116	100%	145.022.040	100%	525.284.272	Kecamatan Balai Riam
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	0	0	0	100%	115.000.000	100%	125.000.000	100%	240.000.000	Kecamatan Balai Riam
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	91.590.000	0	0	100%	133.770.000	100%	133.770.000	100%	133.770.000	100%	492.900.000	Kecamatan Balai Riam
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	0	0	0	100%	226.000.000	100%	236.000.000	100%	462.000.000	Kecamatan Balai Riam



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
7	1	KECAMATAN JELAI			-		-		101.390.000		596.840.000		614.840.000		1.313.070.000			
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	0	0	0	0	100	51.390.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	261.390.000	Kecamatan Jelai
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100	0	0	0	0	100	50.000.000	100	191.840.000	100	199.840.000	100	441.680.000	Kecamatan Jelai
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	0	0	0	100	85.000.000	100	85.000.000	100	170.000.000	Kecamatan Jelai
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	TAD	0	0	0	0	0	0	100	120.000.000	100	120.000.000	100	240.000.000	Kecamatan Jelai
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	0	0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Jelai
7	1	KECAMATAN PANTAI LUNCI				297.256.000		329.261.000		279.540.000		306.446.000		145.777.000		1.480.780.000		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	100	10.170.000	100	11.280.000	100	11.280.000	100	11.880.000	100	11.880.000	100	56.490.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	97,45	97	62.726.000	97	63.981.000	98	65.260.000	98	66.566.000	99	67.897.000	99	326.430.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100	100	25.000.000	100	44.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	100	52.000.000	100	217.000.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	122.500.000	100	122.500.000	100	545.000.000	Kecamatan Pantai Lunci
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100,0	100	99.360.000	100	110.000.000	100	55.000.000	100	57.500.000	100	14.000.000	100	335.860.000	Kecamatan Pantai Lunci



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
7	1		KECAMATAN PERMATA KECUBUNG		152.76 0.000		116.427. 500		224.105. 040		897.770. 000		945.000. 000		2.336.06 2.540			
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	TAD	0	0	0	0	0%	0	100%	159.000. 000	100%	169.000. 000	100%	328.000. 000	Kecamatan Permata Kecubung
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	100%	75.000. 000	99,22%	116.427. 500	100%	149.025. 040	100%	200.000. 000	100%	210.000. 000	100%	750.452. 540	Kecamatan Permata Kecubung
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	0	0%	0	100%	115.000. 000	100%	125.000. 000	100%	240.000. 000	Kecamatan Permata Kecubung
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	TAD	99%	77.760. 000	0	0	100%	75.080.0 00	100%	197.770. 000	100%	205.000. 000	100%	555.610. 000	Kecamatan Permata Kecubung
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	0	0%	0	100%	226.000. 000	100%	236.000. 000	100%	462.000. 000	Kecamatan Permata Kecubung
7	1		KECAMATAN SUKAMARA			-		-		2.491.77 3.453		5.679.67 9.350		5.939.67 9.350		14.111.1 32.153		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	100	0	0	0	100	2.491.77 3.453	100	5.154.67 9.350	100%	5.154.67 9.350	100%	12.801.1 32.153	Kecamatan Sukamara
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	0	0	0	0	0	0	100	200.000. 000	100%	210.000. 000	100%	410.000. 000	Kecamatan Sukamara
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	0	0	0	100	115.000. 000	100%	125.000. 000	100%	240.000. 000	Kecamatan Sukamara
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	TAD	0	0	0	0	0	0	100	10.000.0 00	100%	200.000. 000	100%	210.000. 000	Kecamatan Sukamara
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	0	0	0	100	200.000. 000	100%	250.000. 000	100%	450.000. 000	Kecamatan Sukamara



**PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	Realisasi				APBD		Proyeksi Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					1.049.647.226		4.191.587.800		4.292.859.600		9.534.094.626							
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							1.049.647.226		4.191.587.800		4.292.859.600		9.534.094.626			
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	TAD	0	0	0	0	100%	349.684.600	100%	1.767.859.600	100%	1.842.859.600	100%	3.960.403.800	KESBANGPOL
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	TAD	0	0	0	0	100%	630.103.276	100%	960.000.000	100%	1.125.000.000	100%	2.715.103.276	KESBANGPOL
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	TAD	0	0	0	0	0	0	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	350.000.000	KESBANGPOL
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakat dan Ekonomi	TAD	0	0	0	0	100%	19.525.000	100%	625.000.000	100%	525.000.000	100%	1.169.525.000	KESBANGPOL
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan	TAD	0	KESBANGPOL	0	0	100%	50.334.350	100%	688.728.200	100%	600.000.000	100%	1.339.062.550	KESBANGPOL
TOTAL ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN					490.772.790.024		494.272.779.431		758.782.092.081		956.412.425.379		1.150.291.485.467		3.871.508.627.315			





BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pencapaian IKU dihitung dari indikator tujuan dan sasaran, sedangkan untuk IKK dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

IKU dan IKK Pemerintah Kabupaten Sukamara secara rinci dapat di lihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Realisasi		Target Tahun			Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,95	68,03	68,62	69,21	69,81	BPS, DIKPORA, KESEHATAN, DLH
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	53,00	54,00	54,5	55	55,5	DLH
3	Pertumbuhan ekonomi	6,05	1,98	2,4	4,13	4,8	BPS
4	Angka Kemiskinan	3,36	3,36	3,36	3,2	3,2	BPS
5	PDRB Per Kapita	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	BPS
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,57	3,13	2,72	2,33	1,98	BPS
7	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	45	45	50	55	60	Organisasi
8	Indeks Gini	0,33	0,3	0,29825	0,2965	0,29475	BPS



No	Indikator	Rumus Indikator
1	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3)$ <p>Keterangan: X_1 = Indeks Harapan Hidup X_2 = Indeks Pendidikan X_3 = Indeks Standar Hidup Layak</p> <p>Dimana: $X_2 = 2/3$ [Indeks Melek Huruf] + $1/3$ [Indeks Rata-rata Lama Sekolah]</p>
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).</p> <p>A. Indeks Kualitas Air (IKA) :</p> $Nilai\ relatif = \frac{M}{L_0}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_1/L_1)^2 + (C_2/L_2)^2}{2}}$ <p> $0 \leq P_i \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < P_i \leq 5,0 \rightarrow$ cemah ringan $5,0 < P_i \leq 10,0 \rightarrow$ cemah sedang $P_i > 10,0 \rightarrow$ cemah berat</p> <p>B. Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> $IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ <p>C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>
3	Pertumbuhan ekonomi	<p>Rumus Pertumbuhan Ekonomi:</p> $G_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan: G_t = pertumbuhan ekonomi periode t (Desialan atau tahunan) PDB = produk domestik bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB_{t-1} = PDB satu periode sebelumnya</p>
4	Angka Kemiskinan	$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{x - y_i}{x} \right]^p$ <p>Dimana: P_0 = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>) x = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$); $y_i < x$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk</p>
5	PDRB Per Kapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$



No	Indikator	Rumus Indikator																																
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\text{Angkatan Kerja} = \text{Jumlah orang yang bekerja} + \text{Jumlah orang yang tidak bekerja}$ $\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$																																
7	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>AA</td> <td>>90-100</td> <td>Intimewa</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>A</td> <td>>80-90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BB</td> <td>>70-80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>B</td> <td>>60-70</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup (memulai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>C</td> <td>>30-50</td> <td>Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D</td> <td>0-30</td> <td>Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1.	AA	>90-100	Intimewa	2.	A	>80-90	Memuaskan	3.	BB	>70-80	Sangat Baik	4.	B	>60-70	Baik , perlu sedikit perbaikan	5.	CC	>50-60	Cukup (memulai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6.	C	>30-50	Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	7.	D	0-30	Sangat Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																															
1.	AA	>90-100	Intimewa																															
2.	A	>80-90	Memuaskan																															
3.	BB	>70-80	Sangat Baik																															
4.	B	>60-70	Baik , perlu sedikit perbaikan																															
5.	CC	>50-60	Cukup (memulai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																															
6.	C	>30-50	Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar																															
7.	D	0-30	Sangat Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar																															
8	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>$G < 0,3$ = ketimpangan rendah</p> <p>$0,3 \leq G < 0,5$ = ketimpangan sedang</p> <p>$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>																																



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT								
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	6,17	5,9	5,9	5,9	6	6,1	5,28
2	Tingkat Inflasi	6,02 %	2,02%	1,62%	4%	4%	4%	4%
3	Indeks Pembangunan Manusia	67,52	67,95	68,03	68,62	69,21	69,81	69,81
4	Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun)	97,64%	97,62%	97,70%	97,80%	98,00%	98,15%	98,15%
5	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,10	12,11	12,12	12,29	12,75	12,95	12,77
6	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,84	7,91	8,01	8,15	8,49	8,64	8,48
7	Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,45	71,49	71,53	71,55	71,58	71,6	71,6
8	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	4,83	3,57	3,13	2,72	2,33	1,98	1,98
9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	74,18	73,37	65,60	65,71	65,83	65,94	65,94
10	Angka Kemiskinan	3,19	3,36	3,36	3,36	3,2	3,2	2,79
11	PDRB Per Kapita ADHB (Juta rupiah/tahun)	62,47	65,18	66,27	70,27	74,52	79,02	79,02
12	Indek Kepuasan Masyarakat	82,00%	89,3	90	90	95	95	95
13	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	1.189.064,7	1.274.424,1	1.417.944,9	1.436.270,6	1.513.308,7	1.590.346,7	1.590.346,7
15	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB (ADHB) (juta/tahun)	112	126	132	137	144	152	152
16	Kontribusi sektor Pariwisata dalam PDRB	47	52	52	55	59	62	62
17	Kontribusi sektor industri dalam PDRB (ADHB)	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14
18	Nilai Realisasi Investasi	Rp3.930.121.324.307,00	1,06078E+11	1,08199E+11	Rp647.917.255.507	Rp680.313.188.283	Rp714.328.774.198	Rp5.972.680.542.295,00
19	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2	86,8	89,5	92,1	94,7	100	100
ASPEK PELAYANAN UMUM								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.1	Angka Melek Huruf	97,64%	97,62%	97,70%	97,80%	98,00%	98,15%	98,15%



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1.2	Harapan Lama Sekolah	12,10 Tahun	12, 11 Tahun	12,12 Tahun	12,29 Tahun	12,75 Tahun	12,95 Tahun	12,95 Tahun
1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,84 tahun	7,91 tahun	8,01 tahun	8,15 tahun	8,49 tahun	8,64 tahun	8,48 tahun
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA	84,47%	88,00%	88,25%	88,50%	88,75%	89,00%	89,00%
1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA)	45,07%	87,52%	88,00%	88,25%	88,50%	89,00%	89,00%
1.6	Rasio lembaga PAUD : jumlah penduduk usia PAUD	1:73	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100
1.7	Persentase TK yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD	TAD	0,2195	0,3049	0,3659	0,3659
1.8	Angka melek huruf (penduduk usia >15 tahun) (Kesetara)	97,64%	97,62%	97,70%	97,80%	98,00%	98,15%	98,15%
1.9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 -12 tahun	91,96%	0,92	92,25%	92,5%	92,75%	93,00%	93,00%
1.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	93,88%	94%	94,25%	94,5%	94,75%	95%	95%
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	86,64%	90,00%	90,15%	90,25%	90,35%	90,45%	90,45%
1.12	Rasio sekolah : jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun)	13,82%	1 : 134	1 : 130	1 : 127	1 : 125	1 : 122	1 : 122
1.13	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,58%	0,14%	0,13	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%
1.14	Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.15	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	89,13%	100,00%	100,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.16	Persentase Sekolah Dasar yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD	TAD	34,69%	51,02%	61,22%	61,22%
1.17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	96,00%	96,5%	96,75%	97,00%	97,25%	97,5%	97,5%
1.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	81,90%	85,00%	85,5%	85,75%	86,00%	86,5%	86,5%
1.19	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	63,15%	70%	79,50%	80,00%	80,25%	80,50%	80,50%
1.20	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,97%	0,50%	0,48%	0,46%	0,44%	0,42%	0,42%
1.21	Angka Kelulusan SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.22	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	86,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.23	Rasio sekolah per jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun)	1:141	1 : 125	1 : 125	1 : 122	1 : 122	1 : 120	1 : 120
1.24	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi minimal B	TAD	TAD	TAD	57,14%	71,43%	85,71%	85,71%
1.25	Guru TK/RA berkualifikasi S1/D4	46,91%	58,00%	60,00%	61,00%	63,00%	64,00%	64,00%
1.26	Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi S1/D4	5,40%	27,00%	28,00%	29,00%	29,50%	30,00%	30,00%
1.27	Guru TK/RA bersertifikasi	54,27%	58,00%	58,50%	58,75%	59,00%	59,50%	59,50%
1.28	Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi	9,15%	28,00%	28,25%	28,50%	28,75%	29,00%	29,00%
1.29	Rasio guru : murid (G/M) SD/MI	0,049305556	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 10	1 : 10	1 : 10



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
1.30	Guru SD/MI berkualifikasi S1/D4	91,73%	92,00%	93,00	94,00%	94,5%	94,75%	94,75%
1.31	Guru SD/MI sertifikasi	0,2	0,2	22,5%	25,5%	27,5%	0,3	0,3
1.32	Rasio guru : murid (G/M) SMP/MTs	1:8	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9
1.33	Guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4	93,21%	96,00%	96,5%	96,75%	96,8%	0,97	0,97
1.34	Guru SMP/MTs sertifikasi	22,01%	23,5%	0,25	27,5%	0,3	33,5%	33,5%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
2.1	Persentase penanganan Covid-19 di rumah sakit	TAD	0,00%	0,00%	25,00%	25%	25%	25%
2.2	Standarisasi dan Akreditasi rumah sakit berkelanjutan	0,25	1	1	1	100,00%	100,00%	100,00%
2.3	Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di rumah sakit	TAD	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.4	Angka kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
2.5	Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2.6	BOR	38,36%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
2.7	Av-Los	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
2.8	TOI	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47
2.9	BTO	41,72	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
2.10	NDR	3,74	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000	25/1000
2.11	GDR	14,66	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000	45/1000
2.12	Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK)	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2.13	Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standart	75,0%	80,0%	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2.14	Persentase Bahan Persediaan yang Kadaluarsa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.15	Persentase fasilitas air bersih rumah sakit memenuhi syarat higiene sanitasi	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2.16	Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
2.17	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di rumah sakit	75,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2.18	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standart	75,0%	75,0%	75,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023**

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2.19	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standart di rumah sakit	36,00%	50,00%	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
2.20	Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	0,75	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2.21	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2.22	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan rumah sakit	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2.23	Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di rumah sakit	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2.24	Persentase SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi	25,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
2.25	Cakupan Puskesmas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.26	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)	8900,00%	<89	<88	<88	<87	<87	<87
2.27	Cakupan Pelayanan Nifas	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.28	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH)	1000,00%	<10	<10	<9	<9	<8	<8
2.29	Cakupan Pelayanan Anak Balita	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.30	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.31	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	9,50%	>10%	>12%	>15%	>20%	>25%	>25%
2.32	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	0,00%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
2.33	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.34	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.35	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.36	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	20,00%	>0,2	>0,2	>0,3	>0,3	>0,3	>0,3
2.37	Rasio puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	40,00%	>0,40	>0,40	>0,50	>0,50	>0,50	>0,50
2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	TAD	<6	<6	<5	<5	<5	<5
2.39	Rasio Posyandu per satuan balita	500,00%	>6	>6	>7	>7	>7	>7
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	57,34 %	64,93 %	72,07 %	79,59 %	87,29 %	95 %	95 %
3.2	Rasio Jaringan Irigasi (RASIO)	-	64,91 %	72,05	79,57 %	87,29	95 %	95 %



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
3.3	Persentase penduduk berakses air minum	33,2 %	33,2 %			35 %	35 %	35 %
3.4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	26 %	26 %	-	55 %	55 %	55 %	55 %
3.5	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	45 %	45 %	50 %	55 %	55 %	55 %	55 %
3.6	Persentase limbah yang ditangani dengan baik	35 %	35 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
3.7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	76,20 %	76,20 %	79,90 %	81 %	84 %	87,74 %	87 %
3.8	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
3.9	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	985 Unit	818 Unit	309 Unit	309 Unit	309 Unit	309 Unit	309 Unit
3.10	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	17,41 Ha	1,89 Ha	3,7 Ha	3,7 Ha	4,16 Ha	5,3 Ha	5,3 Ha
3.11	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	72,075 Km	72,075 Km	36,037 Km	36,037 Km	36,037 Km	36,037 Km	36,037 Km
3.12	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	41 m	41 m	45,36 m	49,72 m	54,08 m	58,44 m	58,44 m
3.13	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	17,77 %	30,17 %	36,37	42,57 %	48,77 %	55 %	55 %
3.14	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	25 %	30 %	45 %	50 %	55 %	60 %	60
3.15	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	70 %	78 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
3.16	Ketaatan terhadap RTRW	52%	60%	63%	65%	67%	70%	70%
3.17	Ruang publik yang berubah peruntukannya	52%	52 %	63%	65%	67%	70%	70%
3.18	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (Luasan=Ha)	30 Ha	34 Ha	34 Ha	34 Ha	34 Ha	34 Ha	34 Ha
3.19	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	3,13	3,13	8,25	9,35	12,5	15,62	15,62
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Rasio rumah layak huni	20,7%	14,49%	32%	32%	30%	32%	32%
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	25%	20%	10%	0	0	0	30%
4.3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	25%	25%	25%	25%	30%	30%	40%



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4.4	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15%	32%	38%	42%	48%	53%	65%
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	Persentase Laporan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	55	70	85	85
5.2	Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	TAD	0	0	55	70	85	85
5.3	Persentase peningkatan kapasitas PPNS	TAD	0	0	0	100	100	100
5.4	Persentase daerah rawan bencana yang dibina	TAD	0	0	0	85	85	100
5.5	Cakupan Penanggulangan Bencana Alam	TAD	0	100	100	100	100	100
5.6	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	TAD	0	0	100	100	100	100
5.7	Persentase Pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran	TAD	100	100	100	100	100	100
5.8	Persentase Pertolongan Terhadap kondisi membahayakan manusia	TAD	0	0	0	90	95	95
5.9	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (IKD)	TAD	0	0	0	80	85	85
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
6.1	Persentase PMKS yang Diberdayakan	0	0	82	100	100	100	100
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	TAD	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase cakupan Korban Bencana Sosial dan Alam yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
6.5	Cakupan TMP dalam Kondisi baik	1	1	1	1	1	1	1
6.6	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa	96	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
7.1	Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagkerjaan	0	1	0	0	1	1	3
7.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	14	10	14	12,8	15	16	67,8
7.3	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55	48	55	55	55	55	55



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
7.4	Rasio kasus yang diselesaikan terhadap kasus yang dilaporkan/tercatat	80	70	80	80	90	100	100
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
8.1	Cakupan PUG dan PPRG yang aktif	13,33	16,6	29,4	44,1	58,8	73,5	100%
8.2	Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG	13,33	16,6	29,4	44,1	58,8	73,5	100%
8.3	Rasio KDRT (%)	TAD	0	0	0,048	0,036	0,03	0,03
8.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	TAD	50%	60%	70 %	80 %	90 %	100%
8.5	Tingkat Cakupan Ketersediaan informasi/data gender dan anak	0	0	0	0	250	300	300
8.6	Capaian nilai evaluasi kota layak anak	0	0	0	500	600	700	700
8.7	Persentase Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif.	TAD	0	0	50%	75%	100%	100%
8.8	Total Fertility Rate	2,62	2,62	2,60	2,58	2,57	2,56	2,56
8.9	Ratio Akseptor KB (%)	79,58	79,58	8,379	8,59	8,804	9,024	9,024
8.10	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,07	4,07	3,86	3,67	3,49	3,30	3,30
8.11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	TAD	0	0	0	20%	30%	30%
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
9.1	Ketersediaan pangan utama (%)	29,87	61,73	80,68	80,84	81,55	82,27	82,27
9.2	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,20	86,80	89,50	92,10	94,70	100,00	100,00
9.3	Penguatan cadangan pangan (Ton)	21,64	22,53	23,43	24,40	25,39	26,42	26,42
9.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	5 Dok	2 Dok	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
9.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	5,00	13,00	17,00	31,00	32,00	33,00	33,00
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
10.1	Penyelesaian izin lokasi	TAD	16%	32%	32 %	67%	67 %	67 %
10.2	Presentase Penyelesaian kasus tanah Negara	TAD	5%	10%	15%	20%	25%	25%
10.3	Jumlah tanah yang dilakukan ganti kerugian dan santunan	TAD	2 Bidang	3 Bidang	1 Bidang	2 Bidang	2 Bidang	10 Bidang
10.5	Tingkat Cakupan Redistribusi tanah (IKD)	TAD	0	0	0	0	0	10%
10.6	Presentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (IKD)	TAD	0	0	0	0	0	10 %



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
11.1	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
11.2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	2	1	3
11.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	0	0	0	0	Ada	Ada
11.4	Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota	0	0	0	0	2	1	3
11.5	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	< 5	< 10	< 5	< 10	< 10	< 10	< 10
11.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	100	100	100	100	100	100	100
11.7	Cakupan penanganan limbah B3 yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100
11.8	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100
11.9	Terfasilitasnya pendampingan pengakuan MHA	4	4	4	4	4	4	4
11.10	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	6	4	6	6	6	6	6
11.11	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usahadan dampaknya di Daerah Kabupaten	100	0	0	100	100	100	100
11.13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	4	6	2	6	6	6	10
11.14	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	100	0	0	100	100	100	100
11.15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	73	80	75	74	73	72	71
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
12.1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90,50	95	90,50	94	96	98	98
12.2	Cakupan penerbitan akta kelahiran	0,89	0,90	0,89	0,91	0,92	0,93	0,94
12.3	Cakupan penerbitan akta Pencatatan sipil	43,09	41	43	45	46	47	47
12.4	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
13.1	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100
13.2	Persentase Peningkatan Keberdayaan Ekonomi dan Masyarakat Desa	96	100	100	100	100	100	100
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
14.1	Laju pertumbuhan penduduk	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Total Fertility Rate	2,62	2,62	2,60	2,58	2,57	2,56	2,56
14.3	Ratio Akseptor KB	7,958	7,958	8,379	8,59	8.804	9.024	9.024
14.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	4,07	4,07	3,86	3,67	3,49	3,30	3,30
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
15.1	Persentase layanan angkutan darat	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	1,50
15.2	Jumlah uji kir angkutan	4	4	4	2.000	3.000	7.500	7.500
15.3	Pemasangan Rambu rambu	100%	100 %	50 %	50 %	50 %	50%	100%
15.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	30.467	30.467	30.967	31.467	31.967	32.467	187.802
15.5	Tersedianya Dermaga Penyeberangan	TAD	0	0	0	1	1	2
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
16.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	0	0	16%	31%	50%	50%
16.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	88%	88%	91%	94%	97%	100%	100%
16.3	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	0	10%	40%	60%	80%	100%	100%
16.4	Jumlah Sarana Information Center	1	1	1	1	1	1	1
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
17.1	Cakupan Palayanan izin usaha simpan pinjam yang disetujui	TAD	0	0	0	0	100	100
17.2	Persentase koperasi aktif	94,29	40	94,29	95	97	98	98
17.3	Presentase KSP/USP Koperasi sehat	TAD	0	0	0	0	50	50
17.4	Presentase Koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	42,86	53,33	0,00	53,33	53,33	66,67	50
17.5	Persentase UMKM Aktif	100	53,33	0	100	100	100	100
17.6	Presentase Usaha mikro menjadi usaha Kecil	4,67	4	0	4	4	4	16



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	12	1	1	1	1	1	5
18.2	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	1	0	0	0	1	1	5
18.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,74%	89,30%	82,41%	92%	92%	92,50%	92,50%
18.4	Nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. 2.879.273.378. 498	Rp. 849.382.600. 658	Rp. 201.465.345. .151	Rp. 647.917.255. .507	Rp. 680.313.118. .283	Rp. 714.328.774. .198	5.972.680.472. 295
18.5	Jumlah data penanaman modal	1	0	0	1	1	1	1
18.6	Jumlah sistem yang dikembangkan	2	0	0	2	1	1	2
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
19.1	Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha	4,85	4,85	8,08	7,52	5,26	5,26	5,26
19.2	Cakupan pembinaan cabang olahraga	90,48	100	100	100,00	100,00	100,00	100
19.3	Cakupan pembinaan Kepramukaan	-	-	-	-	2,79	4,68	4,68
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
20.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	TAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
22.1	Jumlah sanggar seni budaya	20	5 Group	8 Group	10 Group	13 Group	15 Group	51 Group
22.2	Jumlah sanggar seni budaya yang terdaftar dan aktif	20	5 Group	8 Group	10 Group	13 Group	15 Group	51 Group
22.3	Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi	14	3 Group	5 Group	7 Group	10 Group	14 Group	39 Group
22.4	Jumlah gedung seni budaya	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit
22.5	Penyelenggaraan festival/pegelaran seni budaya	0	3 Even	4 Even	5 Even	6 Even	7 Even	25 Even
22.6	Jumlah yang diduga cagar budaya yang dilestarikan (didaftar/registrasi)	0	25 Cagar Budaya	20 Cagar Budaya	15 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	80 Cagar Budaya
22.7	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (ditetapkan)	0	20 Cagar Budaya	17 Cagar Budaya	13 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	70 Cagar Budaya
22.8	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	0	0	1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	1 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2018 - 2023

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
22.9	Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat	0	0	0	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	3 Lokasi
22.10	Jumlah museum yang didirikan	0	0	0	0	1 Unit	0	1 Unit
22.11	Penyelenggaraan pameran cagar budaya	0	0	0	0	0	1 Even	1 Even
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	12.000	11.500	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23.2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	32	32	32	32	32	32	32
23.3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	13 %	3%	13%	23%	33%	38%	38%
24.2	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	TAD	0%	0%	50%	50%	50%	50%
24.3	Cakupan data dan informasi penggunaan arsip	TAD	0%	0%	20%	20%	20%	20%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
25.1	Produksi perikanan Tangkap (Ton)	4.633,77	4.259,93	4336,61	4.414,67	4.494,12	4.547,02	4.547,02
25.2	Produksi perikanan Budidaya	1.520,19	1.183,71	1.213,32	1.243,64	1.274,70	1.309,21	1.309,21
25.3	Peningkatan produksi benih	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25.4	Peningkatan produksi benih	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25.5	Cakupan pengawasan sumberdaya sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	TAD	0	0	0	0	10%	10%
25.6	Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB	11.8890,5	12.5534,3	132.224,6	138.968,5	145.773	152.645,6	152.645,6
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
26.1	PAD Sektor Pariwisata	15,39	15,39	13,58	17,42	19,07	18,60	18,60
26.2	Lama kunjungan Wisata	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari
26.3	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	20	20	20	20	40	40	140
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
27.1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14	27,14
27.2	Produksi sektor pertanian (Ton)	4.989,60	5.243.79	6.818,03	7.158,93	7.516,88	7.892,72	22.568,53
27.3	Jumlah kasus kesehatan hewan (ekor)	230,00	663,00	1.110,00	1.150,00	1.250,00	1.300,00	3.700,00



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
27.4	Tingkat Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	105	65	63,40	20	15	10	10
27.5	Cakupan bina kelompok petani (%)	5,53	5,95	6,38	6,80	7,66	8,51	35,32
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
28.1	Presentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28.2	Tingkat Inflasi	6,02%	2,02%	1,62%	4%	4%	4%	4%
28.3	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
28.4	Presentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah	TAD	0	0	0	4	4	4
28.5	Persentase alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	TAD	0	0	0	0,10%	0,20%	0,20%
28.6	Cakupan bina kelompok pedagang informal	30	30	30	30	30	40	40
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
29.1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri	TAD	0	0	Tidak	Tidak	Ada	Ada
29.2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	TAD	0	0	0	0	100	100
29.3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	TAD	0	0	0	0	Ada	Ada
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							
30.1	Presentase ketersediaan kawasan transmigrasi	50	50	50	50	75	75	75
30.2	Jumlah transmigran yang ditempatkan	0	0	0	0	90	50	140
30.3	Jumlah Transmigran yang menetap	55	55	55	55	145	195	195
30.4	Presentase kawasan pemukiman yang di kembangkan	50	50	50	50	75	75	75
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
31	SEKRETARIAT DAERAH							
31.1	Terpenuhinya Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	TAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
31.2	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Organisasi SKPD di Kabupaten Sukamara	TAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
31.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	TAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
31.4	Meningkatnya Penyelesaian Masalah di Sektor Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	TAD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
32	SEKRETARIAT DPRD							
32.1	Persentase Peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32.2	Tersusunnya dan terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakann Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
33	PERENCANAAN							
33.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	0	1	0	0	1	Tersedia
33.2	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
33.3	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
33.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	TAD	100	100	100	100	100	100
33.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	TAD	100	100	100	100	100	100
33.7	Cakupan konsistensi perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	100	100	100	100	100	100	100
34	KEUANGAN							
34.1	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	90	100	90	90	90	90	90
34.2	Capaian Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	90	100	90	90	90	90	90
34.3	Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	90	100	90	90	90	90	90
35	KEPEGAWAIAN							
35.1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	92,65	95	95	95	95	95	95
35.2	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	100	100	100	100	100	100	100
35.3	Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN	70,57	95	95	95	95	95	95
35.4	Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	93,8	95	95	95	95	95	95
35.5	Persentase pengelolaan data kepegawaian	100	95	95	95	95	95	95
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
36.1	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	80,23	95	95	95	95	95	95
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
37.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	TAD	0	100	100	100	100	100
37.2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	TAD	0	100	100	100	100	100
37.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	TAD	0	3,23	6,45	9,68	12,9	32,26
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
38	INSPEKTORAT DAERAH							
38.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal Serta Kasus Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38.2	Jumlah Dokumen Standar Operasional Pengawasan dan Terlaksananya Kegiatan KPK dan Satgas SABER PUNGGLI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNSUR KEWILAYAHAN								
39.1	KECAMATAN BALAI RIAM							
39.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	TAD	0	0	0	100%	100%	100%
39.1.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	0	100%	100%	100%	100%	100%
39.1.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	100%	100%	100%
39.1.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%
39.1.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	100%	100%	100%
39.2	KECAMATAN JELAI							
39.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	0	0	100	100	100	100
39.2.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	100	0	0	100	100	100	100
39.2.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	100	100	100
39.2.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	TAD	0	0	0	100	100	100
39.2.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	100	100	100
39.3	KECAMATAN PANTAI LUNCI							
39.3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
39.3.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	97,45	97	97	98	98	99	99
39.3.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100	100	100	100	100	100	100
39.3.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100
39.3.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100,0	100	100	100	100	100	100
39.4	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG							
39.4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	TAD	0	0	0%	100%	100%	100%
39.4.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	100%	99,22%	100%	100%	100%	100%
39.4.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0%	100%	100%	100%
39.4.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	TAD	99%	0	100%	100%	100%	100%
39.4.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0%	100%	100%	100%
39.5	KECAMATAN SUKAMARA							
39.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	100	100	0	100	100	100%	100%
39.5.2	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	TAD	0	0	0	100	100%	100%
39.5.3	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	TAD	0	0	0	100	100%	100%
39.5.4	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	TAD	0	0	0	100	100%	100%
39.5.5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	TAD	0	0	0	100	100%	100%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
40.1	Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	TAD	0	0	100%	100%	100%	100%
40.2	Prosentase Cakupan Peningkatan Peran Paratai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	TAD	0	0	100%	100%	100%	100%
40.3	Prosentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	TAD	0	0	0	100%	100%	100%
40.4	Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakat dan Ekonomi	TAD	0	0	100%	100%	100%	100%



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
40.5	Terpeliharanya Stabilitas daerah serta deteksi dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap jalannya roda pemerintahan	TAD	0	0	100%	100%	100%	100%
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Kriminalitas	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	30467	30467	30967	31467	31967	32467	187802
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (Panjang Jalan/Jarak = Meter/Kilometer)	41 m	41 m	45,36 m	49,72 m	54,08 m	58,44 m	58,44 m



BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 ini merupakan perubahan atas dokumen RPJMD sebelumnya. Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dilakukan atas dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dengan mempertimbangkan berbagai perubahan fundamental saat ini, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024.



9.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan dasar hukum pada periode transisi, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Sukamara, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengingat masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara sekarang akan berakhir pada tahun 2023, maka pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Sukamara periode sekarang atas pelaksanaan RPJMD Sukamara 2018-2023 sampai tahun pelaksanaan 2023;
2. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara di tahun 2023, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 dan 2025 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara 2005-2025 atau sampai dengan RPJMD hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara periode berikutnya tersusun.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan



koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Agar Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Sukamara berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dan mengkoordinasikan pelaksanaannya oleh Bappeda Kabupaten Sukamara;
2. Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran terkait wajib menjabarkan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan untuk tahun rencana berkenaan;
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukamara, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD



yang diamanatkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023;

5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Bupati harus menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD, maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RPJMD ini. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 - 2023 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara;
6. Dalam hal pelaksanaan perubahan RPJMD ini terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan capaian sasaran perubahan RPJMD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bupati Sukamara,

H. WINDU SUBAGIO